



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ROESLAN ABDULGANI:  
PERANANNYA DALAM PENERAPAN PEMIKIRAN  
BUNG KARNO TENTANG PEMBANGUNAN BANGSA  
DAN PEMBANGUNAN KARAKTER  
(1959-1965)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Magister Humaniora**

T  
25229

**SUBIYARTO  
0606013235**

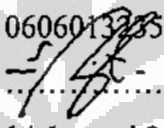
**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
DEPOK  
JANUARI 2009**

Roeslan Abdulganis, Subiyarto, FIB UI, 2009

**UNIVERSITAS INDONESIA**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

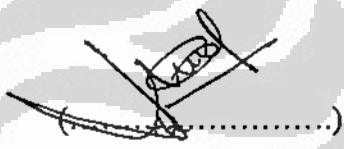

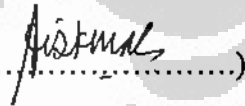
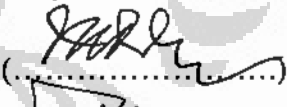

Nama : Subiyarto  
NPM : 0606013235  
Tanda Tangan :  .....  
Tanggal : 14 Januari 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Subiyarto  
NPM : 0606013235  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Judul Tesis : Roeslan Abdulgani: Peranannya dalam Penerapan  
Pemikiran Bung Karno tentang Pembangunan  
Bangsa dan Pembangunan Karakter (1959-1965)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Priyanto Wibowo   
Pembimbing : Prof. Dr. Susanto Zuhdi   
Pembimbing/Panitera : Tri Wahyuning M. Irsyam, M.Si.   
Penguji : Dr. Anhar Gonggong   
Penguji : Dr. Suharto 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 14 Januari 2009

Oleh :

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia

  
Dr. Bambang Wibawarta

NIP. 131 882 265

Roeslan abdulgani: ..., Subiyarto, FIB UI, 2009

## PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

1. Istriku Tercinta (Dra. Eni Gusniwati)
2. Anakku Tersayang (Prihatmi Nursa Savitri)
3. Anakku Tersayang (Shintia Dwi Savitri)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa hambatan yang berarti. Ditengah kesibukan sebagai pengajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Nusantara Jakarta Utara di mana penulis diperbantukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebagai Kepala Sekolah di SMK Nusantara 1 Jakarta Utara, serta sebagai pengajar pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial (FIPPS) Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, penulis masih dapat memanfaatkan waktu untuk menempuh studi pada Program Magister Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Bagi penulis hal ini merupakan sebuah perjuangan yang memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran, namun penulis juga sangat bangga dan berbahagia karena akhirnya dapat menyelesaikannya dengan baik.

Proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Bapak Prof. Dr. Susanto Zuhdi selaku pembimbing utama penulisan tesis ini. Beliau telah banyak memberikan saran dan masukan sejak pemilihan topik sampai pada proses penyelesaian. Dan selama proses itu pula beliau telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran.

Bapak Prof. Dr. I Ketut Surajaya selaku Ketua Departemen Sejarah ketika penulis mengawali studi yang kemudian posisi beliau digantikan oleh Bapak Dr. Priyanto Wibowo. Beliau berdua telah banyak memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa Program Magister Ilmu Sejarah agar dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.

Ibu Tri Wahyuning M. Irsyam, M.Si. selaku Sekretaris Departemen Sejarah yang sekaligus bertindak sebagai pembimbing kedua penulisan tesis ini, sejak awal perkuliahan beliau telah membimbing dan mengarahkan kepada seluruh mahasiswa Program Magister Ilmu Sejarah dan juga selalu memberikan motivasi

untuk dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Para pengajar pada Program Magister Ilmu Sejarah yaitu Ibu Mona Lohanda, S.S., M.Phil.; Bapak Dr. Masyuri; Bapak Dr. Yusuf Achyar Lubis; Bapak Dr. M. Iskandar; Ibu Wardiningsih, Ph.D.; Bapak M. Wasith, M.Hum.; Bapak Prof. Dr. Robert M. Lawang; Bapak Prof. Dr. R.Z. Leirissa; Bapak Prof. Dr. Benny Hoedoro Hoed; Bapak Prof. Dr. Maswadi Rauf; dan pengajar lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Kepada para pengajar tersebut penulis ucapkan terima kasih karena telah memberikan bekal ilmu yang sangat berguna.

Para penguji yang terdiri dari Bapak Dr. Priyanto Wibowo sebagai Ketua Penguji, Ibu Tri Wahyuning M. Irsyam, M.Si. sebagai Panitera, dan Bapak Prof. Dr. Susanto Zuhdi, Bapak Dr. Anhar Gonggong, Bapak Dr. Suharto sebagai anggota. Beliau semua telah berjasa dengan memberikan banyak kritik, saran, dan masukan sejak ujian proposal, seminar pra tesis, samapai ujian akhir.

Di samping itu penulis juga merasa perlu untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap karyawan Perpustakaan FIB-UI, Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan Nasional di Jl. Salemba Raya Jakarta, Perpustakaan Yayasan Bung Karno di Gedung Pola Jl. Proklamasi Jakarta, dan Perpustakaan Direktorat Nilai Sejarah pada Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Mereka telah banyak berjasa kepada penulis karena dengan penuh kesabaran telah membantu mencarikan sumber-sumber sejarah dan informasi yang relevan dan dapat dijadikan bahan penelitian dalam rangka penulisan tesis ini.

Tidak lupa pula, penulis haturkan ucapan terima kasih kepada Ibu Dra. Hj. Arnizam selaku Kepala Sekolah dan Bapak Hamdan Hasibuan, BA. selaku Wakil Kepala Sekolah yang kemudian digantikan oleh Bapak Drs. Achmad Nizar di SMA Nusantara Jakarta Utara di mana penulis bertugas, yang penuh pengertian dan kebijaksanaan sehingga memungkinkan penulis menempuh studi ini, serta rekan-rekan pengajar yang telah memberikan motivasi. Begitu pula dengan rekan-rekan yang bertugas di SMK Nusantara 1 Jakarta Utara, khususnya Bapak Juhadi Arief, S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah dan Sdr. Tios Penangsang S.Pd yang telah banyak membantu proses penyelesaian tesis ini dalam hal pengetikan, serta rekan-rekan pengajar dan karyawan yang dengan penuh pengertian dapat memahami manakala penulis harus meninggalkan tugas sekolah karena kesibukan

studi ini.

Juga kepada segenap pengurus Yayasan Pendidikan Nusantara, Bapak Drs. H. Saprawi, MBA selaku Ketua Yayasan yang kemudian digantikan oleh Bapak Drs. H. Achmad Solpani (almarhum) dan Bapak Drs. H. Djawawi MS selaku Sekretaris Yayasan yang kemudian digantikan oleh Bapak Aminudin, S.Pd. yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada jenjang magister. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga mereka senantiasa mendapat lindungan dari Allah swt.

Segenap Sivitas Akademika Universitas Indraprasta PGRI, khususnya rekan-rekan pengajar pada Program Studi Pendidikan Sejarah pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Kepada Ibu Dra. Hj. Sartini, M.M., selaku Ketua Program studi; Bapak Taufik, M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi yang telah lebih dulu menyelesaikan studinya pada Program Magister Ilmu Sejarah UI; Bapak Drs. H. Harun; Bapak Drs. DM. Suryavin, MPd.; Bapak Drs. Sunaryo; Bapak Drs. Sukarya; Bapak Achmad Kosasih S.Pd., Bapak Tengku Azwansyah SS. yang telah banyak memberikan motivasi, serta para mahasiswa khususnya Saudara Taat Ujianto yang telah membantu penulis untuk mendapatkan sumber sejarah. Kepada mereka penulis mengucapkan banyak terima kasih, penulis berdo'a semoga mereka diberikan kemudahan oleh Allah swt.

Kepada teman-teman seangkatan pada Program Magister Ilmu Sejarah UI, Saudara Sanggupri Bochari, Saudara Agus Hermanto, dan Saudara Shutaro Hongo dari Jepang. Juga Saudara Yudi Octora dan Yanwar Pribadi yang sempat bersama-sama selama satu semester karena kemudian mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi ke negeri Belanda. Penulis telah banyak bertukar pikiran dengan mereka sehingga ikut serta membantu kelancaran penyelesaian tesis ini.

Mereka yang berada dibalik keberhasilan penulis dalam proses penyelesaian studi ini yakni istri tercinta dan anak-anak tersayang. Kepada istriku Dra. Eni Gusniwati yang telah banyak membantu dan mendampingi selama penulis menempuh studi dengan penuh kesabaran dan pengertian, juga kepada anakku Prihatmi Nursa Savitri dan Shintia Dwi Savitri yang tidak banyak menuntut perhatian kepada penulis sebagai seorang ayah. Kepada mereka, penulis berjanji setelah menyelesaikan studi ini akan berusaha meluangkan waktu untuk

memberikan perhatian dan kasih sayang. Semoga keberhasilan penulis ini dapat menjadi tauladan bagi anak-anakku.

Akhirnya penulis menutup kata pengantar ini dengan suatu ungkapan “tiada gading yang tak retak.” Penulis sadar bahwa tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran dari pembaca yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini. Selanjutnya, penulis berharap pula semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya, khususnya mahasiswa Ilmu Sejarah, dan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam khasanah penulisan sejarah dalam format studi tokoh.

Depok, 14 Januari 2009

Penulis





**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

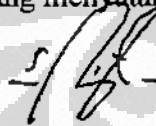
Nama : Subiyarto  
NPM : 0606013235  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Departemen : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:  
Roeslan Abdulgani: Peranannya dalam Penerapan Pemikiran Bung Karno tentang Pembangunan Bangsa dan Pembangunan Karakter (1959-1965)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok  
Pada tanggal: 14 Januari 2009  
Yang menyatakan

  
(Subiyarto)

## ABSTRAK

Nama : Subiyarto  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Judul : Roeslan Abdulgani: Perannya dalam Penerapan Pemikiran Bung Karno tentang Pembangunan Bangsa dan Pembangunan Karakter (1959-1965)

Tesis ini membahas tentang peranan Roeslan Abdulgani dalam penerapan pemikiran Bung Karno mengenai pembangunan bangsa dan pembangunan karakter yang berlangsung pada periode (1959-1965). Penulis memilih judul tersebut dengan alasan: tokoh Roeslan Abdulgani belum begitu banyak mendapat perhatian untuk diteliti, khususnya di kalangan mahasiswa ilmu sejarah Universitas Indonesia, baik dalam bentuk *skripsi*, *tesis*, maupun *disertasi*; diharapkan tokoh Roeslan Abdulgani dapat menjadi teladan dan perannya dapat diaktualisasikan dalam menghadapi persoalan bangsa pada dewasa ini; dan memberikan sumbangan bagi pengembangan penulisan sejarah dalam format studi tokoh. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui sejauh mana peranan Roeslan Abdulgani dalam penerapan pemikiran Bung Karno tentang pembangunan bangsa dan pembangunan karakter. Permasalahan yang dibahas meliputi: latar belakang kehidupan sosial Roeslan Abdulgani, pemikiran Bung Karno dan pemahaman Roeslan Abdulgani tentang pembangunan bangsa dan pembangunan karakter, dan bagaimana Roeslan Abdulgani menjalankan perannya dalam kegiatan indoktrinasi.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan memanfaatkan sumber tertulis berupa kumpulan pidato, sambutan, prasaran, ceramah, dan tulisan Roeslan Abdulgani, inventaris arsip Roeslan Abdulgani (1950-1976), arsip Sekretariat Menko Hubra (1963-1966), dan beberapa surat kabar. Selain itu juga memanfaatkan sumber berupa transkripsi hasil wawancara dengan Roeslan yang dilakukan oleh *Buletin Antara*, *Prisma*, J.R. Chaniago, dan Tony Hasyim. Metodologi naratif digunakan sebagai pendekatan untuk mendeskripsikan pembahasan tesis ini dengan menunjukkan peran individu yaitu Roeslan Abdulgani dalam proses pembangunan bangsa dan pembangunan karakter.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh Roeslan Abdulgani memiliki latar belakang kehidupan sosial yang baik yaitu semangat nasionalisme yang telah tertanam sejak muda. Herbert Feith dan Lance Castles yang menempatkan Roeslan Abdulgani sebagai tokoh dalam aliran pemikiran politik “Nasionalisme Radikal” di Indonesia pada periode (1945-1965) tidak tepat dan tidak cukup bukti. Tetapi Roeslan Abdulgani lebih tepat disebut sebagai tokoh yang mampu memahami pemikiran orang lain yaitu Bung Karno. Roeslan Abdulgani memiliki peranan yang cukup penting dalam kegiatan indoktrinasi dalam rangka pembangunan bangsa dan pembangunan karakter.

Katakunci:

Peranan, penerapan pemikiran, pembangunan bangsa dan pembangunan karakter.

## ABSTRACT

Name : Subiyarto  
Study Program : Historical Science  
Title : Roeslan Abdulgani: His Role in Applying Idea of Bung Karno about Nation and Character Building (1959-1965)

This thesis discuss about role of Roeslan Abdulgani in applying idea of Bung Karno about nation and character building which taking place at period (1959-1965). Writer chooses the title with some reasons: figure of Roeslan Abdulgani has not so much getting attention to discuss, especially among historical science student University of Indonesia, either in the form of *scription, thesis, and dissertation*; the writer expect figure of Roeslan Abdulgani can be a model and his role can actualize in facing problem of nation at these days; and gives contribution to expansion of historiography in figure study format. Purpose of this research is to know how far role of Roeslan Abdulgani in applying idea of Bung Karno about nation and character building. Problems studied about: background of social life of Roeslan Abdulgani, idea of Bung Karno and understanding of Roeslan Abdulgani about nation and character building, and how Roeslan Abdulgani implements his role in indoctrination activity.

This research using method of history by exploiting source is written in the form of gathering of oration, greeting, working paper, discourse, and article of Roeslan Abdulgani, archive inventories Roeslan Abdulgani (1950-1976). Archive Secretariat Menko Hubra (1963-1966), and some newspapers, besides also exploits source in the form of transcription result of interview with Roeslan Abdulgani by *Buletin Antara, Prisma*, J.R. Chaniago, and Tony Hasyim. Narrative methodologies applied as approach to description this thesis by showing the role of individual that is Roeslan Abdulgani in process of nation and character building.

Result of research indicates that figure of Roeslan Abdulgani have a background of social life which good that is spirit of nationalism since he is young. Herbert Feith and Lance Castles placing Roeslan Abdulgani as figure in politics philosophy "Radical Nationalism" in Indonesia at period (1945-1965) is not true and insufficient evidence. But Roeslan Abdulgani is more accurately called as figure that able to comprehend idea of others that is Bung Karno. Roeslan Abdulgani has an important role in activity of indoctrination for the agenda of nation and character building.

Keyword:

Role, applying idea, nation and character building.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	8
1.4 Kerangka Teori.....	9
1.5 Metodologi.....	15
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.7 Tinjauan Pustaka.....	20
1.8 Sumber Sejarah.....	23
1.9 Sistematika Penulisan.....	24
2. ROESLAN ABDULGANI DAN NASIONALISME.....	26
2.1 Riwayat Singkat Roeslan Abdulgani.....	27
2.2 Sejarah Nasionalisme Indonesia.....	40
2.3 Nasionalisme dalam Diri Roeslan Abdulgani.....	50
2.4 Roeslan Abdulgani dan Nasionalisme Radikal.....	58
3. PEMBANGUNAN BANGSA DAN PEMBANGUNAN KARAKTER: PEMIKIRAN BUNG KARNO DAN PEMAHAMAN ROESLAN ABDULGANI.....	66
3.1 Pemikiran Bung Karno.....	67
3.2 Pemahaman Roeslan Abdulgani.....	72
3.3 Hubungan Roeslan Abdulgani dengan Bung Karno.....	90
3.4 Roeslan Abdulgani sebagai Menteri Penerangan.....	95
3.5 Roeslan Abdulgani dan Doktrin Manipol/Usdek.....	100
4. LEMBAGA PEMBINAAN KESATUAN BANGSA (LPKB) SEBAGAI ALAT INDOKTRINASI.....	108
4.1 Pembentukan LPKB.....	109
4.2 Perkembangan LPKB.....	118
4.3 Aktivitas LPKB.....	121
4.4 Aktivitas Roeslan Abdulgani dalam LPKB.....	142
5. KESIMPULAN.....	151
DAFTAR PUSTAKA.....	156

## DAFTAR LAMPIRAN

1. ICHTISAR POKOK-POKOK ASSIMILASI .....	160
2. PERNJATAAN (Peserta Musyawarah Assimilasi).....	163
3. KEPUTUSAN MUSJAWARAH ASSIMILASI .....	165
4. KEPUTUSAN-KEPUTUSAN SEKSI .....	169
5. PIMPINAN PUSAT LEMBAGA PEMBINA KESATUAN BANGSA....	172
6. KEPUTUSAN MUSJAWARAH ASSIMILASI tentang Program Djangka Pendek untuk Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa .....	173
7. PERNJATAAN (Pimpinan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa).....	174
8. PERATURAN DASAR LEMBAGA PEMBINA KESATUAN BANGSA	176
9. AMANAT PEMIMPIN BESAR REVOLUSI .....	183
10. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 140 TAHUN 1963.....	184
11. KIKISLAH HABIS RASA MENJENDIRI Amanat J.M. Menko/Menteri Penerangan/Ketua Panitia Pembina Djiwa Revolusi Dr. H. Roeslan Abdulgani, pada peresmian L.P.K.B. Tjabang Bogor, tanggal 6 Djuni 1963.....	186

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah Indonesia terdapat beberapa tokoh yang telah mencurahkan perhatiannya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan melalui konsep pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*). Jauh sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaannya, perjuangan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa telah dilakukan oleh Bung Karno, Moh. Hatta, Sutan Sjahrir, Amir Sjarifuddin, Moh. Yamin, Sudirman, Roeslan Abdulgani, dan tokoh-tokoh yang lain. Dari sejumlah tokoh tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Roeslan Abdulgani khususnya yang berhubungan dengan perannya dalam penerapan pemikiran Bung Karno tentang pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*), yang berlangsung dalam periode (1959-1965).

Roeslan Abdulgani merupakan salah seorang tokoh yang ikut mewarnai sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara baik yang terjadi pada periode kolonialisme-imperialisme Barat, zaman pendudukan Jepang, masa pergerakan nasional dan revolusi fisik, bahkan sampai era reformasi. Itulah sebabnya wajar jika Casper Schuurung, seorang penulis Barat menyebutnya sebagai “tokoh segala zaman” yang memiliki pengalaman luas di berbagai bidang kehidupan di Indonesia dan mampu bertahan lebih dari 40 tahun sebagai tokoh politik.<sup>1</sup> Ia mengalami zaman Belanda dengan kolonialismenya, revolusi Indoneisa, demokrasi terpimpin di bawah Bung Karno, sikap negaranya yang netral tetapi aktif sampai kudeta tahun 1965,<sup>2</sup> demikian Schuurung menulis dalam pengantar bukunya.

Sedangkan Herbert Feith dan Lance Castles menempatkannya sebagai seorang tokoh dalam aliran pemikiran “Nasionalisme Radikal” bersama Bung Karno dan Sayuti Melik. Indikator yang digunakan Feith dan Castles adalah isi

---

<sup>1</sup> Casper Schuurung, (2002), *Roeslan Abdulgani, Tokoh Segala Zaman* (Penerjemah: Loek Pattirajawane), Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), hal. vi.

<sup>2</sup> *Ibid.*

pidato yang disampaikan di depan Sidang Konstituante pada 3 Desember 1957.<sup>3</sup> Dua orang penulis ini memberikan pemahaman tentang nasionalisme radikal sebagai berikut:

*"Nasionalisme radikal berakar pada "nasionalisme polos" yang dihayati oleh orang Indonesia pada masa penjajahan yang perhatian politiknya terpusat pada tercapainya kemerdekaan dan yang keterlibatannya dalam nasionalisme bukanlah bagian dari komitmennya yang lebih luas kepada Islam atau sosialisme. Tidak semua para "nasionalis polos" adalah nasionalis-nasionalis yang radikal, tetapi nasionalisme radikal telah sangat kuat mempengaruhi mereka. Dan pada masa setelah kemerdekaan, nasionalisme radikal sajalah yang bertahan sebagai tendensi ideologis yang khas. "Nasionalisme polos" telah banyak menghilang, dengan para nasionalis moderat semakin menunjukkan ciri-ciri pengaruh sosialis demokrat atau tradisional Jawa."*<sup>4</sup>

Dengan kata lain, tokoh yang lebih akrab dengan sapaan Cak Roes ini memiliki pengaruh yang kuat baik terhadap tokoh-tokoh sebayanya maupun terhadap para pendahulunya seperti Bung Karno. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jabatan yang pernah disandangnya terutama pada masa demokrasi terpimpin.

Tokoh ini memang tidak menyandang nama sebesar Bung Karno, Moh. Hatta, Sutan Syahrir, Amir Syarifuddin maupun tokoh-tokoh lain yang dikenal secara luas oleh masyarakat Belanda. Sekalipun demikian, ia bukan merupakan tokoh yang asing di kalangan wartawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 1973 misalnya, seorang wartawan Belanda bernama Joop van Tijn dari mingguan *Vrij Nederland* pernah mengadakan wawancara luas dan mendalam dengan tokoh ini. Dari hasil wawancara tersebut van Tijn kemudian menulis tentang Cak Roes sebagai "tokoh Indonesia yang termasuk di antara yang paling penting dan yang paling terbuka". Bahkan pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an ia sering diwawancarai oleh stasiun-stasiun televisi Belanda seperti NOS dan VPRO dalam siaran dokumenter mengenai Indonesia.<sup>5</sup> Sebelas tahun sebelumnya, yakni pada tanggal 16 Oktober 1962 ketika sedang melakukan aktivitas dalam kegiatan indoktrinasi, Cak Roes menerima kehadiran seorang wartawan asing yang akan melakukan wawancara untuk siaran televisi Kanada.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa tokoh Roeslan Abdulgani memiliki peranan yang cukup penting dalam proses pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*). Dalam situasi seperti

<sup>3</sup> Herbert Feith dan Lance Castles (ed.), (1988), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, hal. 252.

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 136.

<sup>5</sup> Casper Schuurung, *op. cit.*

sekarang ini sesungguhnya dibutuhkan kehadiran seorang tokoh seperti sosok Roeslan Abdulgani. Setidaknya dapat meneladani aktivitasnya dalam rangka membangun kembali semangat solidaritas, persatuan dan kesatuan bangsa, maupun nasionalisme yang sempat terkoyak karena *ekses* yang ditimbulkan oleh sistem demokrasi yang belum mapan dan kebijakan otonomi daerah yang pelaksanaannya masih kacau-balau, pada era reformasi ini.

Reformasi yang telah berlangsung selama satu dasawarsa semula didambakan sebagai dewa penyelamat bagi krisis politik dan ekonomi yang melanda bangsa Indonesia, tetapi dalam kenyataannya justru melahirkan permasalahan-permasalahan baru yang mengancam keutuhan bangsa. Disintegrasi sosial sebagai akibat saling dukung dalam bentuk bentrokan fisik dan konflik antar kelompok baik yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung maupun Pemilihan Umum (Pemilu) untuk legislatif yang multipartai tak dapat dihindarkan. Begitu pula dengan nilai-nilai solidaritas sosial sebagai akibat dari sistem Otonomi Daerah yang masih carut-marut mulai memudar esensinya, bahkan telah mendorong kembali munculnya semangat primordialisme atau semangat kedaerahan. Jika pemerintah kurang waspada, bukan tidak mungkin akan mengarah munculnya kembali gerakan separatisme.

Situasi demikian tentu tidak diharapkan menjadi lonceng kematian demokrasi yang secara substantif bagi bangsa Indonesia justru baru dimulai. Tetapi jika hal di atas dianggap sebagai resiko dan konsekuensi maupun bentuk pengorbanan dari penyelenggaraan sistem demokrasi, betapa mahal harga sebuah demokrasi. Padahal hakikat dari demokrasi adalah menghargai adanya perbedaan-perbedaan dan siap menghadapi kekalahan dalam pemilihan. Oleh karena itu sudah semestinya pemerintah memikirkan format terbaik bagi penyelenggaraan demokrasi dengan meminimalisir resiko dan konsekuensi jatuhnya korban, di samping sudah dapat dipastikan menelan biaya yang tidak sedikit. Yang diharapkan bagi bangsa ini adalah bahwa demokrasi menjadi alat pemersatu dan bukan sebagai alat pemecah belah.

Harapan lain dari demokrasi adalah bahwa konsep tersebut merupakan pilihan terbaik bagi penyelenggaraan sistem pemerintahan dan tidak menimbulkan kekhawatiran orang banyak. Resiko jatuhnya korban dan *ekses*



yang ditimbulkan dapat ditekan, kesejahteraan masyarakat semakin terjamin sehingga kehidupan rakyat yang aman, tenteram, tertib, dan damai dapat diciptakan dalam suasana yang demokratis. Harapan ini mungkin dapat dipenuhi apabila pemerintah mampu membangun pola pikir dan kultur yang demokratis dalam kehidupan masyarakat bangsa. Pada saat itulah persatuan dan kesatuan bangsa yang belakangan ini tercederai oleh hiruk-pikunya reformasi dapat dikembalikan keutuhannya.

Menggalang persatuan dan kesatuan, melalui konsep pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*), barangkali merupakan pernyataan klasik yang sudah usang tetapi tetap dipandang perlu dan relevan untuk menghadapi kenyataan kondisi sosial bangsa Indonesia dewasa ini. Bahkan jauh sebelum bergulirnya era reformasi pun masalah persatuan dan kesatuan bangsa telah menarik perhatian di kalangan cendekiawan. Misalnya Harsja W. Bachtiar Gurubesar Sosiologi dan Sejarah Masyarakat Universitas Indonesia, mengemukakan pandangannya bahwa:

“Masalah persatuan dan kesatuan bangsa kita, bangsa Indonesia, sesungguhnya merupakan masalah yang cukup kompleks, rumit, dan menyangkut kepentingan kita semua sebagai manusia perorangan, anggota keluarga tertentu, anggota golongan tertentu, anggota masyarakat setempat tertentu, maupun anggota bangsa Indonesia sebagai keseluruhan”.<sup>6</sup>

Dalam pandangannya tersebut, Harsja menunjukkan bahwa masalah persatuan dan kesatuan bangsa merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh komponen bangsa dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, budaya, bahasa, dan perbedaan-perbedaan lain yang bersifat alamiah. Lebih jelas dan tegas lagi Harsja menyebutnya pada bagian penutup dari paper yang ditulisnya, sebagai berikut:

“Nasion Indonesia terbentuk dari manusia-manusia yang berasal dari berbagai golongan, baik suku bangsa, ras, maupun agama, bahkan dengan latar belakang dan arah budaya yang beraneka ragam. Oleh karena itu, keberhasilan upaya integrasi nasional, yang lebih dikenal dengan ungkapan “persatuan dan kesatuan bangsa,” tidak saja ditentukan oleh Pemerintah ataupun golongan tertentu saja, melainkan ditentukan oleh seluruh nasion, seluruh bangsa kita.

Bilamana kita semua sadar akan tugas kewajiban kita masing-masing sebagai orang Indonesia berkenaan dengan tuntutan untuk mempersatukan golongan-golongan yang berbeda-beda dalam masyarakat kita, persatuan nasional dapat terwujud secara lebih baik, lebih lestari, berlangsung terus-menerus, hingga akhir zaman”.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Harsja W. Bachtiar, Paper dipublikasikan dalam *Wawasan Kebangsaan Indonesia – Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa* (Jakarta: BAKOM PKB PUSAT, 1994).

<sup>7</sup> *Ibid.*

Pendapat lain muncul di era reformasi antara lain seperti berita yang dilansir harian *Kompas* yang terbit pada 5 April 2008. Dalam *headline*-nya yang membahas masalah kebangsaan, khususnya tentang kondisi yang tidak menguntungkan selama sepuluh tahun terakhir ini dan tidak menampakkan tanda-tanda perbaikan kebangkitan ekonomi. *Headline* itu bertajuk “Indonesia Punya Masa Depan, Nasionalisme dan Solidaritas Sosial Menjadi Modal Bangsa”. Berikut kutipannya:

“Modal sosial bangsa ini masih ada, (yaitu) nasionalisme masih kuat dan bisa diandalkan. Solidaritas kelas atas masih terlihat meskipun harus dioperasionalkan dengan lebih baik. Begitu pula dengan prinsip pluralisme, bangsa ini masih memilikinya, terutama dari kalangan Islam *mainstream* yang menghargai pluralisme.”<sup>8</sup>

Dalam pandangan Magnis, pluralisme merupakan pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dijaga kelestariannya. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap rakyat kelas bawah yang termarginalkan. Situasi yang mengkhawatirkan saat ini adalah: “bahwa yang di atas akan berusaha sangat keras dengan segala cara untuk tetap di atas, dan yang di bawah makin tidak berdaya, sementara pemerintah tidak berbuat apa-apa,” demikian Magnis menambahkan.<sup>9</sup>

Pendapat paling aktual dikemukakan H.A.R. Tilaar, pakar ilmu pendidikan yang menyatakan bahwa:

“Masalah karakter bangsa dewasa ini khususnya dalam Era Reformasi pada akhir-akhir ini menjadi topik yang hangat baik bagi pemimpin-pemimpin politik, para pemimpin bangsa pada umumnya dan akhir-akhir ini juga melibatkan para akademisi. Hal ini disebabkan karena masyarakat dalam transisi dewasa ini merasakan mulai kehitangan karakter bangsa atau disebut juga jatidiri bangsa atau identitas bangsa sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh pendiri bangsa kita.”<sup>10</sup>

Dari ketiga pandangan tersebut, penulis berpendapat bahwa apa yang dikemukakan Harsya, Magnis, dan Tilaar menurut pengalaman sejarah merupakan suatu hal yang pernah diperjuangkan oleh Cak Roes pada masa yang lalu. Artinya, dengan pernyataan yang demikian itu apa yang pernah Cak Roes perjuangkan kembali menemukan eksistensinya. Dengan kata lain, bahwa hal

<sup>8</sup> *Kompas*, 5 April 2008.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> H.A.R. Tilaar, “Karakter Bangsa dalam Perspektif Pedagogik Kontemporer” dalam Achmad Fedyani Saifuddin dan Mulyawan Karim (*Penyunting*), (2008), *Refleksi Karakter Bangsa*, Diterbitkan Atas Kerjasama Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga RI dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia: Penerbit Forum Kajian Antropologi Indonesia, hal. 18.

tersebut merupakan aktualisasi dari peranan Cak Roes. Kondisi obyektif bangsa Indonesia pada masa sekarang ini memang perlu memikirkan kembali konsep-konsep lama, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di sinilah pentingnya nilai-nilai historis dari peristiwa sejarah yang pernah diperjuangkan oleh para tokoh pendahulu pada masa yang lampau perlu dikaji kembali. Bahkan dipandang perlu untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang ini. Bukankah sejarah menjadi penting bukan karena peristiwanya, melainkan karena pengaruhnya bagi kehidupan manusia pada masa kini dan yang akan datang?

Fokus utama dari penelitian ini adalah tentang peranan Roeslan Abdulgani dalam penerapan pemikiran Bung Karno tentang pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*). Sejauh mana aktivitasnya ketika sang tokoh menduduki berbagai jabatan dalam pemerintahan memiliki pengaruh dan peranan dalam *nation and character building* akan ditelusuri melalui sumber-sumber sejarah yang dijadikan bahan penelitian untuk penulisan tesis ini.

Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian tentang peranan Roeslan Abdulgani dalam penerapan pemikiran Bung Karno, khususnya tentang pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) adalah sebagai berikut. *Pertama*, tokoh ini belum mendapat perhatian untuk diteliti khususnya dikalangan mahasiswa ilmu sejarah Universitas Indonesia baik dalam bentuk *skripsi*, *tesis*, maupun *disertasi*. *Kedua*, dengan mengungkapkan peranannya dalam penerapan pemikiran Bung Karno penulis berharap dapat memetik manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam upaya membangun kembali sikap mental yang sesuai dengan dasar keteladanan seperti semangat nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi pergaulan dunia. Ditengah derasny arus informasi dan komunikasi ini, kita membutuhkan sikap mental yang kuat yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Seperti pernah diungkapkan Cak Roes sendiri tentang arti simbolik dari pengalaman sejarah. Baginya sejarah merupakan guru yang paling baik yang bisa mengajarkan cara menghindari kesalahan-kesalahan masa lampau dan menikmati

keagungan masa lampau.<sup>11</sup> Pernyataan Cak Roes yang senada juga terdapat pada pidato sambutan yang disampaikan pada acara penutupan Musyawarah ke-I IKIP Bandung pada tanggal 19 Oktober 1963 di Bumi Siliwangi. Dalam kesempatan tersebut, ia mengemukakan bahwa:

“Jang dimaksud dengan Ilmu-sedjarah ibarat penglihatan tiga-dimensi, jaitu pertama penglihatan kemasa selam, kedua kemasa sekarang dan kemudian kemasa depan. Dengan lain perkataan; dalam menjelidiki masa selam itu kita tidak dapat melepaskan jang sedang kita alami bersama, dan sedikit banjak djuga tidak dapat kita lepaskan daripada perspektipnja masa depan.

Maka sedjarah masa lampau harus kita peladjadi dengan berpidjak kepada kenjataan-kenjataan perkembangan situasi sekarang, serta pula dengan menantjapkan perkiraan-perkiraan serta harapan-harapan jang berperspektip ke masa jang akan datang.

Tanpa tantjapan kepada perspektipnja masa depan, sedjarah seakan-akan bukan merupakan suatu proses jang terus berdjalan, melainkan suatu keadaan jang membeku, terpentjil dari keadaan sekarang dan dari masa depan.”<sup>12</sup>

*Ketiga*, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk pengembangan sejarah dalam format studi tokoh sehingga akan menambah khasanah atau perbendaharaan dari penulisan tokoh-tokoh lain yang pernah diteliti sebelumnya. Lebih jauh lagi diharapkan bahwa peranan Roeslan Abdulgani yang tertuang dalam tesis ini dapat diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat sepuluh tahun belakangan bangsa Indonesia belum mampu beranjak dari krisis multidimensional dan justru menimbulkan permasalahan yang mengancam keutuhan bangsa.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah seperti telah diuraikan pada awal bab ini, terutama yang berkaitan dengan pertimbangan penulis dalam memilih topik penelitian tentang peranan Roeslan Abdulgani dalam penerapan pemikiran Bung Karno, khususnya dalam pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*), maka masalah-masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan: Bagaimanakah kemampuan Roeslan Abdulgani memahami pemikiran Bung Karno untuk diterapkan dalam

<sup>11</sup> Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo: “Arah Gejala dan Perspektif Studi Sejarah Indonesia” dalam Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo (*redaksi*), (1985), *Ilmu Sejarah dan Historiografi, Arah dan Perspektif*, Jakarta: PT Gramedia, hal. 28.

<sup>12</sup> Roeslan Abdulgani, (1963), *Penggunaan Ilmu Sedjarah*, Djakarta: Prapantja, hal. 12-13.

pembangunan bangsa dan pembangunan karakter yang berlangsung pada periode (1959-1965)? Selanjutnya untuk menelusuri aktivitas Roeslan Abdulgani yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, maka akan dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang kehidupan sosial Roeslan Abdulgani mempengaruhi pembentukan jiwa nasionalismenya ?
2. Bagaimanakah pemikiran Bung Karno dan pemahaman Roeslan Abdulgani tentang pembangunan bangsa dan pembangunan karakter?
3. Bagaimanakah Roeslan Abdulgani menjalankan peranannya dalam kegiatan indoktrinasi untuk proses pembangunan bangsa dan pembangunan karakter?

### 1.3 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini berupaya merekonstruksi peranan Roeslan Abdulgani terhadap pemikiran Bung Karno khususnya yang berhubungan dengan masalah pembangunan bangsa dan pembangunan karakter yang berlangsung pada periode (1959-1965). Penulis menetapkan periode tersebut dengan dua pertimbangan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. *Pertama*, periode tersebut merupakan masa berlangsungnya demokrasi terpimpin, di mana terdapat kebijakan Presiden Sukarno yang kemudian dijadikan doktrin politik seperti, Manipol-Usdek, Nasakom, politik konfrontasi dengan Malaysia, perjuangan pengembalian Irian Barat ke Indonesia, bahkan secara spesifik menyebut tentang pentingnya *nation building* dan *character building* dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1962. *Kedua*, periode tersebut merupakan masa di mana Roeslan Abdulgani memiliki kedekatan hubungan dengan Bung Karno sehingga banyak mendapat kesempatan menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Jabatan-jabatan yang dimaksud antara lain, Wakil Menteri Pertama bidang khusus merangkap Menteri Penerangan, Menteri Koordinator Perhubungan dengan Rakyat, Wakil ketua DPA, dan Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi, bahkan mendapat tugas sebagai penanggung jawab sebuah lembaga indoktrinasi yang dibentuk pada tahun 1963.

Namun demikian, untuk mendapatkan gambaran tentang kedekatan hubungan Roeslan Abdulgani dengan Bung Karno perlu ditelusuri terlebih dahulu

latar belakang kehidupan sosialnya. Bagaimana kehidupan keluarganya, masa kecilnya, pendidikannya, aktivitasnya dalam organisasi telah berpengaruh terhadap terbentuknya semangat nasionalisme dalam diri Roeslan akan dibahas pada tesis ini. Roeslan dan Bung Karno dipertemukan oleh persamaan semangat nasionalisme yang mengalir dalam jiwa mereka berdua. Begitu pula dengan cara Roeslan memahami pemikiran Bung Karno sehingga ia mampu menerapkan pemikiran tersebut dalam konteks pembangunan bangsa dan pembangunan karakter, menjadi pembahasan yang lain. Akhirnya, akan dibahas peranan Roeslan dalam kegiatan indoktrinasi yang tidak hanya tentang masalah pembangunan bangsa dan pembangunan karakter tetapi juga hal-hal yang berhubungan dengan doktrin politik Bung Karno.

Oleh karena itu jika mengacu pada kelaziman penelitian sejarah yang selalu memperhatikan tiga aspek pokok yaitu *tematis*, *spasial*, dan *temporal*, maka tidak semua aspek dapat dipenuhi. Secara tematis penelitian ini memfokuskan perhatiannya pada masalah pembangunan bangsa dan pembangunan karakter, yang secara temporal berlangsung dalam periode (1959-1965), tetapi secara spasial tidak mengenal batas. Hal ini disebabkan penelitian ini lebih menekankan pada format studi tokoh.

#### 1.4 Kerangka Teori

Sesuai dengan topik penelitian ini: “Roeslan Abdulgani: Peranannya dalam Penerapan Pemikiran Bung Karno tentang Pembangunan Bangsa dan Pembangunan Karakter (1959-1965)”, penulis mencoba memberikan pemahaman beberapa konsep yang berkaitan dengan topik tersebut. Beberapa konsep yang dimaksud adalah: peranan, penerapan, pemikiran, pembangunan bangsa dan pembangunan karakter. Istilah “peranan” berasal dari kata dasar “peran” yang artinya sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).<sup>13</sup> “Penerapan” berasal dari kata dasar “terap” yang mengandung arti pengenaaan, pemasangan, perihal yang

<sup>13</sup> W.J.S. Poerwadarminta, (1986), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 735.

berhubungan dengan “mempraktekkan.”<sup>14</sup> Kemudian “pemikiran” berasal dari kata dasar “pikir” yang berarti akal budi, ingatan, angan-angan. “Memikirkan” berarti mempertimbangkan (mencari akal untuk penyelesaian suatu masalah).<sup>15</sup> “Pemikiran” berarti apa yang menjadi angan-angan atau yang dipikirkan seseorang yang sedang mencari akal untuk penyelesaian suatu masalah.

Sedangkan untuk konsep “pembangunan bangsa dan pembangunan karakter”, Susanto Zuhdi, memberikan pemahaman tentang konsep yang dalam bahasa Inggris disebut “nation and character building”. Menurutnya ungkapan yang sudah klasik itu sesungguhnya merupakan pemendekan dari ungkapan “nation building and character building” (“pembangunan bangsa dan pembangunan karakter”). Yang dimaksud dengan “pembangunan karakter” adalah “pembangunan karakter bangsa”. Jadi ada dua maksud dan tujuan sekaligus: “pembangunan bangsa” dan “pembangunan karakter bangsa”.<sup>16</sup> Jika merujuk kepada istilah Inggrisnya, maka yang dimaksud dengan “nation” adalah sekelompok orang, komunitas, masyarakat yang terbentuk oleh suatu persamaan tertentu. “Building” dapat diartikan sebagai pembangunan, pembentukan, pembinaan; sedangkan “character” adalah karakter, watak, tabiat, ciri khas, kepribadian, atau sifat-sifat yang melekat pada bangsa secara keseluruhan.<sup>17</sup> Jadi yang dimaksud “pembangunan bangsa dan pembangunan karakter” adalah membangun bangsa yang berkarakter, memiliki kepribadian yang membedakan dengan bangsa lain. Karena salah satu unsur pembentuk itu adalah Pancasila, maka sering dijumpai sebutan “Pancasila sebagai kepribadian bangsa.”

Berdasarkan konsep-konsep tersebut, maka peranan Roeslan Abdulgani dalam penerapan pemikiran Bung Karno tentang pembangunan bangsa dan pembangunan karakter, dapat dipahami. Cita-cita besar Bung Karno adalah terbentuknya “kepribadian bangsa”, karena berorientasi pada pembangunan politik. Hal yang membedakan dengan Orde Baru Suharto yang menginginkan terbentuknya “jatidiri bangsa”, karena berorientasi pada pembangunan

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 1059.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 752.

<sup>16</sup> Susanto Zuhdi, “Pembangunan Karakter Bangsa: Suatu Perspektif Historis” dalam Achmad Fedyani Saifuddin dan Mulyawan Karim (*Penyunting*), *op. cit.*, hal. 71.

<sup>17</sup> Maswadi Rauf, “Mengubah Karakter Bangsa Warisan Orde Baru” dalam Achmad Fedyani Saifuddin dan Mulyana Karim (*Penyunting*), *ibid.*, hal. 88.

ekonomi.<sup>18</sup> Roeslan Abdulgani adalah tokoh yang memiliki peranan dalam mewujudkan cita-cita Bung Karno tersebut.

Dalam perkembangannya, penulisan sejarah atau *historiografi* tidak hanya menelaah atau mengkaji peristiwa dan aktivitas yang dialami atau dilakukan oleh manusia tetapi dapat pula tentang apa yang dipikirkan, maka lahirlah sejarah pemikiran. Richard Tuck dalam sebuah artikel yang ditulisnya, mengutip pendapat Quentin Skinner menyatakan bahwa penelitian sejarah pemikiran dapat dilakukan dengan memanfaatkan teks sebagai obyek penelitian dan pemahaman.<sup>19</sup> Teks yang dimaksud oleh Tuck adalah tulisan yang merupakan hasil curahan buah pikiran seseorang yang ingin ditulis sejarahnya yang dapat berupa teks pidato, sambutan, pernyataan hasil wawancara, buku atau literatur, ceramah, bahkan mungkin kuliah umum yang pernah dilakukan. Satu hal yang tak dapat dipungkiri adalah bahwa kultur yang mencerminkan suasana zaman sangat berpengaruh terhadap pembentukan pemikiran seseorang.

Pada bagian yang lain pernyataan Skinner seperti dikutip Tuck menyebutkan bahwa sikap, tindakan, dan aktivitas seseorang memiliki korelasi dengan apa yang dipikirkan.<sup>20</sup> Dengan kata lain bahwa sikap, tindakan, dan aktivitas yang dilakukan seseorang dalam sebuah peristiwa pada dasarnya merupakan manifestasi dari pemikirannya. Meskipun Tuck mengemukakan pandangannya tersebut dalam konteks sejarah pemikiran politik, penulis berpendapat bahwa hal tersebut juga relevan untuk konteks yang lain, seperti halnya pemikiran Bung Karno. Karena kemampuan Roeslan memahami jalan pikiran Bung Karno, maka ia dapat menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat ditambahkan pula bahwa: “cara menafsirkan kejadian sejarah adalah sesuai dengan jalan pikiran orang atau bangsa Indonesia yang telah bebas-merdeka, dan yang tak terikat oleh rasa-rendah atau berpemandangan sempit di dalam ruangan pikiran yang terbatas.”<sup>21</sup>

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 78.

<sup>19</sup> Richard Tuck: “History of Political Thought” dalam Peter Burke (ed.), (1991), *New Perspectives on Historical Writing*, Oxford: Polity Press, hal. 193-194.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 202.

<sup>21</sup> Muhammad Yamin, “Tjatur-Sila Chalduniah”, *Seminar Sedjarah Nasional I* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1957), hal. 26-34, terdapat dalam William H. Frederich dan Soeri Soeroto (*penyunting*), (1984), *Pemahaman Sejarah Indonesia, Sebelum dan Sesudah Revolusi*, Jakarta: LP3ES, hal. 53.



Demikian salah satu corak penulisan sejarah yang mendapat pengaruh dari nasionalisme Indonesia.

Dari uraian tersebut, bahwa apa yang menjadi pemikiran Bung Karno dan diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari oleh Roeslan Abdulgani dapat dianalisis dengan teori Benedict Anderson, seorang tokoh yang dikenal dengan gagasan teoretisnya tentang nasionalisme, khususnya nasionalisme Indonesia dengan menyatakan pendapatnya:

“Maka dengan gaya pikir antropologis, saya usulkan definisi berikut ini tentang bangsa atau nasion: ia adalah komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan.

Bangsa adalah sesuatu yang *terbayang* karena para anggota bangsa terkecil sekali pun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Namun toh dibenak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka.”<sup>22</sup>

Kata “terbayang” yang oleh Anderson diberi penekanan, dalam definisi yang lain diberi arti “anggapan.” Keanekaragaman kondisi obyektif suatu komunitas dapat dipersatukan dengan membentuk suatu nasion, dimana mereka dianggap hidup dalam satu wadah yang sama yakni “bangsa Indonesia.” Definisi tersebut mengandung konsekuensi bahwa pemerintah nasional memproyeksikan kekuasaannya ke seluruh wilayah secara merata, seragam, adil, dan tanpa diskriminasi.

Sedangkan untuk kata “komunitas”, Anderson memberi penekanan dalam kesimpulannya, seperti berikut:

Akhirnya, bangsa dibayangkan sebagai sebuah *komunitas*, sebab tak peduli akan ketidakadilan yang ada dan penghisapan yang mungkin tak terhapuskan dalam setiap bangsa, bangsa itu sendiri selalu dipahami sebagai kesetiakawanan yang masuk mendalam dan melebar-mendatar. Pada akhirnya, selama dua abad terakhir, rasa persaudaraan inilah yang memungkinkan begitu banyak orang, jutaan jumlahnya, bersedia jangankan melenyapkan nyawa orang lain, merenggut nyawa sendiri pun rela demi pembayangan tentang yang terbatas itu. Kematian-kematian itu menyeret kita ke hadapan problema pokok yang dibawa nasionalisme: apa yang menjadikan pembayangan-pembayangan yang kian menciut dalam kerangka sejarah terkini (tidak lebih dari dua abad saja) bisa menggugah pengorbanan kolosal seperti itu? Saya percaya bahwa jawabannya terletak di akar-akar budaya nasionalisme.<sup>23</sup>

Apabila diperhatikan, pada dasarnya pemikiran Bung Karno yang diimplementasikan Cak Roes dalam konteks pembangunan bangsa dan

<sup>22</sup> Benedict Anderson, (2002), *Imagined Communities, Komunitas-komunitas Terbayang* (Penerjemah-Omi Intan Naomi), Yogyakarta: INSIST, hal. 8.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 11.

pembangunan karakter (*nation and character building*), dilakukan antara lain dengan cara menanamkan semangat nasionalisme. Hal ini ditunjukkan dalam pidato-pidatonya yang seringkali mengutip pendapat ilmuwan dan negarawan asing yang memiliki perhatian terhadap masalah nasionalisme. Ilmuwan dan negarawan itu misalnya Lenin, Stalin, Trotsky, Ernest Renan, Otto Bauer, Garibaldi, Mao Tse Tung, Yoze Rizal, Mahatma Gandhi, dan yang lain. Untuk kepentingan implementasi, Cak Roes mengutip ulang pidato Bung Karno. Suatu hal yang sering dilakukannya dalam berbagai kesempatan.<sup>24</sup>

Dengan mencermati definisi nasionalisme yang dikemukakan Anderson, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa menurut Anderson pendapat Renan dan Bauer sulit diwujudkan. Dalam pandangan Anderson perbedaan-perbedaan yang ada seperti suku, agama, bahasa, dan budaya sulit dipersatukan sehingga hanya merupakan komunitas-komunitas terbayang. Terhadap pandangan Anderson tersebut, Bung Karno dan Cak Roes ingin membuktikan kebenaran teori Renan dan Bauer. Menurut Bung Karno dan Cak Roes bahwa perbedaan-perbedaan seperti di atas dapat dipersatukan oleh pengalaman sejarah yang sama yakni penderitaan yang ditimbulkan oleh penjajahan kolonialisme-imperialisme Belanda selama ratusan tahun. Persatuan yang dilandasi pengalaman yang sama pun tidak muncul dengan sendirinya, melainkan ada faktor penggerak dari luar yang dalam istilah Herbert Feith disebut *solidarity makers*.<sup>25</sup>

Dalam kaitannya dengan teori Anderson, maka Bung Karno dan Roeslan Abdulgani adalah dua orang tokoh yang didasarkan atas pengalaman historisnya selama dijajah oleh kolonialisme-imperialisme Belanda telah mengantarnya menjadi tokoh pemersatu bangsa. Sedangkan dalam kaitannya dengan gagasan Feith, Bung Karno dan Roeslan adalah tokoh *solidarity makers* yang mampu

<sup>24</sup> Pidato Bung Karno yang mengutip pendapat Ernest Renan dan Otto Bauer yang dikutip ulang Roeslan Abdulgani terdapat pada tesis ini, hal. 34.

<sup>25</sup> Herbert Feith, (1973), *The Decline of Constitutional Democracy In Indonesia*, Itacha and London: Cornel University Press, hal. 25. Feith menyebut adanya dua tipe kepemimpinan pada masa revolusi yaitu tipe administrator yang mengandalkan kemampuan administrasi, hukum, teknik, dan bahasa asing. Tipe ini dibutuhkan dalam perundingan, negosiasi dengan Belanda, dan diplomasi dengan PBB. Pada umumnya tipe pemimpin seperti ini berpendidikan Barat. Sedangkan tipe kedua adalah *integratif skill* yang memiliki kemampuan dalam mediasi kebudayaan, manipulasi simbol, dan organisator massa. Tipe inilah yang disebut sebagai *solidarity makers*, biasanya mendapat pendidikan muslim, dan merupakan kombinasi pemimpin berbasis tradisional dan kharismatik. Karakteristik tipe kedua ini dimiliki oleh Roeslan Abdulgani.

menggerakkan massa. Dengan kepiawaiannya berorasi, ia telah mengantarkan masyarakat Indonesia menuju persatuan dan kesatuan bangsa melalui proses pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*). Tetapi karena penelitian ini memfokuskan pada peranan Roeslan Abdulgani, maka pembahasan tesis ini lebih menekankan peristiwa-peristiwa historis yang berkaitan dengannya.

Pengalaman historis yang dialami Cak Roes sejak kecil hingga zaman revolusi menjadi modal baginya ketika harus memasuki gelanggang politik pada zaman kemerdekaan. Sekitar awal kemerdekaan, peran Roeslan Abdulgani dapat diungkapkan dari peristiwa besar yang terjadi di Surabaya, kemudian dikenal sebagai “Peristiwa 10 November 1945” dan juga dikenang sebagai “Hari Pahlawan” yang merupakan bagian dari revolusi Indonesia. Dalam peristiwa ini dapat ditunjukkan seberapa besar peran tokoh Roeslan Abdulgani yang oleh William H. Frederick disebut sebagai pemimpin priyayi baru.<sup>26</sup>

Pasca “insiden bendera” yang masih diliputi pertentangan para pemimpin pemuda, Roeslan Abdulgani menyarankan agar dilakukan persiapan untuk bermusuhan serta kemungkinan melucuti senjata Jepang.<sup>27</sup> Dalam sebuah rapat telah terjadi perdebatan sengit tentang persoalan organisasi dan kepemimpinan. Beberapa di antara yang hadir lebih suka mendukung Abdulgani dan Komite Angkatan Muda-nya. Karena hampir semua pemuda yang hadir pada rapat ini dari kalangan terpelajar, dan merupakan orang-orang yang sadar secara politis, imbauan Abdulgani cukup kuat.<sup>28</sup> Demikian gambaran sekilas tentang peranan tokoh Roeslan Abdulgani dalam peristiwa 10 November yang merepresentasikan semangat nasionalismenya sebagai seorang *solidarity makers*.

Di samping peristiwa besar tersebut, dari pernyataan-pernyataan yang terungkap dalam berbagai kesempatan, Cak Roes selalu mengangkat tema-tema tentang pentingnya membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan-pernyataan itu semakin tajam ketika ia menyitir pendapat Bung Karno yang kemudian dijadikan doktrin politik, terutama pada periode

<sup>26</sup> William H. Frederick, (1989), *Pandangan dan Gejolak Masyarakat Surabaya dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926 – 1946)* (Diindonesiakan oleh Hermawan Sulisty), Jakarta: Penerbit PT Gramedia, hal. 255.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 263.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Demokrasi Terpimpin. Pada periode tersebut, sasaran utama kegiatan indoktrinasi adalah membangun persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat dengan menyatukan perbedaan-perbedaan dan menghapuskan diskriminasi. Karena diskriminasi, apapun bentuknya adalah bertentangan dengan semangat kebangsaan.

## 1.5 Metodologi

Dalam penelitian sejarah banyak sejarawan Indonesia maupun sejarawan asing yang mengemukakan teori dan pemahaman tentang metodologi sejarah yang dibedakan dengan metode sejarah meskipun keduanya merupakan mata rantai yang sulit dipisahkan satu sama lain. Artinya metode dan metodologi dalam penelitian sejarah adalah dua fase kegiatan yang berbeda untuk tugas yang sama. Sartono Kartodirdjo membedakan antara *metode* sebagai “bagaimana orang memperoleh pengetahuan” (*how to know*) dan *metodologi* sebagai “mengetahui bagaimana harus mengetahui” (*to know how to know*). Dengan demikian jika diterapkan dalam proses penelitian sejarah, metode sejarah ialah “bagaimana mengetahui sejarah”, sedangkan metodologi sejarah “mengetahui bagaimana mengetahui sejarah.” Hal ini dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan ilmu bantu yaitu ilmu-ilmu sosial yang lain.

Untuk mengetahui sejarah dengan menggunakan metode sejarah dapat ditempuh melalui proses dan prosedur yang terdiri dari beberapa tahapan secara berurutan seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya yaitu *heuristik*, *kritik* atau *verifikatif*, *interpretasi* atau *eksplanasi*, dan *historiografi*.<sup>29</sup> Sedangkan untuk mengetahui bagaimana mengetahui sejarah dengan menggunakan metodologi, dapat dilakukan dengan pendekatan teoretis. Sartono Kartodirdjo mengemukakan “antara sejarah dan ilmu-ilmu sosial dalam pendekatan-pendekatan yang disebut interdisiplin atau multidimensional adalah langkah-langkah yang menempatkan sejarah sejajar dengan ilmu-ilmu sosial dari pada sub-ordinasi sejarah pada ilmu-ilmu sosial.”<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini, yang mengangkat topik tentang “Roeslan Abdulgani: Peranannya dalam Penerapan Pemikiran Bung Karno (1959-1965)”, penulis

<sup>29</sup> Lihat kembali bagian: *Metode Penelitian*.

<sup>30</sup> Sartono Kartodirdjo, (1992), *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 120-156.

mencoba menggunakan metodologi “naratif.” Metodologi ini diperkenalkan oleh Leopold von Ranke – seorang sejarawan Jerman yang menjadi pelopor penulisan sejarah modern – dan juga Seignebos yang populer dengan istilah “narrativisme.” Bukunya yang terbit pada 1824 telah membawa perubahan dalam praktek historiografi sebelumnya. Metodologi ini menekankan pentingnya mempelajari arsip, khususnya dokumen-dokumen primer (saksimata). Dengan cara ini, menurut Ranke sejarah akan mencapai obyektivitas (*wie es eigentlich gewesen*, atau kenyataan yang sesungguhnya). Ranke melakukan koreksi atas tradisi penulisan sejarah sebelumnya yang digunakan sejak *renaissance* yang hanya mengulang-kutip buku-buku klasik.<sup>31</sup>

Sejarah naratif mempunyai beberapa sebutan lain seperti: sejarah populer dan sejarah peristiwa (*histoire evenementielle*) yaitu sejarah yang menyandarkan pada peristiwa-peristiwa.<sup>32</sup> Metodologi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa peristiwa sejarah yang akan dibahas menyangkut peran individu dalam peristiwa sejarah yaitu sosok Roeslan Abdulgani melalui peranannya dalam mengimplementasikan pemikiran Bung Karno. Tokoh ini sarat dengan pengalaman historis, baik yang dialaminya pada masa pergerakan, pendudukan Jepang, maupun zaman kemerdekaan, hingga dirinya disebut tokoh segala zaman. Dalam berbagai peristiwa Cak Roes memiliki peranan yang menentukan bagi proses berlangsungnya sejarah.

Karakteristik metodologi ini, seperti dikemukakan Kuntowijoyo, “sejarah naratif ialah menulis sejarah secara deskriptif, tetapi bukan sekedar menjejerkan fakta. Ia menyebut, setidaknya terdapat tiga syarat untuk menulis sejarah naratif, yaitu *colligation*, *plot*, dan struktur sejarah.”<sup>33</sup> *Colligation*, ialah mencari *inner connection* (hubungan dalam) antar peristiwa sejarah; *plot*, ialah interpretasi dan eksplanasi; dan struktur sejarah, ialah cara mengorganisasikan sebagai “rekonstruksi yang akurat”<sup>34</sup>, adalah membahas peristiwa sejarah secara tematis

<sup>31</sup> R.Z. Leirissa : “Peradaban dan Kapitalisme” di Asia Tenggara (Pengantar), dalam Anthony Reid, (2004), *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara* (Penerjemah, Sori Siregar dkk.), Jakarta: Pustaka LP3ES, hal. xvi. Lihat juga Eddy Kristiyanto, (2008), *Sejarah Sebagai Locus Philosophicus et Theologicus*, Yogyakarta: Penerbit Lamalera, hal. 15-17.

<sup>32</sup> Helius Sjamsuddin, (2007), *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, hal. 237.

<sup>33</sup> Kuntowijoyo, (2008), *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. 147.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 147-148.

dengan menunjuk keterlibatan individu yang memiliki peran terhadap proses berlangsungnya peristiwa itu. Sejarah adalah peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh orang-orang besar (*History of Event*), menonjolkan unsur kisah, dan menunjukkan peran tokoh dalam peristiwa. Dalam istilah Ranke, perubahan sosial terjadi karena faktor dari peran individu. Artinya jika mengacu pada konteks permasalahan, penulisan tesis ini juga akan menelusuri terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia, khususnya pada masa revolusi dimana Roeslan Abdulgani menunjukkan peranannya. Lebih konkretnya, peranan yang ditunjukkan selama dalam penerapan pemikiran Bung Karno, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) yang berlangsung selama periode (1959-1965).

Penerapan metodologi naratif dalam penulisan tesis ini terutama untuk memperlihatkan perjalanan sejarah Roeslan Abdulgani. Sesuai dengan karakteristik metodologi naratif, maka penulis menyesuaikan antara peristiwa sejarahnya dengan peranan Roeslan dalam peristiwa tersebut. Karakteristik *deskriptif*, terlihat pada pembahasan mengenai latar belakang kehidupan sosial Roeslan sejak muda hingga aktivitasnya ketika menduduki berbagai jabatan dalam struktur pemerintahan. Kemudian keterlibatannya dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dan dalam KAA 1955 di Bandung, menunjukkan karakteristik *History of Event* (sejarah adalah peristiwa besar yang dialami oleh orang besar). Sedangkan *peran individu dalam peristiwa*, tampak pada peranannya dalam lembaga indoktrinasi LPKB.

## 1.6 Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu merekonstruksi peranan Roeslan Abdulgani dalam mengimplementasikan pemikiran Bung Karno untuk kepentingan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*), sehingga dapat dituangkan dalam sajian *historiografi*, maka penulis menempuh langkah-langkah sesuai dengan prosedur dan tahapan dalam metode sejarah. Dimulai dari tahapan *heuristik*<sup>35</sup> yang didahului dengan

<sup>35</sup> Louis Gottschalk, (1975), *Mengerti Sejarah, Pengantar Metode Sejarah* (terjemahan Nugroho Notosusanto), Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, hal 41-56.

perumusan masalah,<sup>36</sup> untuk membingkai obyek penelusuran sumber, penulis berusaha untuk mencari dan menghimpun sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik yang telah dipilih. Sumber-sumber sejarah itu didapatkan diantaranya di Perpustakaan FIB-UI, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Yayasan Bung Karno, Perpustakaan CSIS, Perpustakaan Direktorat Nilai Sejarah-Dirjen Sejarah dan Purbakala-Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan informasi yang diakses dari internet. Penulis juga memanfaatkan tulisan berupa transkripsi hasil wawancara dengan Roeslan Abdulgani yang pernah dilakukan oleh Tony Hasyim wartawan majalah *Forum Keadilan* dan J. R. Chaniago yang pernah menjabat Deputy Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kedua hasil wawancara itu merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi penulis.

Salah satu kendala yang penulis hadapi dalam penelusuran sumber sejarah sebagai bahan penelitian ini adalah terbatasnya waktu yang penulis miliki karena terikat oleh tugas dan pekerjaan. Namun sebagai konsekuensi logis menempuh studi, penulis berusaha memanfaatkan waktu luang di luar jam tugas untuk mengunjungi tempat-tempat tersedianya sumber sejarah seperti telah penulis sebut di atas. Kendala yang lain adalah kesulitan penulis untuk mencoba menghubungi alamat tempat tinggal Roeslan Abdulgani di Jl. Imam Bonjol no. 11 Jakarta untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Konfirmasi yang penulis lakukan melalui telepon mengalami kendala teknis. Namun demikian dari sumber-sumber yang telah berhasil dihimpun, penulis memandang cukup memadai bahan penelitian.

Tahap yang kedua adalah *kritik* atau *verifikatif*<sup>37</sup> yaitu mencoba memberikan penilaian terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan sehingga dari sumber-sumber yang ada itu penulis memperoleh sumber primer. Dari hasil kritik-verifikatif yang penulis lakukan terhadap sumber-sumber yang telah berhasil dihimpun, maka diperoleh beberapa sumber primer berupa kumpulan teks pidato, ceramah-ceramah, artikel-artikel yang pernah ditulisnya, dan materi

<sup>36</sup> R.Z. Leirissa, (1998), *Laporan Penelitian: Strukturalisme Dalam Ilmu Sejarah (Pengantar)*, Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Baca juga R.Z. Leirissa, (1999), *Metodologi Strukturis Dalam Ilmu Sejarah*, Depok: Program Ilmu Sejarah, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

<sup>37</sup> Louis Gottschalk, *op. cit.*, hal. 57-79.

kuliah-kuliah umum yang disampaikan di depan mahasiswa Universitas Djakarta dan IKIP Bandung yang telah diterbitkan oleh berbagai penerbit nasional, baik penerbit pemerintah maupun penerbit swasta. Di samping itu penulis juga mendapatkan sumber sekunder berupa buku-buku, majalah, surat kabar, dan tulisan berupa transkripsi hasil wawancara dengan Roeslan Abdulgani yang pernah dilakukan oleh Tony Hasyim dan J. R. Chaniago, seperti telah disebut pada fase pertama metode ini.

Tahap yang ketiga adalah *interpretasi*<sup>38</sup> dan *eksplanasi* yaitu berdasarkan sumber-sumber yang telah berhasil dihimpun dan telah terseleksi, penulis membuat catatan-catatan kecil dari tema-tema penting sehingga diperoleh data-data sejarah. Dari data-data sejarah tersebut, penulis menafsirkan dengan pendekatan metodologis yang sesuai untuk menyerap dan menyelami suasana zaman, menggambarkan situasi dan kondisi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada zamannya yang dialami oleh Roeslan Abdulgani sebagai tokoh yang menjadi pusat perhatian penulisan tesis ini. Data-data yang telah tersaji dirangkai, dianalisis dengan memberikan pandangan dalam bentuk interpretasi, maka didapatkan fakta baru tentang peranan Roeslan Abdulgani dalam mengimplementasikan pemikiran Bung Karno yang berlangsung selama periode Demokrasi Terpimpin.

Sedangkan tahap akhir dari proses dan prosedur penelitian sejarah adalah *historiografi*.<sup>39</sup> Dari fakta baru yang merupakan hasil interpretasi atau eksplanasi yang penulis lakukan pada tahap sebelumnya, selanjutnya disusunlah konstruksi sejarah baru dengan senantiasa memperhatikan aspek-aspek historis berdasarkan tema-tema penting sehingga akan menghasilkan karya sejarah dalam bentuk tesis yang obyektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan senantiasa memihak kepada bukti-bukti yang didapatkan. Sesuai dengan karakteristik ilmu sejarah yaitu *kronologis* dan *diakronis*, maka tema-tema penting yang dibahas dalam tesis ini disusun berdasarkan urutan waktu dan alur peristiwa. Hal yang membedakan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain seperti Sosiologi, Antropologi, dan Politik. Meskipun ada kalanya ilmu-ilmu sosial yang lain itu dapat digunakan sebagai pendekatan.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*



Meskipun periode sejarah dari penelitian ini berlangsung 1959-1965 tetapi penulis merasa perlu untuk mengungkapkan latar belakang kehidupan dari tokoh Roeslan Abdulgani. Penulis berpendapat bahwa pengungkapan latar belakang kehidupan dari seorang tokoh yang sedang menjadi topik dalam penelitian sejarah menjadi penting untuk mengenali karakteristik sosio-budaya yang melingkupinya dan untuk memahami perjalanan politik dan karirnya. Dengan demikian tanpa mengurangi fokus utama dari periodisasinya, dihasilkan penulisan sejarah tentang tokoh Roeslan Abdulgani secara utuh.

### 1.7 Tinjauan Pustaka

Penulisan sejarah Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan studi tokoh telah banyak dilakukan baik oleh mahasiswa maupun sejarawan. Bahkan jika seorang tokoh memiliki daya tarik yang kuat, banyak menarik minat para penulis sejarah dengan sudut pandang yang berbeda dan pada aspek yang berbeda pula. Bung Karno misalnya, sejarahnya telah ditulis oleh puluhan orang mulai dari otobiografinya, biografinya, dan yang menulis dari sudut pandang tertentu yang dianggap sebagai bagian menarik sepanjang hayatnya. Baik yang dilakukan oleh penulis-penulis asing maupun penulis-penulis Indonesia.

Namun tidak demikian halnya dengan tokoh Roeslan Abdulgani. Meskipun sosoknya tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia – bahkan di kalangan wartawan asing sekalipun, khususnya Belanda – tetapi tidak begitu banyak penulis sejarah yang tertarik untuk menulisnya. Mungkin salah satu sebabnya adalah karena tokoh ini oleh banyak orang hanya dianggap sebagai juru bicara Bung Karno, dengan predikat “Jubir Usman”<sup>40</sup>, mungkin juga memiliki alasan yang lain. Tetapi setidaknya terdapat dua buah buku yang membahas tentang Roeslan.

*Pertama*, Herbert Feith dan Lance Castles (ed.), (1988), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES. Buku ini memuat banyak tulisan yang merupakan buah pikiran dari tokoh atau pelaku sejarah seperti Bung Karno, Moh. Hatta, Moh. Natsir, Sjahrir, Sumitro Djojohadikusumo, Roeslan Abdulgani,

<sup>40</sup> Yang dimaksud dengan “Jubir Usman” adalah Juru Bicara Usdek-Manipol, yaitu doktrin politik Bung Karno pada periode berangsurnya demokrasi terpimpin (1959-1965). Usdek singkatan dari UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Nasional; sedangkan Manipol singkatan dari Manifesto Politik.

hingga Suharto. Selain itu, buku ini juga menyajikan tulisan karya cendekiawan Indonesia seperti Nugroho Notosusanto, Selo Soemardjan, Rosihan Anwar, dan Soedjatmoko. Buah pikiran para pelaku dan penulis sejarah tersebut oleh Feith dan Castles diklasifikasikan dalam lima tipologi aliran pemikiran politik Indonesia pada periode (1945-1965) yang terdiri dari: Nasionalisme Radikal, Tradisionisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis, dan Komunisme.

Dalam buku tersebut tokoh Roeslan Abdulgani bersama-sama dengan Bung Karno dan Sajuti Melik ditempatkan sebagai tokoh dengan aliran pemikiran politik "Nasionalisme Radikal." Dalam pengantarnya Feith dan Castles mengemukakan bahwa aliran pemikiran politik tersebut telah mencapai antiklimaks pada tahun 1966 seiring dengan dibubarkannya komunisme di Indonesia. Bersamaan dengan itu, suksesi kepemimpinan nasional pasca 1966 juga telah membawa konsekuensi dilarangnya ajaran Marhaenisme Bung Karno yang mendasari PNI sebagai manifestasi gerakan nasionalis radikal.

Bahan yang digunakan untuk menempatkan tokoh Roeslan Abdulgani dalam aliran pemikiran politik "Nasionalisme Radikal" adalah pidato yang disampaikan di depan Sidang Konstituante pada tanggal 3 Desember 1957. Inti dari pidato dimaksud adalah membahas masalah konsep kebangsaan yang erat kaitannya dengan nasionalisme. Cak roes menyatakan bahwa paham kebangsaan yang berkembang di Indonesia memiliki karakteristik yang membedakan dengan paham kebangsaan yang berkembang di negara lain, khususnya di Eropa Barat. Sejarah lahirnya paham kebangsaan di Eropa Barat seiring dengan terjadinya proses industrialisasi yang melahirkan golongan menengah dan atas yang kemudian memonopoli etiket kebangsaan itu. Sedangkan sejarah lahirnya paham kebangsaan di Indonesia justru merupakan reaksi atas kolonialisme dan imperialisme Eropa Barat yang telah menyengsarakan rakyat. Seperti halnya dengan sejarah lahirnya paham kebangsaan di negara-negara Asia pada umumnya.

*Kedua*, Casper Schuurin, (2002), *Roeslan Abdulgani Tokoh Segala Zaman*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Berbeda dengan yang pertama, buku ini lebih mirip dengan sebuah otobiografi karena berisi kisah perjalanan hidup Roeslan sejak muda yang seolah-olah dituturkan sendiri oleh

pelakunya. Dalam setiap pembahasan Schuurin mengawali dengan sedikit pengantar, selanjutnya berisi penuturan Cak Roes yang disesuaikan dengan konteks pembahasannya. Sesuai dengan judulnya, buku ini memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca bahwa tokoh Roeslan Abdulgani memegang peranan yang cukup penting dalam dua periode zaman dengan rezim yang berbeda yaitu masa Orde Lama (1959-1966) dan Orde Baru (1966-1998). Dua rezim pemerintahan yang bertolak belakang tentang cara pandang terhadap ideologi komunis. Suatu hal yang membuat pemerintah Orde Baru menyingkirkan mantan pejabat Orde Lama dari panggung politik, tetapi tidak demikian halnya dengan Roeslan.

Dalam buku ini – khususnya pada masa berlangsungnya Orde Lama – Roeslan tidak banyak berkisah tentang posisi dirinya sekalipun ia banyak memperoleh kesempatan untuk menduduki berbagai jabatan dari Bung Karno. Ia lebih banyak menceritakan tentang berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia pada masa itu. Buruknya hubungan Bung Karno dengan partai-partai politik (kecuali PKI) dan militer sehingga menyeretnya ke dalam situasi yang menyulitkan dirinya sendiri yang berujung pada penyerahan kekuasaan negara sepenuhnya kepada Suharto pada 22 Februari 1967.

Berakhimnya kekuasaan Bung Karno tidak serta merta berakhir pula peranan Cak Roes dalam percaturan politik Indonesia karena Presiden Suharto masih memberi kepercayaan sebagai Duta Besar RI untuk PBB (1967-1971). Pada masa-masa selanjutnya di zaman Orde Baru selama bertahun-tahun Roeslan mengemban tugas sebagai Ketua Dewan Penasehat Kepresidenan mengenai Pancasila yang dikenal dengan lembaga P-7. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Schuurin untuk menyebutnya sebagai “tokoh segala zaman.”

Dari hasil penelaahan terhadap dua tulisan yang membahas tentang Roeslan Abdulgani ini, penulis berkesimpulan bahwa keduanya tidak membahas tentang peranan Roeslan Abdulgani dalam penerapan pemikiran Bung Karno, khususnya untuk kepentingan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*). Kedua tulisan dalam bentuk buku tersebut tidak secara spesifik membahas satu sisi dari kehidupan Roeslan, tetapi lebih menyoroti aktivitas Roeslan secara umum dan dalam konteks yang lebih luas. Hal ini

merupakan celah bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan tugas akhir sebagai mahasiswa program magister ilmu sejarah pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Namun demikian, kedua buku tersebut merupakan sumbangan yang cukup berharga sebagai referensi bagi penulis untuk menyelesaikan tugas ini.

## 1.8 Sumber Sejarah

### a. Sumber Tertulis

Sumber ini meliputi beberapa macam bahan seperti kumpulan pidato, sambutan, ceramah, prasaran, dan tulisan Roeslan Abdulgani yang telah dibukukan. Selain itu juga berupa arsip yang berkaitan dengan aktivitas Roeslan Abdulgani, khususnya dalam Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB), yaitu *Inventaris Arsip Dr. H. Roeslan Abdulgani 1950-1976* dan *Arsip Sekretariat Menteri Koordinator Perhubungan dengan Rakyat 1963-1966*. Selain itu juga berupa surat kabar atau koran sezaman yang memuat opini sekitar pengangkatan Roeslan Abdulgani menjadi Wakil Menteri Utama Urusan Khusus merangkap Menteri Penerangan, yang terbit pada tahun 1962. Surat kabar tersebut meliputi *Suluh Indonesia* tanggal 25 Oktober 1962, *Berita Indonesia* tanggal 25 Oktober 1962, *Harian Rakjat* tanggal 26 Oktober 1962, *Warta Bakti* tanggal 25 Oktober 1962, dan *Merdeka* tanggal 6 November 1962. Sumber tertulis yang lain berupa buku yang memuat pandangan dari penulisnya dan merupakan rekam jejak Roeslan Abdulgani semasa hidupnya. Buku tersebut berjudul *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* dengan editor Herbert Feith dan Lance Castles, dan buku lain yang merupakan biografi dengan judul *Roeslan Abdulgani Tokoh Segala Zaman* ditulis oleh seorang sejarawan barat Casper Schuurin. Buku pertama menempatkan Roeslan Abdulgani sebagai seorang tokoh dalam aliran pemikiran “Nasionalisme Radikal”, sedangkan buku kedua memuat riwayat dan aktivitas Roeslan Abdulgani dalam dua periode zaman yakni Orde Lama dan Orde Baru. Buku kedua ini lebih menyerupai sebuah otobiografi, di mana perjalanan sejarah hidup Roeslan yang didasarkan pada pengalam empirisnya dideskripsikan begitu saja oleh penulisnya.

## b. Hasil Wawancara

Sumber yang berupa hasil wawancara yang pernah dilakukan oleh wartawan Televisi Kanada yang dimuat dalam *Buletin Antara*, No. 288/A, Selasa, 16 Oktober 1962. Wawancara majalah *Prisma* yang dimuat dalam kolom Dialog untuk terbitan No.8, Agustus 1981, Tahun ke X. Wawancara JR. Chaniago, sejarawan yang pernah menjabat Deputy Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan transkripsinya dimuat dalam majalah *Sejarah (Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi)*, Edisi 4, November 1993. Wawancara Toni Hasyim seorang wartawan majalah Forum Keadilan kepada tokoh Roeslan Abdulgani, dimuat dalam *Forum Keadilan*, No. 10, Tahun III, tanggal 1 September 1994.

### 1.9 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan agar penulisan tesis ini tersusun secara *kronologis* dan *diakronis* maka penulis membuat sistematika yang terdiri dari lima bab dan isi dari tiap bab dapat dijelaskan sebagai berikut.

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan untuk mengawali penulisan tesis ini yang memuat pembahasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teori, sekilas tentang metode penelitian, metodologi, tinjauan pustaka, sumber sejarah, serta sistematika penulisan itu sendiri. Sedangkan tiga bab yang lain yaitu bab kedua, ketiga, dan keempat akan mendeskripsikan hasil penelitian. Sedangkan bab kelima merupakan bagian penutup dari tesis ini yang berupa kesimpulan.

*Bab kedua*, akan dideskripsikan hasil temuan yang berhubungan dengan latar belakang kehidupan sosial Roeslan Abdulgani. Sub bab yang dibahas pada bab ini meliputi: riwayat singkat Roeslan Abdulgani, sejarah pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme Indonesia, nasionalisme dalam diri Roeslan Abdulgani, serta penggambaran predikat nasionalisme radikal terhadap Roeslan Abdulgani dalam pandangan Herbert Feith dan Lance Castles.

*Bab ketiga*, berisi pemaparan tentang hasil temuan yang berkaitan dengan konsep dasar pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character bilding*) menurut pemikiran Bung Karno dan pemahaman Roeslan

Abdulgani. Bab ini membahas beberapa sub bab yang terdiri dari pemikiran Bung Karno, pemahaman Roeslan Abdulgani terhadap pemikiran Bung Karno, hubungan kedekatan antara Roeslan Abdulgani dengan Bung Karno, dan juga membahas Roeslan Abdulgani dalam menjalankan peranannya sebagai Menteri Penerangan.

Selanjutnya pada *bab keempat*, akan membahas tentang peranan Roeslan Abdulgani dalam rangka menerapkan pemikiran Bung Karno tentang pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*). Implementasi yang dimaksud ditunjukkan melalui aktivitas yang dilakukannya dalam LPKB, dimana ia memiliki peran sebagai pelaksana sehari-hari. Bagaimana latar belakang sejarah terbentuknya LPKB dan perkembangannya sebagai alat indoktrinasi akan dibahas pada bab ini. Begitu pula dengan analisis kegiatan indoktrinasi yang telah dilakukan Roeslan Abdulgani khususnya selama berlangsungnya demokrasi terpimpin melalui LPKB dan sejauh mana efektivitas indoktrinasi, merupakan bagian akhir pembahasan bab ini.

Akhirnya penulis mengakhiri tesis ini dengan sebuah kesimpulan yang akan dituangkan pada *bab kelima* atau bab terakhir, yang merupakan sintesis dari hasil analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab inilah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam perumusan masalah dapat ditemukan jawabannya.

Temuan hasil penelitian yang tertuang pada bab kedua sampai keempat tersebut sekaligus memuat analisis tentang peranan tokoh Roeslan Abdulgani dalam penerapan pemikiran Bung Karno, dan mencoba menunjukkan seberapa besar pengaruhnya terhadap pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) dengan mencoba menerapkan metodologi naratif.

## BAB 2

### ROESLAN ABDULGANI DAN NASIONALISME

Memahami kepribadian seseorang – terlebih yang berkaitan dengan masalah-masalah kebangsaan atau nasionalisme – bukanlah perkara mudah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan terlebih dahulu mengenali latar belakang kehidupan sosial orang tersebut. Dalam istilah yang lain “kepribadian” disebut juga “karakter.” Menurut psikologi, istilah “karakter” secara konseptual menekankan pada individu, sedang antropologi menempatkan istilah “karakter” yang lebih menekankan pada kehidupan sosial yaitu kelompok atau komunitas.<sup>41</sup> Jadi dua disiplin ilmu sosial ini (psikologi dan antropologi) bertemu sebagai pendekatan dalam kajian sejarah karena kajian sejarah bersifat interdisipliner artinya dapat memanfaatkan ilmu-ilmu sosial yang lain. Kajian sejarah tentang seseorang (biografi) dengan pendekatan psiko-analisa, sorotannya tidak hanya pada individu tersebut, melainkan ditempatkan pada konteks sosialnya.<sup>42</sup>

Dalam tesis ini, meskipun tidak sepenuhnya merupakan biografi tetapi unsur itu ada karena riwayat Roeslan Abdulgani perlu dilukiskan sebagai latar belakang sejarah yang telah membentuk kepribadiannya secara individual dalam konteks kehidupan sosialnya. Se jauh mana lingkungan keluarga, pendidikan, organisasi sosial dan politik yang digelutinya, maupun pertemanannya berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian Roeslan Abdulgani. Dan se jauh mana pula bahwa kepribadian yang dimiliki Cak Roes telah berpengaruh terhadap peranan dan aktivitasnya dalam pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*).

Demikian pula dengan berbagai aktivitas yang dijalani sejak ia masih muda dalam berbagai organisasi dan pergerakan, maupun ketika menduduki jabatan-jabatan penting dalam struktur pemerintahan. Berbagai aktivitas yang telah dilakukan selama periode (1959-1965) mencerminkan peranannya dalam menerapkan pemikiran Bung Karno. Dengan kata lain bahwa kehidupan

---

<sup>41</sup> Susanto Zuhdi, dalam Achmad Fedyani Saifuddin dan Mulyawan Karim (*Penyunting*), *op. cit.*, hal. 72-73.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 73.

keluarga, pendidikan, aktivitasnya diberbagai organisasi, dan karir politiknya telah membentuk kepribadian seorang Roeslan Abdulgani.

## 2.1 Riwayat Singkat Roeslan Abdulgani

Roeslan Abdulgani atau yang lebih akrab dengan panggilan Cak Roes, dilahirkan di kota pahlawan Surabaya, tepatnya di sebuah kampung bernama Plampitan pada tanggal 24 November 1914. Tokoh ini berasal dari sebuah keluarga yang berkecukupan dan terpandang di kota kelahirannya karena ayahnya Haji Abdulgani adalah saudagar kaya dan sukses, yang pada masa itu termasuk salah seorang tokoh pergerakan nasional Sarekat Dagang Islam. Ayahnya memiliki tujuh mobil Fiat yang disewakan sebagai usaha pertaksian. Tidak hanya itu, ayah Roeslan juga memiliki 30 rumah yang tersebar di berbagai kampung. Ia merupakan anak keempat dari lima bersaudara yang lahir dari seorang ibu bernama Siti Moerad, istri kedua dari ayahnya. Keadaan ini menggambarkan bahwa dalam struktur sosial masyarakat keluarga Cak Roes termasuk golongan menengah atas.

Dalam hubungan sosial, keluarga Cak Roes termasuk keluarga yang memiliki rasa solidaritas tinggi dan peduli terhadap kaum miskin. Ayah Roeslan sering memberi sumbangan kepada komunitas muslim untuk memperbaiki *langgar*<sup>43</sup> sebagai sarana menunaikan ibadah orang-orang kampung. Ia juga membagikan zakat kepada kaum miskin yang menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam yang memiliki rezeki lebih, tetapi ia menolak kebiasaan tradisional untuk memberi zakat kepada *modin*<sup>44</sup> karena menurutnya seorang *modin* sudah cukup kaya dan tidak selayaknya menerima zakat. Oleh karena itu keluarga Abdulgani tiap tahun menyalurkan zakat secara langsung kepada para tetangga yang dianggap paling memerlukan dan pantas untuk menerimanya. Tindakan ayah Roeslan ini mendapat dukungan dari ibunya, suatu hal yang mencerminkan

<sup>43</sup> *Langgar* adalah sejenis musholla atau surau yang terdapat di kampung-kampung sebagai sarana ibadah terutama sholat lima waktu bagi kaum muslim.

<sup>44</sup> *Modin* adalah jabatan sejenis perangkat kampung yang tugasnya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan agama seperti pernikahan dan kematian, khususnya yang terdapat di daerah Jawa. Istilah lain yang digunakan untuk daerah lain di Jawa misalnya: *Kaum* yang sekarang disebut *Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat*.



kebebasan berpikir bagi seorang perempuan kampung yang telah menjadi bagian dari karakteristik dalam kehidupan sosialnya.

Pengaruh ibunya terhadap kepribadian Roeslan sangat kuat karena ibunya adalah seorang guru ngaji yang pandangan hidupnya lebih mencerminkan sinkretisme Jawa yang toleran dan memandang ritual agama sebagai kesadaran pribadi. Ketika Roeslan kecil bertanya kepada ibunya di mana sebetulnya Tuhan berada, ibunya tersenyum sambil berbisik, "Carilah di dalam sanubarimu. Karena itu, *sing eling* ...."<sup>45</sup> Sebagai seorang pemeluk Islam yang taat ibu Roeslan sangat memperhatikan pendidikan agama bagi putra dan putrinya. Oleh karena itu, Roeslan pun memperoleh bekal pendidikan agama yang cukup dari keluarganya. Pengetahuan agamanya yang luas membuatnya sering diminta memberikan ceramah atau siraman rohani pada acara-acara peringatan hari-hari besar Islam dan hari-hari bersejarah bagi organisasi-organisasi Islam, maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut. Kumpulan ceramah, khotbah, sambutan dengan materi keislaman yang pernah dilakukannya telah diterbitkan.<sup>46</sup>

Pengaruh ibunya itu semakin kuat, terutama setelah ia dilarang bertemu ayahnya karena sang ayah berniat menikah lagi. Hal inilah yang membuat Cak Roes berseberangan pendapat dengan Bung Karno dalam soal poligami. Meskipun begitu dalam hal yang lain ia banyak belajar dari Bung Karno. Begitu pula sebaliknya, Bung Karno pun mengaku banyak belajar dari Cak Roes. Kedua tokoh ini dalam perjalanan sejarah selanjutnya memiliki hubungan yang sangat baik sejak sekitar awal kemerdekaan hingga berakhirnya kekuasaan Bung Karno. Terlebih pada periode demokrasi terpimpin di mana Cak Roes banyak mendapat kesempatan menduduki berbagai jabatan penting dalam struktur pemerintahan.

Di samping mendapat pengaruh dari keluarga, kepribadian Roeslan juga dibentuk oleh lingkungan kultur dan struktur masyarakat di mana ia dilahirkan

<sup>45</sup> Copyright© 2002-2007 Ensiklopedi Tokoh Indonesia. "All right reserved. Design and Maintenance by Esero" dalam *www.pdat.co.id* 13/11/2007. Dalam pandangan dan pemahaman masyarakat Jawa, kata-kata "*sing eling*" dalam konteks kehidupan spiritual keagamaan mengandung makna "untuk selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa" yang dalam kepercayaan Islam berarti taat beribadah.

<sup>46</sup> Materi ceramah, khotbah, dan sambutan dalam berbagai kesempatan kegiatan keagamaan dan organisasi Islam terdapat dalam: Roeslan Abdulgani, tt., *Api Islam Ditengah-tengah Berkobarnya Revolusi*, B.P.U. Perusahaan-perusahaan Pertjetakan dan Penerbitan Negara, Departemen Penerangan R.I.

yakni Surabaya. Sebuah kota yang namanya menjadi sangat terkenal di zaman revolusi karena menjadi ajang pertempuran melawan tentara Inggris yang mestinya justru memberi jaminan perlindungan terhadap jalannya pemerintahan karena Indonesia telah memperoleh kemerdekaannya. Kota yang memiliki simbol ikan cucut dan buaya ini diberi makna dengan ungkapan berbahasa Jawa “*suring bhaya*” yang artinya “keberanian menghadapi bahaya.” Konon istilah ini diambil dari suatu babak dikalahkannya pasukan Mongol oleh pasukan Jawa.<sup>47</sup> 31 Mei 1293 merupakan tanggal yang dijadikan rujukan hingga sekarang bagi hari jadi kota Surabaya yang secara resmi ditetapkan atas kesepakatan sekelompok sejarawan yang dibentuk oleh pemerintahan kota.<sup>48</sup> Simbol dan ungkapan tersebut seperti telah menjadikan karakteristik yang melahirkan istilah *arek Surabaya* untuk menyebut penduduk asli Surabaya yang dikenal sebagai orang yang berpikiran bebas dan cepat mempertahankan diri, merupakan karakter awal yang tetap melekat sampai saat ini. Secara teoretis Roeslan Abdulgani, yang merupakan bagian dari masyarakat Surabaya dapat diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakter demikian.

Hal lain yang juga ikut membentuk pribadi Roeslan adalah mulai tumbuh dan berkembangnya kesadaran nasional yang menghinggapi pemuda-pemuda Surabaya pada masa itu terutama pada periode pasca terbentuknya organisasi pergerakan Budi Utomo 1908. Dinamika politik yang berkembang di kalangan generasi muda Surabaya pada dasawarsa ketiga awal abad 20 telah diwarnai oleh munculnya berbagai kegiatan baik dalam bentuk organisasi atau perkumpulan massa maupun penerbitan-penerbitan pers. Dr. Sutomo misalnya, ia mendirikan perkumpulan yang diberi nama *Indonesische Studieclub* pada tahun 1924 yang keanggotaannya tidak hanya terbatas kaum pria tetapi juga wanita. Sepasang suami-istri bernama Sudirman dan Siti Sudari menjadi aktivis dari organisasi bentukan Sutomo ini, bahkan dalam organisasi penggantinya yaitu Partai Bangsa Indonesia (PBI) dan kemudian Partai Indonesia Raya (Parindra).

Sutomo sendiri pada awalnya memiliki keinginan untuk memperjuangkan nasib masyarakat kampung Surabaya dengan cara menjadi anggota dewan kota praja yang dibentuk dan diawasi secara ketat oleh orang-orang Belanda.

<sup>47</sup> William H. Frederick, *op. cit.*, hal. 1.

<sup>48</sup> *Ibid*

Keanggotaannya pun didominasi oleh orang-orang Belanda sehingga Sutomo dan beberapa rekannya serta-merta mengundurkan diri dari dewan ini pada tahun 1925. Namun demikian, upayanya untuk memperjuangkan masyarakat kampung Surabaya tidak surut dengan mendirikan badan tandingan bagi dewan kota praja yang didasarkan pada perkumpulan sinoman, dan diberi nama *Sinoman Raad* (Dewan Sinoman), atau secara lebih resmi, *Gemeenteraad* Bangsa Indonesia (Dewan Kota Praja Indonesia).<sup>49</sup>

Sedangkan untuk usaha-usaha penerbitan pers yang juga menjadi sarana bagi perjuangan rakyat Surabaya misalnya terbitnya tiga surat kabar lokal menjelang awal 1930-an yaitu *Soeara Oemoem*, *Sin Tit Po*, dan *Espres*. Ketiganya terbit dalam bahasa Jawa atau Indonesia, yang oleh masyarakat awam dan tidak mengerti baca-tulis atau buta huruf menganggapnya berbahasa Belanda atau bahasa asing yang lain. Selain itu juga terdapat beberapa penerbitan lain seperti *Star Weekly* yang diredaksi oleh orang Indonesia keturunan Cina, Auw Jong Peng, *Penjebat Semangat* sebuah mingguan berbahasa Jawa, *Djanggal*, *Tekad*, *Berjoeang*, dan mungkin masih ada jenis penerbitan pers yang lain. Seiring dengan banyaknya penerbitan pers berupa surat kabar tersebut, di Surabaya terdapat setidaknya tiga orang wartawan yang cukup disegani karena tulisan-tulisannya. Orang pertama dari ketiga wartawan tersebut dapat disebut di sini adalah Imam Supardi yang menulis untuk *Soeara Oemoem*, kedua adalah Raden Ajat Djojoningrat yang pada tahun 1930 bersama Isbandi mendirikan *Djanggal*. Wartawan penting ketiga era 1930-an di Surabaya adalah Doel Arnowo yang dengan kegigihannya berhasil menerbitkan surat kabar dwimingguan berbahasa Indonesia dengan nama *Berdjoeang*. Namanya menjadi semakin populer dan disegani oleh teman sebayanya setelah menerbitkan *Kamoes Marhaen*.

Dalam pandangan George Mc Turnan Kahin, bahwa perkembangan surat kabar yang memakai bahasa sehari-hari telah merangsang pertumbuhan dan persebaran nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Menurut Kahin surat kabar telah menjadi sarana bagi cara-cara penyebaran gagasan. Hal ini juga terdorong oleh besarnya peningkatan mobilitas geografis penduduk dan gagasan-

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 67-68.

gagasan yang disebabkan oleh pola organisasi ekonomi abad ke-20 di Indonesia dan fasilitas-fasilitas transportasi yang menjadi konsekuensinya.<sup>50</sup>

Roeslan Abdulgani sendiri lebih memilih aktif dalam sebuah organisasi sayap PNI yang didirikan oleh Bung Karno beberapa tahun sebelumnya. Dalam usia yang relatif muda yakni 20 tahun, Roeslan mendapat kepercayaan memimpin organisasi yang diberi nama Indonesia Muda (IM). Pada umumnya para aktifis pers yang telah disebut namanya di atas juga aktif sebagai anggota PNI. Oleh karena itu bukan suatu kebetulan karena dekat dengan Bung Karno jika di kelak kemudian hari Roeslan menjadi seorang tokoh marhaenis yang militan bagi PNI, tetapi jauh sebelumnya ia telah melibatkan dirinya secara intensif dalam organisasi tersebut. Eksistensi kaum muda yang memiliki aktivitas baik dalam organisasi maupun pers di Surabaya ini oleh William H. Frederick disebut golongan “priyayi baru.”

Jiwa nasionalisme Roeslan mulai tumbuh ketika sering diajak ayahnya berkeliling ke desa-desa untuk melihat nasib bangsanya. Sejak kecil ia sudah belajar memahami keberagaman, suatu hal yang melandasi peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kelak. Roeslan sangat memahami dan menghargai pluralisme, yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Bagi Cak Roes pluralisme bukan merupakan kelemahan tetapi justru merupakan kekuatan bagi bangsa Indonesia. Dalam alam pikirannya perbedaan adalah kodrat dan anugerah yang pantas disyukuri. Perbedaan-perbedaan suku, ras, agama, budaya, dan bahasa daerah, telah mewarnai konsep-konsep besar dalam sejarah sejak zaman Majapahit. Seorang pujangga pada zaman Majapahit bernama Empu Tantular dalam kitab *Sutasoma* yang ditulisnya mencetuskan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang artinya “berbeda-beda tetapi tetap satu”. Sekelompok pemuda yang berasal dari berbagai daerah rela menanggalkan atribut kedaerahannya pada tahun 1928 dan mengikrarkan Sumpah Pemuda, “satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa” Indonesia. Muhammad Yamin dan Bung Karno memandang perbedaan yang dapat diwadahi dalam satu kerangka ideologi Pancasila yang secara formal telah dideklarasikan pada tanggal 1 Juni 1945 dan resmi menjadi ideologi negara.

<sup>50</sup> George Mc Turnan Kahin, (1995), *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme dan Revolusi Di Indonesia* (Alih bahasa: Nin Bakdi Sumanto), Sebelas Maret University Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan, hal. 54.

Ketika usianya menginjak 29 tahun, Cak Roes mengalami kegelisahan dalam aktivitasnya karena ketatnya pengawasan atau di bawah tekanan Jepang. Satu-satunya kegiatan yang dapat dilakukan adalah membentuk kelompok studi yang longgar. Anggotanya pada umumnya pemuda-pemuda berusia sekitar 20 tahun yang masih memiliki ikatan sebagai sanak keluarga, teman-teman dekat, dan sahabat-sahabatnya ketika di Indonesia Muda. Buku atau bacaan telah menjadi bagian penting bagi kelompok studi ini. Untuk keperluan memenuhi hasrat akan bacaan itu maka Cak Roes meringkas berbagai karya berbahasa Barat untuk dibagikan kepada anggota. Salah satunya adalah karya W. Hendrik van Loon, *The Liberation of Mankind*, yang memberi tuntunan inspirasi dan intelektual. Dengan ketatnya pengawasan Jepang terhadap aktivitas pemuda, maka kelompok ini sering melakukan diskusi di tempat-tempat yang sangat tidak nyaman, seperti misalnya di warung kaki lima.

Seiring memudarnya kekuasaan Jepang di Indonesia pada pertengahan tahun 1945, maka keterbukaan para pemuda Surabaya untuk melakukan aktivitas seperti telah tiba saatnya. Komite Angkatan Muda yang berada di bawah pengaruh Roeslan merupakan salah satu organisasi kepemudaan di Surabaya yang mengambil jarak terhadap tokoh-tokoh pergerakan yang memiliki kedekatan dengan pemerintah Jepang. Sahabat dekatnya dalam kelompok baru ini adalah Bambang Kaslan, seorang teman pada masa Indonesia Muda dulu yang memiliki kedekatan pribadi dan sosial dengan Roeslan. Komite Angkatan Muda merupakan pusat utama dari para pemuda aktivis di Surabaya. Sementara kekuatan pemuda lain bertumpu di bawah pengaruh seorang pemuda Sutomo (kemudian populer dengan Bung Tomo) yang usianya baru berkisar 25 tahun tetapi memiliki semangat patriotisme yang luar biasa. Namanya menjadi sangat populer karena keterlibatannya dalam peristiwa 10 November 1945 yang heroik itu. Meskipun pengaruh Cak Roes di kalangan pemuda Surabaya cukup kuat tetapi namanya tidak setenar Bung Tomo terutama di kalangan kaum pergerakan di luar Surabaya.

Di bulan September 1945, tepatnya pada tanggal 3, kaum pemuda kota dan terpelajar berkumpul di sebuah sekolah atas undangan Roeslan Abdulgani yang baru kembali dari kunjungannya beberapa hari ke Jakarta. Dalam kesempatan

tersebut Roeslan berpidato dengan memberikan penjelasan kepada semua yang hadir tentang kronologi peristiwa yang terjadi sejak 17 Agustus pada tahun itu. Ia menyampaikan bahwa Angkatan Muda-nya telah mempersiapkan rencana-rencana yang strategis untuk menghadapi situasi yang baru di Surabaya pasca kemerdekaan. Namun sebelum Roeslan selesai berpidato beberapa pemuda dari kelompok Sjahroezah memotong dengan melompat ke atas meja dan berdiri di atas kursi. Mereka menyatakan bahwa jika diundang ke tempat ini hanya untuk tujuan seperti itu terasa menyakitkan. Sementara mereka telah bersiap untuk melawan Jepang dan Belanda demi mempertahankan kemerdekaan. Namun Jepang nampaknya menyadari bahwa kekuasaannya di Indonesia akan segera berakhir, maka sisa-sisa laskar yang ada secara sukarela menyerahkan senjatanya, bukan kepada Sekutu tetapi kepada pemuda-pemuda Surabaya. Tidak jelas apa yang menjadi alasan atau motifnya sehingga tentara Jepang lebih suka menyerahkan senjatanya kepada pemuda-pemuda Surabaya dari pada kepada Sekutu. Jika dianalisis mungkin tentara Jepang merasa sesama bangsa Asia dengan Indonesia, atau diakhir dari kekuasaannya ingin berjasa kepada Indonesia.

Sementara itu situasi di Surabaya kian hari kian memanas semenjak kedatangan tentara Inggris atas nama Sekutu, yang ternyata diboncengi oleh Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Ketegangan semakin meningkat menjelang bulan November, terutama setelah terbunuhnya seorang perwira Inggris bernama Mallaby oleh pemuda Surabaya yang hingga kini tidak teridentifikasi dengan jelas siapa orang yang telah menyebabkan serdadu Inggris berpangkat Brigadir Jenderal itu meregang nyawanya. Sudah dapat diduga bahwa peristiwa terbunuhnya Mallaby akan mengakibatkan kemarahan Inggris. Pada tanggal 9 November Jenderal Mansergh mengeluarkan sebuah ultimatum yang menuntut supaya semua senjata di Surabaya diserahkan sebelum jam 06.00 pagi hari berikutnya, dan supaya orang-orang Indonesia yang bertanggung jawab atas tewasnya Mallaby diserahkan.<sup>51</sup>

Setelah melalui proses konsultasi dengan Jakarta dan kesepakatan di antara pemuda Surabaya sendiri, maka jawaban atas ultimatum tersebut disampaikan oleh Gubernur Soeryo pada pukul 23.00 melalui pengumuman radio yang

---

<sup>51</sup> Ben Anderson, (1988), *Revoloesi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 191.

menyatakan bahwa Surabaya akan melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan.<sup>52</sup> Keesokan harinya, pada 10 November Surabaya dibombardir oleh pasukan Inggris dari darat, laut, dan udara. Pasukan Inggris memulai suatu aksi pembersihan berdarah ke seluruh penjuru kota Surabaya. Dalam waktu tiga hari hampir setengah dari kota Surabaya berhasil ditaklukkan, tetapi pertempurannya sendiri baru berakhir setelah tiga minggu. Setidaknya enam ribu nyawa melayang dan ribuan lainnya harus meninggalkan kota yang sudah luluh lantak.<sup>53</sup>

Setelah dewasa Roeslan menikah dengan seorang gadis yang dicintainya bernama Sihwati Nawangwulan, anak seorang pangreh praja berkedudukan tinggi, Suprobo Reksodiprojo. Wanita kelahiran 5 Mei 1916 itu memberinya keturunan lima orang anak yang terdiri dari tiga orang anak perempuan dan dua laki-laki. Anak sulungnya lahir pada tanggal 19 Maret 1939 yang diberi nama Roestini Wulan. Dua tahun kemudian, pada 17 April 1941 anak keduanya lahir dengan nama Retnowati yang belakangan namanya menjadi populer karena menulis buku Biografi Suharto, mantan Presiden RI kedua dengan judul *Soeharto The Live and Legacy of Indonesia's Second President* yang banyak menarik perhatian pembaca biografi tersebut. Anak ketiganya yang juga anak laki-laki pertama bernama Rudiono Iskandar lahir pada tanggal 6 Oktober 1946. Pada tanggal 9 Mei 1948 lahirlah anak keempat dan merupakan anak laki-laki keduanya dengan nama Hafil Budiarto yang pada saat ini merupakan salah satu anggota Tim Dokter Kepresidenan dan sempat ikut menangani kesehatan ayahnya ketika dirawat di RSPAD Gatot Subroto pada tahun 2005, sebelum akhirnya sang ayah menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 29 Juni 2005.<sup>54</sup> Hafilijah Riniati, adalah nama yang diberikan bagi anak bungsunya yang lahir pada 4 Oktober 1958.<sup>55</sup> Retnowati dan Rudiono sangat bangga terhadap ayahnya, hal ini ditunjukkan oleh keduanya dengan mencantumkan nama ayahnya di belakang namanya sehingga masing-masing menjadi Retnowati

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hal. 192.

<sup>53</sup> M.C. Ricklefs, (2005), *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Penerjemah: Satrio Wahono dkk.), Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, hal. 438.

<sup>54</sup> Berita sekitar wafatnya Roeslan Abdulgani dimuat dalam berbagai media massa seperti: *Gatra*, *Sinar Harapan*, *Pikiran Rakyat*, dan *Tempo* yang informasinya dapat diakses dalam <http://www.abdulgani.info/memorial/gatra.htm>

<sup>55</sup> Roeslan Abdulgani, (1962), *Politik dan Ilmu* (diutjapkan pada waktu menerima gelar doctor honoris causa dalam ilmu politik pada Universitas Padjadjaran, pada tanggal 31 Djuli 1961 di Bandung). Djakarta: Jajasan Prapantja, hal. 43.

Abdulgani dan Rudiono Abdulgani. Dan itu berarti juga merupakan bentuk sikap dan perbuatan menjaga kehormatan nama kakeknya Haji Abdulgani, yang lebih dikenal sebagai Pak Dulgani.

Riwayat pendidikan Cak Roes diawali dari *HIS (Hollandsch Inlandsche School)* yang diselesaikannya selama delapan tahun (1920-1928). Sekolah ini diperuntukkan bagi penduduk pribumi Hindia Belanda tetapi menggunakan pengantar bahasa Belanda. Dengan demikian jika merujuk pembagian kategori seperti dikemukakan Sartono Kartodirdjo, maka HIS merupakan kategori kedua.<sup>56</sup> Empat tahun kemudian (1928-1932) berhasil menamatkan sekolahnya di *MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs)* setingkat Sekolah Menengah Pertama yang termasuk dalam kategori sistem pengajaran umum. Sekolah ini berlangsung selama empat tahun yang terdiri dari tiga tingkat ditambah tingkat pendahuluan (*voorklas*). Sedangkan pendidikan umum yang ditempuhnya di *HBS (Hogere Burger School)* diselesaikannya dua tahun kemudian (1932-1934),<sup>57</sup> di mana Bung Karno juga menempuh pendidikannya di tempat ini beberapa tahun sebelumnya. Pendidikan formal tertinggi yang pernah ditempuhnya adalah *OEK (Openbare Europeesche Kweekschool)*, yaitu Sekolah Pendidikan Guru Belanda. Tetapi tidak mendapat ijazah karena sebulan sebelum ujian akhir ia dikeluarkan dari sekolah dengan Surat Keputusan Direktur Departemen Onderwijs dan Eredienst dengan alasan karena selalu aktif dalam gerakan Indonesia Muda dan memberikan kursus-kursus politik.<sup>58</sup>

Kerelaannya untuk tidak mendapat ijazah dari pendidikan yang ditempuhnya itu merupakan salah satu bentuk pengorbanan yang dilakukan Cak Roes, yang berarti ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri tetapi karena semangat kebangsaan yang mengalir dalam dirinya.

<sup>56</sup> Sartono Kartodirdjo, (1990), *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia, hal. 76. Sartono membagi empat kategori sekolah yang ada pada masa itu, ialah (1) sekolah Eropa yang sepenuhnya memakai model sekolah negeri Belanda; (2) sekolah bagi pribumi yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar; (3) sekolah bagi pribumi yang memakai bahasa daerah/pribumi sebagai bahasa pengantar; (4) sekolah yang memakai sistem pribumi.

<sup>57</sup> Penjelasan kategori dari setiap jenjang pendidikan tersebut seperti dikemukakan Sartono Kartodirdjo dalam: *Ibid.*, hal. 79-80.

<sup>58</sup> Sauki Hadiwardoyo (*et. al.*), (1995), *Inventaris Arsip Dr. H. Roeslan Abdulgani 1950-1976*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, hal. ix-xi.



Tidak puas dengan pendidikan formal yang disandanginya, Cak Roes mengikuti berbagai pendidikan non-formal. Pada tahun 1938 mengikuti kursus Tata Buku A dan B, dan pada tahun 1940 mengikuti Kursus Notariat I dan II. Ia juga telah mengikuti ujian tertulis untuk bagian III dengan baik, tetapi gagal menjalani ujian lisan karena didahului kedatangan tentara Jepang ke Indonesia, sehingga tidak pernah ada kelanjutannya. Pergulatan hidup selanjutnya dialami selama pendudukan Jepang yang memerintah Indonesia selama tiga setengah tahun. Meskipun hanya tiga setengah tahun Jepang berkuasa tetapi telah membuat penderitaan dan meninggalkan luka yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia.

Sebagai negara fasis, cara Jepang memerintah Indonesia sangat jauh berbeda dibanding Belanda. Belanda dipandang sebagai penjajah yang kejam, tetapi kekejaman yang ditunjukkan oleh Jepang melebihi kekejaman Belanda. Pada masa pemerintahan Jepang semua bentuk organisasi pergerakan dilarang, lebih-lebih jika diketahui adanya kegiatan anti Jepang. Sejumlah aktivis menjadi ketakutan dan kaum terpelajar menjadi sasaran penangkapan. Sebanyak 85 orang ditangkap, beberapa di antaranya disiksa dan dieksekusi. Selama sekitar tiga setengah tahun Jepang menduduki Indonesia, setidaknya telah terjadi dua kali penangkapan dan penahanan terhadap para pemuda aktivis dan terpelajar. Pertama, terjadi di bulan September 1942, dan berikutnya pada bulan Januari 1943 yang pada umumnya mereka merupakan aktivis PNI, PKI, dan Parindra. Salah seorang yang menjadi korban adalah Amir Sjarifuddin yang oleh Jepang dijatuhi hukuman mati tetapi kemudian dibebaskan atas jasa Bung Karno. Sementara Roeslan Abdulgani sendiri masih tetap bekerja pada posisinya di Kantor Urusan Ekonomi pemerintah, yang telah dijabatnya sejak zaman pemerintahan Belanda.

Dalam situasi yang seperti itu, akhirnya Roeslan tidak lagi berkesempatan menempuh pendidikan formal. Selebihnya ia mengembangkan pengetahuannya dengan cara otodidak. Namun demikian wawasannya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, khususnya yang berkaitan dengan masalah kebangsaan, tidak kalah dengan cendekiawan yang berpendidikan formal. Hal ini dibuktikan dengan adanya anugerah tiga gelar Doktor Honoris Causa yang diperolehnya dari perguruan tinggi yang cukup dikenal di tanah air yakni

Universitas Padjadjaran Bandung (31 juli 1961), Universitas Airlangga Surabaya (10 November 1964), dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tetapi penulis tidak mendapatkan data mengenai waktu penganugerahannya. Tiga gelar Doktor Honoris Causa itu merupakan indikator bahwa Roeslan Abdulgani memiliki kemampuan akademik yang cukup memadai sehingga dapat menunjang karirnya dalam berbagai organisasi sosial dan politik yang ditekuninya, begitu pula ketika menduduki berbagai jabatan dalam struktur pemerintahan.

Kemampuan akademiknya itu pula yang membuat dirinya memperoleh kepercayaan untuk menjadi Guru Besar Tamu pada berbagai universitas luar negeri seperti di India, Belanda, Amerika, Australia, dan Mexico. Ia juga sering mendapat undangan dari berbagai perguruan tinggi dalam negeri untuk memberikan ceramah-ceramah dan kuliah-kuliah.

Hal lain yang tidak kalah penting perihal yang berhubungan dengan kemampuan akademiknya adalah Cak Roes dapat dengan mudah memahami dan menterjemahkan keinginan Presiden Sukarno untuk mewujudkan cita-cita pembentukan persatuan dan kesatuan bangsa yang populer dengan istilah *nation and character building*. Itulah sebabnya selama Bung Karno berkuasa dan khususnya yang berlangsung pada demokrasi terpimpin, Cak Roes banyak mendapat kepercayaan untuk menduduki berbagai jabatan penting.

Secara historis situasi kehidupan sosial dan politik pada era 1920-an kurang menguntungkan bagi tumbuh dan berkembangnya organisasi pergerakan nasional khususnya yang memiliki corak non-kooperatif. Pemerintah kolonial Belanda pada masa itu bertindak represif dengan melakukan penangkapan terhadap para pemimpin pergerakan, lebih-lebih yang berhaluan radikal.

Aktivitas Roeslan pada bidang organisasi sosial dan politik dimulai pada tahun 1926 sebagai anggota *National Indonesische Padvinderij* (Pramuka). Sejak masih menempuh pendidikan di MULO, Cak Roes sudah mulai aktif di Perkumpulan Jong Java, hingga organisasi ini berfusi atau meleburkan diri dalam Indonesia Muda pada tahun 1933. Pada tahun 1934 terpilih menjadi Ketua Indonesia Muda untuk Cabang Jawa Timur dalam usia yang relatif muda (20 tahun) untuk memimpin sebuah perkumpulan atau organisasi.

Selama tahun 1935-1938 ia mengajar di sekolah-sekolah swasta, antara lain: *Kweekschool Islamiyah, Indonesich Middelbare Vak en Handelsschool*, Perguruan Rakyat dan Kursus malam Taman Siswa. Tahun 1936-1937, ketika Pengurus Besar Indonesia Muda di Jakarta dipindahkan ke Surabaya karena alasan-alasan politik, ia terpilih melalui referendum sebagai Ketua Pengurus Besar organisasi tersebut. Tahun 1937-1941 menjalani aktivitasnya sebagai karyawan yayasan semi-pemerintah dibawah pimpinan Ir. Darmawan Mangunkusumo (adik dr. Tjipto Mangunkusumo), atas bantuan dr. Samsi (Menteri Keuangan RI pada masa itu). Semuanya dijalannya di kota kelahirannya Surabaya.

Pada zaman pendudukan Jepang (1942-1943), Roeslan diangkat menjadi Kepala Bagian Ekonomi dari organisasi yang dibentuk pemerintah pendudukan Jepang yaitu Poesat Tenaga Rakjat (POETERA). Tahun 1945-1946 ia mendapat kepercayaan sebagai Redaksi Majalah Bakti, juga dipercaya memimpin Angkatan Muda Indonesia sewaktu Proklamasi Kemerdekaan dan pertempuran Surabaya. Lingkungan pergerakan telah membentuk pribadi tokoh yang pernah menjadi Ketua IV DPP PNI ini, ketika Ketua Umum-nya dijabat oleh Ali Sastroamidjojo yang sama-sama berperan besar dalam Konferensi Asia-Afrika 1955 yakni Roeslan sebagai Sekretaris Jenderal dan Ali terpilih sebagai pimpinan sidang.

Keberhasilannya sebagai Sekjen dalam KAA 1955 di Bandung telah mendongkrak popularitasnya karena telah membawa bangsa Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menentukan percaturan politik dunia. Keberhasilan itu pulalah yang telah membawa dirinya mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Pada masa-masa sesudahnya karir Cak Roes semakin gemilang dibuktikan dengan berbagai jabatan yang pernah disandangnya, bahkan ia sering menerima jabatan rangkap dari Bung Karno.

Karir dan pekerjaan Cak Roes yang pernah dijalani selama hidupnya membentang sangat panjang. Tokoh ini memiliki semangat hidup, etos kerja, dan motivasi yang tinggi. Karakteristiknya ini dipertahankan hingga ketika usianya sudah tidak muda lagi yang ditunjukkan dengan kegemarannya membaca dan menulis, sekalipun tangannya bergetar manakala harus memegang pena. Tetapi kondisi itu bukan merupakan halangan baginya untuk tetap berkarya.

Tahun 1945 ia mengawali karirnya sebagai sekretaris gubernur Jawa Timur yang pada masa itu gubernurnya sendiri dijabat oleh Suryo. Ketika menduduki jabatan itu, ia pernah menghadiri pertemuan untuk suatu pembicaraan penting antara Mallaby dengan Sukarno, Hatta, dan Amir; bahkan mendapat tugas sebagai penghubung dengan pihak Inggris.<sup>59</sup> Apakah dalam *event* ini Sukarno mulai tertarik perhatiannya terhadap Cak Roes, tidak jelas benar. Tahun 1946-1947 Roeslan menjalani karir dan pekerjaannya sebagai Kepala Dinas Penerangan Rakyat Jawa Timur yang kantornya sempat diungsikan ke Malang. Jabatan Sekjen Kementerian Penerangan di Yogyakarta disandanginya tahun 1947-1949 karena ketika itu Ibukota RI dipindahkan dari Jakarta, dan pada 1950-1954 jabatan yang sama dijalaninya di Jakarta setelah Ibukota RI dikembalikan dari Yogyakarta. Ia mengalami peristiwa yang traumatis karena tertembak tentara Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Luka di tangan kanannya sangat parah, bahkan harus dioperasi berkali-kali dan setelah sembuh meninggalkan cacat yang permanen yaitu jari tangan kanannya hanya tiga sehingga tidak normal.

Tahun 1954-1956, ketika ia menjabat sebagai Sekjen Kementerian Luar Negeri berkesempatan mengikuti rombongan Presiden Sukarno ke Arab Saudi dan pada saat itu pula ia menunaikan ibadah Haji. Pada tahun berikutnya ia mengikuti perjalanan Presiden Sukarno ke Amerika, Canada, Eropa-Barat, Uni Soviet, Cekoslovakia, Mongolia dan RRC. Pada waktu itu ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri periode 1956-1957, dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II.<sup>60</sup> Ketika pemerintahan Sukarno membentuk Dewan Nasional, Cak Roes dipercaya menduduki jabatan Wakil Ketua (1957-1959). Setelah mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Nasional itu, pada 1959-1962 ia diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.

Karir politiknya terus menanjak hingga mencapai puncaknya ketika ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat, merangkap Menteri Penerangan (1962-1965). Kesetiiaannya telah membuat Bung Karno kembali memberinya posisi untuk duduk sebagai Anggota

<sup>59</sup> Lambert Giebels, (2001), *Soekarno, Biografi 1901-1950*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 390.

<sup>60</sup> P. N. H. Simanjuntak, *op. cit.*, hal. 163.

Presidium Kabinet dan Wakil Perdana Menteri Bidang Politik dalam Kabinet Dwikora II pasca meletusnya peristiwa Pemberontakan G 30 S/PKI (1965-1966).

Berakhirnya kekuasaan Presiden Sukarno pada tahun 1967, ternyata tidak serta-merta membuat karir Roeslan berakhir. Terbukti ia masih mendapat kepercayaan dalam Kabinet Ampera yang dibentuk pejabat Presiden Suharto untuk menduduki jabatan sebagai Duta Besar RI untuk PBB (1967-1971). Disinilah ia memperlihatkan minatnya yang sangat kuat dalam hal pendidikan sehingga di masa reses sidang PBB ia menyempatkan diri mengikuti kuliah di Hunter College dan Columbia.

Selain jabatan yang telah disebutkan itu, jabatan-jabatan lain yang pernah disandang semasa hidupnya antara lain: Anggota Dewan Pertahanan Nasional (Depernas), Anggota Dewan Keamanan Nasional, Wakil Ketua Dewan Nasional, Anggota Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), Menteri Penasehat Presiden, Penasehat Menteri Urusan Demobilisasi dan Veteran RI, Penasehat Menteri Luar Negeri, Wakil Panglima Besar Komando Operasi Tertinggi, Ketua dan Sekretaris Sekretariat Bersama Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955, Wakil Ketua Delegasi Indonesia ke Sidang PBB dan Konferensi Suez di London, Anggota Senat IKIP Bandung dan Universitas Padjadjaran, dan Ketua Umum Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI).

## 2.2 Sejarah Nasionalisme Indonesia

Perlawanan bangsa Indonesia terhadap eksploitasi kekayaan alam oleh bangsa asing sekalipun tidak dalam bentuk kolonialisme tetapi masih dilakukan oleh kongsi dagang swasta seperti VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie), telah dimulai sejak abad ke-17. Perlawanan yang dilakukan Sultan Agung dari Mataram (1628 dan 1629) dan Sultan Hasanuddin dari Makasar adalah merupakan contoh dari sekian banyak perlawanan yang pernah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Namun demikian, perlawanan ini masih bersifat lokal atau kedaerahan, negatif, irasional, dan belum memikirkan *follow up* atau tindak lanjut. Sifat-sifat perlawanan seperti ini berlangsung hingga akhir abad ke-19.

Pada awal abad ke-20, sifat-sifat perlawanan tersebut mengalami perubahan yaitu bersifat nasional, positif, rasional, dan telah memikirkan *follow up* atau

tindak lanjut. Perubahan sifat tersebut menunjukkan adanya perkembangan sejarah bangsa Indonesia dalam menghadapi bangsa asing atau penjajah. Bentuk perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, sifat lokal atau kedaerahan menggambarkan belum adanya rasa persatuan dan kesatuan, sedangkan sifat nasional adalah sebaliknya. Ancaman terhadap salah satu wilayah baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, dirasakan sebagai ancaman bagi wilayah yang lain. *Kedua*, sifat negatif ditunjukkan dengan cara berpindah tempat atau mengundurkan diri ke daerah yang tidak atau belum terjangkau oleh kekuasaan penjajah, sedangkan sifat positif dalam perlawanan dilakukan dengan senjata dan taktik yang modern berupa diplomasi. *Ketiga*, sifat irasional – hanya menggantungkan kepada seorang pemimpin yang karismatis dan apabila pemimpin itu tertawan atau terbunuh maka perlawanan segera berakhir, sedangkan sifat rasional dilakukan melalui organisasi pergerakan modern dan tidak mengandalkan seorang pemimpin saja. Lahirlah semboyan “patah tumbuh hilang berganti”, “esa hilang dua terbilang”, dan “mati satu tumbuh seribu”.<sup>61</sup> *Keempat*, *follow up* atau tindak lanjut belum dipikirkan, artinya apabila perlawanan yang dilakukan menghasilkan perubahan struktur masyarakat baru, belum terbayangkan seperti apa bentuknya; sedangkan *follow up* atau tindak lanjut telah dipikirkan, artinya masa depan bangsa sesudah perlawanan berhasil menumbangkan struktur masyarakat lama dan membentuk struktur masyarakat baru maka bentuk susunan pemerintahan, penataan kehidupan ekonomi, penyelenggaraan pendidikan dan bidang yang lain telah dipikirkan sebelumnya.<sup>62</sup> Demikian latar belakang sejarah pertumbuhan dan perkembangan perlawanan bangsa Indonesia yang merupakan benih nasionalisme.

Kapan dimulainya nasionalisme Indonesia tidak dapat disebutkan atau diperkirakan secara tepat. Ini merupakan suatu fase yang baru mulai disebut-sebut dengan jelas dan terorganisir pada dasawarsa kedua abad ke-20.<sup>63</sup> Jika pendapat Kahin ingin dijadikan rujukan, maka pendapat tersebut dapat didukung dengan analisis tentang kehidupan sosio-kultural masyarakat kampung di Surabaya yang mungkin juga terjadi di daerah-daerah lainnya. Pada masa itu

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> George Mc. Tuman Kahin, *op. cit.*, hal. 54.

nasionalisme telah menemukan tambatannya yakni organisasi-organisasi pergerakan modern dengan para pemimpin muda yang pada umumnya berasal dari kalangan terpelajar.

Lebih lanjut Kahin mengidentifikasi karakteristik nasionalisme Indonesia yang membedakannya dengan nasionalisme lain khususnya yang tumbuh dan berkembang di barat. Salah satu keunikan nasionalisme Indonesia bahwa sejarah pertumbuhannya dibentuk oleh lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang dimaksud Kahin adalah alam Indonesia abad kedupuluh yang melahirkan suatu tahap yang jelas dan konkrit dalam nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia kontemporer terutama berakar dalam keadaan negeri ini pada abad kedupuluh, namun beberapa dari akar-akarnya berasal dari lapisan sejarah yang jauh lebih tua.<sup>64</sup>

Beberapa faktor penting yang mendukung pertumbuhan nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya derajat homogenitas agama di Indonesia yakni lebih dari 90% penduduknya beragama Islam. Bagi bangsa Indonesia Islam benar-benar merupakan semacam simbol kelompok-dalam (*in-group*) untuk melawan gangguan asing dan penindas suatu agama yang berbeda.<sup>65</sup>
- b. Perkembangan bahasa persatuan Hindia kuno, bahasa Melayu Pasar, menjadi suatu bahasa nasional. Bahasa ini memasuki pasar dan membantu aliran Islam mematahkan kecenderungan orang Indonesia memiliki nasionalisme yang picik,<sup>66</sup> berpikiran sempit dan fanatik.
- c. Akibat dibentuknya *Volksraad* (Majelis Rakyat), majelis perwakilan tertinggi bagi seluruh Indonesia. Badan ini cenderung mengembangkan dalam diri mereka suatu kesatuan yang lebih meyakinkan, yang menggabungkan nasionalisme mereka secara lebih erat.<sup>67</sup> Di tempat ini para pemimpin dari berbagai organisasi bertemu dan bertukar pikiran sehingga merasa senasib.
- d. Penyebaran gagasan akibat berkembangnya suatu surat kabar yang memakai bahasa sehari-hari dan radio juga telah merangsang pertumbuhan dan

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 1.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 50.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 51.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 52.

persebaran nasionalisme.<sup>68</sup> Melalui surat kabar dan radio para pemuda dan kaum pergerakan terinspirasi oleh adanya peristiwa-peristiwa dunia yang mendorong timbulnya semangat nasionalisme.

Sedikit berbeda dengan Kahin, D.G.E. Hall, seorang guru Besar Emiritus Sejarah Asia Tenggara Universitas London, menyatakan bahwa nasionalisme Indonesia mulai tumbuh pada awal abad ke-20 mendapat pengaruh dari peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah dunia seperti Pemberontakan Boxer di Cina, pemberontakan orang-orang Philipina menentang Spanyol, dan kebangkitan Jepang tak dapat dipungkiri ikut memainkan peranan yang cukup penting dalam proses lahirnya nasionalisme Indonesia.<sup>69</sup> Bahkan Hall menambahkan bahwa penyair India Rabindranath Tagore dan Mahatma Gandhi ikut mengilhami. Hall juga mengutip pendapat Colenbrander yang menyatakan; “Islam adalah pengikat dan lambang tindakan bersama melawan bangsa-bangsa lain.”<sup>70</sup>

Hans Kohn mengidentifikasi bahwa bangkitnya nasionalisme Asia pada abad ke-20 antara lain dipengaruhi oleh pola pemikiran Barat terutama tentang cara-cara mengenai organisasi politik dan ekonomi. Ideologi Barat tentang kebebasan dan rasionalitas yang berkembang sejak pasca abad pertengahan dan dibawa masuk ke dunia Timur mulai abad ke-19 telah berpengaruh terhadap keinginan melepaskan diri dari gaya hidup yang terkungkung oleh adat.<sup>71</sup> Demikian Barat telah mempengaruhi dunia Timur dalam hal nasionalisme. Meskipun tidak secara langsung menyebut nama Indonesia, tetapi secara implisit penyebutan kata Asia telah menunjukkannya.

Sebelum nasionalisme berkembang menjadi sebuah paham yang dianut oleh seluruh negara di dunia, yang berlangsung selama berabad-abad yang lalu, kesetiaan tertinggi individu tidak diserahkan kepada negara kebangsaan, melainkan kepada pelbagai macam bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik atau raja feodal, dan kesatuan ideologi seperti misalnya suku atau clan, negara

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 54.

<sup>69</sup> D.G.E. Hall, (tt.), *Sejarah Asia Tenggara* (Diterjemahkan oleh: Drs. I.P. Soewarsha), Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, hal. 704.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 705.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 102.



kota, gereja atau golongan keagamaan.<sup>72</sup> Negara kebangsaan yang dimaksud oleh Kohn adalah tanah tumpah darah, tanah air, tanah kelahiran, atau dalam istilah yang lain disebut ibu pertiwi. Artinya sebuah negara di mana seseorang dilahirkan. Oleh karena itu nasionalisme dapat pula diartikan sebagai cinta tanah air. Manifestasi dari rasa cinta tanah air adalah rela berkorban dengan segenap jiwa dan raga apabila tanah airnya menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar, termasuk penindasan kolonialisme-imperialisme.

Sementara itu Sartono Kartodirdjo, sejarawan Universitas Gajah Mada memandang bahwa nasionalisme yang tumbuh dan berkembang di Indonesia pada dasarnya sama dengan nasionalisme yang tumbuh dan berkembang di negara-negara Asia Tenggara. Dalam pandangan Sartono, nasionalisme Indonesia merupakan manifestasi dari gerakan antitesis kolonial. Untuk dapat menemukan aspek analitis dari nasionalisme sehingga dapat digunakan sebagai konstruksi konseptual untuk lebih menjelaskan keadaan nasionalisme, dapat dilakukan dengan pendekatan multidimensional. Struktur analitis, seperti nasionalisme kebudayaan, nasionalisme ekonomi, nasionalisme politik, mempunyai hubungan langsung dengan ciri-ciri tertentu pada nasionalisme Indonesia.<sup>73</sup>

Secara konkrit sejarah perkembangan nasionalisme Indonesia dapat diikuti melalui pelaku sejarahnya. Bung Karno misalnya, ketika menyampaikan pidato pembelaan di depan Pengadilan Kolonial Bandung pada tahun 1930, ia mengutip sebuah nyanyian yang terdapat dalam kitab *Bagawat Gita*.<sup>74</sup>

“Ketahuilah, senjata tiada menyinggung hidup;  
 Api tiada membakar, tiada air membasahi,  
 Tiada angus oleh angin yang panas.  
 Tiada tertembusi,  
 Tiada terserang, tiada terpijak dan merdeka  
 Kekal abadi, di mana-mana, tetap tegak,  
 tidak nampak, terucapkan tiada,  
 Tiada terangkum oleh kata, pikiran, senantiasa pribadi tetap-  
 Beginulah disebut *jiwa*”

Pidato itu – selengkapnya – kemudian dibukukan dan diberi judul *Indonesia Menggugat*.

<sup>72</sup> Hans Kohn, (1961), *Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya* (Terjemahan Sumantri Mertodipuro), Jakarta: P.T. Pembangunan, hal. 11.

<sup>73</sup> Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hal. 226-260.

<sup>74</sup> Sukarno, (1985), *Indonesia Menggugat, Pidato Pembelaan Bung Karno di Depan Pengadilan Kolonial Bandung, 1930*, Jakarta: Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno, hal. 106.

Di hadapan hakim yang diketuai oleh Mr. Siegenbeek van Heukelom dengan jaksa penuntut R. Sumadisurja, Bung Karno menunjukkan bahwa nasionalisme itu adalah *jiwa* dari sebuah bangsa. Dan bahwasanya yang dimaksud dengan jiwa bangsa itu adalah semangat rakyat, dan jika semangat rakyat itu telah tersusun serta menyala-nyala berkobar-kobar, tidak ada satu kekuasaan duniawi yang bisa membinasakannya. PNI yakin bahwa, jika sudah menggenggam semangat yang demikian itu, akan dapat mencapai atas segala apa yang diinginkan, tidak perlu pedang, tidak perlu bedil, tidak perlu bom ataupun meriam, demikian pernyataan Bung Karno.<sup>75</sup>

Dalam pandangan Bung Karno, nasionalisme adalah nyawanya pembentukan kekuasaan. Untuk itu ia mengungkapkan:

“PNI oleh karenanya, tak berhenti-hentinya menyubur-nyuburkan semangat rakyat itu. Semangat tiap-tiap rakyat yang disengsarakan oleh suatu keadaan, baik rakyat proletar di negeri-negeri industri, maupun rakyat di tanah-tanah jajahan, adalah *semangat ingin merdeka*. Nah, kami menyuburkan semangat ingin *merdeka* itu pada rakyat Indonesia. Kami menyuburkannya *tidak terutama* dengan keinsafan *kelas* sebagai pergerakan kaum buruh umumnya, tetapi terutama dengan keinsafan *bangsa*, dengan keinsafan *nasionaliteit*, dengan *nasionalisme*. Sebab tiap-tiap rakyat yang dikuasai oleh bangsa *lain*, tiap-tiap rakyat jajahan, tiap-tiap rakyat yang saban hari, saban jam, merasakan imperialisme *bangsa lain*, - tiap-tiap rakyat yang diperintah secara jajahan demikian itu, adalah berbudi akal nasionalistis. Rasa pertentangan, yang di Eropa atau di Amerika, berwujud rasa pertentangan *kelas*, oleh karena kaum yang berkuasa dan kaum yang dikuasai di sana terdiri dari *satu bangsa*, satu kulit, satu rasa, - rasa pertentangan itu di suatu negeri jajahan adalah menyatu dengan pertentangan *nasionaliteit*. Bukan terutama rasa pertentangan si buruh terhadap si kapitalis, bukan terutama rasa pertentangan kelas yang kita alami dalam suatu negeri jajahan, tetapi, rasa pertentangan si hitam terhadap si putih, si Timur terhadap si Barat, si terjajah terhadap si penjajah.”<sup>76</sup>

Jika ditinjau dari faktor yang menjadi penentu timbulnya nasionalisme, maka Bung Karno nampaknya mengagungkan jiwa atau semangat sebagai faktor subyektif yang paling menentukan irama dan gerak nasionalisme di Indonesia. Dalam hal ini terlihat bahwa Bung Karno terinspirasi pandangan Ernest Renan yang sering dijadikan rujukan dalam pidato-pidatonya.

Pada bagian lain dari pidato pembelaannya itu, Bung Karno mengatakan bahwa rakyat Indonesia telah mengalami kebangkitan sejak 1908. Bagi Bung Karno, arti penting peristiwa 1908 adalah terjadinya perubahan pola pikir dalam perjuangan menentang kolonialisme dan imperialisme Belanda. Bahwa sejak itu rakyat Indonesia tidak lagi mempercayai adanya mitos atau ramalan-ramalan

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 107.

yang dikenal dengan Jangka Jayabaya. Menurut sabda Prabu Jayabaya bahwa rakyat akan mendapatkan kebebasannya setelah datangnya “Ratu Adil” yang bergelar “Imam Mahdi” atau “Heru Cakra” yang diyakini khususnya oleh masyarakat Jawa.<sup>77</sup> Bahwa sejak itu telah terjadi perubahan besar dengan membangun suatu kesadaran tentang pentingnya membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan modern. Hal ini terjadi terutama didorong oleh perubahan yang mendahuluinya yaitu kemajuan pendidikan. Pada umumnya organisasi-organisasi pergerakan didukung oleh kaum terpelajar yang kemudian menjadi basis perjuangan, sehingga mereka juga dikenal sebagai kaum pergerakan. Namun demikian, semangat nasionalisme tidak hanya terdapat dalam jiwa kaum pergerakan itu. Justru tugas utama dari kaum pergerakan adalah membangunkan jiwa atau semangat seluruh rakyat Indonesia untuk menentang kolonialisme dan imperialisme Belanda.

Mohammad Hatta, pelaku sejarah yang dalam periode (1945-1956) dimitoskan sebagai tokoh “dwitunggal” bersama Bung Karno, dua tahun sebelumnya menunjukkan hal serupa dengan yang terjadi dan dilakukan oleh Bung Karno. Di depan mahkamah Belanda di Den Haag bulan Maret 1928 ia menjelaskan keterlibatan para mahasiswa dalam aksi-aksi politik radikal menentang kolonialisme yang menyebabkan penderitaan rakyat Indonesia, sebagai berikut:

“Di Barat, pemuda-pemuda intelektual pada Universitas-universitas mempersiapkan diri untuk kegiatan di bidang politik dan kemasyarakatan di kemudian hari. Di Indonesia kegiatan itu sudah dimulai tatkala pemuda-pemudanya masih duduk di bangku sekolah. Organisasi-organisasi seperti “Jong Java”, “Jong Sumatranen Bond”, “Jong Ambon”, “Jong Islamieten Bond”, “Indonesia Muda” dan lain-lain, semua organisasi itu lahir dalam ruangan kelas sekolah-sekolah menengah.

Mengapakah demikian? Untuk dapat mengerti kenyataan itu, haruslah diingat, bahwa pemuda-pemuda tidak mendidik diri sendiri, melainkan *dididik* dalam kondisi dan situasi di mana ia tumbuh dan berkembang, dan dalam masyarakat di mana ia berada. Dalam masyarakat kolonial, pemuda itu cepet sekali mengalami kenyataan yang keras dan pahit. Ia melihat dengan mata kepala sendiri kesenangan oleh massa rakyat yang tertindas. Ia melihat bagaimana massa rakyat itu bermula menerima saja nasibnya yang nestapa itu, bagaimana selama berpuluh-puluh tahun ia menyerah saja pada siksaan-siksaan dari suatu sistem yang pada suatu waktu pasti akan tenggelam. Pemuda itu merasakan dan mengkaji duka dan sengsara rakyat. Itulah sebabnya mengapa hampir semua organisasi pemuda di Indonesia mencantumkan dalam programnya tujuan sebagai berikut: *Peningkatan kesejahteraan rakyat*. Dalam segala kejujurannya, pemuda-pemuda itu menyadari sepenuhnya penindasan rakyat oleh pemerintah asing. Pemuda-pemuda itu benar-benar

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 68.

merasakan hinaan karena dijajah. Masa media penguasa kulit putih, dan tindakan mereka yang angkuh terhadap bangsa yang dijajah, mengingatkan pemuda-pemuda itu betapa nistanya rakyat yang tidak merdeka. Itulah sebabnya putera-putera bangsa yang tidak merdeka itu, sejak dari usia mudanya, telah bergumul dengan pikiran-pikiran yang tidak dialami oleh pemuda-pemuda Barat yang sebaya mereka.”<sup>78</sup>

Tak dapat dipungkiri, Bung Karno dan Mohammad Hatta adalah dua tokoh terkemuka yang terlibat langsung dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Kedua tokoh ini sama-sama memiliki pengalaman historis menghadapi pengadilan kolonial dengan tuduhan-tuduhan yang sulit dibuktikan secara hukum. Walaupun tidak dapat dibuktikan kesalahannya, namun keduanya menjalani pembuangan. Oleh pemerintah kolonial Belanda, Bung Karno dibuang mula-mula ke Ende, Flores, kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Sedangkan Hatta mengalami pembuangan ke Boven Digul, kemudian ke Bandaneira, dan akhirnya ke Sukabumi. Keduanya kemudian menjadi penentu bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia karena memiliki pengaruh yang luar biasa. Bung Karno adalah seorang orator ulung yang kharismatik sehingga mampu menggerakkan massa. Sementara Hatta seorang analis sosial, ekonomi, dan politik yang cerdas yang juga memiliki basis massa yang cukup kuat. Keduanya kemudian mengambil jarak lebih lunak ketika terjadi pergantian pemerintahan penjajah dari Belanda kepada Jepang. Suatu hal yang memberinya cap sebagai *kolaborator*.

Akhirnya sejarah membuktikan bahwa langkah strategis yang diambil kedua tokoh ini menuai hasil positif. Setelah mendapat kesempatan memimpin organisasi bentukan Jepang yang diberi nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dalam istilah Jepang disebut *Docuritzu Zunbi Iinkai*, keduanya membawa bangsa Indonesia ke puncak perjuangan nasionalismenya yakni mencapai “Indonesia Merdeka.”

Pengalaman lain tentang perkembangan sejarah nasionalisme Indonesia, diungkapkan oleh A. Dahlan Ranuwihardjo. Seorang pelaku sejarah yang menjadi saksi ketika semangat nasionalisme Indonesia sedang mengalami perkembangan. Ia mengemukakan pendapatnya bahwa karakteristik dari nasionalisme Indonesia adalah:

- “1. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme rakyat yang religius dan beragama. Agama mengajarkan untuk menentang kemungkaran dan kedholiman, dan kapitalisme/kolonialisme adalah kedholiman maka harus ditentang.

<sup>78</sup> Mohammad Hatta, (1976), *Indonesia Merdeka*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, hal. 12.

2. Nasionalisme Indonesia tidak berorientasi kepada apa yang dinamakan kemegahan dan kebesaran (*national glories and grandeurs*), seperti yang terjadi pada nasionalisme Barat yang ekspansionistik.
3. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalismenya masyarakat pluralis yang primordialnya berwarnakan perbedaan suku, agama, dan keturunan namun telah melewati perjuangan menentang kolonialisme.
4. Semuanya terumuskan dalam Trilogi Nasionalisme Indonesia, yaitu (i) satu nation: Bangsa Indonesia; satu Negara nasional: Negara Republik Indonesia; (iii) satu ideologi nasional: Pancasila.<sup>79</sup>

Dari beberapa pendapat dan pandangan tentang nasionalisme yang tumbuh dan berkembang di Indonesia tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan, sebagai berikut:

*Pertama*, apabila dilihat dari waktu tentang kapan nasionalisme Indonesia mulai tumbuh, tidak dapat ditentukan dengan tepat. Tetapi diperkirakan sejak akhir abad 19 sampai dasawarsa ketiga abad 20, merupakan rentang waktu bagi akar sejarah nasionalisme Indonesia dalam pengertian modern. Sedangkan benih-benihnya telah tumbuh jauh sebelumnya. *Kedua*, apabila dilihat dari unsur-unsur pembentuknya, maka terdapat dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya berupa homogenitas agama, berkembangnya bahasa persatuan, dibentuknya *Volksraad*, dan berkembangnya surat kabar lokal dan radio. Feodalisme yang berlangsung sangat lama juga merupakan faktor internal yang ikut mendorong timbulnya nasionalisme Indonesia. Karena pada dasarnya nasionalisme adalah memindahkan rasa kesetiaan seseorang yang semula diserahkan kepada raja feodal dialihkan kepada negara kebangsaan. Kemudian faktor eksternalnya dipengaruhi oleh Pemberontakan Boxer di Cina, perjuangan rakyat Philipina melawan Spanyol, kebangkitan Jepang (mungkin yang dimaksud adalah kemenangan Jepang atas Rusia 1905), juga diilhami oleh pemikiran-pemikiran Rabindranath Tagore dan Mahatma Gandhi. Faktor eksternal yang lain adalah pengaruh dari pola pemikiran Barat, terutama dalam bidang politik dan ekonomi.

*Ketiga*, dari pengalaman sejarah secara empiris, nasionalisme Indonesia tumbuh dari adanya kesadaran untuk membangun semangat persatuan dan kesatuan menghadapi musuh bersama yaitu kolonialisme-imperialisme Belanda. Bahwa faktor pendidikan memiliki pengaruh yang cukup kuat, terbukti semangat

---

<sup>79</sup> Viva Yoga Mauladi (ed.), (2002), *A. Dahlan Ranuwihardjo: Revolusi, Anti Imperialisme, dan Pancasila*, Jakarta: INTRANS Institute for Transformation Studies, hal. iii dan 141-144.

nasionalisme Indonesia digerakkan oleh golongan terpelajar. Dan akhirnya, nasionalisme Indonesia bermuara pada hasrat untuk mewujudkan masyarakat nasional yang mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan yang diikat dengan satu ideologi yaitu Pancasila.

Berdasarkan rentang waktu sejarah terbentuknya, maka pada awalnya nasionalisme Indonesia bertujuan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan kolonialisme-imperialisme Belanda dan membentuk negara nasional yang merdeka. Namun terwujudnya negara merdeka bukan merupakan tujuan akhir dari nasionalisme Indonesia. Munculnya semangat primordialisme yang melahirkan gerakan separatis, adanya dikotomi tentang penduduk asli dan tidak asli, perbedaan-perbedaan ideologi dalam berpolitik, dan keanekaragaman suku, bahasa, budaya maupun perbedaan-perbedaan lain menjadi tantangan baru bagi nasionalisme Indonesia. Disinilah Roeslan diuji kemampuannya untuk memahami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kebangsaan.

Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya bagi bangsa Indonesia, nasionalisme senantiasa relevan dengan semangat zaman. Suatu hal yang membedakannya dari masa ke masa tentang nasionalisme Indonesia itu adalah persoalan-persoalan yang dihadapinya. Kapan pun dan dalam situasi seperti apa pun bangsa Indonesia membutuhkan semangat persatuan dan kesatuan, bekerja sama, bergotong royong, rasa solidaritas, toleransi, semua itu merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam semangat kebangsaan, semangat nasionalisme.

Sebuah majalah *Sejarah (Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi)*, Edisi 4 yang terbit di bulan November 1993 memuat hasil wawancara yang dilakukan oleh JR. Chaniago dengan Roeslan Abdulgani dan telah ditranskripsi. Ada hal menarik dari wawancara itu, meskipun temanya tentang “peran partai politik dalam demokrasi” tetapi Cak Roes mengaitkan dengan masalah nasionalisme. Nasionalisme sepertinya telah menyatu dengan jiwanya, tak lapuk dan tak lekang ditelan zaman. Zaman boleh berubah tetapi nasionalisme tetap relevan dan diperlukan dalam segala situasi dan kondisi bangsa. Tentang hal ini, JR. Chaniago mengungkapkan:

“Menurut Roeslan Abdulgani, masa Pergerakan Nasional itu antara lain telah menjadi cikal bakal baginya dalam melakukan pencarian dan penemuan berbagai pemikiran mengenai demokrasi yang kemudian dikembangkannya secara terus-menerus pada masa Indonesia merdeka. Karena itu bukan sesuatu yang ganjil jika secara tegas beliau mengatakan bahwa

“demokrasi itu bukanlah tujuan, tetapi hanyalah sekadar alat untuk mencapai tujuan”. Dulu, katanya, masa Pergerakan Nasional partai-partai politik adalah alat perjuangan rakyat melawan kolonialisme. Ia berfungsi sebagai pembangkit semangat nasionalisme yang berkerakyatan dan humanistik. Partai-partai politik itu juga mencerminkan dan memancarkan jiwa percaya pada diri sendiri, dan jiwa nasionalisme yang herois.”<sup>80</sup>

Bagian terpenting dari kutipan tersebut bahwa demokrasi bukanlah tujuan tetapi hanya sekadar alat untuk mencapai tujuan. Penulis berpendapat bahwa demokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah sebuah pilihan. Artinya demokrasi alat yang terbaik dan elegant, tidak menghalalkan segala cara, tidak mengorbankan kepentingan umum, sebab kepentingan umum justru merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui demokrasi itu yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

### 2.3 Nasionalisme dalam Diri Roeslan Abdulgani

Berpijak pada rentang waktu terbentuknya nasionalisme Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti telah disebut pada bagian sebelumnya, maka semangat nasionalisme yang tumbuh dalam diri Roeslan Abdulgani dapat ditelusuri dari perjalanan sejarah yang melatarbelakangi kehidupan sosialnya. Roeslan Abdulgani mulai tertarik dengan masalah-masalah kebangsaan sejak masih duduk di bangku sekolah pada tahun 1920-an. Lingkungan sosial yang menempatkannya dalam kelompok priyayi baru di kampungnya Plampitan, Surabaya telah mendorongnya untuk menentukan pilihan hidupnya. Ia memilih diberhentikan dari sekolahnya untuk tetap bisa beraktivitas dalam kegiatan politik. Posisinya sebagai ketua Indonesia Muda, organisasi sayap PNI merupakan pantulan dari semangat nasionalismenya. Sebab di zaman penjajahan kolonial, memimpin sebuah organisasi pergerakan – lebih-lebih yang bersifat radikal – merupakan pekerjaan yang sangat mengandung resiko.

Sesungguhnya dari riwayat singkat Roeslan Abdulgani – dapat dilihat kembali pada bagian terdahulu – telah memberikan gambaran bahwa semangat nasionalisme yang ada pada dirinya dimulai sejak muda dalam lingkungan keluarga. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa keterlibatannya dalam peristiwa besar 10 November 1945 di Surabaya menjadi bagian terpenting bagi

<sup>80</sup> Hasil wawancara JR. Chaniago dengan Roeslan Abdulgani dimuat dalam majalah *Sejarah (Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi)*, Edisi 4, November 1993, hal. 51-55.

perjalanan sejarahnya, khususnya untuk melihat semangat nasionalismenya. Ia menggabungkan diri dalam suatu gerakan pemuda yang menamakan dirinya *arek-arek Surabaya* untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa 10 November 1945 yang menggemparkan dunia itu telah menjadi bagian dari perjuangan yang pernah dilakukan, dan merupakan cerminan dari semangat nasionalisme pemuda Surabaya pada umumnya dan khususnya dalam diri Roeslan Abdulgani. Peristiwa ini telah mengendap dalam ingatannya, dan senantiasa memberi inspirasi sepanjang hayatnya.

Pada tahun 1958, dalam rangka peringatan 10 November Cak Roes menulis untuk sebuah penerbitan majalah *Brawidjaja* dengan tajuk “Mengenangkan Surabaya”. Dalam tulisannya itu, ia mengenangkan tentang peristiwa yang pernah terjadi di Surabaya pada 10 November 1945. Dalam pandangannya peristiwa tersebut, adalah suatu tanggal tanpa dokumen tapi dirayakan dimana-mana di seluruh penjuru pelosok tanah air, dan dengan begitu telah menambah peristiwa dalam sejarah bangsa Indonesia setelah Hari Proklamasi Kemerdekaan, tanggal 17 Agustus dan Hari Angkatan Perang, tanggal 5 Oktober, kemudian sekarang bertambah dengan Hari Pahlawan, tanggal 10 November.<sup>81</sup>

Dalam sebuah buku yang memuat himpunan tulisan dan sambutan Roeslan Abdulgani, terdapat sambutannya untuk Penerbitan Istimewa Harian “Tempo” Semarang yang disampaikannya bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November 1961 berjudul *Amal dan Perbuatan Menentukan Nilai dan Mutu Kepahlawanan*. Bagian yang penulis anggap penting dari sambutannya itu adalah:

“... bila dibandingkan dengan perjuangan-perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa lain, maka rakyat kita tidak tergolong bangsa yang memperoleh begitu sadja kemerdekaannya dari tangan si-pendjadjah, melainkan kita semua harus berdjuaang, dan berkorban untuk kemerdekaan itu. Kemerdekaan kita harus kita bajar dengan duka-derita, djerih-pajah, tjutjuran keringat dan tjutjuran air-mata; dan djuga dengan penumpahan darah.”<sup>82</sup>

Dari kutipan tersebut, tidak perlu diinterpretasikan, penulis langsung menangkap makna tentang betapa besar pengorbanan yang dilakukan oleh para pejuang bangsa khususnya dalam peristiwa pertempuran yang terjadi di Surabaya. Pernyataan tersebut bahkan dipertajam pada bagian yang lain yakni:

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 46.

<sup>82</sup> Roeslan Abdulgani, (1963), *Api Revolusi Tetap Berkobar*, Departemen Penerangan RI, hal. 40.



“Kota Surabaya, tempat lahirnja Hari Pahlawan, lama kelamaan tidak lagi mempunyai arti local-historis, atau local-geografis; melainkan dalam kota Surabaya telah berpadu persatuan bulat antara pemuda-pemuda dari seluruh Nusantara; antara pemuda dan rakjatnja; antara Tentara, Lasjkar Rakjat dan kaum buruh serta kaum taninja; antara kaum intelek-revolusioner dengan massa revolusioner; antara Pemerintah Revolusioner dengan semua lapisan masjarakat kita; pokoknja didalam pertempuran-pertempuran itu, maka kota Surabaya adalah Indonesia dalam lokalitet ketjil, jang semangatnja adalah semangat Revolusinja seluruh Rakjat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.”<sup>83</sup>

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa peristiwa Surabaya telah mengilhami timbulnya peristiwa-peristiwa penting lain yang terjadi di berbagai daerah seperti Bandung, Semarang, Ambarawa, dan Magelang. Itulah sebabnya Roeslan menyebut Surabaya adalah Indonesia dalam lokalitet kecil. Surabaya adalah miniaturnya Indonesia dalam konteks menumbuhkan semangat juang demi mempertahankan kemerdekaan yang telah diraihinya. Bahkan meletusnya peristiwa “Bandung Lautan Api” disebabkan antara lain terprovokasi oleh peristiwa Surabaya tersebut.

Hal senada ditunjukkan ketika dalam sebuah kesempatan menyampaikan makalah untuk acara lokakarya yang diselenggarakan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional pada tahun 1981. Dalam kesempatan tersebut, Cak Roes mengemukakan pendapatnya tentang nasionalisme yang terinspirasi peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, yaitu:

“Nasionalisme dalam arti-kata yang suci murni, yaitu percaya kepada kekuatan bangsanya sendiri; bangga tergolong sebagai bangsa Indonesia; setia kawan dan solider kepada nasib bangsanya; tak bersedia dijajah, dihina dan diperas oleh bangsa lain dan ingin menentukan nasib bangsa sendiri sesuai dengan kebudayaan dan wataknya sendiri. Pokoknya nasionalisme sebagai suatu *state of mind*, suatu sikap kejiwaan yang menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan kepada kekuatan bangsa sendiri.”<sup>84</sup>

Dalam pandangannya itu, Cak Roes secara spesifik memberi arti nasionalisme bagi setiap individu sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nampaknya dengan konsepnya itu, ia ingin memberikan pemahaman mengenai arti kata nasionalisme yang lebih sederhana dibanding teori-teori besar yang populer dalam buku-buku sejarah. Konsep nasionalisme yang didasarkan atas tinjauan empiris dan praktis, didasarkan atas tinjauan pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal. 41.

<sup>84</sup> Roeslan Abdulgani, (1981), “Semangat dan Jiwa Kepahlawanan dalam Peristiwa 10 November 1945 untuk Kelanjutan Pembinaan Bangsa” dalam *Pemikiran Biografi, Kepahlawanan dan Kesejarahan; suatu kumpulan prasaran pada berbagai lokakarya*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, hal. 184.

menghadapi kolonialisme dan imperialisme Barat. Menurut Cak Roes bahwa semangat nasionalisme telah menjadi kekuatan pendorong dalam perjuangan menentang kolonialisme dan imperialisme Barat dengan dilandasi oleh jiwa patriotisme. Demikian lebih jauh ia menerangkan dengan memberikan contoh tentang meletusnya peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, di mana dirinya terlibat secara langsung.

Bahkan di tahun 1981, 36 tahun setelah peristiwa 10 November di Surabaya terjadi, dalam sebuah kegiatan lokakarya yang diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Cak Roes menyajikan makalah dengan judul: "Semangat dan Jiwa Kepahlawanan dalam Peristiwa 10 November 1945 untuk Kelanjutan Pembinaan Bangsa." Dalam makalahnya itu Cak Roes mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa bahwasanya konsep *nation and character building* tidak hanya dibutuhkan ketika kita menghadapi ancaman dari luar saja, melainkan dibutuhkan pula di medan pembangunan. Kutipan dari makalah itu adalah:

"...jiwa kepahlawanan/heroisme itu tidak hanya diperlihatkan oleh rakyat dan pemuda kita di medan pembelaan saja, tetapi juga di medan pembangunan, dan di segala bidang. Tidak hanya di bidang pembangunan sosial-ekonomi, tetapi juga di bidang pembangunan bangsa dan watak bangsa (*nation and character building*) di bidang pembangunan Negara (*State-building*) dengan atribut-atribut kedaulatannya, seperti Tentara sendiri, Hubungan Luar Negeri sendiri dan Mata keuangan sendiri. Sebab juga di medan pembangunan di segala bidang ini diperlukan semangat *sepi hing pamrih rame hing gawe* berdasarkan Pancasila kita."<sup>85</sup>

Demikian peristiwa 10 November 1945 yang meletus di Surabaya telah mempengaruhi dan membentuk semangat nasionalisme seorang Roeslan Abdulgani.

Jika ditinjau dari perspektivisme individual, dalam proses sejarah tertanamnya semangat nasionalisme sangat dipengaruhi oleh peran individu sebagai faktor penentu. Dalam konteks peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, semangat nasionalisme dan patriotisme pemuda dan rakyat Surabaya tidak terlepas dari keberhasilan seorang pemuda Sutomo melalui pidato-pidato radionya yang heroik dan patriotik. Cak Roes pun memiliki peranan yang cukup penting dalam peristiwa 10 November itu, sehingga dalam perjalanan sejarah kedepan ia dapat memberi makna tentang arti penting peristiwa tersebut terhadap

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 187.

pembangunann bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*).<sup>86</sup> Jiwa yang oleh Sukarno diberi makna sebagai semangat rakyat tidak akan bangkit jika tidak ada individu yang membangunkannya.

Bagi Cak Roes, peristiwa 10 November 1945 yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Pahlawan memiliki makna yang sangat dalam. Peristiwa itu merupakan sebuah momentum sejarah yang mengandung nilai bagi penanaman nilai-nilai *nation and character building*. Itulah sebabnya dalam setiap momentum peringatan Hari Pahlawan, melalui tulisan dan sambutan-sambutan yang disampaikannya, Cak Roes senantiasa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di mata Cak Roes peristiwa 10 November di Surabaya bukanlah peristiwa biasa. Meskipun peristiwa itu terjadi pada tingkatan lokal, tetapi pengaruhnya sangat besar di tingkat nasional. Dengan janji kesetiannya, pemuda dan rakyat Surabaya ingin membuktikan baik pada tataran tingkat lokalnya maupun pada tataran tingkat nasionalnya. Pada tingkat lokal, mereka ingin membuktikan kesetiannya yang terjalin dalam nama kota yakni "Surabaya" seperti telah dijelaskan di bagian depan. Sedangkan pada tingkat nasional, mereka ingin membuktikan kesetiannya terhadap semboyan: "Merdeka atau Mati." Demikian Cak Roes memberi makna pada peristiwa 10 November.

Bagi penulis, apa yang telah dilakukan Cak Roes melalui pidato, sambutan, tulisan yang telah disampaikan dalam berbagai kesempatan; baik dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara maupun sebagai bagian dari masyarakat Surabaya itu sendiri telah memberikan penguatan terhadap predikat nasionalisme yang disandangnya. Di samping itu, penulis juga berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan Cak Roes merupakan bentuk semangat nasionalisme yang melekat pada dirinya.

Peristiwa lain yang ikut membentuk semangat nasional Cak Roes semakin kokoh adalah penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. Dalam KAA yang merupakan forum bersejarah bagi masa depan bangsa-bangsa Asia dan Afrika itu, Cak Roes mendapat kepercayaan dari Presiden Sukarno untuk bertindak sebagai Sekretaris Jenderal. Sebagai Sekjen tentu ia

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

harus mengetahui berbagai agenda perhelatan besar yang berlangsung dari tanggal 18 – 24 April 1955 itu, bahkan ia diminta oleh Bung Karno untuk memberikan sumbangan pendapat. Tentang hal ini Cak Roes mengungkapkan bahwa di bulan Maret 1955, ketika Bung Karno sedang dalam persiapan menyusun konsep Pidato Pembukaan KAA. “Seperti biasa” – demikian ungkap Cak Roes – “beliau memerlukan sumbangan pikiran-pikiran saya.”<sup>87</sup> “Malahan” – lanjut Cak Roes – “begitu Konperensi Bogor selesai, Bung Karno sudah berbisik-bisik kepada saya”:

“Cak! Jangan lupa sumbangan pikiranmu untuk Pidato Pembukaan nanti. Konperensi A-A maha penting. Salah satu cita-cita Pergerakan Nasional kita berpuluhan tahun akan terlaksana. Dan di kota Bandung, di mana 30 tahun yang lalu gagasan Pan Asiatisme telah saya cetuskan ....”<sup>88</sup>

Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai Sekjen dalam kegiatan itu, sejak tiga bulan sebelum digelarnya konferensi tersebut telah disibukkan dengan berbagai persiapan mulai dari sarana transportasi, penginapan delegasi dan wartawan, logistik, pengaturan jumpa pers dan siaran radio (pada masa itu belum ada siaran televisi), bahkan sarana gedung yang akan digunakan pun tidak luput dari perhatiannya karena harus di-*upgrade*. Gedung itu bernama Gedung Concordia, harus selesai disulap menjadi Gedung Konferensi pada akhir bulan Maret atau paling lambat pada awal bulan April 1955, baik eksteriornya maupun interiornya.<sup>89</sup> Sementara waktu dan dana yang tersedia sangat terbatas dan tidak seimbang dengan keinginan Bung Karno. Tidak jarang Cak Roes harus menerima teguran Bung Karno bahkan menjadi sasaran kemarahan ketika tindakan yang dilakukannya tidak sesuai dengan keinginan Bung Karno.

Dalam suatu kesempatan, ketika Bung Karno mengetahui bahwa ternyata interior gedung itu dibuat tidak sesuai dengan keinginannya, Cak Roes mengungkapkan:

“Bukan main marahnya Bung Karno, pada waktu beliau mendengar pendirian saya dan Pak Ali Sastroamidjojo di atas itu. Tapi, anehnya Bung Karno tidak mau menegor Pak Ali secara langsung. Jadi saya yang dijadikan “bumper” atau “buffer”. Sekaligus juga “sasaran.”

“Cak,” kata Bung Karno kepada saya, “engkau ini, dan juga Ali, tahu apa tentang arsitektur? Saya ini insinyur dan mengerti seluk-beluknya arsitektur. Interiur Gedung

<sup>87</sup> Roeslan Abdulgani, (1980), *The Bandung Connection, Konperensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955*, Jakarta: Gunung Agung, hal. 43.

<sup>88</sup> *Ibid*, hal. 43-44.

<sup>89</sup> *Ibid*, hal. 49.

Concordia itu mesti mengilhami. Semua nanti yang duduk di dalamnya, mesti kena ilham. Jangan begitu prozais. Jangan begitu kering. Jangan seperti buku Undang-Undang, yang hanya diketahui oleh Ali sebagai seorang Sarjana Hukum. Kamu tahu pendapat saya: *Met juristen kun je nooit een revolutie beginnen*. Kita tidak bisa ber-revolusi dengan kaum yuris! Mereka kurang mengilhami. Padahal para peserta perlu dilingkungi oleh inspirasi! Karena itu robahlah interiurnya gedung ini! Sudahlah nuruto saya.”<sup>90</sup>

Dari apa yang diungkapkan Cak Roes tersebut, dapat dibayangkan betapa berat beban yang harus dipikul karena tidak hanya beban pekerjaan secara fisik tetapi juga beban mental-psikologis. Bahkan beban mental-psikologis yang harus ditanggungnya bersama Ali Sastroamisjojo selaku Perdana Menteri yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KAA itu, tidak hanya datang dari kemarahan Bung Karno melainkan juga dari negara lain dengan pernyataan yang bernada sumbang. Negara lain itu adalah Amerika yang meragukan kemampuan Indonesia untuk menyelenggarakan *event* sebesar itu dengan nada meremehkan dan cenderung menghina.

Berkaitan dengan hal tersebut, Cak Roes mengungkapkan:

“... saya ungkapkan isi hati dorongan saya untuk bekerja sebaik mungkin. Dorongan itu antara lain disebabkan karena sebuah majalah mingguan Amerika, – kalau saya tidak keliru majalah *Time* – memuat berita tentang Konperensi Bogor yang lalu. Di situ dikatakan, bahwa akomodasi untuk para delegasi begitu buruk – air tak mengalir, gantungan pakaian di kamar-kamar tidak ada, listrik kedap-kedip dan sebagainya – sampai-sampai seorang anggota delegasi India (tanpa disebut namanya) mengeluh dan menyangsikan – apakah Indonesia dapat mengorganisir Konperensi A-A dengan baik! Diberitakan anggota delegasi India itu mengejek kita dengan kata-kata: “*These beggars will never learn it*”. Pengemis-pengemis ini tak akan dapat belajar!”<sup>91</sup>

Cak Roes dan Ali Sastroamidjojo bereaksi keras terhadap pemberitaan yang telah *mendiskreditkan* bangsa Indonesia itu. Dalam dugaan Cak Roes, pers Amerika memiliki tujuan untuk mengadu domba antara Indonesia dengan India. Atau siapa tau, ejekan itu memang betul diucapkan oleh orang India. Terlepas dari apakah berita itu sekadar adu domba atau benar, Cak Roes sepertinya tidak ambil pusing dengan hal itu. Ia justru mengambil hikmah positifnya yaitu harus bekerja lebih keras agar penyelenggaraan konferensi itu dapat meraih sukses, dan itu berarti tamparan bagi pers Amerika.

Di samping berita dari pers Amerika yang bernada miring, ternyata terdapat pula berita menggembirakan yang datangnya juga dari Amerika. Berita itu sangat kontradiktif dengan berita pertama, dan memberi dorongan baru bagi semua yang

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 50.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal. 40.

sedang berkecimpung dalam persiapan-persiapan KAA, begitu Cak Roes menyebut isi berita tersebut. Betapa tidak, karena berita menggembirakan itu berupa sebuah surat yang dikirim oleh 14 orang Sarjana dan Humanis kenamaan dari berbagai aliran dan kepercayaan di Amerika kepada PM Ali Sastroamidjojo. Keempatbelas orang itu antara lain, Miss Emily G. Bach, seorang ekonom dan sosiolog, pemenang hadiah Nobel untuk perdamaian; penulis wanita Pearl Buck, pemenang hadiah Nobel, dan juga pemenang hadiah Pulitzer karena bukunya: *the good earth* tentang Tiongkok; S.R. Marlow, mahaguru Agama; Lewis Mumford ahli filsafat dan sejarah.<sup>92</sup>

Surat tersebut tertanggal 21 Maret 1955, dengan alamat para pengirimnya di 36 S. Centre St., Ferry, New York. Selain memuat harapan dari pengirimnya untuk suksesnya penyelenggaraan KAA, surat itu isinya sangat menyentuh permasalahan yang sedang berkembang pada masa itu yang ditulis bernuansa puitis. Berikut kutipannya:

"Banyak penduduk dunia hidup dalam kemelaratan, banyak yang hidup dirundung ketakutan, banyak lagi yang asyik membentuk blok-blok. Di tengah-tengah tekanan dan kekacauan situasi demikian, kami membuat surat ini untuk menganjurkan kepada Tuan: bukanlah keragu-raguan tetapi keberanian, bukannya perhitungan-perhitungan tetapi kebijaksanaan, bukannya tindakan-tindakan sesuka sendiri, tetapi disiplin, bukannya rencana untuk sesuatu blok tetapi kemajuan cita-cita universal ...

Dunia telah jemu akan penindasan, dogma dan peperangan, Dunia telah jemu melihat nafsu penjajah pelbagai negara, atau nafsu mendirikan pakta-pakta pertahanan. Besar harapan kami kepada Tuan, mudah-mudahan Tuan dapat memecahkan semua masalah dengan merdeka; untuk merumuskan dasar-dasar masyarakat baru ...

Cara Caesar, yang menggunakan kekuasaan perjuangan hidup telah kandas di Moskow dan Washington dan juga di Roma. Kami sangat mengharap agar Tuan dapat menjadi Asoka untuk menyatukan kembali dunia kita dalam suatu masyarakat berdasarkan cinta sesama, suatu dunia di mana masyarakat saling mengerti, masyarakat teknik dan masyarakat seni dapat berkembang menuju kesempurnaan."<sup>93</sup>

Cak Roes mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan suksesnya penyelenggaraan konferensi itu. *Pertama*, kuat dan mendalamnya cita-cita solidaritas bangsa Asia-Afrika dalam hati sanubari rakyatnya dalam menghadapi dominasi Barat dalam segala bentuk dan manifestasinya, seperti kolonialisme, imperialisme, fasisme, komunisme dan sebagainya. *Kedua*, situasi dan kondisi sekitar tahun 1954/1955 yang merupakan ladang yang subur bagi berseminya, tumbuhnya, dan berkembangnya cita-cita tersebut. *Ketiga*, bangsa Indonesia sendiri sebagai pemrakarsa dan tuan rumah dari konferensi tersebut telah

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 54.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 54-55.

membangkitkan suatu “*pushing power*” dan “*organizational skill*” yang menjamin suasana yang sangat menguntungkan bagi jalannya KAA, sekalipun tidak sedikit adanya oposisi dari dalam negeri sendiri terhadap dilaksanakannya gagasan ini.<sup>94</sup>

Apa yang diidentifikasi Cak Roes sebagai faktor-faktor penentu suksesnya penyelenggaraan KAA itu adalah kondisi obyektif yang bersifat situasional. Diluar faktor-faktor tersebut sesungguhnya Cak Roes sendiri juga merupakan faktor penentu kesuksesan penyelenggaraan konferensi itu. Sebagai Sekjen ia telah berjuang dengan mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya. Semua itu dilakukan karena cintanya terhadap tanah air dan bangsanya. Dan itu merupakan indikator kuatnya semangat nasionalisme yang mengalir dalam jiwanya.

Semangat nasionalisme yang tertanam dalam dirinya sejak muda hingga sebagai Sekjen KAA, telah menambah kepercayaan Bung Karno kepadanya. Oleh karena itu wajar apabila pada masa-masa selanjutnya Cak Roes banyak mendapat kesempatan menduduki berbagai jabatan penting dalam struktur pemerintahan. Salah satu jabatan penting itu adalah menjadi penanggung jawab kegiatan indoktrinasi dalam rangka pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*).

## 2.4 Roeslan Abdulgani dan Nasionalisme Radikal

Pemahaman terhadap istilah “radikal” yang dirangkai dengan kata nasionalisme dalam tulisan ini dapat diartikan sebagai suatu gerakan menentang kolonialisme-imperialisme Belanda yang dimulai pada dekade pertama abad 20. Radikalisme dalam pergerakan nasional terutama bersumber pada paham komunisme.<sup>95</sup> Selain radikalisme yang bersumber pada PKI, di kalangan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda muncul pula paham radikal mengenai penjajahan. Organisasi mahasiswa Indonesia di negeri Belanda bernama Perhimpunan Indonesia.<sup>96</sup> Selanjutnya perkembangan nasionalisme yang radikal ini menjadi karakteristik PNI, seperti dikemukakan R.Z. Leirissa sebagai berikut:

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 149-150.

<sup>95</sup> R.Z. Leirissa, (1985), *Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 52.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 55.

“Pada tahun 1927 Ir. Soekarno mengubah *Algemeene Studie Club* menjadi Partai Nasional Indonesia. Tiga bekas anggota Perhimpunan Indonesia hadir dalam rapat pembentukannya, yaitu Mr. Iskak Tjokrohadisuryo, Mr. Budiarto dan Mr. Sunario. Selain itu Tjipto Mangunkusumo ada pula dan menyarankan agar istilah partai jangan dipakai mengingat nasib yang telah menimpa *Indische Partij* dan Partai Komunis Indonesia. Cita-cita Partai Nasional Indonesia tidak berbeda jauh dari cita-cita Perhimpunan Indonesia. Nasionalisme yang radikal ditanamkan dengan cara propaganda agar rakyat menjadi sadar akan tujuan pergerakan. Trilogi Partai Nasional Indonesia yang ditanamkan pada rakyat adalah jiwa nasional (*nationaale geest*), tekad nasional (*nationaale wil*), dan tindakan nasional (*nationaale daad*). Dengan cara ini Partai Nasional Indonesia ingin mengerahkan rakyat untuk memperbaiki keadaan politik, ekonomi dan budaya. Agar kondisi kemelaratan dalam alam penjajahan jelas tertulis dalam benak rakyat, diciptakan pula pandangan sejarah yang khas. Soekarno melukiskan betapa dalam masa lampau Indonesia pernah mengalami masa yang gemilang, dan bahwa masa kini penuh kesengsaraan, dan bahwa akan tiba saatnya Indonesia (dengan pimpinan Partai Nasional Indonesia) akan mencapai masa kebesaran lagi.”<sup>97</sup>

Demikian gambaran mengenai sifat-sifat radikal dalam nasionalisme yang berkembang di Indonesia melalui organisasi-organisasi pergerakan. Pada umumnya para sejarawan mengelompokkan pergerakan nasional Indonesia menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu yang bersifat *radikal-non kooperatif* dan *moderat-kooperatif*.

Herbert Feith pada bagian pengantar (1970) dari buku yang ditulisnya bersama Lance Castles (sebagai editor) mengemukakan tentang adanya lima aliran dalam pemikiran politik di Indonesia yang berkembang pada periode (1945-1965), yaitu: Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme demokratis, dan Komunisme.<sup>98</sup> Bahkan Feith melengkapi penjelasannya dengan menampilkan sebuah bagan yang menggambarkan adanya pengaruh dari warisan-warisan tradisional Indonesia terhadap pertumbuhan dan perkembangan pemikiran kelima aliran itu, yang berhadap-hadapan dengan adanya pengaruh dunia modern, di mana Feith dan Castles menunjuk – terutama dunia Barat – dan ide-idenya.<sup>99</sup>

Secara organisatoris aliran nasionalisme radikal dimanifestasikan oleh PNI. Dalam kaitannya dengan aliran pemikiran yang lain, PNI memperlihatkan ikatannya dengan aliran tradisionalisme Jawa, sosialisme demokratis, bahkan dengan Komunisme. Konsep nasionalisme merupakan label bagi PNI, dan hal ini menjadi semakin populer dan berhasil merebut hati rakyat dengan jargon-jargon politiknya yang menekankan pentingnya faktor persatuan yang harus dijunjung

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal. 58.

<sup>98</sup> Herbert Feith dan Lance Castles (*ed.*), *op. cit.*, hal. liii-liv.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hal. lvi.



tinggi demi mencapai terwujudnya cita-cita kebangsaan. Gejala demikian ini telah tampak dari masa-masa sebelum PNI itu sendiri dibentuk yakni ketika Sukarno pada tahun 1926 melahirkan tulisan mengenai “Nasionalisme, Islam dan Marxisme”, yang segera mendapat sambutan positif di kalangan kaum pergerakan. Bahkan pada tahun 1963 seorang penyanjung menyatakan bahwa orang Indonesia mana pun – apakah dari golongan Protestan, Katolik, Islam, Sosialis ataupun Komunis – dapat menyatakan, “Andaikata partai saya tidak ada, bagian terbesar anggotanya akan menjadi anggota partai Saudara (PNI)”.<sup>100</sup>

Selanjutnya Feith dan Castles mengutip pidato Roeslan Abdulgani yang disampaikan di depan Sidang Konstituante pada tanggal 3 Desember 1957 berjudul *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante*. Bersama kutipan pidato Bung Karno dan kumpulan artikel yang ditulis Sajuti Melik ditempatkan dalam konteks “Nasionalisme Radikal”. Bagian dari pidato yang dikutip Feith dan Castles yang secara kontekstual relevan dengan pandangannya tersebut adalah:

“Di tengah-tengah bercorak ragamnya teori tentang Kebangsaan, maka yang kita maksud dengan kebangsaan adalah kebangsaan yang sesuai dengan keharusan zaman moderen. Zaman moderen tidak memberi tempat bagi teori kebangsaan yang ikatan persatuannya didasarkan hanya atas persamaan kebutuhannya, agama atau ras, melainkan zaman moderen menghadapkan kita lagi kepada adanya *historische noodzakelijkheid* tentang keharusan ikatan persatuan berupa keinginan dan kemauan untuk hidup bersatu, laksana suatu *solidariteit* besar yang harus ditempa setiap hari. *Solidariteit* mana dilahirkan karena adanya nasib-historis yang bersama, kemenangan-historis yang bersama, pokoknya ialah; suka-duka-historis yang bersama.”<sup>101</sup>

Dari kutipan tersebut penulis menangkap makna tentang pentingnya kebersamaan dalam membangun sebuah bangsa yang kuat. Bahwa proses sejarah terbentuknya kebersamaan dalam membangun bangsa itu tidak ditentukan oleh faktor-faktor obyektif seperti persamaan kebutuhan, agama, atau ras, melainkan ditentukan oleh faktor subyektif yaitu adanya keharusan ikatan persatuan berupa keinginan dan kemauan untuk hidup bersatu.

Pada masa penjajahan, dalam kurun waktu 1920-an gerakan nasionalisme radikal yang disimbolkan oleh PNI bentukan Bung Karno merupakan bukti dari

<sup>100</sup> Sayuti Melik, (1963), *Pembinaan Jiwa Marhaenisme*, Djakarta: Pantjaka, hal. 43. Seperti dikutip Herbert Feith dan Lance Castles (ed.), dalam *ibid.*, hal. lviii.

<sup>101</sup> Herbert Feith dan Lance Castles (ed.), *op. cit.*, hal. 159. Pernyataan senada terdapat pada Hans Kohn, (1961), *Nasionalisme, Arti dan Sedjarahny* (Terjemahan Sumantri Mertodipuro), Djakarta: P.T. Pembangunan.

adanya karakteristik tersebut. Bersama Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supriadinata; Sukarno menghadapi resiko dipenjarakan di Sukamiskin, Bandung dan mengalami pengasingan atau pembuangan selama bertahun-tahun ke daerah terpencil di Ende-Flores yang merupakan sarang wabah penyakit malaria yang sempat menggerogoti dirinya, sebelum dipindahkan ke Bengkulu. Di Ende-Flores inilah Bung Karno menemukan nilai-nilai spiritual dalam hidupnya yaitu mempelajari agama Islam secara mendalam dan tekun beribadah. Satu hal yang tidak ia lakukan sebelumnya, seperti orang Jawa pada umumnya, Bung Karno penganut Islam abangan karena ayah Bung Karno seorang muslim tapi ibunya seorang Hindu Bali. Keuntungan lain yang diperoleh Bung Karno dari peristiwa pembuangan ke Ende-Flores dan Bengkulu, dikemukakan oleh Bernard H.M. Vlekke:

“.... Apabila Sukarno di-bebaskan dari penjara dalam tahun 1932 (sa-lepas dua tahun menjalani hukuman-nya) ia chuba menyatukan balek kaum sosialis – nasionalis di-bawah pimpinannya, tetapi ia gagal. Nasib-nya malang sedikit, karena pergerakan-nya telah sampai ke-pengetahuan gabenor-jenderal yang baharu dan ia telah di-perentahkan di-tahan di-pulau Flores (1933). Lepas itu, beberapa ketika sa-belum pechah-nya perang Pasifik, ia di-pindahkan ka-Benkulen di-Sumatera. Pelek tetapi benar, orang boleh berkata bahawa Sukarno mendapat sanjongan tinggi di-sebabkan oleh perbuatan gabenor-jenderal De Jonge yang telah menahan-nya di-dalam penjara. Hal ini telah menyebabkan ia di-pandang sebagai sa-orang pahlawan tanah ayer oleh orang2 Indonesia. ....”<sup>102</sup>

Pernyataan Vlekke dalam bukunya *Nusantara (Sejarah Indonesia)* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia itu menunjukkan bahwa popularitas Bung Karno sebagai seorang pemimpin pergerakan nasional justru semakin meluas di kalangan rakyat Indonesia setelah ia mengalami berbagai peristiwa mulai dari penjara sampai pembuangan. Penulis berpendapat bahwa penjara dan pengasingan merupakan sarana untuk menempa diri bagi setiap pemimpin pergerakan nasional, tidak hanya yang terdapat di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia.

Sedangkan pemimpin pergerakan yang lain, Hatta dan Sjahrir mengalami pembuangan ke Boven-Digul, yang kemudian dipindahkan ke Banda Neira.<sup>103</sup> Kebijakan politik pemerintah kolonial dengan cara memenjarakan dan mengasingkan para pemimpin pergerakan yang bertujuan melumpuhkan gerakan

<sup>102</sup> Bernard H.M. Vlekke, (1967), *Nusantara (Sejarah Indonesia)*; terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia, hal. 389.

<sup>103</sup> Lambert Giebels, *op. cit.*, hal. 204-207.

radikal para pemimpin PNI itu ternyata tidak membuahkan hasil, dan justru karakteristik radikalisme semakin tumbuh subur sampai pada lapisan masyarakat paling bawah setelah Bung Karno menemukan ide “Marhaenisme”.<sup>104</sup>

Pada bagian yang lain, Feith dan Castles menyatakan bahwa:

*“PNI Sukarno tahun 1927 ini dilarang dalam waktu 3 tahun kemudian dan organisasi-organisasi penggantinya, yang bergerak dalam suasana yang lebih menindas, sifatnya lebih moderat, terpecah-pecah dan kecil. Memang pada kenyataannya, nasionalisme radikal jarang terlihat dalam masa 10 tahun sebelum invasi Jepang. Namun selama masa pendudukan Jepang pengaruhnya menjadi sangat kuat. Hal ini karena propaganda anti Barat yang dilancarkan Jepang dan juga karena peranan penting yang dapat dimainkan Sukarno dan pemimpin-pemimpin nasionalis radikal lainnya.”*<sup>105</sup>

Demikianlah gambaran nasionalisme radikal sebagai sebuah corak pergerakan pra kemerdekaan yang bertumpu pada PNI dan Bung Karno sebagai sentral pengaruh terhadap gerakan-gerakan nasionalis lain yang oleh Feith dan Castles diberi istilah nasionalisme polos, sebagai pengganti istilah moderat yang mungkin dianggap kurang tepat. Tampilnya Bung Karno dalam kancah politik pergerakan nasional merupakan fenomena tersendiri pada masa itu. Kharismanya yang luar biasa mampu menangkap perhatian rakyat yang sedang merindukan kehadiran seorang pemimpin. Meminjam istilah Bung Karno sendiri, pidato-pidatonya yang “menggeledek” telah memberi corak baru di kalangan kaum pergerakan.

Bagaimana Roeslan Abdulgani dalam kaitannya dengan “Nasionalisme Radikal” seperti pandangan Feith dan Castles?

Terhadap analisis yang dilakukan Feith dan Castles tersebut, penulis mencoba untuk mengkritik dengan mengemukakan beberapa catatan. *Pertama*, menempatkan sosok Roeslan Abdulgani sebagai tokoh pemikir dalam konteks “Nasionalisme Radikal” tidaklah tepat. Sumber sejarah yang dijadikan bukti untuk itu hanya berupa sebuah teks pidato sehingga tidak merepresentasikan dari pemikiran Roeslan secara komprehensif. Di samping itu sifat radikal yang berkembang pada masa itu didominasi oleh gerakan PNI yang bertumpu pada

<sup>104</sup> John Ingleson, (1983), *Jalan Ke Pengasingan, Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934* (Diterjemahkan oleh: Zamakhsyari Dhofier). Jakarta: LP3ES, hal. 34. Lihat juga William H. Frederich dan Suri Suroto, (1985), *Pemahaman Sejarah Indonesia, Sebelum dan Sesudah Revolusi*, Jakarta: LP3ES, hal. 56 dan Cindy Adams, (2005), *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*, Jakarta: Yayasan Bung Karno, hal. 146. Juga dalam Sartono Kartodirdjo, (1990), *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia, hal. 164.

<sup>105</sup> Herbert Feith dan Lance Castles (ed.), *op. cit.*, hal. 137.

pemikiran Bung Karno, bukan pada Roeslan Abdulgani. *Kedua*, dari berbagai pernyataan Roeslan Abdulgani yang tertuang dalam pidato, ceramah, prasaran, kuliah, dan tulisan yang penulis temukan hampir kesemuanya mencerminkan pemikiran Bung Karno. Artinya, bahwa Roeslan bukanlah seorang pemikir yang mandiri tetapi sekadar memindahkan pikiran orang lain ke alam pikirannya. Dalam konteks ini, predikat sebagai “juru bicara” mungkin lebih tepat baginya. *Ketiga*, penulis berpendapat bahwa dalam konteks peranan dan aktivitasnya, Roeslan dapat disebut sebagai seorang nasionalis radikal. Tetapi dalam konteks pemikiran, ia tidak memiliki kapasitas tersebut. Peranan dan aktivitas dengan pemikiran adalah dua hal yang sangat berbeda. Radikalisme Roeslan yang tampak pada sikap dan tindakan bukan merupakan cerminan dari pemikirannya tetapi terutama karena menerapkan pemikiran-pemikiran Bung Karno. Roeslan lebih banyak menjalankan aktivitas atas mandat Bung Karno melalui berbagai jabatan yang diberikan kepadanya.

Meskipun demikian penulis berpendapat bahwa melalui peranan dan aktivitas yang dilakukannya, Roeslan Abdulgani telah memberikan sumbangan bagi sejarah pertumbuhan dan perkembangan corak pergerakan nasionalisme radikal itu sendiri. Apa yang pernah diperjuangkan pada masa sebelum kemerdekaan masih menjadi isu yang menarik hingga dekade keenam pada abad ke-20. Jika sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia berjuang menghadapi kolonialisme-imperialisme Belanda, maka perjuangan setelah kemerdekaan adalah menghadapi berbagai macam gerakan yang mengancam keutuhan bangsa. Gerakan-gerakan yang dimaksud adalah Pemberontakan PKI Madiun 1948, DI/TII Kartosuwiryo 1949, DI/TII Kahar Muzakar 1950, RMS Soumokil 1950, APRA Kapten Westerling 1950, DI/TII Daud Beureueh 1953, hingga PRRI-Permesta, dan berujung pada G 30/S PKI 1965. Begitu pun pada masa-masa selanjutnya, bangsa Indonesia masih menghadapi persoalan-persoalan yang mengancam persatuan dan kesatuan.

Beberapa catatan yang berkaitan dengan latar belakang kehidupan Roeslan Abdulgani dapat dikemukakan sebagai berikut. *Pertama*, kepribadian Cak Roes telah terbentuk sejak kecil melalui lingkungan keluarga, dimana ayahnya adalah seorang saudagar dan aktivis pergerakan nasional SDI yang sering mengajaknya

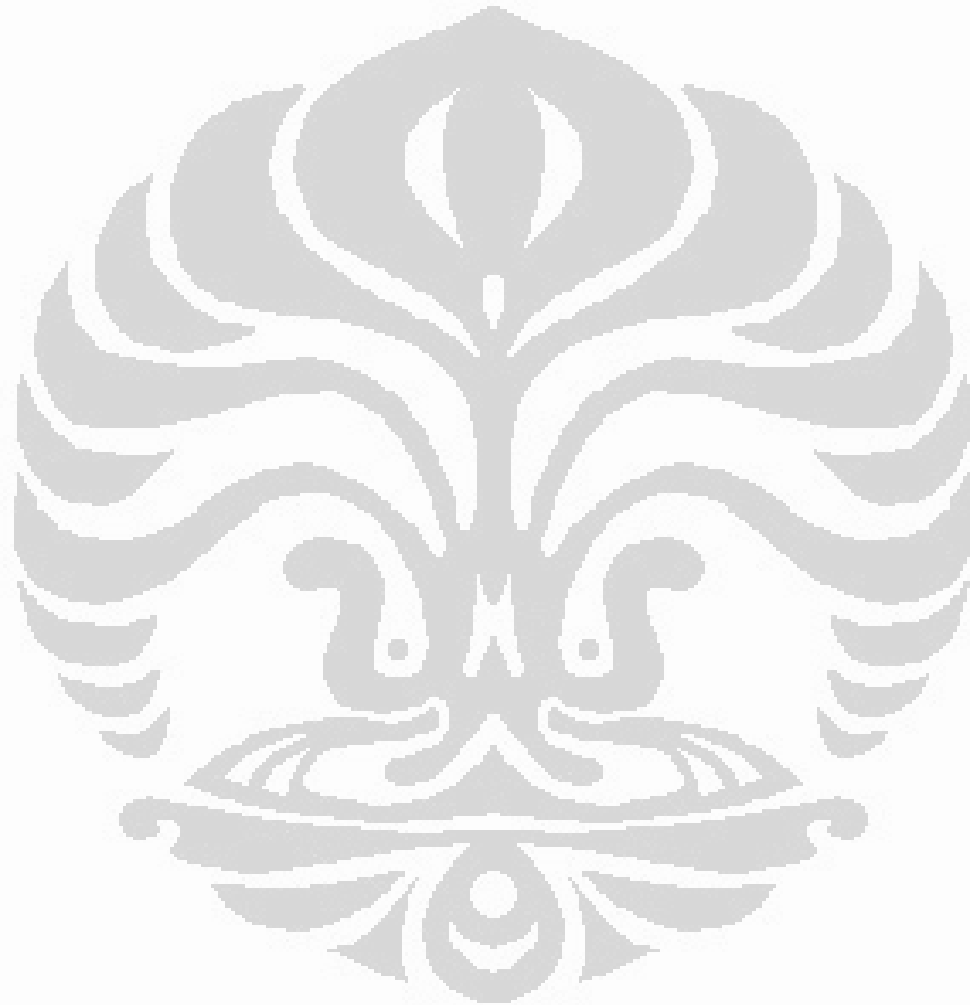
melakukan perjalanan ke berbagai daerah, yang telah membuatnya memahami kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kondisi sosial masyarakat kampung Surabaya pada dasawarsa ketiga abad ke-20 hingga sekitar awal kemerdekaan juga telah banyak mempengaruhi kepribadiannya. Di samping itu pendidikan, organisasi sosial dan politik, dan karir pekerjaannya juga memiliki peranan penting dalam menanamkan semangat nasionalisme dalam dirinya.

*Kedua*, bahwa pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, khususnya nasionalisme yang tumbuh dan berkembang di Eropa. Dalam pandangan Kahin nasionalisme Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan sosial, tingkat homogenitas agama Islam yang mencapai 90%, berkembangnya bahasa persatuan Hindia Kuno dan bahasa Melayu Pasar, sebagai akibat dibentuknya *Volksraad* (Majelis Rakyat), dan pada akhirnya faktor yang tidak kalah pentingnya dengan faktor-faktor yang lain adalah adanya penyebaran gagasan melalui perkembangan surat kabar yang menggunakan bahasa sehari-hari dan radio.

*Ketiga*, semangat nasionalisme yang mengalir dalam jiwanya dibentuk oleh suatu peristiwa besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dimana ia terlibat secara langsung didalamnya. Dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, Cak Roes bersatu padu bersama pemuda dan rakyat menghadapi pasukan Inggris. Sedangkan dalam Konferensi A-A di Bandung 1955, Cak Roes sebagai Sekjen telah berhasil mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki peran besar dalam percaturan politik dunia. Aktivitas Cak Roes selaku Sekjen dalam kegiatan berskala internasional tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi perjalanan karirnya sebagai pejabat negara karena memiliki peran yang cukup penting dalam penentuan masa depan bangsa Asia dan Afrika. Keberhasilan Cak Roes menjalankan peranannya telah menambah kepercayaan Bung Karno atas dirinya, dibuktikan dengan jabatan-jabatan strategis yang diberikan pada masa-masa sesudahnya.

*Keempat*, predikat sebagai pemikir dalam konteks nasionalisme radikal yang diberikan atas dirinya oleh Feith dan Castles sebagai salah satu aliran politik yang berkembang pada periode (1945-1965) tidaklah tepat. Dari bukti yang ada

menunjukkan bahwa Cak Roes bukanlah seorang pemikir. Namun demikian ia memiliki peranan dan aktivitas yang cukup penting dalam konteks nasionalisme radikal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bukti-bukti bahwa pernyataan-pernyataan yang diucapkan melalui pidato, sambutan, prasaran, ceramah, kuliah umum, dan tulisan-tulisannya lebih banyak mengutip ulang pendapat dan pandangan Bung Karno.



### BAB 3

#### PEMBANGUNAN BANGSA DAN PEMBANGUNAN KARAKTER: PEMIKIRAN BUNG KARNO DAN PEMAHAMAN ROESLAN ABDULGANI

Jika ditinjau secara historis, sebuah konsep dalam sejarah menjadi bermakna terutama disebabkan oleh semangat zamannya. Begitu pula dengan konsep “pembangunan bangsa dan pembangunan karakter” (*nation and character building*), menjadi sangat penting dan bermakna ketika pada era 1960-an menghadapi berbagai permasalahan bangsa sebagai akibat pluralisme atau kemajemukan, seperti timbulnya gerakan separatis di beberapa daerah, pemberontakan dengan berbagai motifnya, dan masalah rasialisme. Jadi konsep ini lahir dari pemikiran untuk menjawab tantangan zaman. Bagaimana perbedaan-perbedaan yang secara obyektif dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat dipersatukan dengan faktor subyektif melalui semangat persatuan dan kesatuan.

Sebegitu penting dan bermaknanya konsep “pembangunan bangsa dan pembangunan karakter” (*nation and character building*) itu sehingga pemerintah pada masa itu memandang perlu untuk mempropagandakan menjadi sebuah semangat, bahkan untuk menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dibentuk sebuah lembaga indoktrinasi. Untuk itu diperlukan pula orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan indoktrinasi. Dan itu artinya bahwa orang tersebut memiliki peranan dalam menerapkan pemikiran tentang pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*)

Kini setengah abad kemudian, kondisi serupa kembali mengoyak kehidupan bangsa Indonesia dengan sebab yang sedikit berbeda. Ekses dari adanya tuntutan demokrasi dan otonomi daerah telah mengancam nilai-nilai persatuan dan kesatuan, lebih jauh telah mendorong bangkitnya kembali semangat primordial dan sektarian. Bahkan era reformasi bergulir dari gerakan rasialis dimana warga keturunan Cina menjadi sasaran amuk massa di bulan Mei 1998.

Untuk itulah konsep “pembangunan bangsa dan pembangunan karakter” (*nation and character building*) yang pernah digagas para *founding fathers* dapat kembali dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini.

### 3.1 Pemikiran Bung Karno

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Bung Karno dalam berbagai kesempatan pidatonya telah menyampaikan mengenai pentingnya membangun sebuah bangsa yang kuat dan memiliki kepribadian guna menghadapi tantangan zaman dengan semangat persatuan dan kesatuan. Pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa selama ratusan tahun bangsa Indonesia hidup di bawah penjajahan bangsa asing disebabkan oleh tidak adanya kesadaran untuk menggalang rasa persatuan dan kesatuan. Kegagalan demi kegagalan dialami oleh para pemimpin lokal dari berbagai daerah dalam upaya mengusir penjajah Belanda. Sultan Agung dari Mataram, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Sultan Hasanudin dari Makasar, Cut Nyak Dien dan Teuku Umar dari Aceh, Pangeran Diponegoro dari Tegalrejo – Yogyakarta, dan Imam Bonjol dari Minangkabau adalah para pemimpin perlawanan dari berbagai daerah yang mengalami kegagalan dalam menghadapi Belanda yang pada masa itu lebih dikenal sebagai “kumpeni”. Istilah “kumpeni” diambil dari kata “Compagnie” dalam kepanjangan dari VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie). Bahkan sebutan kumpeni masih digunakan oleh rakyat Indonesia ketika VOC sudah dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799.

Padahal jika ditelusuri akar sejarahnya, sesungguhnya bangsa Indonesia telah memiliki benih-benih persatuan dan kesatuan sejak berabad-abad yang lampau. Kerajaan Sriwijaya, sekitar abad ke 7-13 pernah berkembang menjadi kerajaan bercorak maritim yang besar dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Dalam masa perkembangannya kerajaan ini pernah menguasai wilayah geografis dan politis yang cukup luas yakni wilayah Indonesia bagian barat, termasuk bandar besar yang terletak di Semenanjung Malaka.<sup>106</sup> Pada masa selanjutnya, Kerajaan Majapahit yang berkembang sekitar abad ke 13-15 merupakan kerajaan besar yang lebih bercorak agraris, meskipun bukan berarti mengabaikan kegiatan pelayaran dan perdagangan. Ketika mencapai puncak kejayaannya Majapahit menguasai wilayah yang sangat luas yaitu, seluruh Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Indonesia Timur.<sup>107</sup> Bahkan kemudian para sejarawan

<sup>106</sup> Bernard H.M. Vlekke, *op. cit.*, hal. 29.

<sup>107</sup> M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hal. 56.



bersepakat menyatakan Sriwijaya sebagai “Kerajaan Nasional I” dan Majapahit sebagai “Kerajaan Nasional II.”

Anhar Gonggong dalam makalahnya, “Tema Sentral Persatuan dan Alur Pemikiran Soekarno (1926-1966)” yang disampaikan dalam Seminar Sejarah Nasional IV di Yogyakarta menyatakan, bahwa Soekarno merupakan salah seorang tokoh yang sangat konsisten dengan pemikirannya tentang persatuan. Dalam makalahnya itu Anhar menyebutkan, bahwa sejak penampilannya sebagai pemimpin pergerakan kebangsaan, Soekarno senantiasa menjadikan tema persatuan (1926) sebagai landasan perjuangannya.<sup>108</sup> Sedangkan di era kemerdekaan, menurut Soekarno ada tiga prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam rangka mengisi kemerdekaan, yaitu: 1. Berdaulat penuh di bidang politik; 2. Berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) di bidang ekonomi; 3. Berkepribadian di bidang kebudayaan.<sup>109</sup>

Pandangan lain dikemukakan Bernard Dahm, yang mendasarkan pendapatnya dengan pendekatan budaya. Dahm melihat Bung Karno sebagai pribadi yang pemikirannya sangat sarat dengan pengaruh budaya Jawa yang nampak dalam tulisannya *Nasionalisme, Islam dan Marxisme*, ataupun pada pemikirannya tentang Pancasila yang sinkretis.<sup>110</sup> Sedangkan George Mc Turnan Kahin dalam bukunya *Nationalism and Revolution in Indonesia* melihat cita-cita dan pikiran-pikiran Bung Karno sebagai:

*“Probably in no other exposition of principle can one find a better example of the synthesis of Western democratic, Modernist Islamic, Marxist, and indigenous-village democratic and communalistic ideas which forms the general basis of the Social thought of so large a part of the post-war Indonesian political elite.”<sup>111</sup>*

(Terdjemahan: “Dalam perwujudan sesuatu prinsip, orang mungkin tidak dapat menemukan sebuah tjontoh jang lebih tepat tentang penggemblengan daripada Demokrasi Barat, Modernisme Islam, Marxisme dengan fikiran-fikiran Demokrasi desa dan Komunalisme asli, penggemblengan mana merupakan dasar umum dari pada alam fikiran sosial dari sebagian besar orang-orang politik bangsa Indonesia jang terkemuka sesudah perang”).<sup>112</sup>

<sup>108</sup> Anhar Gonggong, “Tema Sentral Persatuan dan Alur Pemikiran Soekarno (1926-1966)” disampaikan dalam Seminar Sejarah Nasional IV di Yogyakarta seperti dikutip Peter Kasenda dalam Syamsul Hadi (ed.), (1991), *Bung Karno dalam Pergulatan Pemikiran*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Soekarno bekerjasama dengan Pustaka Simponi Jakarta, hal. 70.

<sup>109</sup> Syamsul Hadi (ed.), *ibid.*, hal. 73.

<sup>110</sup> Bernard Dahm, (1970), *Sukarno and the struggle for Indonesian independence*, Itacha: Cornell University Press, hal. xx.

<sup>111</sup> Roeslan Abdulgani, (1963), *Resapkan dan Amalkan Pantjasila*, Djakarta: Jajasan Prapantja, hal. 37.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hal. 37-38.

Bung Karno mensintesakan beberapa aliran ideologi yang berbeda antara konsep demokrasi barat, aliran Islam modern, dan Marxis yang dikemas dalam persatuan. Dalam dunia barat sintesa semacam ini tidak mungkin dilakukan karena ada di antara dua aliran ideologi yang bertentangan secara antagonis.

Bung Karno sendiri menyadari bahwa banyak orang – tidak hanya orang barat saja – yang melihat pemikirannya sebagai sebuah teka-teki. Apakah dia seorang nasionalis, Islamis, atau Marxis. Bung Karno dengan tegas menyatakan melalui tulisan-tulisannya bahwa, “saya tetap seorang nasionalis, tetap seorang Islam, dan tetap seorang Marxis. Dalam kesempatan yang lain Bung Karno mengungkapkan bahwa satu-satunya alat perjuangan bagi bangsa Indonesia adalah “persatuan.” Jika tidak berdiri di atas landasan ini, maka perjuangan bangsa Indonesia tidak akan memperoleh hasil.<sup>113</sup>

Latar belakang sejarah yang memberi inspirasi kepada Bung Karno tentang konsep pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) sampai pada proses terbentuknya lembaga indoktrinasi, dapat diikuti dalam penjelasan berikut. Dari amanatnya yang disampaikan di Bogor pada tanggal 15 Juli 1963, diketahui bahwa ternyata fikiran-fikiran Bung Karno yang mendasari proses “*nation-building*” telah dicetuskan pada waktu menyampaikan pidato tentang Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945.<sup>114</sup> Bahkan jika ditelusuri ke belakang, peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah mewarnai pemikiran-pemikiran Bung Karno yang mendasari konsep pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) misalnya peristiwa 20 Mei 1908 dan 28 Oktober 1928. Mengenai hal-hal penting yang terkait dengan peristiwa 20 Mei 1908, Bung Karno dalam kesempatan memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 1952 mengungkapkan sebagai berikut:

“Maka bagi kita pun 20 Mei itu tidak per-tama2 dan tidak se-mata2 hanya “een groot practisch-succesnja lahirnja satu perkumpulan ketjil dari kaum prijaji jang bernama Budi Utomo – ia adalah berarti lahirnja dan menangnja satu “beginsel” : beginsel hak-dan-adilnja berserikat dan berkumpul meski dibawah antjaman pentung kolonialisme pun, beginsel hak-dan-adilnja manusia ingin berharkat manusia dan bangsa ingin berharkat

<sup>113</sup> Sukarno, (2001), *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Penerbit PT. Toko Gunung Agung Tbk., hal. 27.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hal. 11. Amanat Presiden Sukarno tersebut secara lengkap dapat dibaca pada: *Lampiran 9*.

bangsa, beginsel bahwa dialam kolonialisme tiap2 perobahan hanjalah dapat diperoleh dengan desakannya satu kekuatan dan tidak sekedar dengan bermohon sadja, beginsel bahwa kekuatan ini harus disusun menurut tjaranja organisasi perserikatan, beginsel bahwa organisasi perserikatan inilah djalan jang utama untuk memenuhi adjaran “rukunagawe santosa”, “persatuan membuat kekuatan” (cetak tebal-*pen*).<sup>115</sup>

Dari kutipan pidatonya tersebut, betapa momentum sejarah 20 Mei 1908 telah mengilhami dan memberi inspirasi yang sangat penting bagi konsep persatuan dan kesatuan bangsa, yang kemudian oleh Bung Karno dimatangkan menjadi *nation and character building*.

Budi Utomo sendiri sesungguhnya hanya merupakan sebuah organisasi yang oleh Bung Karno disebut perkumpulan kecil, yang dibentuk oleh kaum priyayi Jawa. Kaum priyayi yang dimaksud adalah mahasiswa-mahasiswa STOVIA (Sekolah Kedokteran Pribumi) antara lain Sutomo, Gunawan, dan Suraji, tetapi inspiratornya Dokter Wahidin Sudirohusodo dari Yogyakarta. Tujuan utama organisasi ini adalah memberikan beasiswa bagi kaum miskin masyarakat Jawa dan Madura yang ingin menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi.<sup>116</sup> Jadi peran besar Budi Utomo dalam sejarah terwujudnya cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa adalah sebagai pelopor berdirinya pergerakan-pergerakan nasional modern setelah itu. Hal inilah yang telah mengilhami Bung Karno.

Lain halnya dengan peristiwa 28 Oktober 1928 yang merupakan proses bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia menuju persatuan dan kesatuan karena melibatkan pemuda-pemuda yang berasal dari berbagai suku. Para pemuda dari berbagai suku itu berhasil membangun kesepakatan bersama dalam sebuah komitmen yang kemudian diikrarkan menjadi “Sumpah Pemuda.” Tentang arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya, Panitia Nasional Hari Sumpah Pemuda tahun 1961 menyampaikan uraian tiga hal, yaitu:

“Pertama pada waktu revolusi bersendjata dimana seluruh bangsa menolak kembalinja kekuasaan bersendjata Belanda dengan kekerasan bersendjata.

Sehingga dengan demikian tidak ada satu kekuasaan politik imperialisme Belanda jang sanggup berdiri dengan aman diwilajah Indonesia.

Kedua peristiwa pembentukan R.I.S. ala Van Mook itu dalam waktu jang sangat singkat dirobek-robek oleh bangsa Indonesia dan kembali kepada bentuk kesatuan seperti diinginkan oleh djiwa Sumpah Pemuda.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal. 31.

<sup>116</sup> M. C. Ricklefs, *op. cit.*, hal. 343-345.

Ketiga dalam menghadapi kesuraman liberalisme dibawah U.U.S.R.I., peranan sumpah Pemuda tetap menerangi seluruh bangsa kearah tujuan yang jelas, ialah kemerdekaan penuh dan kemakmuran rakyat.”<sup>117</sup>

Agar sejarah tidak terulang, dan sejalan dengan pemikirannya yang berkaitan dengan prinsip dasar berkepribadian di bidang kebudayaan, maka setelah Indonesia merdeka Bung Karno ingin mewujudkan impian besarnya untuk membangun bangsa yang memiliki kepribadian dengan konsep “*nation building*” dan “*character building*”. Konsep ini telah sering diucapkan oleh Bung Karno dalam kesempatan menyampaikan pidatonya, sebelum dibentuk lembaga indoktrinasi untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sosial masyarakat. Simak misalnya kutipan pidato Bung Karno yang disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1962 berikut ini:

“... Perdjoangan membebaskan Irian Barat merupakan satu dasar fundamental daripada *Nationbuilding* (cetak tebal-*pen*) kita, bahkan djuga satu dasar fundamental daripada *characterbuilding* (cetak tebal-*pen*) Indonesia. Sedjak dulu mula kita menjubur-njuburkan karakter-tulen kepada bangsa Indonesia, djauh daripada opportunisme, djauh daripada djiwa pendjiplak, djauh daripada Sklavengeist, atau djiwa budak-belian yang tidak mengenal kehormatan. Kalau sekarang ini ada seorang moralis-politikus berkata “A nation with character is worth to live for, is worth to sacrifice for”, - “satu bangsa yang berkarakter pantas kita sadjikan hidup dan korbanan kepadanya” -, maka kita telah mentjam-tjarkan keagungan djiwa yang demikian itu kepada Rakyat Indonesia djauh sebelum “*Sturm uber Asien*” menderu-deru diangkasa Timur! Itulah sebabnja kita djuga membantu perdjoangan lain-lain bangsa yang menentang kolonialisme, dengan tidak memperdulikan bangsa itu apa warnakulitnja atau apa tjorak agamanja. ....”<sup>118</sup>

Jika mencermati pidato yang diucapkan pada ulang tahun proklamasi kemerdekaan 1962 ini, sangatlah tepat kiranya Bung Karno memberi judul “Tahun Kemenangan.” Perjuangan membebaskan Irian Barat yang kemudian diganti namanya menjadi Irian Jaya (sekarang Papua) merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda. Itulah sebabnya banyak pendapat yang menyatakan bahwa tahun 1962 merupakan puncak kejayaan Bung Karno. Bahkan dalam pandangan Roeslan Abdulgani, orang yang memiliki kedekatan pribadi dan juga kedekatan dalam struktur pemerintahan, mengungkapkan bahwa Bung Karno pada tahun 1962 sudah mencapai cita-cita

<sup>117</sup> C.S.T. Kansil (et. al.), *Capita-Selecta: Pembinaan Kesatuan Bangsa (28 Oktober 1928 – 28 Oktober 1964) Dalam Rangka Nation-Building & Character-Building*, Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat, Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa, hal. 86-89.

<sup>118</sup> “Tahun Kemenangan” Amanat Presiden Sukarnopada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1962 di Djakarta, dalam *Dibawah Bendera Revolusi*, Djilid Kedua, hal. 498.

hidupnya, yakni kesatuan Indonesia dengan keberhasilannya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi.<sup>119</sup> Sedangkan dalam pikiran Bung Karno sendiri, pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) harus tetap terus dilakukan secara intensif.

### 3.2 Pemahaman Roeslan Abdulgani

Sebagai orang yang memiliki hubungan dekat dengan Bung Karno, bahkan banyak mendapat kesempatan menduduki berbagai jabatan darinya, wajar apabila banyak pengamat yang menjulukinya sebagai duplikat Bung Karno. Selain predikat sebagai “Jubir Usman”, ada pula yang menyebutnya sebagai seorang epigon. Predikat dan sebutan tersebut bukan tidak beralasan, karena hampir dalam setiap kesempatan berbicara Cak Roes selalu mengutip ucapan-ucapan Bung Karno, seorang tokoh yang dikaguminya dan sekaligus memiliki hubungan yang dekat baik secara pribadi maupun dalam struktur pemerintahan. Penulis berpendapat bahwa Bung Karno sebagai seorang pemikir dan Roeslan Abdulgani yang menerapkan pemikirannya merupakan dua hal yang berbeda. Tetapi bahwa keduanya dapat digambarkan sebagai dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Artinya, sebuah pemikiran besar hanya dapat diketahui efektifitasnya jika dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan sebagai seorang pemikir menjadi berarti dan bermakna ketika berhasil diterapkan.

Hal yang menarik dari hubungan antara Roeslan Abdulgani dengan Bung Karno, yaitu bahwa Cak Roes mengakui banyak belajar dari Bung Karno termasuk dalam hal berpidato. Tetapi di sisi lain Bung Karno juga pernah mengakui bahwa dirinya juga banyak belajar dari Cak Roes. Satu hal yang tak dapat dipungkiri, Cak Roes sering menyebut nama Bung Karno dalam berbagai kesempatan pidatonya, bahkan dengan terus terang menyitir ucapan-ucapan Bung Karno secara detail kata demi kata. Bung Karno juga sering menyebut nama Roeslan Abdulgani dalam pidatonya, meskipun tidak dalam konteks mengutip ucapannya. Itulah sebabnya Cak Roes oleh banyak penulis sejarah diberi predikat

---

<sup>119</sup> Casper Schuurin, *op. cit.*, hal. 70-71.

sebagai “Jubir Usman”, yang dimaksud adalah Juru Bicara Bung Karno sehubungan dengan doktrinnya Manipol-USDEK (Manifesto politik – UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia).<sup>120</sup>

Memang jika ditelusuri dari pidato-pidatonya dalam berbagai kesempatan, seringkali Roeslan menyitir pendapat dan pernyataan Bung Karno. Suatu hal yang dapat dijadikan indikator bahwa ia sekadar juru bicara Bung Karno. Namun demikian bukan berarti Cak Roes tidak memiliki peranan dalam ikut serta membangun bangsa dan membangun karakter (*nation and character building*) seperti apa yang menjadi impian besar Bung Karno. Sebagai orang yang memiliki hubungan dekat dengan Bung Karno dan banyak mendapat kesempatan menduduki berbagai jabatan, setidaknya Cak Roes memiliki peranan dalam penerapan pemikiran Bung Karno pada periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965).

Peranan tersebut akan dapat dijalankan dengan baik apabila terlebih dahulu Cak Roes dapat memahami pemikiran-pemikiran Bung Karno. Bentuk pemahaman yang ditunjukkan Cak Roes adalah seringnya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno dalam berbagai kesempatan menyampaikan pidato, amanat, prasaran, ceramah, kuliah umum, dan tulisan-tulisannya. Suatu hal yang dilakukannya dengan penuh kesadaran dan kebanggan. Kebanggan itu ditunjukkannya dengan penyebutan nama Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi atau sebagai pencetus gagasan tertentu yang berkaitan dengan konsep persatuan dan kesatuan bangsa, suatu hal yang sangat didambakannya. Malahan, dalam suatu kesempatan menyampaikan amanat tertulis dalam acara peresmian LPKB Cabang Bogor yang berlangsung pada tanggal 6 Juni 1963, isinya memuat banyak hal yang merupakan kutipan dari beberapa pidato Bung Karno.<sup>121</sup>

<sup>120</sup> Herbert Feith dan Lance Castles (*ed.*), *op. cit.*, hal. 252. Predikat “Jubir Usman” itu dituliskan sebagai biodata Roeslan Abdulgani selaku penyumbang tulisan yang merupakan salinan dan kutipan dari pidatonya, dan yang ditempatkan dalam konteks “Nasionalisme Radikal”.

<sup>121</sup> Amanat tertulis Roeslan Abdulgani disampaikan dalam acara peresmian pembentukan LPKB Cabang Bogor, tanggal 6 Juni 1963. Selengkapnya lihat: *Lampiran 11*.

Sedangkan kutipan pidato yang lain, simak pidato keduanya dalam kesempatan yang berbeda berikut ini:<sup>122</sup>

No.	Pidato Bung Karno	Pidato Roeslan Abdulgani
1.	“Perdjoangan membebaskan Irian Barat merupakan suatu dasar fundamental daripada Nationbuilding kita, bahkan juga suatu dasar fundamental daripada <i>characterbuilding</i> Indonesia.”	“..., ditingkat Nasional dan ditingkat Internasional, penerangan kita itu akan ditujukan terus untuk NATION BUILDING, - membangunkan suatu persatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Malahan baru-baru ini P.J.M. Presiden menegaskan lagi, bahwa disamping itu perlu ditambahkan djuga dengan CHARACTER BUILDING, ...”

Kutipan pidato yang diucapkan Bung Karno tersebut pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang baru, terutama untuk konsep *nationbuilding* karena telah sering diucapkan dalam berbagai kesempatan. Tetapi untuk konsep *characterbuilding*, tampaknya dalam kesempatan tersebut baru untuk pertama kalinya secara eksplisit Bung Karno menyebutnya. Roeslan pun selama ini lebih menekankan pada masalah konsep *nationbuilding*, sehingga ketika Bung Karno menambahkan konsep *characterbuilding*, ia pun segera mensosialisasikannya dalam setiap kesempatan berbicara. Hal tersebut menunjukkan bahwa Roeslan senantiasa memperhatikan perkembangan konsep-konsep baru yang menjadi pemikiran Bung Karno, untuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat.

<sup>122</sup> Kutipan pidato Bung Karno no. 1 terdapat pada “Tahun Kemenangan”, Amanat Presiden Sukarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1962 di Djakarta, dalam *Dibawah Bendera Revolusi*, Djilid Kedua, hal. 498; sedangkan kutipan pidato Roeslan Abdulgani no.1 terdapat pada “Pidato Didepan Para Pegawai Penerangan Di Kotabaru-Irian Barat, 14 Djuni 1963” dalam *Buatlah Irian Barat Satu Zamrud Jang Indah* (kumpulan Amanat-amanat dan Pidato-pidato Penting Khusus mengenai Irian Barat) 1 Mei 1963-1 Mei 1964, Departemen Penerangan Republik Indonesia, hal. 108. Kutipan pidato Bung Karno no. 2 terdapat pada “Lahirnya Pancasila” dalam Bung Karno, (2001), *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Penerbit PT. Toko Gunung Agung Tbk., hal. 189; sedangkan kutipan pidato Roeslan Abdulgani terdapat pada “Sambutan J.M. Wampa Bid. Khusus/Menpen Dr. H. Roeslan Abdulgani” dalam *Assimilasi Dalam Rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa* (Sambutan-sambutan/Prasaran-prasaran pada Musjawarah Assimilasi pada tanggal 10 s/d 12 Maret 1963 di Djakarta), Departemen Penerangan R.I., hal. 9. Kutipan pidato Bung Karno no.3 terdapat pada C.S.T. Kansil (*at. al.*), (1964), *Capita Selecta: Pembinaan Kesatuan Bangsa (28 Okober 1928-28 Oktober 1964) Dalam Rangka Nation Building dan Character Building*, Kompartimen Perhubungan Dengan Rakjat, Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa, hal. 11; sedangkan kutipan pidato Roeslan Abdulgani no. 3 terdapat pada “Indonesia Tidak Menghendaki Warganegarannya Punja Dubbel Vaderland”, Sambutan J.M. Menko/Menpen dalam rapat L.P.K.B. di Sujrabaja, dalam sumber yang sama, hal. 134, 136, 137, 138.

No.	Pidato Bung Karno	Pidato Roeslan Abdulgani
2.	<p>“Ernest Renan Menyebut syarat bangsa; “le desior d’etre ensemble”, yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa, yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.</p> <p>.....</p> <p>Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer, di dalam bukunya “Die Nationalitätenfrage”, di situ dinyatakan; “Was ist eine Nation?” dan jawabnya ialah; “Eine Nation ist eine aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft.” Inilah yang menurut Otto Bauer satu natie. (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib).”</p>	<p>“Dalam usaha kita dibidang pembinaan bangsa, atau “nation building” dewasa ini, maka Bung Karno dalam pidato „Lahirnja Pantja Sila” menekankan, bahwa pikiran-pikiran jang mendasari proses “nation building” itu ialah tiga buah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pertama teorinya Ernest Renan, jang menitik-beratkan kepada adanya keinginan bersama untuk membangunkan djiwa bangsa jang bersatu,</li> <li>kedua teorinya Otto Bauer, jang menekankan kepada timbulnja persatuan karakter akibat daripada persamaan nasib.</li> <li>Patriotisme atau tjinta kepada Tanah Air.”</li> </ol>

Dalam kutipan pidato yang kedua ini, Roeslan menunjukkan kemampuannya untuk menangkap dan meterjemahkan jalan pikiran Bung Karno. Hal ini tampak dari apa yang diucapkan Bung Karno mungkin masih sulit dipahami oleh orang lain terutama yang tidak memiliki kemampuan berbahasa asing dengan baik, meskipun Bung Karno sendiri memberikan penjelasan dari bahasa asing yang diucapkannya itu. Di sini Roeslan tidak saja berupaya memahami pemikiran Bung Karno tetapi juga menyederhanakan konsep tersebut dan disusun kembali dalam kalimat yang lebih singkat dan mudah dimengerti oleh orang awam sekalipun.

Dengan demikian, maka sesungguhnya peranan Roeslan tidak hanya sebatas pada menerapkan pemikiran Bung Karno sebagai konsep yang sudah matang, tetapi ia juga memiliki peranan yang lain yaitu dalam hal memahami dan mengolah kembali sehingga menjadi konsep yang lebih sederhana. Di sinilah sumbangan pemikiran Roeslan dibutuhkan oleh Bung Karno – seperti pernah dikatakan oleh keduanya – sehingga apa yang diinginkan oleh Bung Karno dapat diwujudkan. Tampaknya Roeslan menyadari tingkat perkembangan kemampuan masyarakat Indonesia pada masa itu, sehingga kesalahpahaman terhadap konsep-konsep Bung Karno dapat dihindarkan. Dengan cara inilah maka kegiatan indoktrinasi dapat berjalan lebih efektif.



No.	Pidato Bung Karno	Pidato Roeslan Abdulgani
3.	<p>1. "Dalam amanat saja, Lahirnja Pantjasila, saja telah mengemukakan pikiran-pikiran jang mendasari proses "NATION BUILDING", ...</p> <p>2. Proses "NATION BUILDING" itu terus-menerus memerlukan aktivitas jang dinamis, pemupukan mental dan djiwa jang ingin bersatu, ...</p> <p>3. Saja membenarkan usaha-usaha djiwa muda dalam pembinaan kesatuan Bangsa ini, dengan menghilangkan sikap-sikap dan sifat-sifat menjendiri (eksklusivisme), ...</p> <p>4. Saja gandrung akan kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia, saja tidak mau mengenal pembatasan "asli" dan "tidak asli", ...."</p> <p>Selengkapnya, lihat: <i>Lampiran 9</i>.</p>	<p>"..., saja telah mengemukakan pikiran-pikiran jang mendasari proses "Nation Building", jaitu adanja keinginan bersama untuk membangun djiwa Bangsa jang bersatu , persatuan karakter karena persamaan nasib dan patriotisme.</p> <p>.....</p> <p>...proses nation building memerlukan terus menerus aktivitas dinamis terhadap pemupukan mental dan djiwa jang ingin bersatu.</p> <p>.....</p> <p>..., bahwa saja membenarkan usaha-usaha djiwa muda dalam pembinaan kesatuan Bangsa ini, menghilangkan sikap-sikap menjendiri, eksklusivisme dengan djalan penjatuan, dengan djalan pembauran, asimilasi didalam tubuh Bangsa Indonesia.</p> <p>.....</p> <p>....Saja gandrung akan persatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Saja tidak mau mengenal pembatasan asli dan tidak asli, persukuan serta pementjilan-pementjilan jang berupa apapun, dalam kesatuan tubuh bangsa Indonesia."</p>

Pada kutipan no. 3 ini, yang terdiri dari empat butir pada pidato Bung Karno, selain Roeslan mengutip ulang butir-butir pidato tersebut, ia juga memberikan penjelasan untuk tiap butir yang dikutipnya. Penjelasan Roeslan itu merupakan penafsiran sebagai bentuk pemahaman terhadap pemikiran Bung Karno. Dalam kutipan dari butir *pertama*, Roeslan memberikan penjelasan:

"Kalau saja boleh mengomentari amanat point satu ini, ini tidak lain daripada pendapatan daripada apa jang beliau njatakan dalam lahirnja Pantjasila. Pantjasila lahirnja didjaman Djepang pada tanggal 1 Djuni 1945. Bung Karno mengemukakan satu teoritis fundasi daripada nasionalisme Indonesia dimana beliau menolak paham, bahwa nasionalisme itu persamaan agama, nasionalisme itu adalah persamaan ras, menolak bahwa nasionalisme itu adalah persamaan daripada warna kulit, ...."<sup>123</sup>

Kemudian dalam kutipan dari butir *kedua*, penjelasan Roeslan adalah:

"Siapa jang didalam badannja berkiplat ke Indonesia, tetapi didalam djiwanja mengelirik kekiblat diluar negeri dibidang politik, dibidang sosial dan dibidang ekonomi dia adalah apa jang dikatakan oleh Bung Karno "retak dalam djiwanja." Een gespleten persoonlijkheid, dan een natic van gespleten persoonlijkheid, adalah een gespleten natic. Dan dia punja denken, pemikiran, akan mendjadi gespleten denken, utjapannja Indonesia

<sup>123</sup> Roeslan Abdulgani, "Indonesia Tidak Menghendaki Warganegarannya Punja „Dubbel Vaderland" dalam C.S.T. Kansil (*at. al.*), *op. cit.*, hal. 134.

denken isinja Hollands denken, Arabis denken, Chinees denken, Russis denken atau Amerikaans denken.

Saudara-saudara sekalian telah mengetahui bahwa Bung Karno kalau berkata “Saja menentang dan kikis habis Hollands denken itu”, maksudnja adalah het-a-Indonesis denken, het-on Indonesis denken, het-in Indonesis denken djuga het-anti-Indonesis denken. Inilah apa jang dimaksud didalam Amanat jang kedua.”<sup>124</sup>

Begitu pula dengan kutipan pada butir *ketiga*, Roeslan pun memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Dus Bung Karno membenarkan penjatuan pembauran didalam tubuh bangsa Indonesia, tetapi harus diingatkan, bahwa pembauran ini tidak dalam artian biologis. Pembauran ini tidak dalam arti hal-hal lain, terketjuali didalam bidang jang menjangkut politik, ialah begrip seperti jang kita kehendaki didalam nation-building.”<sup>125</sup>

Dan pada bagian akhir dari kutipannya, yaitu butir *keempat*, Cak Roes mengemukakan penjelasannya:

“Eksklusivisme tidak dibenarkan oleh presiden kita. Eksklusifisme jang menganggap dirinja karena sesuatu hal eksklusif, jang umpamanja pernah oleh kaum kolonialis dijatakan di Hongkong dan dikenal oleh umum, bahwa didalam Park ini “not allowed dogs and Chinese.” Dan di Bandung dan Djakarta pernah djuga terdjadi, didjaman kolonial, dilarang untuk berenang disatu kolam renang miliknja orang Belanda dengan tulisan “niet toegelaten voor honden en Inlanders.”

Nah, ini karena apa? Karena ada satu klasse jang karena ekonomisnja baik jang memegang politik mengadakan eksklusivisme, maka menganggap lain pihak itu sedikitnja, een politieke melaatse. Orang sakit-kusta-politik atau orang sakit-kusta-sosial.”<sup>126</sup>

Bagi penulis, penjelasan yang dilakukan oleh Roeslan Abdulgani terhadap butir-butir pernyataan Bung Karno yang dikutipnya itu merupakan bentuk nyata kemampuannya menagkap isi dan memahami arti maupun maknanya. Dengan demikian, dapat dikatakan pula bahwa penjelasan Roeslan merupakan hasil elaborasinya terhadap pemikiran-pemikiran Bung Karno. Roeslan tidak sekadar mengutip ulang begitu saja, tetapi berusaha menterjemahkan ke dalam pemahaman yang mudah dimengerti oleh orang awam sekali pun. Apa yang dilakukan Cak Roes ini, diharapkan dapat memperlancar proses indoktrinasi sehingga indoktrinasi berjalan efektif. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor penyebab hubungannya dengan Bung Karno semakin dekat.

Rupanya bukan kutipan itu saja yang merupakan cerminan atau pantulan dari pemikiran Bung Karno. Pernyataan-pernyataan Cak Roes yang terkait dengan kegiatan Pembinaan Kesatuan Bangsa itu sarat dengan nuansa konsep

<sup>124</sup> *Ibid.*, hal. 137.

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*, hal. 138.

pemikiran Bung Karno. Nuansa itu bisa ditangkap dari kutipan pernyataan yang lain dan merupakan bagian dari *event* yang sama, yaitu:

“Saja melihat musjawarah asimilasi sekarang ini sebagai usaha untuk memperkuat semenja “nation building” itu, jang tumbuh dari kewadjarannya sedjarah, tanpa paksaan dari atas. Dan sesuai dengan andjuran Presiden kita, jang menekankan bahwa „das Sollen“-nja adalah „Ika”, dan „das Sein“-nja adalah „Bhineka“-nja, maka saja harapkan supaja kita djangan bersikap passip dalam proses ini, melainkan aktip menundjukkan kita punja kesetia-kawanan terhadap Tjita-tjita Bangsa, Nasib Rakjat dan Tanah Air, menudju kearah persatuan bulat antar-suku, antar-lapisan dan antar-golongan dari Sabang sampai Merauke.”<sup>127</sup>

Bentuk pemahaman lain terhadap pemikiran Bung Karno terlihat dari Kuliah Umum di SESKOAD Bandung pada tanggal 13 April 1962, dengan materi kuliah *Pantjasila Ideologi Pemersatu, Revolusi Tidak Boleh Mandeg-Dimana Kita Sekarang Berada?*, maka apa yang dimaksud kepribadian oleh Cak Roes itu akan terungkap dalam kutipan berikut.

“Jang dimaksud dengan Kepribadian Indonesia ialah: keseluruhan tjiri-tjiri chas bangsa Indonesia, jang membedakan bangsa Indonesia dengan lain-lain bangsa. Keseluruhan tjiri chas bangsa Indonesia, jang membedakan bangsa Indonesia dengan lain-lain bangsa itu adalah pentjerminan daripada garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa itu ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan tempat-lingkungan Indonesia serta-suasana waktu sepanjang perdjalanannya masa. Tjiri-tjiri chas budi dan kehidupan Indonesia adalah antara lain semangat Gotong-Rojong, Kekeluargaan, Ketuhanan, Kemanusiaan, Keadilan, Ramah-tamah dan sifat Bhinneka Tunggal Ika.”<sup>128</sup>

Kutipan tersebut tidak secara eksplisit menampakkan pemikiran Bung Karno dalam pemahaman Roeslan Abdulgani. Tetapi dari judul dan substansinya jelas bahwa hal tersebut merupakan buah pikiran Bung Karno.

Sartono Kartodirdjo mengungkapkan hal senada dengan menunjuk kebudayaan nasional berdasarkan Pancasila merupakan sarana dalam pembangunan bangsa (*nation building*). Ungkapan Sartono itu memperkuat anjuran Sukarno yang dikutip oleh Cak Roes tersebut, yang secara lengkap sebagai berikut:

“..., bahwa pemulaan kehidupan bangsa Indonesia dalam rangka KN (Kebudayaan Nasional-*pen*) yang berdasarkan Pancasila, adalah proses yang timbal-balik antar yang ideal dan yang aktual, antara *das Sollen* dan *das Sein*, antara “kebenaran ideal” dengan realitas pengalaman historis. Dalam hal ini kebudayaan perlu dipandang sebagai polaritas antara yang ideal dan yang aktual, antara nilai-nilai dan kelakuan individu, antara kelembagaan dan interaksi sosial, dan sebagainya.”<sup>129</sup>

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>128</sup> Roeslan Abdulgani, (1963), *op. cit.*, *Resapkan ...*, hal. 147-148.

<sup>129</sup> Sartono Kartodirdjo, (2005), *Dari Indische sampai Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 83.

Dari pernyataan Sartono tersebut tergambar dengan jelas adanya hubungan kesinambungan secara historis dari apa yang pernah dipikirkan oleh Sukarno, dan selama bertahun-tahun berusaha diwujudkan oleh Roeslan Abdulgani melalui proses indoktrinasi, tentang pentingnya membangun bangsa (*nation building*). Secara teoretis-ideal, kebudayaan nasional berdasarkan Pancasila merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai tertentu yang dikandung di dalamnya. Nilai-nilai tertentu yang dikandung didalam kebudayaan nasional berdasarkan Pancasila itu merupakan karakteristik bangsa (*character building*).

Proses penanaman nilai-nilai itu dapat dilakukan melalui *habituaasi* (pembiasaan) kelakuan manusia menurut pola kelakuan atau norma sosial tertentu, akan menciptakan suatu kelembagaan sebagai realisasi nilai-nilai ideal tertentu, demikian lebih lanjut Sartono mengungkapkan.<sup>130</sup> Dengan demikian setiap individu manusia Indonesia memiliki jiwa budaya yang sama, dan jiwa budaya yang sama akan melahirkan budaya yang melembaga dalam kehidupan sosial masyarakat, dan itu berarti terciptanya etos budaya bangsa Indonesia. Di dalam etos budaya Indonesia itu dikandung nilai-nilai yang menjadi watak khas dan pada akhirnya merupakan karakteristik bangsa.

Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan mendasari terwujudnya kebudayaan nasional telah melahirkan etos kebudayaan. Seperti halnya bangsa lain di dunia, misalnya Jepang dengan semangat busido-nya, India dengan semangat dharma-nya, dan Eropa Barat yang menjunjung tinggi Etika Kristen, maka bangsa Indonesia memiliki semangat Pancasila. Jadi Pancasila adalah etos kebudayaan bangsa Indonesia, yang membedakan dengan bangsa lain dalam berbagai aspek seperti politik, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Bangsa Indonesia memiliki ciri politik sendiri, ciri kehidupan sosial sendiri, ciri ekonomi sendiri, dan ciri budaya sendiri. Dalam politik misalnya, bangsa Indonesia memiliki asas musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan bersama dengan tidak menutup kemungkinan bagi cara-cara yang lain seperti voting atau pemungutan suara apabila musyawarah dan mufakat itu tidak mencapai kesepakatan. Hal tersebut merupakan cerminan dari

<sup>130</sup> *Ibid.*

sila keempat dari Pancasila yaitu: “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Menjunjung tinggi nilai-nilai pluralitas merupakan ciri khas dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, yang pada masa Orde Baru nilai pluralitas itu dikonsepsikan dengan akronim SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan Masyarakat). Sedangkan ciri ekonomi Indonesia seperti terdapat pada Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33, Ayat (1)-(5) yang bunyinya sebagai berikut:<sup>131</sup>

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Salah satu bentuk pelaksanaan dari Pasal 33, Ayat (5) maka pemerintah mengatur sistem ekonomi Indonesia melalui Undang-Undang Pokok Perkoperasian, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967. Sesuai Undang-Undang tersebut, pemerintah menyatakan bahwa: “Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia”. Jadi koperasi merupakan karakteristik sistem ekonomi masyarakat Indonesia, seperti dianjurkan oleh Bapak Koperasi Moh. Hatta. Undang-undang tersebut selanjutnya diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, dimana kopersasi merupakan sistem ekonomi kerakyatan yang berbentuk Badan Usaha.

Demikian pula halnya dengan budaya, bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa yang dinamikanya membentang sepanjang sejarah keberadaan bangsa Indonesia sejak prasejarah hingga sekarang. Aktualisasi dan konseptualisasi kebudayaan tersebut juga diatur dalam UUD 1945, Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 32, Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:<sup>132</sup>

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

<sup>131</sup> Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bab XIV, Pasal 33, Ayat (1)-(5).

<sup>132</sup> *Ibid.*, Bab XIII, Pasal 32, Ayat (1) dan (2).

- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dasar pemikiran tentang pengembangan kebudayaan nasional berdasarkan Pancasila seperti pada uraian tersebut, ikut mewarnai aktivitas Roeslan selama menjalankan peranan dan tugas-tugasnya dalam pemerintahan. Dalam suatu kesempatan halal bihalal dengan keluarga Departemen Penerangan, ia menyampaikan pidato dengan judul *Berani Bertindak Sambil Selalu „Mawas Diri”*. Dari bagian pidatonya itu ia mengucapkan : “... patriotisme jang namakanlah emosional, itu sudah ada, pada rakjat kita; patriotisme politik, patriotisme ekonomi, patriotisme sosial”.<sup>133</sup> Pada waktu itu ia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertama Khusus merangkap Menteri Penerangan.

Begitu pun dengan pidatonya *Menentang Imperialisme Kebudayaan*, pada acara pelantikan S.P.S. – O.P.S. – Pers, ia menyampaikan:

“... ditinjau dari segi Mental dan Kebudajaan, karena Revolusi kita bukan hanja Revolusi materuil, tapi djuga Revolusi mental, dimana tenaga “funds and forces” jang progressif revolusioner harus digunakan untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakjat, jang tidak hanja meminta sumbangan keringat dan d i s i p l i n, tapi djuga fikiran-fikiran dan konsepsi-konsepsi baru, maka tidaklah berlebihan kiranja kalau pembentukan S.P.S. – O.P.S. – Pers ini dapat pula kita golongankan kedalam barisan perdjjoangan ini, jaitu dalam perdjjoangan menentang imperialisme kebudajaan dan dalam hal mana Pemerintah harus melindungi dan mendjjamin berkembangnja kebudajaan nasional, termasuk S.P.S. – O.P.S. – Pers .....”<sup>134</sup>

Pernyataan Roeslan yang tertuang dalam pidatonya tersebut menyiratkan bahwa perjuangan menentang kolonialisme-imperialisme Barat tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata. Dalam pandangan Roeslan, imperialisme yang berkembang di Indonesia tidak hanya mengancam sendi-sendi ekonomi melalui eksploitasi kekayaan alam demi kekayaan dan kejayaan kaum imperialis, tetapi juga mengancam eksistensi kebudayaan yang melahirkan sikap mental rendah diri dan pesimisme. Bahkan bangsa Barat sendiri dengan kecongkakan dan kesombongannya mengklaim bahwa bangsanya adalah bangsa yang “superior” dan bangsa yang menjadi sasaran imperialismenya adalah bangsa “inferior”. Barat merasa lebih tinggi derajatnya dibanding bangsa Timur (Asia dan Afrika). Dengan kata lain, ini berarti dominasi Barat atas Timur.

<sup>133</sup> Roeslan Abdulgani, (1963), *Pantjaran Api Nan Tak Kundjung Padam*. Djakarta: Departemen Penerangan RI., hal. 87.

<sup>134</sup> *Ibid.*, hal. 95.

Klaim Barat atas dirinya sebagai bangsa superior ini telah berkembang menjadi mitos yang membungkus alam pikiran bangsa terjajah sebagai bangsa yang hidupnya menghamba kepada penjajah, mengharapkan belas kasih, dan hanya menunggu datangnya Ratu Adil<sup>135</sup> yang akan membebaskan dirinya dari belenggu kolonialisme-imperialisme. Untuk itulah maka Roeslan mempersepsikan bahwa sikap-mental juga merupakan alat perjuangan. Rakyat Indonesia harus dibangun jiwanya, diberikan pencerahan dengan doktrin-doktrin yang akan mendorong tumbuhnya semangat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran dan konsepsi-konsepsi baru seperti yang dinyatakan melalui pidato-pidatonya. Tabir yang menyelimuti kebodohan dan keterbelakangan akibat sistem kolonialisme-imperialisme yang diwariskan kepada masyarakat Indonesia harus didobrak dan dibongkar untuk digantikan dengan sistem yang baru, yang lebih sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila.

Dari pidato-pidato yang disampaikan dalam berbagai kesempatan yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku, antara lain dikemukakan mengenai landasan politik luar negeri Indonesia yaitu:

“... dapat disebut disini adanya dua sandaran jaitu: pertama jang bersifat constant dan kedua jang bersifat variabel.

Adapun sandaran pertama jang bersifat constant itu, adalah Pantja Sila, jaitu ideologie Negara kita.

Sandaran kedua, jaitu jang bersifat variabel, adalah ketentuan-ketentuan seperti jang terdapat dalam Program Pemerintah. Tiap-tiap Pemerintah mempunjai programnja sendiri-sendiri, didalam mana termasuk pula programnja mengenai kebidjaksanaan politik luar negeri jang akan dilaksanakan.

Dalam hubungan ini saja ingin menundjukkan suatu garis tegas jang constant sifatnja dalam pemberian nama dan kwalifikasi daripada haluan politik luar negeri kita, yakni:

bahwa politik luar negeri kita adalah bebas dan actief menudju perdamaian dunia atas dasar kepentingan nasional.”<sup>136</sup>

Untuk pertama kalinya politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif ditegaskan sebagai program kabinet yaitu dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957), dimana Roeslan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Sebelumnya, ia menduduki jabatan Sekjen Kementerian Luar Negeri. Pada kabinet-kabinet sebelumnya garis politik luar negeri hanya disebut bebas, tetapi tidak dirangkai

<sup>135</sup> Konsep “Ratu Adil” dipopulerkan sejarawan Sartono Kartodirdjo melalui berbagai tulisannya, bahkan ia mendapat julukan sebagai “Sejarawan Ratu Adil”.

<sup>136</sup> Roeslan Abdulgani, (1956), *Mendajung Dalam Taufan, Ichtihar dan Ichtisar Politik Luar Negeri Indonesia 1956*, Djakarta: Penerbit “Endang”, hal. 9. Lihat juga P. N. H. Simanjuntak, S.H., (2003), *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia, Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*, Jakarta: Djambatan, hal. 166.

dengan kata aktif, seperti yang terdapat dalam Program Kabinet Wilopo (1952-1953) dan Program Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955).<sup>137</sup> Sedangkan kabinet yang lain belum mencantumkan garis politik luar negeri dalam program kabinetnya, karena masih memerlukan konsentrasi untuk urusan dalam negeri.

Apa yang dikemukakan Cak Roes dalam pidatonya itu memberikan gambaran tentang adanya dua prinsip dasar membangun hubungan dengan luar negeri berlandaskan pada Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang merupakan karakteristik bangsa Indonesia. Sedangkan prinsip bebas dan aktif, bebas berarti tidak memihak Blok Barat maupun Blok Timur yang saling bertentangan secara ideologis,<sup>138</sup> dan aktif artinya berperanserta dalam upaya menggalang terwujudnya cita-cita perdamaian dunia. Bentuk konkret dari peranserta itu adalah pengiriman pasukan perdamaian ke negara-negara yang mengalami konflik apabila diminta oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kebijakan politik ini dikenal dengan Misi Republik Indonesia Garuda (MISRIGA).

Prinsip tersebut dikemukakan Cak Roes sebagai kesimpulan dari pidatonya yaitu:

“Ringkasnja dapatlah saja katakan bahwa politik luar negeri kita jang bebas dan actief itu, harus menampakkan diri keluar tidak semata-mata sebagai suatu persoalan theoretic dan akademis belaka, melainkan disamping merenungkan suatu „viewpoint”, sesuatu pandangan, djuga kemudian harus mampu melahirkan suatu „stand point”, suatu pendirian. Pendirian2 itu dapatlah disingkatkan sebagai berikut:

- a. Didalam persoalan nasionalisme kita prinsipiel berdiri dipihak bangsa-bangsa jang masih didjajah.
- b. Didalam persoalan perang dingin kita setjara actief berusaha menengahi dan menjegah meletusnja perang dingin.
- c. Didalam menghadapi soal2 didalam negeri, kita harus mendahulukan perhatian kita atas rentjana Pembangunan 5 tahun.”<sup>139</sup>

Masih tentang Pancasila, kumpulan buah pikirannya dalam bentuk teks pidato, makalah seminar, dan artikel memuat intisari yang menjelaskan fungsi Pancasila dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>140</sup> Kumpulan buah pikirannya tersebut kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku yang dapat

<sup>137</sup> P. N. H. Simanjuntak, S.H., *ibid.*, hal. 129 dan 141.

<sup>138</sup> Blok Barat adalah istilah yang digunakan bagi kelompok negara-negara yang berhaluan liberal dibawah pimpinan Amerika Serikat, sedangkan Blok Timur adalah kelompok negara-negara yang memiliki ideologi komunis dibawah pimpinan Uni Soviet. Kedua blok ini terlibat permusuhan dalam kancah Perang Dingin (*Cold War*) pasca Perang Dunia II (1939-1945) yang berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990.

<sup>139</sup> Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, *Mendajung...*, hal. 15.

<sup>140</sup> Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, *Resapkan...*



dijadikan referensi bagi orang yang ingin lebih jauh mempelajari tentang Pancasila.

Sedangkan dari kuliah umum yang disampaikan di depan mahasiswa Universitas Rakjat Djakarta pada tanggal 22 Januari 1962, memuat beberapa hal penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, pentingnya kekuatan senjata di garis belakang sebagai pendukung keberhasilan diplomasi masalah Irian Barat. *Kedua*, perundingan merupakan bagian dan alat pertempuran, dan *ketiga*, penegasan Presiden Sukarno baik di dalam maupun di luar negeri bahwa Indonesia tidak meminta-minta untuk berunding tetapi tidak pula menolak untuk diajak berunding asal atas dasar penyerahan administratif Irian Barat secara konkrit kepada Indonesia.<sup>141</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam perjuangan merebut kembali Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi, kekuatan bersenjata dan diplomasi merupakan alat yang saling melengkapi, seiring-sejalan. Ketika perang harus diakhiri maka alat yang digunakan untuk menuju proses damai adalah diplomasi, begitu pula ketika diplomasi mengalami jalan buntu karena kompromi tidak bisa dicapai maka harus siap bertempur dengan kekuatan senjata.

Sedangkan pernyataan Presiden Sukarno “tidak meminta-minta untuk berunding” merupakan sikap mental bangsa Indonesia dimana Cak Roes ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat, yang memiliki harga diri dan kehormatan, dan tidak bergantung kepada bangsa lain manapun juga. Dengan kata lain, kembalinya Irian Barat yang kemudian diubah namanya menjadi Irian Jaya, dan akhirnya bernama Papua semata-mata merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur diplomasi yang ditempuh melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949, dan jalur perjuangan bersenjata yang ditandai dengan gugurnya seorang perwira Angkatan Laut Indonesia bernama Komodor Yos Sudarso dalam sebuah pertempuran yang terjadi di Laut Aru.

Begitu pula dengan ceramah-ceramahnya yang disampaikan di depan peserta Kongres Organisasi Wanita seperti Persit, IKWI, Perwari, dan Wanita Demokrat Indonesia, yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan RI tahun

<sup>141</sup> Roeslan Abdulgani, (1962), *Peranan Universitas dalam Perjuangan Irian Barat* (Kuliah Umum di Universitas Rakjat Djakarta, Pada tgl. 22 Djanuari 1962), Djakarta: diterbitkan oleh jajaan “universitas rakjat”.

1964. Salah satu dari pernyataan Cak Roes yang menarik dan memiliki korelasi terhadap *nation and character building* adalah yang disampaikan pada Kongres ke-V Wanita Demokrat Indonesia tanggal 17 Juli 1964 di Jakarta.

“Saja berpendapat, bahwa apa jang harus dikerdjakan oleh Wanita Demokrat dalam menghadapi situasi sekarang ini, seperti jang saja djelaskan diatas, jalah tidak lain dan tidak bukan : **pembinaan kerochanian, kedjiwaan dan mental jang sedjalan pasang-naiknja Revolusi kita sekarang ini**, berlandasan Pantja-Sila kita, jang dipantjarkan kedalam Manipol/Usdek dan jang disumberi oleh Marhaenisme sebagai tjerminannya Amanat Penderitaan Rakjat Marhaen.”<sup>142</sup>

Hasil terpenting dari kongres ini adalah memutuskan pergantian nama organisasi Wanita Demokrat Indonesia menjadi Gerakan Wanita Marhaenis, yang berarti menunjukkan betapa besarnya pengaruh gagasan Cak Roes terhadap organisasi itu. Di sisi lain, hal ini juga menampakkan ideologinya dalam berpolitik yakni dengan penyebutan kata *Marhaenisme* yang menjadi asas PNI (Partai Nasional Indonesia) bentukan Soekarno.<sup>143</sup>

Sebuah buku yang merupakan kumpulan buah pikiran Roeslan Abdulgani, antara lain memuat pandangan tokoh-tokoh nasional dan Barat mengenai Pancasila, baik berpandangan negatif maupun positif, yang kontra maupun yang memberi dukungan. Diantara pandangan para tokoh yang positif dan memberikan dukungan ialah sebagai berikut:

- a. Dr. J. Leimena dalam kata pengantar untuk buku *Pantja Sila* yang ditulis oleh Ds. Rosin, mengatakan: “menurut pandangan saja, Pantja Sila ini, sebagai suatu falsafah Negara, harus mendapat perhatian sebesar-besarnja, djustru dalam waktu Negara dan bangsa Indonesia berada dalam fase “one nation” dan “one state building”, ....”<sup>144</sup>
- b. Hamka dalam risalahnya “Urut Tunggang Pantja Sila” menyatakan pendapatnya bahwa: “bagi tiap-tiap orang jang beragama ..., Pantja Sila bukanlah sesuatu jang perlu dibitjarakan lagi, karena sila jang empat dari

<sup>142</sup> Roeslan Abdulgani, (1964), *Bersama-sama Wanita Menjelesaikan Revolusi*, B.P.U. Perusahaan-perusahaan Pertjetakan dan Penerbitan Negara, Departemen Penerangan R.I., hal. 54.

<sup>143</sup> Tentang asal mula lahirnya konsep “Marhaenisme” terdapat dalam Bung Karno, (2001), *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Penerbit PT. Toko Gunung Agung Tbk., hal. 26-32. Lihat juga Restu Gunawan (*Penyunting*), (1999), *Tokoh-tokoh Pemikir Paham Kebangsaan, Dr. Ir. Soekarno dan K. H. Ahmad Dahlan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, hal. 24-44.

<sup>144</sup> Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, *Resapkan...*, hal. 33-34.

- Pantja Sila sebenarnya hanyalah akibat sadja dari pada sila jang pertama, jaitu Ketuhanan Jang Maha Esa.”<sup>145</sup>
- c. A. Zakaria memandang Pantja Sila dari sudut Islam, bahwa: “Pantja Sila itu diwahyu-ilhamkan oleh Tuhan Jang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, jang oleh karenanja pasti sesuai getaran djiwa dan aliran darah dari ummat Indonesia.”<sup>146</sup>
  - d. Moh. Natsir dalam pidatonya di Pakistan Institute of International Affairs di Karachi pada tanggal 9 April 1952, mengatakan: “... Dengan tegas, Indonesia mewudjudkan Tauhid dan pertjaja kepada Tuhan Maha Esa itu sebagai tiang-turus dari Pantja Sila, - Kedaerah jang Lima -, dan dianut sebagai dasar rohani, achlak dan susila oleh Negara dan Bangsa Indonesia”.<sup>147</sup>
  - e. Ki Hadjar Dewantara berpendapat: “bahwa Pantja Sila dalam hakekatnja merupakan djiwa Bangsa kita, sifat pribadi rakjat kita, dalam lingkungan kenegaraan.”<sup>148</sup>
  - f. Prof. Mr. Drs. Notonegoro, atas nama Senat Universiteit Gadjah Mada pada kesempatan melakukan tugas promotor pada promosi honoris causa dalam Ilmu Hukum terhadap Presiden Sukarno, antara lain berkata: “Pantja Sila bukannja suatu konsepsi politik, akan tetapi buah hasil perenungan djiwa jang dalam, buah hasil penjelidikan tjipta jang teratur dan saksama diatas basis pengetahuan dan pengalaman jang luas.”<sup>149</sup>
  - g. G. Mc. T. Kahin dalam bukunya *Nationalism and Revolution in Indonesia* mengatakan bahwa: “Pantja Sila mentjerminkan suatu “matured social philosophy”, jang sangat berpengaruh dalam sikap djiwa rakjat Indonesia ditengah-tengah pergolakan Revolusi.”<sup>150</sup>
  - h. J. F. Rutger antara lain mengatakan bahwa: “... Dalam filsafah negaranya, Pantja Sila diberikan alasan-alasan setjara lebih mendalam daripada revolusi-revolusi itu.”<sup>151</sup>

<sup>145</sup> *Ibid.*, hal. 34.

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> *Ibid.*, hal. 35.

<sup>148</sup> *Ibid.*, hal. 36.

<sup>149</sup> *Ibid.*, hal. 37.

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid.*, hal. 38.

Pandangan beberapa tokoh tersebut memperteguh keyakinan Cak Roes bahwa Pancasila adalah darah baru yang dipompakan bagi semangat perjuangan bangsa Indonesia sejak meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara tidak perlu diragukan lagi kebenaran dan kesesuaiannya bagi bangsa Indonesia. Beberapa bentuk percobaan yang berupaya menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara telah mengalami kegagalan, misalnya Gerakan DI/TII yang dipelopori oleh SM. Kartosuwiryo dan Gerakan 30 September 1965/PKI. Dua bentuk gerakan tersebut membuktikan tentang kebenaran dan kesesuaian yang dimaksud. Oleh karena itu penetapan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan keputusan para *founding fathers* yang sudah final dan tidak dapat ditawar lagi.

Kemampuan Roeslan memahami jalan pikiran orang lain tidak hanya tercermin terhadap pernyataan Bung Karno. Ia juga memiliki sikap kritis terhadap buku yang pernah dibacanya, tentu karena memahami permasalahan dari isi buku tersebut. Hal ini diperlihatkan ketika pada tahun 1981 berkesempatan wawancara dengan *Prisma* untuk terbitan bulan Agustus, yang dimuat dalam kolom "Dialog." Cak Roes menanggapi tulisan Ben Anderson yang menyoroti tentang sejarah revolusi Indonesia (1944-1946) adalah merupakan revolusi pemuda. Cak Roes tidak sepenuhnya menyalahkan kesimpulan Anderson, tetapi ia memberikan sedikit koreksi:

"Jika kita baca buku Ben Anderson, *Java, in a Time of Revolution, Occupation and Resistance, 1944-1946* – bahwa revolusi Indonesia ini adalah revolusi pemuda – saya berpendapat bahwa ada benarnya, tetapi Anderson tidak seluruhnya benar.

Pemuda, yang pada masa itu berusia antara 20 dan 30 tahun, memang merupakan kelompok yang dinamik. Para pemuda, kebanyakan berasal dari Indonesia Muda yang mengecap pendidikan pada zaman penjajahan. Mereka adalah kekuatan pendobrak. Tetapi kita jangan lupa pada orang-orang pergerakan. Selain itu, kalau tidak ada rakyat banyak, yang menderita di bawah pemerintahan kolonial, apalagi di bawah kekuasaan Jepang, menurut saya revolusi itu tidak akan meledak. Jadi, revolusi kita bukan revolusi pemuda, tetapi revolusi di mana semua lapisan masyarakat ikut serta. Namun memang harus diakui, bahwa mungkin ia tidak bisa berjalan tanpa pemuda."<sup>152</sup>

Ditahun 1994, ketika usia Cak Roes sudah genap 80 tahun tapi masih dipercaya oleh Presiden Suharto sebagai Konsultan BP7, dalam suatu kesempatan ia diwawancara oleh Tony Hasyim seorang wartawan dari majalah *Forum Keadilan*. Dari hasil wawancara itu terungkap bahwa dalam usianya yang sudah

<sup>152</sup> "Melacak Jejak Revolusi Nasional" wawancara dengan Roeslan Abdulgani dalam *Prisma*, edisi Agustus 1981, hal. 66.

*sepuh* itu ia masih konsisten dan sangat concern dengan Pancasila dalam kaitannya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata-kata meluncur lancar dengan logat khas Jawa Timur, sama sekali tidak ada tanda-tanda *kepikunan* terbukti ia masih selalu mengutip ucapan-ucapan Bung Karno, sahabat sekaligus pemimpin yang dikaguminya di masa lalu.

Berikut petikan dari wawancara Tony Hasyim yang berlangsung di kantornya, Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat.

Ketika ditanya: “Mengenai wawasan kebangsaan, bagaimana sebenarnya inti pemahamannya ketika dicetuskan “Bapak Pendiri Republik” dahulu?” Cak Roes menjawab dengan tegas sebagai berikut:

“Seperti yang diajarkan para founding fathers dahulu, wawasan kebangsaan itu semula intinya adalah melawan kolonialisme secara destruktif. Seperti dikatakan dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Nah, itu perlu Anda ketahui, kolonialisme itu bergerak disegala bidang, yaitu mendominasi bidang politik, mengeksploitasi bidang ekonomi dan men-infiltrasi (*sic!*) di bidang kebudayaan. Nah, wawasan kebangsaan, nasionalisme kita mengajarkan kita untuk melawan ketiga-tiga cengkraman kolonialisme itu.

Waktu zaman Jepang, rupanya nasionalisme kita menjadi militan. Dan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, menjadikan jiwa nasionalisme tersebut menjadi konstruktif, dengan mengaitkan nasionalisme kita dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan peri kemanusiaan, dengan persatuan Indonesia, dengan kerakyatan, dan dengan keadilan sosial. Artinya Bung Karno membawa nasionalisme kita itu, selain dengan daya destruktifnya untuk melawan kolonialisme, juga memperkokoh daya konstruktifnya untuk menjadikan bangsa Indonesia berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itulah wawasan kebangsaan yang diajarkan oleh para founding fathers kita. Dan sudah terbukti, itulah kekuatan pendobrak bagi Proklamasi dan Revolusi 17 agustus 1945 kita.”<sup>153</sup>

Kemudian jawaban dari pertanyaan: “Setelah usia Republik ini mencapai 49 tahun, apa unek-unek anda sekarang ini?” Roeslan menjawab:

“Begini, pertama, bagaimanapun kita harus mensyukuri ada generasi yang telah berhasil mematahkan belenggu-belenggu kolonialisme. Mereka berhasil karena mereka memiliki jiwa dan semangat nasionalisme Pancasila. Itu merupakan nilai-nilai dasar bangsa kita yang operasionalnya tergantung dari keadaan. Nah, kini Pancasila tetap menjadi pedoman generasi sekarang. Nasionalisme Pancasila adalah cinta kepada Negara, cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa yang bersifat religius, yang bersifat humanistik, yang bersifat kerakyatan, yang bersifat keadilan sosial. Saya berharap itu mesti tetap menjiwai generasi sekarang dan seterusnya. ....”<sup>154</sup>

<sup>153</sup> Hasil wawancara Tony Hasyim, Wartawan Majalah *Forum Keadilan* dengan Roeslan Abdulgani, tahun 1994.

<sup>154</sup> *Ibid.*

Dalam *Republika Online*, “Roeslan Abdulgani: Jangan Tinggalkan Pancasila” terdapat tulisan:

“Tokoh nasional Roeslan Abdulgani menegaskan Pancasila sebagai ruh dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai saat ini masih sangat relevan dan dibutuhkan untuk membangun bangsa yang bermartabat dan punya harga diri di mata dunia.

“Bangsa ini akan mengalami kesulitan besar kalau ideologi Pancasila ditinggalkan. Itu sudah diingatkan Bung Karno pada akhir pemerintahannya”, kata Roeslan di Jakarta, Rabu (1/6).”<sup>155</sup>

Dari serangkaian pernyataan atas hasil wawancara yang dilakukan *Prisma* (1981), *Forum Keadilan* (1994), dan informasi yang terdapat pada *Republika Online* tersebut, penulis memperoleh gambaran yang jelas mengenai konsistensi pemikiran Cak Roes. Tokoh ini memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap nasib masa depan bangsa dan negaranya. Hal itu dilakukan dengan menyumbangkan pemikiran-pemikirannya pada berbagai kesempatan sebagai nara sumber dalam kegiatan seminar, diskusi, wawancara, dan sebagainya.

Ia tetap bersikap kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Salah satu bentuk sikap kritisnya, ia mengungkapkan bahwa dirinya kecewa dengan keadaan yang berkembang pada dewasa ini. Kekecewaan itu dialamatkan kepada permasalahan mengenai gagalnya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam pandangan Cak Roes, menciptakan masyarakat adil dan makmur merupakan cita-cita fase *ketiga* dari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Cita-cita yang *pertama* adalah membentuk negara kesatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan *kedua* adalah politik luar negeri yang bebas dan aktif. Konsepsi tentang negara kesatuan telah terwujud, meskipun deselingi dengan periode pembentukan negara serikat tetapi berhasil dikembalikan dan mampu dipertahankan hingga sekarang. Banyak politikus dan negarawan yang menyatakan bahwa bentuk negara kesatuan sudah final. Begitu pula dengan cita-cita kedua tentang politik luar negeri bebas dan aktif. Bangsa Indonesia, sejak dicetuskannya konsep bebas dan aktif hingga kini mampu mempertahankan netralitasnya, dan tidak terseret dalam kancah pertarungan ideologi terutama komunisme dan liberalisme. Di era Orde Baru, bahkan Indonesia mendapat kehormatan sebagai Ketua Gerakan Non Blok.

<sup>155</sup> *Republika Online*, “Roeslan Abdulgani: Jangan Tinggalkan Pancasila” dalam <http://www.polarhome.com/pipermail/marinir/2005-June/000737.html>, 13/11/2007.

Ia mengakui bahwa sejak pemerintahan Orde Baru hingga sekarang ini kemajuan di bidang pembangunan secara fisik telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun ia menyayangkan karena hasil-hasil pembangunan itu tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Situasi ini bertentangan dengan sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dengan gayanya yang khas dan ceplas-ceplos tetapi tidak membuat tersinggung bagi yang mendengarnya karena dibalut dengan humor yang segar, ia mengungkapkan permasalahan tersebut dalam berbagai kesempatan secara terbuka.

### **3.3 Hubungan Roeslan Abdulgani dengan Bung Karno**

Jauh sebelum Cak Roes mendapat kepercayaan menduduki berbagai jabatan penting dalam struktur pemerintahan, Sukarno telah mengenal dekat keluarga Haji Abdulgani. Bahkan Sukarno sering *ngebon*, karena ayah Cak Roes adalah pedagang yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Hal itu terjadi ketika Bung Karno masih indekost di rumah HOS Cokroaminoto di Surabaya, dimana pada masa itu Bung Karno sedang menyelesaikan studinya sebelum pindah ke Bandung untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi, sebagai mahasiswa pada *Technische Hogeschool* (THS) yang sekarang bernama Institut Teknologi Bandung (ITB). HOS Cokroaminoto sendiri kemudian dikenal sebagai guru politiknya Bung Karno.

Namun tidak demikian halnya dengan perkenalannya terhadap Cak Roes, mengingat usia keduanya terpaut 13 tahun, Bung Karno lahir pada 1901 sedangkan Cak Roes lahir pada 1914. Artinya pada saat Bung Karno sudah tumbuh dewasa, Cak Roes masih kanak-kanak sehingga sudah barang tentu belum saling mengenal secara dekat. Seiring berjalannya waktu, maka perbedaan usia tidak menjadi penghalang bagi keduanya untuk saling mengenal. Ketika itu Bung Karno telah menjadi presiden, sedangkan Cak Roes telah mencapai tingkat kematangan berpikir dan memiliki prestasi yang membanggakan. Itulah sebabnya Bung Karno banyak memberikan kesempatan kepadanya untuk menduduki berbagai jabatan dalam pemerintahan.

Jika diidentifikasi secara cermat, kedua tokoh nasional ini memiliki beberapa kemiripan atau persamaan baik dalam karakternya maupun pengalaman politiknya. Persaman-persamaan tersebut adalah:<sup>156</sup>

- a. Keduanya lahir dalam kultur masyarakat yang sama yakni Jawa Timur, Roeslan lahir di Surabaya dan Bung Karno lahir di Blitar.
- b. Keduanya berasal dari *bibit, bobot, dan bebet* yang seimbang yakni Roeslan keturunan saudagar kaya dan Bung Karno keturunan dari ningrat Jawa.
- c. Keduanya memiliki sikap politik yang sama yakni sebagai tokoh nasionalis, bernaung dalam organisasi politik yang sama (PNI), dan visi tentang masa depan bangsa yang sama yakni mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur.
- d. Keduanya sama-sama merupakan orator yang ulung dengan gaya yang meledak-ledak, dan
- e. Dalam hal ideologi, keduanya dipengaruhi oleh aliran Tradisionalisme Jawa, Sosialisme demokratis, Islam, dan Marxisme, yang dikemas dalam Marhaenisme.

Bagi penulis persamaan karakter dan pengalaman politik tersebut penting untuk menjelaskan hubungan keduanya dalam struktur pemerintahan selama Bung Karno berkuasa. Dan selanjutnya menjadi alat pendekatan untuk menganalisis peranan Cak Roes dalam menerapkan pemikiran Bung Karno tentang pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*).

Banyak orang beranggapan bahwa Cak Roes hanya merupakan duplikat Bung Karno belaka. Anggapan itu muncul sejak tokoh ini mendapat predikat “Jubir Usman” seperti telah penulis ungkapkan sebelumnya. Pandangan tersebut dapat dibenarkan karena dalam kenyataannya harus diakui sering membuat pernyataan dengan mengutip ulang pemikiran-pemikiran Bung Karno. Penulis sependapat apabila tokoh ini dikategorikan lemah dalam pemikiran tetapi kuat dalam menangkap dan melaksanakan pemikiran orang lain. Suatu hal yang telah dibuktikannya pada masa demokrasi terpimpin.

<sup>156</sup> Point *a-d* dapat dilihat pada: William H. Frederich, *op. cit.*, hal. 34, 208, 217, 235, 263; Casper Schuurig, *op. cit.*, hal. 3, 9, 38; Restu Gunawan (*penyunting*), *op. cit.*, hal. 6, 22, 28, 42. Sedangkan point *e* dapat dilihat pada: Herbert Feith dan Lance Castles (*ed.*), hal. 136.



Salah satu pertimbangan Bung Karno menjatuhkan pilihannya kepada Cak Roes sebagai juru bicaranya, karena Bung Karno mengetahui dan memahami bahwa kecerdasan dan kemampuan intelektualnya tidak perlu diragukan. Di mata Bung Karno, Cak Roes adalah orang yang mampu menangkap dan menterjemahkan keinginannya, kebijakan politiknya, dan doktrin-doktrin yang ingin disampaikan kepada bangsa Indonesia. Mulai dari kalangan pemuda, pelajar, mahasiswa, pegawai pemerintah dan swasta, pejabat sipil dan militer, ormas-ormas, dan parpol-parpol. Hampir semua sumber primer yang dimanfaatkan untuk penelitian ini seperti teks pidato, ceramah, kuliah, prasaran, dan sambutan yang disampaikan dalam berbagai kesempatan mencerminkan pola pikir Bung Karno.

Bukti tentang kemampuannya menangkap dan menterjemahkan keinginan, kebijakan politik, serta doktrin-doktrin Bung Karno yang ingin disampaikan kepada seluruh rakyat sebagai warga bangsa, dapat disimak dari berbagai pidato yang disampaikan dalam rangka memperingati peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah seperti “Hari Pahlawan” dan “Sumpah Pemuda.” Dalam pidato radio yang disampaikan pada tanggal 26 Oktober 1962, jam 20.05 wib menyambut Hari Sumpah Pemuda, Cak Roes menyatakan:

“.... Kenyataan adanya gejala dalam masyarakat Indonesia yang hendak mempertajam kelas yang sudah merasa “arrive” dengan kelas yang masih bergulat dengan penderitaan dan kesulitan hidup sehari-hari, akan dapat menimbulkan istilah “two nations” in the “body of one nation”, yaitu “dua bangsa dalam tubuh satu bangsa” yaitu “the poor nation” and “the rich nation”, yaitu bangsa yang melarat dan bangsa yang kaya dalam satu perumahan Bangsa. Apabila hal ini tidak dapat kita kikis-habis dengan semangat persatuan didalam masa “nation-building” dewasa ini, maka semen persatuan bangsa (cetak tebal-*pen*) dan Rakjat kita akan retak dan petjah karena adanya “l’exploitation de l’homme Indonesien par l’homme Indonesien.” Dalam keadaan demikian maka berhaklah Saudara-saudara pemuda-pemuda kita menjadi ketjewa. Malahan wadjiblah kita untuk menjadi tjuriga pula terhadap golongan-golongan yang dalam kedaan dewasa ini merasa puas seluas samudera, dan merasa agung setinggi gunung.”<sup>157</sup>

Pernyataan yang disampaikan melalui pidato radio tersebut, jelas dan tegas bahwa Cak Roes tidak menghendaki adanya perbedaan kelas yang menyolok dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ia mengibaratkan bangsa yang demikian sebagai “dua bangsa yang hidup dalam tubuh satu bangsa” yaitu antara kelompok orang-orang kaya dan kelompok orang-orang miskin. Suatu hal yang akan mengancam persatuan bangsa yang sangat didambakan oleh Sukarno.

<sup>157</sup> Roeslan Abdulganji, *op. cit.*, *Pantjaran...*, hal. 25-26.

Disinilah kemampuan Cak Roes menangkap dan menterjemahkan keinginan Bung Karno ditunjukkan.

Bukti yang lain diperlihatkan dalam sambutan memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 1962, yang dimuat surat kabar seluruh Indonesia. Bagian penting dari sambutannya itu adalah:

“... Memang Rakjat Indonesia umumnja, dan Rakjat Surabaya khususnya, pada waktu itu berjuang untuk kemerdekaan dan demokrasi, melawan kolonialisme dan penghinaan. Dan memang Rakjat Indonesia pada waktu itu sudah sadar sesadar-sadamja, bahwa persatuan dan persamaan (cetak tebal-*pen*) antar-Rakjat adalah sjarat mutlak untuk kemenangan.”<sup>158</sup>

Jika mencermati kedua kutipan tersebut, antara pidato radio dalam rangka memperingati “Sumpah Pemuda” dan sambutan memperingati “Hari Pahlawan” terdapat kesamaan maksud dan tujuan tentang arti penting kedua event bersejarah itu bagi persatuan dan persamaan derajat dalam kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia. Kedua hal tersebut merupakan bukti tentang kemampuan Cak Roes menangkap dan menterjemahkan ide-ide dan keinginan yang akan dicapai Bung Karno.

Sedangkan mengenai kemampuannya bertahan menghadapi berbagai rezim, bahkan selalu mendapat kesempatan menduduki jabatan tertentu, bukan karena tidak memiliki prinsip yang konsisten. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan: *pertama*, Cak Roes sampai menjelang akhir hayatnya masih konsisten dengan sikap politik. Jiwa nasionalis masih nampak jelas dari gaya bicaranya yang kritis dan terbuka, serta *ceplas-ceplos* tetapi karena memiliki selera humor yang tinggi maka dapat diterima oleh semua kalangan termasuk penguasa atau pemerintah. *Kedua*, sebagai orang Jawa tentu ia tidak dapat membebaskan dirinya dari pengaruh corak pemikiran tradisionalisme Jawa, seperti yang diidentifikasi Feith dan Castles.<sup>159</sup> Karakteristik pemikiran tradisionalisme Jawa adalah bahwa apa yang ditampilkan dalam sikap dan perbuatan tidak dapat secara langsung diidentifikasi, dalam istilah Feith dan Castles: “*tradisi Jawa kemudian mempergunakan warna pelindung.*”<sup>160</sup> Sikap dan perbuatan seorang Jawa yang sesungguhnya kadang disembunyikan dibalik simbol yang ditampilkan.

<sup>158</sup> Roeslan Abdulgani, (1963), *Api Revolusi Tetap Berkobar*, Djakarta: Departemen Penerangan RI., hal. 11-12.

<sup>159</sup> Herbert Feith dan Lance Castles (*ed.*), *op. cit.*, hal. 169.

<sup>160</sup> *Ibid.*

Untuk mempermudah pemahaman tentang tradisionalisme Jawa, baiklah penulis berikan contoh mengenai simbol. Sikap diam misalnya mengandung makna yang majemuk, artinya dapat berarti menolak, setuju, marah, atau yang lain, tentu sangat bergantung kepada konteksnya. Dengan kata lain bahwa untuk mengubah sistem tidak harus dilakukan dengan melakukan perlawanan, tapi justru masuk ke dalam sistem itu dan secara internal melakukan perubahan. Begitu pula dengan sikap Cak Roes yang terkesan sekadar mencari posisi dan keselamatan diri, dalam ungkapan Jawa ia ingin "*menang tanpo ngasorake*".<sup>161</sup>

Apapun predikat yang diberikan terhadap pribadi Roeslan Abdulgani, sepek terjangnya sejak muda hingga menduduki berbagai jabatan dalam pemerintahan cukup konsisten dan jauh dari sikap oportunistis. Ia adalah seorang tokoh yang memiliki karakteristik nasionalis. Dan istilah itu adalah predikat yang lebih tepat diberikan kepada sosok Roeslan Abdulgani. Meskipun kesan sebagai seorang oportunistis ada pada dirinya, tetapi penulis lebih memandang sebagai kemampuannya mengungkapkan pemahamannya terhadap pemikiran-pemikiran Bung Karno. Hal tersebut telah mempererat hubungan keduanya baik secara pribadi maupun dalam struktur pemerintahan.

Secara ringkas, sebagai sebuah catatan kecil kiranya perlu dikemukakan disini tentang latar belakang sejarah yang telah mendorong dan memberi inspirasi kepada Bung Karno akan pentingnya membangun bangsa dan membangun karakter (*nation and character building*). Untuk mempropagandakan pentingnya membangun bangsa dan membangun karakter itu, Bung Karno memerlukan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya di lapangan kehidupan sosial masyarakat. Dalam pandangan Bung Karno, Cak Roes merupakan orang yang tepat sebagai pelaksana sehari-hari dari kegiatan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter karena ia mampu menangkap dan menterjemahkan pemikiran dan keinginan Bung Karno.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya Bung Karno pun menyadari akan keterbatasan yang ada pada dirinya, dan untuk menutupi keterbatasannya itu ia memerlukan bantuan orang lain yaitu Roeslan.

---

<sup>161</sup> Ungkapan tersebut dalam pemahaman masyarakat Jawa diartikan sebagai tindakan yang mampu menaklukkan musuh tanpa harus membuat musuh merasa kalah atau bertekuk lutut.

### 3.4 Roeslan Abdulgani sebagai Menteri Penerangan

Kemampuan Roeslan Abdulgani menangkap dan menterjemahkan pemikiran-pemikiran dan keinginan Bung Karno, telah membuat hubungan keduanya memiliki kedekatan. Kedekatan hubungan antara keduanya telah membuat Bung Karno menaruh kepercayaan begitu besar kepada Roeslan Abdulgani. Karena besarnya kepercayaan itulah maka Bung Karno banyak memberikan kesempatan untuk menduduki berbagai jabatan penting dalam struktur pemerintahan. Salah satu jabatan penting dan banyak menarik perhatian dunia pers adalah ketika diangkat sebagai Menteri Penerangan, yang dirangkap dengan jabatan lain yang telah disandang sebelumnya.

Pada tanggal 24 Oktober 1962 Sekretariat Negara mengumumkan pengangkatan Roeslan Abdulgani menjadi Wakil Menteri Pertama bidang khusus dan merangkap Menteri Penerangan. Di samping itu, Roeslan Abdulgani masih menjabat sebagai Anggota Panitia Retooling Aparatur Negara. Keesokan harinya bermunculan tanggapan dari berbagai penerbitan surat kabar yang beredar pada masa itu dan pada umumnya menyambut baik serta menaruh harapan besar bagi kemajuan dunia jurnalistik di tanah air. Hal ini dapat dipahami karena jabatan Menteri Penerangan berkaitan langsung dengan insan pers dan perkembangan dunia jurnalistik.

Harian *Suluh Indonesia* yang terbit pada tanggal 25 Oktober 1962, dalam tajukrencana yang diberi judul "Pilihan Jang Tepat" mengemukakan:

"..., bahwa dunia pers akan menjambut dengan baik keputusan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi mengangkat Roeslan Abdulgani sebagai Menteri Penerangan. Alasannya tjukup kuat, jalah karena Roeslan Abdulgani oleh dunia pers telah diangkat sebagai Pembimbing Agung Pers Nasional, satu pertanda jang djelas betapa eratnja hubungan antara pers dan Menteri Roeslan Abdulgani."<sup>162</sup>

Harian *Berita Indonesia* dalam kolom dan tanggal penerbitan yang sama, menuliskan:

"Dr. H. Roeslan Abdulgani sebagai pemegang utama dari Pembina djiwa revolusi, sebagai pemegang kemudi pelaksanaan indoktrinasi Manipol/Usdek, sebagai Wampa Urusan Chusus dan djuga sebagai Menteri Penerangan, sudah membuktikan sebagai pemimpin memiliki otak briljan, memiliki ketjakaan menganalisa jang kuat dan tjepat. Selama ini beliau telah pula membuktikan hasil-hasil karyanja jang memuaskan dari tugas-tugas jang diserahkan kepadanya.

Seluruh pers nasional pertjaja bahwa Wampa/Menteri Penerangan Dr. H. Roeslan Abdulgani sudah pasti akan mampu melaksanakan pembangunan alat-alat komunikasi-

<sup>162</sup> "Pilihan Jang Tepat" dalam Tajukrencana, *Suluh Indonesia*, tanggal 25 Oktober 1962.

massa, termasuk pembangunan Pers Sosialis Indonesia, sebagai dasar jang mutlak bagi suksesnja pelaksanaan pembangunan mental jang sekarang bulat dipertjajakan kepadanya.”<sup>163</sup>

Selain pada tajukrencana harian tersebut juga menurunkan berita sekitar pengangkatan Roeslan Abdulgani sebagai Wampa Urusan Khusus/Menteri Penerangan, yaitu:

“Pengangkatan Dr. Hadji Roeslan Abdulgani menjadi Wampa/Menpen disambut gembira dan lega oleh seluruh pers nasional, karena sangat pada tempatnja dan tjotjok sekali dengan keputusan seluruh pengikut Coaching Ilmiah Indoktrinasi Manipol/Usdek Karjawan Pers tempo hari jang dengan suara bulat telah mengangkat beliau mendjadi: „Pembimbing Agung Pers Nasional.”<sup>164</sup>

Masih dalam kolom tajukrencana dan tanggal penerbitan yang sama, harian *Warta Bakti* menulis dengan pernyataan yang senada, sebagai berikut:

“Pengangkatan Dr. H. Roeslan Abdulgani mendjadi Wampa Chusus/Menteri Penerangan, menggembarakan korps wartawan Indonesia. Bukan sadja karena Pak Roeslan telah diangkat oleh wartawan-wartawan dari seluruh Indonesia jang mengikuti Coaching Indoktrinasi Manipol/Usdek di Tjipajung pada bulan Desember tahun jang lalu sebagai „Pembimbing Agung Pers Nasional”, tapi djuga karena memang Pak Roeslan Abdulgani adalah orang jang dianggap sudah „sangat biasa” dalam lingkungan pers. Tidak perlu disangsikan lagi bahwa segala kesulitan jang dirasakan oleh pers nasional, turut dirasakan oleh Pak Roeslan.

Oleh karena itu djelaslah sekali bahwa Pak Roeslan didalam kedudukannja jang baru ini, pertama-tama mendapat dukungan jang bulat dan tidak terpetjah-petjah dari korps wartawan nasional.”<sup>165</sup>

Sedang harian *Bintang Timur* dalam kolom “komentar” yang juga terbit pada tanggal 25 Oktober 1962, menyajikan tulisan yang isinya sedikit berbeda dengan harian yang lain. Perbedaan tersebut dapat disimak pada kutipan berikut:

“... djika kemarin Presiden Sukarno mengangkat Roeslan Abdulgani sebagai Wampa Menteri Penerangan, jang tugasnja sehari-hari banjak berhubungan dengan masalah-masalah pers, maka pengangkatan yang wadjar ini pasti mendapat sambutan dan dukungan jang semeriah-meriahnja dari korps wartawan Indonesia!

.....  
Tapi bukan sekedar dalam ini sadja terletak arti penting dari pengangkatan Roeslan Abdulgani ini. Setjara keseluruhan pengangkatan ini berarti m e m p e r k u a t barisan pendukung politik dan idée-idée progressief dari Bung Karno !! Pengangkatan inipun berarti memperkuat barisan anti imperialisme dan neo-kolonialisme, memperkuat barisan perdamaian dan kerdjasama A-A! Bahkan pengangkatan ini berarti memperkuat setjara positif barisan Manipol! Barisan jang meletakkan persatuan bangsa sebagai sjarat mutlak untuk menjelesaikan revolusi, persatuan jang berporoskan Nasakom!”<sup>166</sup>

<sup>163</sup> “Wampa/Menteri Penerangan – Pembimbing Agung Pers Nasional” dalam Tadjukrentjana, *Berita Indonesia*, tanggal 25 Oktober 1962.

<sup>164</sup> “Pengangkatan Dr. H. Ruslan Abdulgani sebagai Wampa/Ment. Penerangan Disambut Gembira dan Lega Oleh Seluruh Pers Nasional” dalam *Berita Indonesia*, tanggal 25 Oktober 1962.

<sup>165</sup> “Harapan Kepada Pak Roeslan” dalam Tadjukrentjana, *Warta Bakti*, tanggal 25 Oktober 1962.

<sup>166</sup> “Pengangkatan Tjak Roeslan” dalam Komentar, *Bintang Timur*, tanggal 25 Oktober 1962.

Berbeda dengan harian-harian yang lain, *Harian Rakjat* yang terbit satu hari lebih lambat yaitu tanggal 26 Oktober 1962 dan menurunkan berita yang sangat singkat. Harian ini juga tidak terlalu menyanjung Roeslan sebagai individu tetapi lebih menekankan tentang pentingnya lembaga penerangan dalam perjuangan anti-imperialisme dan anti-feodalisme.<sup>167</sup>

Pada tanggal 6 November 1962, dua pekan setelah Cak Roes dilantik sebagai Wampa Urusan Khusus/Menpen, harian *Suluh Indonesia* kembali menurunkan tulisan dalam tajukrencana yang isinya memberi apresiasi positif atas kinerjanya. Tajukrencana itu diberi judul "Sudah Mulai Kita Rasakan Hasilnja." Berikut kutipan dari tulisan tersebut.

"Baru beberapa hari sadja Wampa/Menteri Penerangan Roeslan Abdulgani melakukan pekerdjaannja. Artinja dalam kedudukannja sebagai Menteri Penerangan. Akan tetapi dalam waktu jang singkat, ternjata Menteri Penerangan Roeslan Abdulgani telah berhasil meletakkan berbagai dasar pikiran jang sangat penting artinja untuk pegangan. Baik bagi Pegawai-pegawai Departemen Penerangan, masjarakat umumnja, ataupun dunia pers chususnja.

.....  
 Disamping pegangan lama jang selalu mendjadi pedoman bekerdja Pegawai-pegawai Penerangan, jalah Pantja Prasetya dan Kode Kehormatan Djuru Penerang, Menteri Penerangan Roeslan Abdulgani telah menetapkan satu pasangan baru jang benar-benar harus mendapat perhatian penuh. Jang kita maksudkan, jalah apa jang ditekankan oleh Menteri Penerangan Roeslan Abdulgani beberapa hari jang lalu, bahwa Djuru Penerangan tidak hanja mendjadi Djurubitjara politik Pemerintah, akan tetapi djuga harus mendjadi djurubitjara masjarakat. Itulah sebabnja maka Menteri Roeslan Abdulgani menekankan perlunja ada double-way traffic antara Pemerintah dan masjarakat."<sup>168</sup>

Pada tanggal penerbitan yang sama, harian *Merdeka* dalam kolom Indukkarangan, juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Cak Roes dengan jabatan barunya tersebut. Bahkan penilaian yang diberikan harian ini menunjukkan bahwa Cak Roes bekerja secara profesional dan menggunakan landasan hukum formal yaitu Ketetapan MPRS, seperti kutipan berikut:

"Mendengar Dr Roeslan Abdulgani berbitjara tentang masalah-masalah pers, berarti mendengar berbitjara seorang ahli. Dalam waktu begitu singkat ia menduduki pos Departemen Penerangan, dengan segera terasa ada opleving dalam pekerdjaan-pekerdjaan Departemen tsb. Pers bisa merasa bahwa ia diurus, diajom. Sambutan Dr Roeslan Abdulgani dihadapan konperensi Perkembangan Pers Nasional di Tjipajung menggembirakan kita. Sebab disitu mendjadi djelas bahwa Roeslan Abdulgani sebagai Menteri bekerdja dengan Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. ditangan, dan bukan didalam latji.  
 ....<sup>169</sup>

<sup>167</sup> "Menpen Baru" dalam *Harian Rakjat*, tanggal 26 Oktober 1962.

<sup>168</sup> "Sudah Mulai Kita Rasakan Hasilnja" dalam Tadjukrentjana, *Suluh Indonesia*, tanggal 6 November 1962.

<sup>169</sup> "Pedomani Ketetapan-Ketetapan M.P.R.S. !" dalam Indukkarangan, *Merdeka*, tanggal 6 November 1962.

Beberapa catatan yang dikemukakan berbagai surat kabar berkaitan dengan pengangkatan Cak Roes menjadi Wampa/Menpen tersebut menjadi penting artinya untuk diungkapkan di sini. Meskipun pandangan pers masih perlu diragukan obyektivitasnya, setidaknya memberikan gambaran bahwa ia memiliki kapabilitas yang memadai dalam menjalankan perannya sebagai pejabat negara. Dari enam surat kabar nasional yang memberikan pandangan, tidak satupun diantaranya yang meragukan kemampuan Cak Roes untuk mengurus Departemen Penerangan bahkan sebaliknya menaruh harapan besar dengan pengangkatannya sebagai orang nomor satu dalam departemen tersebut. Sanjungan dan harapan yang dialamatkan kepada dirinya oleh beberapa surat kabar itu, sudah tentu bersifat subyektif.

Terlepas dari subyektivitas pandangan pers terhadap dirinya, Cak Roes dapat menjalankan tugasnya sebagai Menteri Penerangan dengan baik. Meskipun jabatannya sebagai Menteri Penerangan tetapi ia tidak lupa bahwa dirinya juga mengemban tugas sebagai Ketua Panitia Indoktrinasi untuk kepentingan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter. Oleh karena itu ia selalu memanfaatkan kesempatan tersebut dan mampu menjalankan peranannya dengan baik. Cak Roes sangat memahami situasi, kapan, di mana, dan dalam forum apa ia dapat bertindak sebagai menteri dan sebagai indoktrinator.

Simak misalnya ketika menyampaikan pidato yang diucapkan pada pelantikan Dewan Pembantu Menteri Penerangan dalam Pembinaan Pers dan Dewan Pertimbangan Pers, pada tanggal 8 Juni 1963 di Jakarta misalnya, Cak Roes mengutip pernyataan Bung Karno sebagai berikut:

“.... Didalam fase **nation building** (cetak tebal-*pen*) ini, dimana public opinion building djuga merupakan bagian, Bung Karno berkata didalam “Ambeg Parama-Arta”, nation building adalah djuga persoalan **character building** (cetak tebal-*pen*). Dan kita ingin membangun nation jang ada diluar ruangan dimana saja bitjara sekarang ini; kita ingin membangun public opinion jang ada diluar ruangan ini, kita ingin membangun character jang ada diluar ruangan ini, karakter bangsa, karakter massa. Saudara-saudara sebetulnja termasuk the character builders, the nation builders dan djuga the public opinion builders.”<sup>170</sup>

Kutipan pidato tersebut berjudul *Manifestasi dan Refleksi dari Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin*, yang kemudian menjadi bagian dari himpunan pidato-pidato, ceramah-ceramah, dan sambutan-sambutan yang diterbitkan oleh

<sup>170</sup> Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, *Pantjaran...*, hal. 157.

Departemen Penerangan RI tahun 1963. Pidato ini diucapkan ketika ia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus merangkap Menteri Penerangan RI. Di samping itu, pada saat yang bersamaan ia juga masih menjabat sebagai Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi dan Anggota Panitia Retooling Aparatur Negara. Dari jabatan rangkap yang dibebankan kepadanya itu menunjukkan betapa besar kepercayaan yang diberikan oleh Bung Karno kepadanya. Pidato ini secara tematis juga dapat dipahami sebagai proses indoktrinasi yang harus dijalankan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Pidato yang lain disampaikan pada Konperensi Wartawan Asia- Afrika, tanggal 25 April 1963 di Jakarta yang diberi judul *Pers Asia-Afrika Tjerm Peradaban A-A jang Sedang Berdjung*. Dalam pidatonya itu ia mengemukakan:

“Perbedaan lain antara kita dan Barat ialah mengenai watak dari pada nasionalisme. Apabila di Eropa nasionalisme bersumber pada mekanisme untuk memindahkan kesetiaan rakjat dari kaum bangsawan kepada bangsa, maka nasionalisme di Asia-Afrika jang bangkit sebagai reaksi terhadap penindasan dan pemerasan Kolonialisme-imperialisme memberi tekanan pada nilai-nilai nasional, keagungan nasional dan martabat nasional. Apabila nasionalisme Eropa menudju ke arah perkembangan ekses-ekses seperti chauvinisme dan fasisme maka nasionalisme Asia-Afrika menempatkan kita dibarisan terdepan bangsa-bangsa jang bersatu dalam Revolusi Besar Umat Manusia. Sudah barang tentu terdapat perbedaan-perbedaan dalam nasionalisme kita jang tumbuh dalam bermatjam-matjam rangka dan telah terkena bermatjam-matjam pengaruh dari berbagai pola Kolonialisme. Tetapi kita hendaknja djangan terlampau pitjik dengan perbedaan-perbedaan ini dan menganggap bahwa India adalah Inggris-nja Asia atau bahwa RRT adalah Rusia-nja Asia. Kita harus selalu menolak bahwa orang Asia diadu lawan orang Asia atau orang Afrika diadu lawan orang Afrika”.<sup>171</sup>

Kutipan pidato tersebut dengan jelas memberi gambaran tentang konsep nasionalisme Indonesia yang berbeda dengan nasionalisme yang tumbuh dan berkembang di Eropa. Dalam momentum ini Cak Roes kembali menunjukkan kemampuannya menjalankan peran ganda yang diembannya. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Penerangan, ia menunjukkan kepada insan pers tentang peranannya bagi bangsa yang sedang berjuang seperti Asia dan Afrika. Sebelumnya, pada tanggal 11 Februari 1963 di Jakarta Cak Roes mengungkapkan hal senada melalui pidatonya *Semangat Bandung dan Pers Asia-Afrika*, yaitu:

“Kekuatan tersebut adalah nasionalisme-bersama Asia-Afrika, reaksi-bersama terhadap kolonialisme dan imperialisme jang telah sama-sama kita derita. Karena kita disini sedang membahas perbedaan-perbedaan antara Barat dan Timur, adalah penting untuk ditjatat bahwa nasionalisme Asia-Afrika adalah berbeda dengan nasionalisme Eropa. Di Eropa nasionalisme mendahului pembentukan Negara-negara nasion jang pada awalnja

<sup>171</sup> *Ibid.*, hal 100-1001.



semata-mata merupakan suatu mekanisme untuk memindahkan hak-hak istimewa seorang bangsawan atau radja kepada barang "non-persoonlijk" jaitu Negara."<sup>172</sup>

Dari pandangan beberapa pers yang memberikan penilaian atas kinerjanya sebagai Menteri Penerangan, penulis berpendapat bahwa secara kontekstual telah sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian dari pidato-pidato yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, penulis berpendapat bahwa Cak roes mampu menjalankan tugas gandanya dengan baik. Dari sinilah dapat diketahui konsistensinya dalam menjalankan peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### 3.5 Roeslan Abdulgani dan Doktrin Manipol/Usdek

Ternyata pemilu yang sangat demokratis tidak menghasilkan sebuah lembaga konstitusional yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas dalam rangka menjamin stabilitas jalannya roda pemerintahan. Sejak pemilu 1955 pemerintahan yang dipimpin Bung Karno praktis mengalami stagnasi sehingga perlu diambil langkah-langkah yang bersifat reaktif dan revolusioner untuk mengatasi keadaan. Hal ini disebabkan kegagalan Dewan Konstituante merumuskan undang-undang baru. Oleh karena itu pada tanggal 22 April 1959, Presiden Sukarno atas nama Pemerintah menyampaikan amanatnya di depan sidang Konstituante dan menganjurkan agar kembali kepada UUD 1945.

Menanggapi usul pemerintah agar kembali kepada UUD 1945, maka pada tanggal 30 Mei 1959 dilaksanakan pemungutan suara tetapi tidak membuahkan hasil karena jumlah yang hadir tidak memenuhi *quorum* 2/3 seperti diatur pasal 37 UUDS 1950. Seperti ketentuan dalam tata tertib Konstituante, maka diadakan dua kali lagi pemungutan suara untuk mengambil keputusan yang sama. Untuk itu, pada tanggal 2 Juni 1959 kembali diadakan pemungutan suara. Tetapi hasilnya kembali nihil karena tetap tidak memenuhi *quorum*. Sedangkan keesokan harinya, tanggal 3 Juni 1959 Konstituante memasuki masa reses yang ternyata kemudian untuk selama-lamanya.

Dalam situasi seperti itu, maka Presiden, Kabinet, Dewan Nasional, dan beberapa partai besar, serta pimpinan TNI bertemu dan mencapai kata sepakat

<sup>172</sup> *Ibid.*, hal. 61.

untuk segera kembali kepada UUD 1945. Langkah ini dipandang sebagai solusi terbaik untuk memecah kebuntuan. Demikianlah, akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno di Istana Negara memaklumkan sebuah dekrit yang pada intinya adalah: pembubaran Dewan Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.

Menyusul keluarnya dekrit tersebut presiden melakukan perombakan struktur pemerintahan dengan membubarkan Dewan Nasional, membentuk Dewan Pertimbangan Agung dimana Roeslan Abdulgani mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua, dan memperkenalkan sistem pemerintahan baru yang tidak lazim dengan nama "Demokrasi Terpimpin". Melengkapi kebijakan politik yang mengiringi keluarnya dekrit, pada tanggal 17 Agustus 1959 Bung Karno menjadikan pidatonya dalam peringatan proklamasi yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" sebagai sebuah doktrin yang diberi istilah Manipol (Manifesto Politik) yang berintikan USDEK (UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia).

Doktrin Manipol/Usdek inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab Cak Roes untuk mempropagandakan dalam berbagai kesempatan dan dalam beragam forum maupun komunitas masyarakat seperti pemuda, mahasiswa, pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, pimpinan perusahaan negara, alim-ulama, ormas-ormas dan parpol-parpol di seluruh penjuru pelosok tanah air. Sumber sejarah berupa arsip tentang kegiatan Cak Roes dalam melakukan indoktrinasi Manipol/Usdek berupa sebuah bundel arsip surat yang ditujukan kepada Presiden RI dengan nomor: -/Ind/DPA/62, hal: Laporan Indoktrinasi, tanggal: 5 Januari 1962. Surat tersebut menggunakan kepala surat atau kop DPA RI dan ditandatangani oleh Wakil Ketua DPA selaku Ketua Panitia Indoktrinasi Dr. H. Roeslan Abdulgani.

Adapun isi dari surat tersebut secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>173</sup>

1. Laporan mengenai sasaran indoktrinasi yang dibagi menjadi dua periode, yaitu:

<sup>173</sup> ANRI, *Arsip*, no. 218, "Presiden RI dari Wakil Ketua DPA: Laporan tanggal 5 Januari 1962 tentang pelaksanaan indoktrinasi, disertai lampiran".

- a. Periode Januari 1960 – 17 Agustus 1960 dengan sasaran: pergerakan pemuda, mahasiswa, pemimpin industri rakyat dan perusahaan negara.
  - b. Periode Maret 1961 – 17 Agustus 1961 dengan sasaran: instansi-instansi pemerintah yaitu Departemen dan Daerah Swatantra Tingkat I, pergerakan pemuda, mahasiswa, dan alim-ulama Protestan dan Katholik.
2. Dalam periode selanjutnya yakni 17 Agustus 1961 – 31 Desember 1961, sasaran indoktrinasi dipusatkan pada Daerah Swatantra Tingkat II terutama Sekretariat Front Nasional Daerah dan para pengajar universitas atau dosen. Dalam periode ini Cak Roes secara khusus telah memberikan kuliah-kuliah tentang Dasar dan Tujuan Revolusi kepada peserta kursus Atase Militer di Jakarta dan para Perwira Komandan Pendidikan Angkatan Darat di Bandung.
3. Beberapa Daerah Swatantra Tingkat II yang telah dilaksanakan indoktrinasi antara lain:
- a. Daerah Swatantra Tingkat II Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi bertempat di Palembang yang berlangsung pada 16 dan 17 Oktober 1961.
  - b. Daerah Swatantra Tingkat II Sumatera Utara dan Aceh bertempat di Prapat yang berlangsung pada 24 – 27 Oktober 1961.

Sedangkan untuk Daerah Swatantra Tingkat II Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat tidak dapat diselenggarakan di daerah tetapi di Cibogo karena kesibukan Cak Roes, dan untuk Daerah Swatantra Tingkat II Sulawesi Utara Cak Roes hanya mengirimkan Tim Indoktrinasi.

Surat tersebut dilengkapi dengan dua macam lampiran. Lampiran *pertama* berupa instruksi dalam melaksanakan indoktrinasi Manipol/Usdek bagi tim Indoktrinasi untuk Departemen-departemen, Daerah Swatantra Tingkat I, dan Daerah Swatantra Tingkat II. Dalam lampiran ini disebutkan bahwa kegiatan indoktrinasi menyangkut empat persoalan penting yang meliputi doktrin, petugas indoktrinasi, media (alat komunikasi), dan sasaran indoktrinasi.

Dari empat persoalan penting yang berkaitan dengan kegiatan indoktrinasi tersebut, terdapat dua hal yang perlu dijelaskan yaitu tentang doktrin dan sasarannya. Inti dari pada doktrin adalah ideologi Pancasila dengan pemahaman bahwa:<sup>174</sup>

<sup>174</sup> Lampiran Pertama, Arsip no. 218, *ibid*.

1. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia.
2. Pancasila adalah doktrin revolusi yang bersifat anti kolonialisme dan anti imperialisme.
3. Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia yang menjiwai peradaban beribu-ribu tahun dari rakyat Indonesia.
4. Pancasila adalah ideologi pemersatu seluruh rakyat Indonesia yang memiliki perbedaan ideologi politik, keragaman suku, agama, dan kondisi sosial ekonomis.
5. Pancasila adalah sublimasi dari *declaration of independence* dan Manifesto Komunis yang bersifat universal.
6. Pancasila adalah aliran sosialisme yang ilmiah dan religius.

Sedangkan penjelasan tentang sasaran indoktrinasi, meliputi:

1. Orang-orang yang anti Manipol dan secara diam-diam menentangnya, golongan ini sebenarnya memahami apa itu Manipol, tetapi karena *vested interest*-nya menganggap pelaksanaan Manipol sebagai membahayakan kedudukan mereka.
2. Orang-orang yang anti Manipol dan menentangnya secara terang-terangan.
3. Orang-orang yang karena kurang pengertian atau salah pengertian tentang Manipol dan yang menentangnya.
4. Orang-orang yang belum mengerti tentang Manipol tetapi tidak menentangnya.
5. Orang-orang yang menyalahgunakan Manipol dan menentangnya.

Lampiran *kedua* berupa petunjuk-petunjuk/instruksi dalam melaksanakan indoktrinasi Manipol/Usdek. Materi yang termuat dalam lampiran ini pada dasarnya sekadar memperkuat dan mempertajam kerangka pemikiran terutama yang berkaitan dengan bahan indoktrinasi dan sasaran indoktrinasi. Hal yang sedikit berbeda dengan lampiran pertama adalah ditunjukkannya peran lembaga DPA dalam kegiatan indoktrinasi secara sistematis.

Dalam kaitannya dengan indoktrinasi Manipol/Usdek ternyata Cak Roes juga mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Pembina Jiwa Revolusi yang mandatnya diterima secara langsung dari Presiden Sukarno. Arsip atau dokumen yang dapat dijadikan bukti berupa surat dari Presiden/Panglima

Teringgi nomor: 682/PR/61, tanggal: 22 Februari 1961 ditujukan kepada Panitia Pembina Jiwa Revolusi tentang tujuh bahan pokok indoktrinasi. Dalam suratnya tersebut Presiden meminta agar dalam kegiatan indoktrinasi Manipol/Usdek menggunakan tujuh bahan pokok indoktrinasi yang terdiri dari:<sup>175</sup>

1. “Lahirnya Pancasila”, pidato Bung Karno 1 Juni 1945.
2. Undang Undang Dasar (UUD) 1945 beserta penjelasannya.
3. Manifesto Politik, beserta perinciannya dari DPA.
4. Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang terkenal dengan nama “Jarek”, beserta perinciannya dari DPA.
5. Pidato Presiden di depan Sidang Umum PBB tanggal 30 September 1960, beserta perinciannya dari DPA.
6. Penjelasan Manipol dan Usdek, rangkaian pidato radio Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi Dr. H. Roeslan Abdulgani.
7. Amanat Pembangunan Presiden pada Sidang Depernas tanggal 28 Agustus 1959 beserta buku *Ringkasan Pembangunan Semesta*.

Selain tujuh bahan pokok indoktrinasi yang dimuat dalam surat Presiden, juga disertakan lampiran tentang bahan-bahan pelengkap untuk indoktrinasi yang dibagi dalam beberapa periode dari masa pra kemerdekaan hingga tahun 1961.

Bukti lain tentang kegiatan indoktrinasi Manipol/Usdek adalah dokumen atau arsip yang memuat daftar alamat yang mendapat kiriman bahan-bahan indoktrinasi/brosur dari Panitia Pembina Jiwa Revolusi. Beberapa kota di berbagai wilayah Indonesia yang telah dikirim bahan indoktrinasi, antara lain: Surabaya, Malang, Probolinggo, Lumajang, Salatiga, Wonosobo, Bandung, Sumedang, Indramayu, Garut, Jakarta, Denpasar, Sumatera Utara, Yogyakarta, Pontianak, Surakarta, Medan, Jember, Wonogiri, Mataram (Lombok), Semarang, Palembang, Pasuruan, Madiun, Nganjuk, Bojonegoro, Purworejo, Serang, dan Tanjung Priok.

Kegiatan yang dilakukan Cak Roes selaku Ketua Panitia Indoktrinasi tentang Manipol/Usdek tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia saja, tetapi telah mengundang perhatian pers luar negeri. Hal ini dapat disimak dari

<sup>175</sup> Lampiran Kedua, Arsip no. 218, *ibid.* Selengkapnya tentang isi materi indoktrinasi dapat dibaca pada buku: *Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi*, Djakarta: Dikeluarkan Oleh Jajasan Prapantja, 1964.

berita *Buletin Antara*, No. 288/A yang terbit pada hari Selasa, 16 Oktober 1962, yaitu:

“Senin siang ini perusahaan televisi Kanada, dalam rangka kunjungannya ke Indonesia, mengadakan opname<sup>2</sup> dari jalannya coaching indoktrinasi Front Nasional yang sedang berlangsung di Lembaga Administrasi Negara, untuk siaran televisi di Kanada.

Sesudah opname jalannya coaching itu, maka kemudian diadakan tanya-jawab khusus dengan Dr. Roeslan Abdulgani selaku Ketua Panitia Indoktrinasi, yang sedang memimpin coaching tersebut.

Tanya-jawab berkisar terutama mengenai usaha-usaha dan tjaru kerjaja Front Nasional dan Panitia Indoktrinasi, dan tentang demokrasi terpimpin. Usaha<sup>2</sup> indoktrinasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia ini ternyata sangat menarik perhatian luar negeri, terbukti dari banyaknya tamu-tamu luar negeri yang memerlukan datang ke Indonesia untuk mengetahui lebih banyak tentang usaha-usaha indoktrinasi ini.”<sup>176</sup>

Dari beberapa dokumen atau arsip yang berhubungan dengan kegiatan indoktrinasi Manipol/Usdek yang telah dilakukan Roeslan, mengindikasikan bahwa sampai tahun 1961 masih terdapat golongan masyarakat atau orang-orang yang secara individual belum meyakini kebenaran Manipol/Usdek. Hal inilah tampaknya yang mendorong Bung Karno kembali menunjuk Cak Roes untuk secara khusus bertindak sebagai Ketua Panitia Indoktrinasi mengenai Manipol/Usdek. Oleh karena itu Cak Roes memandang bahwa kegiatan indoktrinasi perlu ditingkatkan intensitasnya, suatu hal tidak hanya menarik perhatian pers nasional tetapi juga pers luar negeri seperti yang dilakukan oleh wartawan televisi Kanada yang sengaja datang ke Indonesia untuk meliputnya.

Besarnya perhatian dunia terhadap kebijakan politik Bung Karno pada masa itu telah membuatnya memiliki kecenderungan yang berorientasi kepada politik dunia, kemudian dikenal sebagai “politik mercusuar.” Bung Karno merasa bahwa dirinya tidak lagi sekadar sebagai pemimpin bangsa Indonesia tetapi juga telah menjadi pemimpin dunia. Sementara bagi kalangan pemimpin yang lain, kebijakan politik Bung Karno ini masih menjadi perdebatan panjang. Bahkan beberapa golongan masyarakat menuduhnya sebagai pemimpin yang tidak lagi memperhatikan nasib rakyatnya.

Sebagai catatan dapat dijelaskan bahwa; *pertama*, konsep “*nation and character building*” berasal dari gagasan Bung Karno. Gagasan awal muncul dalam pidatonya ketika mengukuhkan hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Namun demikian, gagasan awal itu sesungguhnya terinspirasi oleh

<sup>176</sup> “Tanya Jawab Dr. Roeslan Abdulgani dengan Televisi Kanada” dalam *Buletin Antara*, No. 288/A, Selasa, 16 Oktober 1962.

peristiwa-peristiwa penting yang ikut menentukan perjalanan sejarah bangsa selanjutnya yaitu peristiwa 20 Mei 1908 berdirinya organisasi modern Budi Utomo yang dikenang sebagai “Hari Kebangkitan Nasional.” Peristiwa penting yang lain adalah 28 Oktober 1928 dilaksanakannya Kongres Pemuda Indonesia II yang melahirkan ikrar “Sumpah Pemuda.”

*Kedua*, bentuk pemahaman Roeslan Abdulgani terhadap pemikiran Bung Karno dapat dilihat dari pidato, ceramah, sambutan, prasaran, kuliah umum yang pernah disampaikan dan tulisan-tulisannya yang seringkali mengutip pernyataan-pernyataan dan pandangan pemikiran Bung Karno.

*Ketiga*, Bung Karno dan Roeslan Abdulgani merupakan dua tokoh yang memiliki hubungan kedekatan yang telah terjalin sejak lama. Ketika masih bersekolah di HBS Surabaya Bung Karno sudah mengenal dekat dengan keluarga Roeslan. Kemudian pada sekitar awal kemerdekaan Roeslan memiliki peranan sebagai penghubung pertemuan antara Bung Karno, Hatta, dan Syahrir dengan Mallaby. Pertemuan itu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemuda-pemuda Surabaya dengan tentara Inggris. Hubungan kedekatan ini terus berlanjut dalam struktur pemerintahan, dimana Roeslan Abdulgani banyak mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan-jabatan penting sejak tahun 1950-an.

*Ketiga*, Salah satu jabatan penting dan rangkap adalah pengangkatannya sebagai Menteri Penerangan yang pada waktu itu sudah menduduki jabatan Wakil Menteri Pertama. Hal ini telah menarik banyak perhatian, terutama bagi kalangan pers pada masa itu. Pandangan beberapa surat kabar nasional mengenai pengangkatannya sebagai Wampa/Menpen oleh Presiden Sukarno yang dumumkan Sekretariat Negara pada tanggal 24 Oktober 1962 memberikan gambaran subyektif tentang peranannya pada sisi yang lain. Enam surat kabar nasional yang terbit sehari setelah pelantikannya, memberi catatan yang senada yaitu bahwa dunia pers pada masa itu mendukung sepenuhnya, tidak meragukan kemampuannya, dan menaruh harapan besar bagi perkembangan dunia pers dengan pengangkatannya sebagai orang nomor satu di jajaran Departemen Penerangan itu. Meskipun pandangan pers ini bersifat subyektif, setidaknya telah memberi gambaran tentang peranan Cak Roes dari sisi yang lain yang terjadi dalam periode demokrasi terpimpin.

*Keempat*, aktivitas Cak Roes ketika menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPA dan sekaligus Ketua Panitia Indoktrinasi tentang Manipol/Usdek telah dilakukannya sepenuh hati. Hal ini dibuktikan dengan adanya arsip Laporan Indoktrinasi yang disampaikan kepada Presiden yang menunjukkan betapa besar perhatiannya yang telah dicurahkan dalam kegiatan indoktrinasi Manipol/Usdek. Bahkan karena begitu besarnya perhatian yang dicurahkan itu telah membuat citra atas dirinya dengan predikat “Jubir Usman”. Sekalipun demikian Cak Roes tetap teguh dengan prinsip yang dipegangnya yakni meyakini kebenaran Manipol/Usdek dengan segala konsekuensinya. Dalam pandangan Cak Roes konsep apapun yang bersumber dari Bung Karno adalah benar adanya.





**BAB 4**  
**LEMBAGA PEMBINAAN KESATUAN BANGSA**  
**(LPKB)**  
**SEBAGAI ALAT INDOKTRINASI**

Pada bab terdahulu penulis telah menyebut bahwa salah satu pertimbangan Bung Karno memberi kepercayaan kepada Cak Roes untuk menduduki berbagai jabatan penting dan strategis adalah karena kemampuannya memahami dan menterjemahkan keinginan Bung Karno. Kemampuan yang dimiliki Cak Roes itu merupakan modal yang sangat berharga baginya untuk menjalankan perannya dalam penerapan pemikiran Bung Karno, khususnya yang berhubungan dengan masalah pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*). Meskipun demikian, satu hal lagi yang harus dipikirkan adalah instrumen, atau alat, atau sarana yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan indoktrinasi.

Selain itu juga harus memikirkan bagaimana cara yang paling efektif untuk melaksanakan kegiatan indoktrinasi bagi segenap komponen bangsa yang secara geografis sulit dijangkau. Begitu pula dengan bahan-bahan indoktrinasi yang harus dipersiapkan, merupakan hal lain yang perlu mendapat perhatian. Belum lagi berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang bersifat teknis, seperti sarana transportasi, penggandaan atau pencetakan bahan-bahan tertulis untuk indoktrinasi, menyiapkan tim indoktrinasi yang memiliki kemampuan memadai, masalah logistik, tempat kegiatan, dan masalah-masalah lain yang mungkin terjadi di luar dugaan.

Untuk keperluan tersebut, maka Bung Karno membentuk suatu lembaga yang diberi nama Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB). Sesuai Peraturan Dasar LPKB, maka lembaga ini dibentuk mulai dari tingkat pusat yang berkedudukan di ibukota negara, tingkat cabang berkedudukan di ibukota Daerah Swatantra Tingkat I (Provinsi), tingkat ranting berkedudukan di ibukota Daerah Swatantra Tingkat II (Kotapraja dan Kabupaten), dan yang paling rendah adalah tingkat sektor yang berkedudukan di kota-kota yang dipandang perlu.

Dari penelusuran yang penulis lakukan mengenai sumber-sumber yang berhubungan dengan pembentukan, perkembangan, aktivitas LPKB, dan aktivitas

Roeslan Abdulgani dalam LPKB di ANRI didapatkan beberapa dokumen atau arsip yang dapat dijadikan bukti sejarah.

#### 4.1 Pembentukan LPKB

Para pendiri bangsa atau *founding fathers* telah sepakat menjadikan tanggal 20 Mei 1908 sebagai momentum sejarah bagi kebangkitan bangsa Indonesia untuk menggalang persatuan dan kesatuan dalam rangka membebaskan diri dari cengkeraman kolonialisme-imperialisme barat. Organisasi pergerakan nasional Budi Utomo yang didirikan pada tanggal tersebut telah menjadi tonggak sejarah bagi tumbuh dan berkembangnya pergerakan-pergerakan nasional seperti Sarekat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarekat Islam (1912), Muhammadiyah (1912), Indische Partij (1912), Indische Sociaal Democratische Vereniging (1914), Perserikatan Komunis India (1920), Perhimpunan India yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia (1922), dan puncaknya adalah berdirinya Partai Nasional Indonesia (1927) yang dipelopori oleh Bung Karno.

Momentum sejarah tersebut berlanjut dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda Indonesia II yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kongres yang berlangsung dari tanggal 26-28 Oktober 1928 tersebut dihadiri oleh para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan Jong Java, Jong Sumatra, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Jong Bataksbond, Jong Selebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Himpunan Pelajar Indonesia mempertegas rasa persatuan kebangsaan mereka dengan mengucapkan sumpah yang berbunyi sebagai berikut:<sup>177</sup>

1. Kami putera dan puteri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia.
2. Kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.
3. Kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia.

---

<sup>177</sup> Terdapat beberapa versi tentang bunyi kalimat dari "Sumpah Pemuda" dengan makna dan arti yang sama.

Selain ikrar yang diucapkan sebagai sumpah, dalam kongres tersebut juga disepakati lagu Indonesia Raya ciptaan WR. Supratman sebagai lagu kebangsaan dan bendera Merah Putih sebagai bendera kebangsaan.

Hasil Kongres Pemuda Indonesia II mendapat sambutan yang hangat tidak hanya dikalangan para pemuda tetapi juga kaum tua karena merupakan cerminan dari tekad dan semangat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Peristiwa tersebut sangat penting arti dan maknanya bagi pembangunan bangsa (*nation building*) pada masa-masa selanjutnya. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa momentum sejarah Kebangkitan Nasional 1908 dan Sumpah Pemuda 1928 telah menjadi *turning point* atau titik tolak bagi perjuangan yang dilakukan oleh berbagai organisasi sosial dan politik dari berbagai aliran meleburkan diri dalam bentuk federasi. Beberapa bentuk federasi dimaksud dapat disebut di sini, antara lain:<sup>178</sup>

1. Permuafakatan Perhimpunan-Perhimpunan Partai Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Organisasi ini dipelopori oleh Sukarno yang sangat mendambakan persatuan dengan anggota PNI, PSI, BU, Gerakan-gerakan Daerah seperti Pasundan, Kaum Betawi, Sarekat-sarekat Sumatra, dan studieclub-studieclub. Federasi ini dibentuk dengan tujuan:
  - a. Mencegah timbulnya perselisihan yang mungkin terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lain.
  - b. Menyatukan bentuk organisasi, arah, dan cara beraksi dalam perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia.
  - c. Mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia dengan berbagai lambang yang kemudian diterima oleh seluruh anggota yaitu: Sang Merah Putih sebagai bendera kebangsaan, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, dan Bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan.
2. Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Federasi dari beberapa organisasi politik ini dipelopori oleh Parindra dengan anggotanya: Gerindo, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, PII (pecahan PSII), dan Perhimpunan Politik Katolik Indonesia yang dibentuk pada 1939. Beberapa agenda yang ingin diperjuangkan federasi ini adalah:

<sup>178</sup> M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hal. 379-402.

- a. Pelaksanaan "*the right of self-determination*".
  - b. Persatuan kebangsaan atas dasar demokrasi politik, sosial, dan ekonomi.
  - c. Pembentukan parlemen yang dipilih secara bebas dan umum, yang mewakili dan bertanggung jawab kepada rakyat.
  - d. Membentuk solidaritas Indonesia-Belanda untuk menghadapi kekuatan Fascis.
  - e. Pengangkatan lebih banyak orang Indonesia dalam berbagai jabatan negara, seperti: Wakil Gubernur Jendral, wakil-wakil direktur pada departemen-departemen, dan anggota Dewan India.
3. Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI). Merupakan federasi dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang dibentuk pada 1937 di Surabaya. Federasi ini dibentuk dengan tujuan keagamaan dan persatuan Umat Islam. Berbeda dengan organisasi politik lain yang dilarang pada zaman pendudukan Jepang, MIAI memiliki nasib yang lebih baik karena tidak mengalami pelarangan. Federasi inilah yang kemudian diubah namanya menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang lebih dikenal nama singkatnya Masyumi.
  4. Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (PVPN). Didirikan pada 1929 dan merupakan sentral sarekat sekerja pemerintah seperti: Sarekat Pegadaian, Sarekat Pegawai Pegadaian, Sarekat Pegawai Urusan Candu, Sarekat Pegawai Pajak, Sarekat Pegawai Pabean, dan Persatuan Guru Indonesia. Federasi ini dibentuk dengan tujuan perbaikan kesejahteraan anggota.
  5. Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Adalah federasi-federasi dari berbagai organisasi sosial dan politik yang kemudian bergabung dalam bentuk konfederasi pergerakan. Konfederasi ini dipelopori oleh GAPI dengan anggota MIAI dan PVPN yang didirikan pada 1939. Pada tahun 1941 namanya diubah menjadi Majelis Rakyat Indonesia yang pengurusnya terdiri dari 15 orang (masing-masing federasi 5 orang).

Pembentukan berbagai federasi tersebut membuktikan betapa besarnya semangat perjuangan yang ditunjukkan oleh para pemimpin pergerakan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebelum akhirnya jatuh ketangan pendudukan Fascisme Jepang.

Puncak dari momentum sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah terwujudnya cita-cita kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Sukarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945. Namun demikian tidak serta-merta cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa dapat diwujudkan seiring dengan tercapainya kemerdekaan tersebut. Doktrin mengenai konsep persatuan dan kesatuan harus dapat dimengerti dan dipahami oleh segenap lapisan masyarakat dan pada akhirnya harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pidato yang disampaikan dalam rangka hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 Bung Karno telah mengemukakan pikiran-pikiran yang mendasari proses *nation building*. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam amanatnya yang disampaikan pada tanggal 15 Juli 1963 di Bogor.

Secara kronologis sejarah terbentuknya LPKB diawali dari munculnya keinginan 10 tokoh yang berjiwa muda dari kalangan minoritas ketika pada tanggal 24 Maret 1960 di Jakarta mencetuskan "Statement Assimilasi". Tokoh-tokoh tersebut dengan tegas menyatakan pendiriannya bahwa masalah minoritas hanya dapat diselesaikan dengan jalan assimilasi disegala bidang, sejalan dengan jiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.<sup>179</sup>

"Statement Assimilasi" ini kemudian pada tanggal 15 Januari 1961 ditingkatkan statusnya dalam forum Seminar Kesadaran Nasional di Bandung Ambarawa, Jawa Tengah menjadi "Piagam Assimilasi".<sup>180</sup> Pada tanggal 22 Februari 1963, Bung Karno menerima kedatangan utusan dari para pemuda pendukung assimilasi. Dalam pertemuan tersebut Bung Karno menegaskan tiga hal yang amat penting bagi usaha pembinaan bangsa, yaitu:

1. „BHINEKA" adalah „DAS SEIN" dan „TUNGGAL IKA" adalah „DAS SOLLEN".
2. „Satu Bangsa dengan minoritas-minoritas bukan satu Bangsa".
3. „Saja membenarkan usaha pemuda-pemuda untuk memetjahkan masalah minoritas dengan djalan assimilasi dan menghilangkan exclusivisme dalam tubuh Bangsa Indonesia".<sup>181</sup>

Tiga hal penting yang ditegaskan oleh Bung Karno tersebut telah memberikan gambaran betapa besar perhatiannya terhadap masalah pembinaan bangsa. Atas dasar penegasan itulah maka pada tanggal 10 s. d. 12 Maret 1963

<sup>179</sup> Roeslan Abdulgani, (1966), *Keterangan Wakil Perdana Menteri Bidang Lembaga-lembaga Politik Didepan Sidang DPR-GR*, Djakarta: Kementerian Penerangan R.I., hal. 7.

<sup>180</sup> *Ibid*.

<sup>181</sup> C.S.T. Kansil (*et. al.*), *op. cit.*, hal. 5.

diselenggarakan Musyawarah Assimilasi bertempat di Gedung Lembaga Administrasi Negara Jakarta dengan salah satu hasil terpenting adalah dikeluarkannya “Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 140 Tahun 1963, Tanggal 18 Juli 1963” yang menetapkan: “Pembentukan Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa” disingkat LPKB.<sup>182</sup>

Selain itu Musyawarah Assimilasi juga telah menghasilkan beberapa keputusan penting seperti, terbentuknya Pimpinan Pusat yang dipilih melalui musyawarah anggota LPKB dan Keputusan Musyawarah Assimilasi tentang Program Jangka Pendek untuk LPKB.<sup>183</sup> Pimpinan Pusat yang dipilih melalui musyawarah anggota tersebut bersifat kolektif. Selanjutnya Pimpinan Pusat LPKB yang telah dilahirkan dari hasil Musyawarah Assimilasi tersebut membuat suatu “pernyataan” tertulis yang pada dasarnya mendukung perjuangan untuk “nation building” seperti tertuang dalam pidato PYM. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno pada tanggal 14 Maret 1963 yang diucapkan ketika menyambut Pembukaan Kongres ke-VIII Baperki, bertempat di Istana Olah Raga Bung Karno – Senayan, Jakarta.<sup>184</sup> Sebulan kemudian, Pimpinan Musyawarah Assimilasi membentuk Peraturan Dasar LPKB yang terdiri dari 16 pasal, sebagai pedoman pelaksanaan tugas.<sup>185</sup>

Sebagai anggota pimpinan kolektif LPKB, Sindhunatha mengemukakan tentang pentingnya lembaga ini dalam upaya membina persatuan dan kesatuan bangsa. Tugas LPKB sebagaimana dikehendaki oleh presiden meliputi tiga bidang pokok, yaitu:<sup>186</sup>

1. masalah minoritas keturunan asing.
2. masalah sukuisme dan provinsialisme.
3. masalah phobi-phobian.

Dalam menghadapi tiga masalah pokok tersebut maka fungsi LPKB adalah:<sup>187</sup>

1. sebagai alat penerangan dan indoktrinasi.
2. sebagai alat untuk menilai keadaan dan memberikan usul2 kepada pedjabat-pedjabat jang berwenang untuk menjelesaikan segala sesuatu jang berkenaan dengan 3 masalah pokok tersebut diatas.

<sup>182</sup> Lihat *Lampiran 10*.

<sup>183</sup> Lihat *Lampiran 5* dan *6*.

<sup>184</sup> Lihat *Lampiran 7*.

<sup>185</sup> Lihat *Lampiran 8*.

<sup>186</sup> C. S. T. Kansil (*et. al.*), *op. cit.*, hal. 7.

<sup>187</sup> *Ibid.*

3. sebagai alat untuk menjiptakan suasana dan faktor-faktor positif dan meniadakan suasana dan faktor-faktor negatif terhadap 3 masalah pokok tersebut diatas.

Kemudian dalam pidato yang disampaikan ketika memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1963, secara eksplisit Bung Karno mengemukakan tentang pentingnya membentuk suatu lembaga yang secara khusus akan bekerja keras untuk keperluan *nation and character building*. Bagian dari pidato yang berhubungan dengan masalah itu dapat disajikan kutipannya sebagai berikut:

“Ketjuali itu, kesatuan dan persatuan yang saya maksudkan itu adalah satu tuntutan daripada NATIONBUILDING dan CHARACTERBUILDING. Dapatkah Nation terbentuk diikalau dikalangan Nation itu sengadja dipupuk phobi-phobian antara kita dengan kita?

Saja telah membentuk L.P.K.B. – Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa – untuk mempertjepat NATIONBUILDING dan CHARACTERBUILDING itu, dan pimpinannya hari-hari saja serahkan kepada Wampa Roeslan Abdulgani. Salah satu pesanan saja kepada Sdr. Roeslan ialah, untuk memberi pengertian tentang salahnja phobi-phobian itu ....”<sup>188</sup>

Pada kutipan tersebut, yang dimaksud dengan ungkapan “phobi-phobian” oleh Bung Karno adalah adanya rasa saling curiga antara kelompok aliran politik yang satu dengan yang lain. Pada masa itu terdapat tiga kelompok aliran politik yang menonjol yaitu kelompok politik dengan aliran nasionalis, kelompok politik dengan aliran agama (Islam), dan kelompok politik dengan aliran komunis. Keberadaan ketiga politik aliran ini pulalah yang mengilhami Bung Karno mencetuskan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) sebagai tiga kekuatan revolusioner. Hal yang mendasari politik mercusuar Bung Karno di kemudian hari, dan dipropagandakan kepada dunia sebagai kekuatan trisakti. Konsep Nasakom merupakan bagian dari paket kebijakan politik Bung Karno pada masa Demokrasi terpimpin.

Dalam forum Musyawarah Assimilasi tersebut beberapa pejabat negara berkesempatan menyampaikan sumbangan pemikiran baik yang berupa saran, pendapat, maupun anjuran melalui sambutan, pidato, dan prasaran. Bagian terpenting dari sumbangan pemikiran para pejabat negara dimaksud seperti pada kutipan berikut:

1. Sambutan J.M. Wampa Bidang Khusus/Menpen Dr. H. Roeslan Abdulgani

<sup>188</sup> *Ibid.*, hal. 15. Kutipan tersebut juga merupakan bagian dari Amanat Presiden Sukarno pada Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1963 di Djakarta yang diberi judul “Genta Suara Revolusi Indonesia” yang dimuat dalam *Dibawah Bendera Revolusi*, Djilid Kedua, hal. 545.

“Memang proses sedjarah adalah suatu proses jang madju, suatu proses progresip; dan proses “nation building” adalah pula proses assimilasinja unsur-unsur progresip daripada sesuatu masjarakat dalam tingkatan jang tertentu. Demikianlah halnja dengan proses “nation building” Indonesia berpuluhan tahun jang lalu.

Tetapi proses “nation building” ini terus-menerus memerlukan aktivitas jang dynamis, sambil selalu memupuk setiap hari mental dan djiwa jang ingin bersatu, persamaan watak atas dasar persamaan nasib, dan last but not least: patriotisme, atau rasa setia-kawan dan rasa loyal terhadap Tanah Air Indonesia ini.

Siapa jang tidak berdiri atas semen-semennja “nation building” ini, sebenarnja dihinggapi oleh penyakit „retak dalam djiwa “, karena mungkin didominir oleh loyalitet-dobel, atau berlipat-ganda.

Saja melihat musjawarah Assmilasi sekarang ini sebagai usaha untuk memperkuat semen-nja “nation building” itu, jang tumbuh dari kewadjarannja sedjarah, tanpa paksaan dari atas. Dan sesuai dengan andjuran Presiden kita, jang menekankan bahwa „das Sollen“-nja adalah „Ika“, dan „das Sein“-nja adalah „Bhineka“-nja, maka saja harapkan supaja kita djangan bersikap passip dalam proses ini, melainkan aktif menundjukkan kita punja kesetia-kawanan terhadap Tjita-tjita Bangsa, Nasib Rakjat dan Tanah Air, menudju kearah persatuan bulat antar-suku, antar-lapisan dan antar-golongan dari Sabang sampai Merauke”.<sup>189</sup>

## 2. Sambutan J. M. Wampa/KASAB Djenderal Dr. A. H. Nasution

“Bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai Suku dan berbagai minoritas turunan asing adalah das Sein jang njata dan jang dahulu oleh kolonialis dipertentangkan untuk merintangkan pertumbuhan kesatuan bangsa. Sukses perdjongan kemerdekaan membuka djalan untuk kelanjutan pertumbuhan kesatuan bangsa kita.

Sedjalan dengan perkembangan tersebut, maka untuk pertahanan nasional dan untuk ketahanan nasional Indonesia, adalah amat vital pertumbuhan jang lantjar kepada kesatuan itu.

Nation-building Indonesia telah menderita banjak serangan kontra revolusi dan serangan kolonialisme/imperialisme. Dan sebagai bangsa jang berdjorang, maka antjaman itu terus menekan terhadap kita.

Pengalaman kita dizaman kolonial Belanda dan Djepang, dan dizaman perang kemerdekaan, menundjukkan bahwa dikalangan apa jang dahulu disebut „Vreemde Oosterlingen” dan „Indo-Belanda”, tidak sedikit jang berorientasi dan jang berloyalitas tertudju kenegri asal turunan, baik politis maupun kulturil.

Dibawah kilasan Sang Merah Putih dapatlah diperkembangkan loyalitas jang berpusat di Indonesia.

Dan saja yakin, bahwa dengan usaha dan kesadaran Saudara-saudara menudju kepada kesatuan bangsa tanpa minoritas-minoritas, Saudara ikut pula memperkuat ketahanan nasional dan pertahanan nasional Indonesia”.<sup>190</sup>

## 3. Pidato J. M. Wampa/Ketua Periodik P. B. Front Nasional Chairul Saleh

“Pada Saudara tjukup mempunjai pegangan jang tegas dan kokoh untuk mentjapai tjita-tjita itu, jaitu:

1. Sumpah Pemuda jang berinti: SATU BANGSA, SATU TANAH AIR, SATU BAHASA „INDONRESIA”.

<sup>189</sup> Departemen Penerangan, (1963), *Assmilasi dalam rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa, Sambutan-sambutan/Prasaran-prasaran pada Musjawarah Assmilasi pada tanggal 10 s/d 12 Maret 1963 di Djakarta*, Djakarta: Departemen Penerangan R.I., hal. 9-10.

<sup>190</sup> *Ibid.*, hal. 11-12.



2. Kejakinan bahwa proses asimilasi, jaitu proses penjatuan golongan-golongan jang mempunjai sikap mental, adat kebiasaan dan pernyataan kebudajaan jang berbeda-beda mendjadi satu kebulatan sosiologis jang harmonis dan bermakna, adalah satu-satunja djalan untuk mentjapai tjita-tjita itu. Dan itu adalah satu-satunja djalan jang tersedia bagi Warga Negara keturunan asing, djika ia setia pada Sumpah Pemuda itu.
3. Utjapan P.J.M. Presiden, Pemimpin Besar Revolusi baru-baru ini kepada para pendukung asimilasi: „Een Natie met minoriteiten is geen Natie” – Satu bangsa dengan minoritas-minoritas, adalah bukan merupakan bangsa. „Bhineka” itu adalah „das Sein”, „Tunggal Ika” adalah „das Sollen”.<sup>191</sup>

#### 4. Pidato Prof. Sunario S.H.

„Setjara khusus arti „assimilasi” itu ialah proses bersatunja mereka dari kewarganegaraan R.I. jang „berturunan asing” – tidak dikatakan untuk berapa persen turunan asing itu terdapat dalam darahnja masing-masing – djadi jang biasanja disebut golongan „peranakan” dengan mereka jang lazimnja disebut atau menjebut dirinja sebagai orang Indonesia „asli”, tanpa penjelidikan djuga lebih landjut apa tidak mungkin diantara nenek-mojangnja dulu-dulu terdapat orang-orang asing (Hindu, Arab, Tionghoa, Belanda dan sebagainya). Memang soal keturunan sebenarnja sudah tidak mendjadi pertanjaan (problim) lagi, sesuai dengan pembentukan bangsa (Nation) dimana-mana. Nation building sendiri ialah asimilasi inilah diantara segenap rakjat”.<sup>192</sup>

#### 5. Sambutan J. M. Menteri P.U.O.D. Ipik Gandamana

„Oleh sebab itu sebagai penutup pidato saja, saja andjurkan untuk:

- 1) bahu-membahu dengan Pemerintah dan Rakjat keseluruhannja mempertjepat proses asimilasi,
- 2) memperkembangkan dan mentjiptakan faktor-faktor jang dapat mempertjepat dan sebaliknja melenjapkan, setidak-tidaknja mengurangi faktor-faktor jang menghambatnja;
- 3) tabah menghadapi kesukaran dan rintangan, karena tak ada perdjangan tanpa tantangan, maka berdjanglah terus sampai *das Sollen* (Tunggal Ika)-nja tertjapai. Mempersatukan segala golongan bangsa sebagai Satu Bangsa jang homogeneen, adalah merupakan masalah jang meminta perhatian jang saksama tidak sadja dari Pemerintah, melainkan djuga dari kita Bangsa Indonesia seluruhnja dan terutama sekali sudah tentu dari mereka jang berkepentingan sendiri”.<sup>193</sup>

#### 6. Prasaran dari Kolonel Sutjipto S. H. Kepala Staf PEPERTI

1. Tempatkanlah persoalan „per-suku-an” dalam rangka „Bhineka Tunggal Ika”.
2. Tudju-lah masa depan pembinaan Kesatuan Bangsa.
3. Dalam hubungan ini, mengenai masalah „hak azasi”, lihatlah dalam rangka tata-hukum Sosialis Indonesia dan bukan tata-hukum liberal.
4. Hilangkanlah apriorisme menurunnja kedudukan .... Privilege, mulailah dengan iktikad baik bersama-sama dengan orang jang namankan „golongan asli” (voorheen inlanders) mentjapai tudjuan revolusi Indonesia, jaitu masjarakat jang dengan perkataan modern disebut masjarakat sosialis, sosialis Indonesia, sosialis Pantja Sila.
5. Lenjapkan organisasi-organisasi jang memupuk kesadaran berminorita dan dirikanlah atau masukilah organisasi-organisasi jang bersifat umum dan nasional, baik dibidang sosial, politik, ekonomi, kebudajaan, jang disesuaikan dengan kepertjajaan, kejakinan dan pilihan masing-masing, dan didalam organisasi mana terdapat anggota-anggotanja jang terdiri dari segala matjam „suku” dan „peranakan”.

<sup>191</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>192</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>193</sup> *Ibid.*, hal. 32-33.

6. Kesadaran sebagai orang Indonesia dan Bangsa Indonesia, harus sungguh-sungguh diresapkan sampai djadi darah-daging, dan dengan inisiatip sendiri menggalang organisasi-organisasi yang bersifat umum dan nasional itu.
7. Mempergiat dan memperlantjar pergaulan dan penjatuan tanpa reserve atau kaku antara sesama Warga-negara.
8. Kelanjutan proses assimilasi ini, sangatlah tergantung kepada pengorbanan-pengorbanan yang akan diberikan, dalam membina kesatuan dan kebulatan Bangsa Indonesia".<sup>194</sup>

#### 7. Sambutan PANGDAM V/DJAJA, Brig. Djen. R. Umar Wirahadikusumah

"Dari musjawarah ini, diharapkan satu program perjuangang yang meliputi segala segi perjuangang kesatuan bangsa. Bukan sadja dibidang juridis atau politis, tetapi dibidang-bidang lainnja, seperti dibidang kulturil dan sosial-ekonomis.

Perjuangang ini adalah suatu perjuangang yang besar, yang harus digerakkan oleh segenap pemuda Indonesia dan segenap bangsa Indonesia. Maka adalah tugas musjawarah untuk mengikut sertakan segenap pemuda dan segenap bangsa untuk memenangkan perjuangang persatuan bangsa dan melenjapkan exclusivisme".<sup>195</sup>

Dari sambutan, pidato, dan prasaran yang disampaikan oleh beberapa pejabat negara dalam forum Musyawarah Assimilasi tersebut diperoleh gambaran bahwa masalah persatuan dan kesatuan bangsa telah menjadi perhatian nasional. Hal ini dapat dipahami mengingat konsep pembangunan bangsa (*nation building*) yang digagas oleh Bung Karno sejak sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaannya telah menjadi agenda yang mendapat prioritas utama.

Sebagai orang yang mendapat kepercayaan untuk mengemban tugas pelaksana sehari-hari dari kegiatan LPKB, Roeslan Abdulgani telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membuat strategi yang memudahkan berlangsungnya proses indoktrinasi bagi segenap lapisan masyarakat. Di samping itu, didukung pula oleh posisi Roeslan yang secara bersamaan menduduki berbagai jabatan yang memiliki relevansi dengan kegiatan indoktrinasi. Sebagai Menteri Penerangan sudah tentu bahwa tugas utamanya adalah hal-hal yang berhubungan dengan pers, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan penerangan kepada masyarakat mengenai hal lain yang dipandang perlu yaitu indoktrinasi. Begitu pula dengan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat dan sebagai Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi, keduanya merupakan jabatan yang mengharuskan dirinya selalu dekat dengan masyarakat.

<sup>194</sup> *Ibid.*, hal. 38-39.

<sup>195</sup> *Ibid.*, hal. 40-41.

Dengan demikian, bagi Roeslan Abdulgani pembentukan LPKB merupakan alat yang akan mempermudah dan memperlancar kegiatan indoktrinasi. Lebih-lebih lembaga ini memiliki cabang, ranting, dan sektor di seluruh wilayah di Indonesia. Di dalam pelaksanaan kegiatan indoktrinasinya pun melibatkan berbagai unsur pejabat-pejabat pemerintah di tingkat daerah yang disebut Panca Tunggal.

#### 4.2 Perkembangan LPKB

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan LPKB pada tahap-tahap selanjutnya setelah ditetapkan melalui Keputusan Presiden seperti telah disebut di atas, penulis mendapatkan dua buah dokumen atau arsip yang dapat dijadikan bukti otentik bagi kebenaran sejarah mengenai perkembangan LPKB di berbagai daerah di Indonesia. Dokumen tersebut penulis peroleh pada Arsip Nasional Republik Indonesia ketika melakukan penelusuran sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan pada saat ini.

Dokumen *pertama* berupa sepucuk surat dengan nomor: 765/III-a/1964, hal: Pelantikan LPKB Tjabang Garut, Tasikmalaja dan Tjiamis, tertanggal 24 Djuli 1964. Dokumen berupa sepucuk surat tersebut menggunakan kepala surat atau kop Kompartimen Perhubungan Dengan Rakyat, Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa yang ditandatangani oleh F. S. Wignjosumarsono selaku Sekretaris dan atas nama Kepala LPKB Pusat. Surat tersebut ditujukan kepada Jang Mulia Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan Dengan Rakjat Dr. H. Roeslan Abdulgani.

Adapun isi dari surat dimaksud adalah pengajuan permohonan agar Jang Mulia Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan Dengan Rakjat Dr. H. Roeslan Abdulgani berkenan melantik LPKB cabang seperti yang disebut pada pokok surat. Waktu pelaksanaan pelantikan yang diminta direncanakan berlangsung pada tanggal 7, 8, dan 9 Agustus 1964. Pejabat Panca Tunggal dan Panitia Persiapan sangat mengharapkan agar Jang Mulia Menteri Koordinator

Kompartimen Perhubungan Dengan Rakjat Dr. Roeslan Abdulgani berkenan untuk melantik sendiri dan tidak diwakilkan.<sup>196</sup>

Dokumen *kedua* juga berupa sepucuk surat dengan identifikasi nomor: 60/LPKB/64, perihal: Pembentukan/Penundjukan Tjabang LPKB Kotapraja Pontianak dan Ketapang, tertanggal: 22 Nopember 1964. Surat kedua ini menggunakan kepala surat atau kop Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa Daerah Kalimantan Barat dan ditandatangani oleh R. Asinoellah selaku Kepala LPKB Daerah Kalimantan Barat yang dikirim kepada Kepala LPKB Pusat di Jl. Merdeka Timur 7 Jakarta.

Isi surat ini merupakan jawaban atau penjelasan atas surat yang dikirim oleh LPKB Pusat dengan nomor: 1839/II-3/1964, tanggal 9 November 1964 yang memuat petunjuk tentang prosedur dan tata cara pembentukan LPKB tingkat cabang harus mengacu keputusan Jang Mulia Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan Dengan Rakjat Roeslan Abdulgani, tanggal 1 Agustus 1964. Penjelasan yang disampaikan oleh LPKB Daerah Kalimantan Barat adalah mengenai terbentuknya beberapa cabang sebagai berikut:<sup>197</sup>

1. LPKB Cabang Ketapang
2. LPKB Cabang Kotapraja Pontianak
3. LPKB Cabang Sambas di Singkawang
4. LPKB Cabang Pontianak, Kabupaten Mempawah

Bahwa prosedur dan tata cara pembentukan beberapa cabang LPKB tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh LPKB Pusat. Selanjutnya LPKB Daerah Kalimantan Barat melalui surat tersebut meminta kepada LPKB Pusat untuk memberikan pengesahan atau melakukan pelantikan secepatnya.

Dari dua dokumen tersebut penulis berpendapat bahwa keberadaan LPKB sebagai alat indoktrinasi cukup mendapat perhatian para pejabat di daerah baik Daerah Swatantra Tingkat I (Provinsi) maupun Daerah Swatantra Tingkat II (Kotapraja dan Kabupaten). Hal ini dibuktikan dengan adanya pembentukan

<sup>196</sup> ANRI, *Arsip*, no. 1415, "Sekretaris LPKB kepada Menko HUBRA: Surat tanggal 24 Juni 1964 tentang permintaan untuk melantik LPKB cabang Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis".

<sup>197</sup> ANRI, *Arsip*, no. 1428, "Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) daerah Kalimantan Barat kepada LPKB Pusat: Surat tanggal 23 November 1964 tentang pembentukan cabang LPKB Kopra dan Ketapang di Pontianak".

LPKB cabang di beberapa daerah seperti disebut dalam dua dokumen surat. Meskipun bukti yang ada hanya menunjukkan beberapa daerah di Jawa Barat dan Kalimantan Barat yang secara eksplisit menyebutkan pembentukan cabang-cabang LPKB, tetapi penulis berkeyakinan bahwa hal tersebut juga terjadi pada daerah-daerah yang lain.

Namun demikian secara implisit pembentukan cabang LPKB di daerah yang lain dapat dilihat dari dokumen yang lain yaitu Laporan Kegiatan LPKB Sumatera Utara, nomor: 240/LPSU/1965, tanggal 16 Juni 1965, yang disampaikan kepada Kepala LPKB Pusat. Dokumen ini memuat tentang hasil-hasil konsolidasi yang telah dilakukan oleh LPKB Cabang Sumatera Utara dari tanggal 1 Mei s. d. 14 Juni 1965 yang dilakukan dengan cara berkunjung ke berbagai daerah di wilayah Sumatera Utara, baik yang sudah membentuk LPKB tingkat ranting maupun dalam rangka pembentukan bagi daerah yang belum. Dalam kunjungannya itu LPKB cabang Sumatera Utara memberikan indoktrinasi tentang tujuan pokok LPKB.

Daerah-daerah yang telah dikunjungi, antara lain:

1. Kabupaten Langkat
2. Kotapraja Binjai
3. Kotapraja Medan
4. Kotapraja Tebing Tinggi
5. Kabupaten Deli Serdang
6. Kotapraja Pematang Siantar
7. Kabupaten Simalungun
8. Kabupaten Tapanuli Utara Tarutung
9. Kabupaten Tapanuli Tengah Sibolga
10. Kotapraja Sibolga
11. Kabupaten Tapanuli Selatan Padang Sidempuan
12. Kabupaten Asahan Tanjung Balai
13. Kotapraja Tanjung Balai
14. Labuhan Batu Daerah Tingkat II Rantau Perapat
15. Kabupaten Tanah Karo di Kabanjahe
16. Kabupaten Nias Kabupaten Sitoli

Dari 16 daerah yang dikunjungi oleh Tim Indoktrinasi LPKB Cabang Sumatera Utara tersebut sebagian daerah diantaranya telah membentuk LPKB. Dengan demikian hal ini juga memberi gambaran mengenai seberapa banyak LPKB di tingkat ranting di berbagai daerah di Indonesia telah terbentuk, dan yang lebih penting lagi adalah telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga indoktrinasi dan menunjukkan perkembangan LPKB.

Dilihat dari sisi yang lain, perkembangan LPKB dapat ditunjukkan dari bidang sasarannya. Jika semula LPKB dibentuk dengan sasaran utama adalah pembangunan bangsa dan pembangunan karakter yang dilakukan dengan cara menghapuskan diskriminasi antara penduduk asli dan tidak asli, maka dalam perkembangan selanjutnya LPKB juga berfungsi sebagai alat indoktrinasi kebijakan politik pemerintah seperti tentang Manipol/Usdek, Nasakom, merebut kembali Irian Barat, dan politik konfrontasi dengan Malaysia.

### 4.3 Aktivitas LPKB

Mengenai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh LPKB sebagai lembaga indoktrinasi baik ditingkat pusat maupun cabang, penulis mendapatkan tiga bundel dokumen yang dapat dijadikan bukti otentik. Dokumen bundel *pertama* berupa salinan surat dari Kepala LPKB Pusat K. Sindhunatha SH Kpt. Laut Nrp. 2220/P ditujukan kepada Paduka Yang Mulia/Pemimpin Besar Revolusi RI/Presiden Sukarno, nomor: 007/VII-5/1965. tanggal 21 Januari 1965, tidak mencantumkan hal surat, sifat: Rahasia. Surat ini disertai dua lampiran yang berisi “Rencana LPKB Dalam Turut Memenangkan Aksi Dwikora” dan “Garis-garis Besar Laporan Umum LPKB Kepada PYM Presiden/Pemimpin Besar Revolusi”.<sup>198</sup>

Secara singkat surat ini berisi tentang keinginan LPKB Pusat berpartisipasi dalam usaha memperhebat konfrontasi menghadapi proyek neokolonialisme Malaysia melalui Dwikora. Dalam hal ini LPKB ingin meningkatkan daya upayanya untuk mengintegrasikan dan mengassimilasikan seluruh potensi

---

<sup>198</sup> ANRI, *Arsip*, no. 1632, “LPKB kepada Presiden RI: Surat tanggal 21 Januari 1965 tentang rencana LPKB dalam turut serta memenangkan aksi dwikora sehubungan dengan konfrontasi Indonesia-Malaysia”.

nasional progresif revolusioner dalam kancah perjuangan revolusi sebagai tindak lanjut amanat PYM Presiden/Pemimpin Besar Revolusi di hadapan Kader Revolusi.

LPKB bermaksud melancarkan suatu operasi offensip di seluruh wilayah perbatasan dengan Malaysia untuk menggerakkan dan mengintegrasikan seluruh potensi masyarakat golongan keturunan asing, khususnya keturunan Tionghoa dalam pelaksanaan Dwikora disegala bidang. Ada pun jenis kegiatan yang direncanakan adalah memberikan penerangan dan indoktrinasi secara luas untuk menggerakkan *funds and forces* untuk proyek-proyek pembangunan daerah-daerah perbatasan.

Sedangkan mengenai dua lampiran dari surat tersebut, lampiran pertama tentang “Rencana LPKB Dalam Turut Memenangkan Aksi Dwikora” isinya meliputi beberapa hal, sebagai berikut:<sup>199</sup>

#### 1. Tujuan

Sesuai ajaran Bung Karno tentang *nation and character building*, LPKB turut aktif dalam upaya memenangkan perjuangan Dwikora dengan cara:

- a. Mempertinggi ketahanan revolusi
- b. Mengganyang habis proyek Neokolonialisme Malaysia.

#### 2. Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran pokok dari rencana LPKB adalah:

- a. Rakyat dan penduduk Indonesia terutama yang berada di daerah-daerah perbatasan, dilakukan dengan cara:
  - 1) Memberi pencerahan bahwa dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, setiap bentuk perjuangan pasti dapat dimenangkan.
  - 2) Menggerakkan *funds and forces* untuk proyek-proyek pembangunan daerah perbatasan yang direncanakan.
- b. Para sukarelawan Dwikora yang dilakukan dengan cara memberikan bantuan baik moral maupun spiritual atas perjuangan yang mereka lakukan untuk membela bangsa dan negara dengan niat yang tulus dan suci.
- c. Rakyat Malaysia yang sedang berjuang, dilakukan dengan cara:

<sup>199</sup> ANRI, Lampiran Pertama, Arsip no. 1632, *ibid*.

- 1) Memberikan pengertian dan menyadarkan mereka bahwa pada hakekatnya mereka ditindas oleh rezim Kualalumpur yang hanya menganut politik British Kolonialis, terutama dalam konsep kebangsaan mereka yang rasialistis dan kolonialistis.
- 2) Menyadarkan para mahasiswa yang berasal dari Malaysia yang sedang belajar di luar negeri tentang hal ini.

### 3. Jenis kegiatan

Beberapa kegiatan yang direncanakan LPKB, antara lain:

- a. Indoktrinasi diselenggarakan secara meluas dan intensif kepada penduduk dan rakyat Indonesia terutama yang berada di daerah perbatasan, yang pada umumnya belum fasih berbahasa Indonesia (masih menggunakan dialek Tionghoa). Untuk itu diperlukan:
  - 1) Tim penyusun naskah atau konsep indoktrinasi secara lengkap dan jelas dalam bahasa Tionghoa.
  - 2) *Coaching Centre* bagi indoktrinators yang mahir dalam bahasa Tionghoa untuk dikirim ke daerah-daerah perbatasan. Jumlah peserta yang bdirencanakan antara 15 – 20 orang, selama 15 hari secara intensif.
  - 3) Indoktrinators yang telah mengikuti *coaching* dapat menjadi instruktur di daerah perbatasan untuk dikirim ke pelosok-pelosok.
  - 4) Mencetak buku-buku indoktrinasi dalam bahasa Tionghoa antara lain tentang Amanat Presiden tanggal 15 Juli 1963 dan tentang Assimilasi yang telah diterbitkan oleh Departemen Penerangan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan aksi sosial berupa:
  - 1) Mengirimkan Tim Hiburan ke daerah-daerah perbatasan untuk menghibur para sukarelawan atau penduduk. Bersamaan dengan Tim Hiburan ini disertakan pula Tim Indoktrinasi.
  - 2) Pengumpulan obat-obatan, transistors, pakaian, makanan, dsb.
- c. Membuat sarana propaganda dalam bentuk:
  - 1) Membuat semboyan-semboyan, naskah pidato untuk disiarkan melalui RRI di daerah perbatasan dalam bahasa: Indonesia (Melayu), Tionghoa, Arab (Tamil), dan Inggris.



- 2) Mencetak pamflet-pamflet dalam bahasa: Indonesia (Melayu), Tionghoa, Arab (Tamil), dan Inggris untuk disebar di daerah perbatasan Malaysia.
- 3) Menyebarkan pamflet-pamflet dan naskah-naskah kepada mahasiswa-mahasiswa Malaysia yang sedang belajar di luar negeri melalui perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri, Badan-badan Mahasiswa Internasional, dan LPKB cabang di luar negeri.
  - d. Mengikutsertakan seluruh potensi *funds and forces* di daerah perbatasan untuk dapat membangun dan meningkatkan taraf hidup di daerah tersebut.

#### 4. Stafing

Diperlukan staf ahli yang kuat yang terdiri dari:

- a. Staf Pimpinan Pusat
- b. Staf ahli dalam bahasa: Inggris, Tionghoa, Arab (Tamil), dan Indonesia (Melayu)
- c. Staf Urusan *Coaching Centre*
- d. Staf urusan Tim-tim Hiburan
- e. Staf urusan Pamflet-pamflet
- f. Staf urusan bantuan materiil
- g. Staf urusan pengerahan *funds and forces* daerah perbatasan

#### 5. Pembiayaan

Belum dapat diperhitungkan secara konkret tetapi dipastikan memerlukan biaya yang sangat besar.

#### 6. Cara kerja

Diadakan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan Dwikora.

Lampiran kedua tentang “Garis-garis Besar Laporan Umum LPKB Kepada PYM Presiden/Pemimpin Besar Revolusi” berisi beberapa butir pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala LPKB Pusat K. Sindhunatha SH, sebagai berikut:<sup>200</sup>

1. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan benang merah yang berkesinambungan dari ajaran-ajaran Bung Karno sejak tumbuhnya pergerakan kemerdekaan sampai sekarang, serta merupakan tunutan sejarah

<sup>200</sup> ANRI, Lampiran Kedua, Arsip no. 1632, *ibid*

- yang tak dapat ditawar untuk menjamin suksesnya penyelesaian revolusi Indonesia.
2. Tujuan pokok LPKB adalah memperjuangkan tercapainya Das Sollen seluruh rakyat Indonesia dalam soal pembinaan bangsa yang kompak dan homogen, yang dapat dilakukan dengan cara:
    - a. Menjadikan Indonesia benar-benar suatu bangsa dan keluarga yang besar, rukun dan sejahtera baik materiil maupun spirituil dan rohaniah, dengan membina dan mengobarkan: solidaritas total yang agung dan abadi (*la grande solidarite de tous le jours*) antara sesama putra Indonesia.
    - b. Membentuk masyarakat sosialis Indonesia yang bersih dari phobian, sukuisme, minoritisme/mayoritisme, eksklusifisme dan separatisme, dan segala bentuk kemunafikan, karena unsur-unsur perusak ini semua akan membawa kita kejurang perpecahan dan kehancuran.
    - c. Menggali, membina, dan mengembangkan terus-menerus unsur-unsur positif dalam masyarakat secara dinamis revolusioner sehingga dapat memperkokoh semen persatuan dan kesatuan Indonesia sehingga menjadi kekuatan maha raksasa untuk menyelesaikan revolusi mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.
  3. Tanpa landasan ideologis dan teori revolusioner tak mungkin ada gerakan revolusioner. Demikian pula tanpa teori pembinaan yang revolusioner tak mungkin terbina bangsa yang besar.  
Semua landasan ideologis dan teori pembinaan kesatuan bangsa telah tercakup dalam Pancasila/Manipol, Sumpah Pemuda, Amanat Assimilasi, Gesuri, Tavip, dan semua ajaran Bung Karno secara keseluruhan.  
Sedangkan Keputusan Presiden No. 140 tahun 1963 merupakan landasan hukum serta sekaligus komando untuk meningkatkan perjuangan lebih sistematis dan lebih intensip menuju terbentuknya manusia Indonesia baru sesuai dengan Das Sollen Revolusi.
  4. Untuk melaksanakan komando sesuai dengan Keputusan Presiden No. 140 tahun 1963 itu perlu disusun aparatur organisasi berdasarkan prinsip:
    - a. Mengamankan garis komando Pemimpin Besar Revolusi
    - b. Melaksanakan prinsip kegotongroyongan revolusioner berporos Nasakom

- c. Membina kader-kader yang sungguh-sungguh bertekad menggembelng dirinya sendiri dan masyarakat luas, hingga benar-benar melahirkan manusia Indonesia baru yang berjiwa Nasakom sesuai dengan Das Sollen Revolusi.
5. Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 140 tahun 1963, program LPKB meliputi bidang penelitian-analisa, penerangan-indoktrinasi, serta mendorong proyek-proyek masyarakat yang konkret.

Penelitian dan analisa terutama diarahkan untuk memecahkan secara cepat dan tepat segala masalah praktis operasional.

Dalam penerangan-penerangan selalu diusahakan menanamkan kesadaran tentang mutlak perlunya melancarkan proses asimilasi yang merupakan proses tritunggal meliputi:

- a. Adaptasi dengan keadaan dan kondisi masyarakat Indonesia.
- b. Integrasi dengan kepentingan rakyat, bangsa, dan revolusi nasional bangsa Indonesia.
- c. Identifikasi dengan Indonesia sebagai totalitas.

Semuanya hanya dapat diamalkan dengan sempurna melalui pikiran (ratio) dan perasaan (emosi) kedua-duanya secara simultan. Dalam mendorong proses asimilasi secara konkret, LPKB melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung membantu masyarakat dan pemerintah melancarkan proses asimilasi disegala bidang: politik, pendidikan, sosial, ekonomi, perkoperasian, hukum, kebudayaan, dan keolahragaan.

Mengajak segenap lapisan masyarakat dan pemerintah untuk menghilangkan faktor-faktor negatif yang menimbulkan atau memperkuat penggolongan-penggolongan politik berdasarkan garis pemisah atas dasar kesukuan atau keturunan. LPKB selalu mengingatkan bahwa semangat Sumpah Pemuda telah mengikis sukuisme yang negatif itu semenjak tahun 1928.

Untuk melenyapkan gejala-gejala eksklusivisme dan diskriminasi yang timbul dibidang pendidikan, LPKB mengajak segenap lapisan masyarakat mengobarkan semangat kegotongroyongan revolusioner dalam menanggulangi masalah pendidikan secara nasional, hingga benar-benar menghasilkan generasi manusia Indonesia yang sesuai dengan Das Sollen Revolusi.

Untuk memperkuat persaan senasib yang merupakan salah satu sendi utama dalam *nation building*, asimilasi dibidang ekonomi adalah sangat penting. Koperasi yang berlandaskan semangat kegotongroyongan revolusioner serta bebas dari pengaruh sukuisme dan eksklusivisme merupakan alat yang paling tepat guna membina semangat kekeluargaan dan perasaan senasib.

Mengajak segenap kekuatan progresif yang terdapat dalam masyarakat untuk membangun kesadaran pimpinan lembaga-lembaga sosial yang secara diskriminatif melayani kepentingan golongan masyarakat berdasarkan sukuisme dan eksklusivisme atau rasialisme. Semangat cinta tanah air merupakan salah satu unsur yang sangat penting artinya dalam pembinaan bangsa. Oleh karena itu bagi para pelajar dan pemuda harus diberikan dorongan sebesar-besarnya agar lebih banyak mengenal tentang kekayaan dan keindahan tanah airnya, tentang sejarah kebesaran bangsanya.

6. Seperti ditegaskan oleh Bung Karno, bahwa: "tak ada seorang atau satu golonganpun yang mau melepaskan *bevoorrechte positie*-nya dengan sukarela". Berbagai usaha telah dilancarkan oleh golongan *vested-interest* untuk menghalangi bahkan menghancurkan perjuangan pembinaan kesatuan bangsa. Tetapi berkat kegigihan dan militansi para pemuda yang sadar akan peranan sejarahnya sebagai pewaris semangat Sumpah Pemuda, yang tersebar di seluruh penjuru pelosok tanah air, telah timbul berbagai oto-aktivitas dan inisiatif masyarkat untuk melaksanakan asimilasi secara nyata disegala bidang seperti: politik, sosial, ekonomi, hukum, kebudayaan, dan sebagainya.
7. Dalam dunia politik internasionalpun, gagasan tentang *nation and character building* bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapat perhatian yang cukup besar. Ide tentang asimilasi yang berusaha menghilangkan perbedaan-perbedaan sebagai landasan terwujudnya *nation bulding* telah menempatkan kaum neokolonialisme-imperialisme dalam posisi yang terjepit. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Malaysia dimana warga keturunan Tionghoa tidak mendapat tempat yang layak atau diberlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah.

Dokumen bundel *kedua* berupa laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh LPKB cabang Sumatera Utara kepada Kepala LPKB Pusat dengan nomor:

240/LPSU/1965, tanggal 16 Juni 1965 yang ditandatangani oleh O. Berlin Girsang, SH selaku Kepala Cabang LPKB Sumatera Utara. Dokumen yang berupa laporan ini memuat banyak hal yang telah dilakukan oleh LPKB cabang Sumatera Utara dalam usahanya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui kegiatan konsolidasi.

Kegiatan konsolidasi tersebut dilakukan dalam rangka:

1. Pembentukan LPKB ranting di Daerah Tingkat II Kotapraja dan Kabupaten Sumatera Utara.
2. Memberikan indoktrinasi tentang tujuan LPKB dan pengertian *nation building* dan *character building* dengan jalan integrasi dan asimilasi.
3. Mengaktifkan LPKB yang sudah terbentuk.
4. Menemui pejabat pemerintah daerah dan kader-kader partai politik yang tergabung dalam Nasakom untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya LPKB didirikan di Daerah Tingkat II di wilayah Sumatera Utara.

Hasil-hasil konsolidasi yang tertuang dalam laporan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kabupaten Langkat

Kepala LPKB Sumatera Utara O. Berlin Girsang, SH menemui pejabat Panca Tunggal dan memberikan penjelasan tentang pentingnya dibentuk LPKB di daerah ini. Pada malam harinya diadakan ceramah umum di hadapan kader partai politik yang tergabung dalam Nasakom dan ormas-ormasnya yang berjumlah 5.000 orang dengan inisiator PNI, Partai Katholik, dan pejabat Panca Tunggal. Pada prinsipnya pejabat Panca Tunggal dan partai-partai politik dapat menerima pembentukan LPKB di daerah ini.

2. Kotapraja Binjai

Di tempat ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan penjelasan kepada Walikota, pejabat Panca Tunggal, dan kader dari sembilan partai politik tentang tujuan dan usaha-usaha yang harus dilakukan oleh LPKB. Pada prinsipnya di tempat ini pun pembentukan LPKB dapat diterima dengan baik. Disamping itu juga dilaksanakan *briefing* kepada kader dari sembilan partai politik dan pejabat Panca Tunggal.

3. Kotapraja Medan

Kepala LPKB Sumatera Utara O. Berlin Girsang, SH menemui Walikota dan pejabat Panca Tunggal untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya LPKB dibentuk di daerah ini. Pada prinsipnya pembentukan LPKB di daerah ini telah mendapat persetujuan dan pada tanggal 6 Juni 1965 diadakan ceramah umum bertempat di Wisma Bukit Barisan yang dihadiri oleh lebih dari 6.000 orang, dengan tema tentang *nation building* dan *character building* yang berlandaskan Pancasila dan Manipol-Usdek. Hadir dalam acara tersebut pejabat Panca Tunggal Kotapraja Medan, pejabat Panca Tunggal Daerah Tingkat I Sumatera Utara, dan massa kader partai politik yang tergabung dalam Nasakom. Kegiatan tersebut juga bertepatan dengan peringatan Hari Lahirnya Pancasila, Ulang Tahun Bung Karno, dan Ulang Tahun Harian Bendera Revolusi sebagai media pers penerangan LPKB Sumatera Utara. Dalam kesempatan yang lain, Kepala LPKB Sumatera Utara juga memberikan indoktrinasi dalam kegiatan Ulang Tahun Harian Patriot yang juga merupakan salah satu pers LPKB di hadapan massa lebih dari 3.000 orang.

#### 4. Kotapraja Tebing Tinggi

Di tempat ini Kepala LPKB Sumatera Utara O. Berlin Girsang, SH menemui Walikota Tebing Tinggi, Kepala LPKB Tebing Tinggi Lausau Sinaga, dan pejabat Panca Tunggal. Pada sore harinya diadakan *briefing* kepada pimpinan-pimpinan partai politik yang berporos Nasakom agar LPKB Tebing Tinggi dapat difungsikan dan diaktifkan.

#### 5. Kabupaten Deli Serdang

Di tempat ini Kepala LPKB Sumatera Utara telah tujuh kali menemui Kepala Daerah Tingkat I Deli Serdang, Front Nasional, dan kader dari sembilan partai politik untuk mengadakan *briefing* dalam rangka memberikan penjelasan mengenai pentingnya LPKB yang pada prinsipnya dapat diterima dengan baik.

#### 6. Kotapraja Pematang Siantar

Kepala LPKB Sumatera Utara menemui Walikota Pematang Siantar dan memberikan penjelasan tentang prosedur pembentukan LPKB dilanjutkan *briefing* dengan sembilan partai politik. Pada sore harinya diadakan ceramah

di hadapan mahasiswa Universitas Nasional dan ormas-ormas yang berjumlah lebih dari 4.000 orang tentang tujuan dan usaha LPKB.

7. Kabupaten Simalungun

Kepala LPKB Sumatera Utara menemui Bupati Kepala Daerah Tingkat II Simalungun dan pejabat sementara Kepala LPKB Simalungun. Dalam pertemuan tersebut, diberikan penjelasan agar LPKB Simalungun dapat diaktifkan karena LPKB merupakan satu-satunya alat revolusi untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa. Penjelasan tersebut diterima dengan baik oleh Bupati Kepala Daerah bahkan bersedia memberikan bantuan berupa ruangan untuk kantor.

8. Kabupaten Tapanuli Utara Tarutung

Kepala LPKB Sumatera Utara menemui Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tarutung, dan mandataris LPKB untuk meminta agar segera membentuk LPKB bersama-sama dengan pejabat Panca Tunggal. Selanjutnya diadakan *briefing* kepada sembilan partai politik dan pada malam harinya diadakan ceramah mengenai pengertian dan tujuan LPKB yang dihadiri lebih dari 5.000 orang atas inisiatif dari PNI, Partai Katholik, dan Parkindo. Dalam kegiatan tersebut Kepala LPKB Sumatera Utara juga memberikan penjelasan bahwa tugas LPKB bukan hanya menyadarkan masalah sukuisme tetapi juga tentang pentingnya penyatuan bangsa dalam wadah NKRI.

9. Kabupaten Tapanuli Tengah Sibolga

Seperti halnya di tempat lain, Kepala LPKB Sumatera Utara di tempat ini menemui Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan pejabat Panca Tunggal. Dalam pertemuan itu diadakan *briefing* dengan sembilan partai politik dan sekaligus memberikan ceramah di hadapan kader PNI dan ormas-ormasnya, kader Partai Katholik, kader NU, dan partai-partai lain yang berporos Nasakom yang dihadiri lebih dari 5.000 orang dengan tema tentang arti *nation building* dan *character building*. Dalam sambutannya, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah menjanjikan bahwa dalam waktu dekat akan membentuk LPKB.

10. Kotapraja Sibolga

Di tempat ini Kepala LPKB Sumatera Utara bertemu dengan Walikota, pejabat Panca Tunggal, dan Kepala LPKB Sibolga H. Nadeak. Dalam kesempatan ini Kepala LPKB Sumatera Utara memberikan penjelasan tentang pentingnya pembinaan kesatuan bangsa dalam proyek-proyek negara seperti transmigrasi, dan pentingnya kesatuan berporos Nasakom yang revolusioner dalam proses penyelesaian revolusi Indonesia. Pada malam harinya diadakan ceramah di hadapan segenap pejabat Panca Tunggal dan ormas-ormas atas inisiatif dari GMNI, Gerakan Pemuda Marhaenis, dan Partai Katholik yang berjumlah lebih dari 5.000 orang.

#### 11. Kabupaten Tapanuli Selatan Padang Sidempuan

Kepala LPKB Sumatera Utara di tempat ini bertemu dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II, segenap pejabat Panca Tunggal, organisasi-organisasi yang berporos Nasakom dan ormas-ormasnya. Di sini Kepala LPKB Sumatera Utara memberikan penjelasan tentang landasan dan tujuan LPKB, kemudian pada malam harinya diadakan ceramah di hadapan sekitar 10.000 orang pengunjung yang inisiatifnya datang dari Panitia Penutupan Konperensi PNI Padang Sidempuan. Dalam kesempatan ini, Bupati Kepala Daerah Tingkat II berjanji bahwa dalam waktu singkat akan mendirikan LPKB.

#### 12. Kabupaten Asahan Tanjung Balai

Kepala LPKB Sumatera Utara bertemu dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II, segenap pejabat Panca Tunggal, dan kader dari sembilan partai politik. Dalam pertemuan tersebut diberikan penjelasan mengenai prosedur pembentukan LPKB dan sekaligus diadakan *briefing*, kemudian pada malam harinya diadakan ceramah di hadapan 3.000 orang yang diprakarsai oleh Partai Katholik, IPKI, PNI, NU, yang mendapat sambutan baik dari seluruh lapisan masyarakat.

#### 13. Kotapraja Tanjung Balai

Kepala LPKB Sumatera Utara bertemu dengan Walikota dan pejabat Panca Tunggal, kemudian diadakan *briefing* dengan sembilan partai politik dan ormas-ormasnya. Pada malam harinya diadakan ceramah di hadapan sekitar 4.000 orang tentang pengertian pentingnya LPKB dibentuk dengan inisiatif dari Gerakan Pemuda Marhaenis, Partai Katholik, dan PSII. Walikota



Tanjung Balai dan pejabat Panca Tunggal berjanji akan segera membentuk LPKB.

#### 14. Kabupaten Labuhan Batu, Rantau Perapat

Kepala LPKB Sumatera Utara bertemu dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II, pejabat Panca Tunggal, dan sembilan partai politik, kemudian diadakan *briefing* tentang tujuan dibentuk LPKB. Pada malam harinya diadakan ceramah tentang pentingnya LPKB dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di hadapan sekitar 3.000 orang atas inisiatif Partai Katholik, PNI, Parkindo. Selanjutnya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Labuhan Batu dan pejabat Panca Tunggal berjanji akan segera membentuk LPKB di daerahnya.

#### 15. Kabupaten Tanah Karo, Kabanjahe

Kepala LPKB Sumatera Utara bertemu dengan Kepala LPKB Daerah Tingkat II Tanah Karo Lazim Bangun, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Karo, dan pejabat Panca Tunggal. Dalam pertemuan tersebut Kepala LPKB Sumatera Utara memberikan penjelasan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pada malam harinya digelar pertemuan akbar yang dihadiri sekitar 25.000 orang bertempat di lapangan Kabanjahe dengan inisiator PNI, Partai Katholik, dan Gerakan Pendidik Marhaenis. Dalam pertemuan akbar ini diadakan ceramah tentang tujuan LPKB yang oleh pengunjung disambut dengan gegap gempita.

#### 16. Kabupaten Nias, Gunung Sitoli

Berbeda dengan apa yang terjadi di tempat lain, Kepala LPKB Sumatera Utara bertemu dengan Bupati Kepala Daerah di Kotapraja Medan karena secara kebetulan sedang dalam perjalanan dinas di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Di tempat ini Kepala LPKB Sumatera Utara memberikan penjelasan tentang prosedur dan tata cara pembentukan LPKB dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nias berjanji bahwa dalam waktu dekat akan membentuk LPKB di Gunung Sitoli.

Dalam laporannya Kepala LPKB Sumatera Utara O. Berlin Girsang, SH juga menambahkan bahwa disamping 16 daerah yang telah dikunjungi, ia juga telah memberikan ceramah dalam berbagai kesempatan sebagai berikut:

1. Di Tapanuli Utara II Balige, ceramah dilakukan di hadapan sekitar 6.000 pengunjung dengan inisiator Partai Katholik, PNI, Parkindo, dan Ormas-ormas lainnya.
2. Di Porsea Tapanuli II Kepala LPKB Sumatera Utara memberikan ceramah di hadapan sekitar 5.000 pengunjung yang inisiatifnya digagas oleh PNI, Partai Katholik, dan Parkindo.
3. Pada tanggal 20 Mei 1965 di hadapan Konperensi Kerja PGRI dalam Konggres di Prapat, Kepala LPKB Sumatera Utara memberikan ceramah tentang Pancasila sebagai Dasar Negara dan oleh PGRI yang terdiri dari 17 cabang di Sumatera Utara disambut dengan baik bahkan telah menyatakan kesediaannya untuk membantu kelancaran usaha-usaha LPKB.
4. Tanggal 8 Juni 1965 Kepala LPKB Sumatera Utara memberikan ceramah tentang tujuan LPKB dihadapan LKN Sumatera Utara yang dihadiri sekitar 2.000 orang bertempat di Wisma Bukit Barisan.
5. Tanggal 12 Juni 1965 Kepala LPKB Sumatera Utara memberikan indoktrinasi tentang lahirnya Pancasila dan tujuan LPKB di hadapan seluruh pelajar Kotapraja Medan yang berjumlah sekitar 10.000 orang dan bertempat di Lapangan Garuda Medan.
6. Tanggal 12 Juni 1965 Kepala LPKB Sumatera Utara memberikan ceramah tentang lahirnya Pancasila di Panda Hilir, Kabupaten Deli Serdang yang dihadiri sekitar 3.000 orang dari kader partai-partai politik dan ormas-ormasnya.
7. Tanggal 13 Juni 1965 Kepala LPKB Sumatera Utara memberikan ceramah juga tentang lahirnya Pancasila dan tujuan LPKB bertempat di Stabat, Kabupaten Deli Serdang yang dihadiri oleh sekitar 1.000 orang dari Gerakan Pemuda Marhaenis.
8. Tanggal 15 Juni 1965 diadakan pertemuan bersama antara LPKB Kotapraja Siantar, LPKB Kabupaten Simalungun, pejabat Panca Tunggal, dan sembilan partai politik yang berporos Nasakom bertempat di Gedung Rio Bioskop Pematang Siantar. Dalam kesempatan ini Kepala LPKB Sumatera Utara memberikan ceramah di hadapan sekitar 5.000 orang dari kader-kader partai politik, instansi pemerintah, dan pelajar.

Dokumen bundel *ketiga* berupa laporan perjalanan/inspeksi ke daerah-daerah yang dilakukan oleh Tim Indoktrinasi dibawah koordinasi LPKB Sumatera Utara. Laporan tersebut tertuang dalam surat nomor: 236/VII-5/65, tanggal 7 Juli 1965 yang berisi 13 butir kegiatan yang telah dilakukan Tim Indoktrinasi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Juni 1965 rombongan Tim Indoktrinasi yang berjumlah tujuh orang yang terdiri dari: Pembantu I/Bidang Administrasi, Pembantu Bidang Pembinaan, Pembantu Bidang Khusus, dengan diikuti oleh seorang wartawan *Bendera Revolusi, Patriot, dan Tjahaja* berangkat dari Medan menuju Pematang Siantar untuk mengadakan ceramah umum yang diselenggarakan oleh LPKB setempat. Ceramah umum tersebut bertempat di Gedung Ria yang di luarnya dihadiri sekitar 5.000 orang dari berbagai unsur seperti pejabat Panca Tunggal daerah setempat, tokoh-tokoh Partai Politik, Ormas-ormas, Karyawan-karyawan RSU, PDN, PN Kertas, Pemintalan Rami, PN Perkebunan, Universitas-universitas, Guru dan Siswa, Sekolah Lanjutan, dan masyarakat pada umumnya yang berada di sekitar Kotapraja Pematang Siantar dan Kabupaten Siantar termasuk warga keturunan Tionghoa, India, Pakistan, dan Arab. Tema ceramah yang disampaikan oleh Kepala LPKB Sumatera Utara tentang *nation building* dan *character building* yang dapat dilakukan dengan jalan integrasi dan asimilasi berlandaskan Pancasila dan Manipol.

Acara tersebut mendapat sambutan yang sangat hangat terbukti dengan adanya partisipasi secara aktif yang dilakukan warga keturunan Tionghoa dan India dalam tim paduan suara yang menyanyikan lagu “Nyiur Melambai” dan “Satu Nusa Satu Bangsa”, serta tarian dan hiburan gendang dari masyarakat suku Simalungun.

Dalam sambutan yang disampaikan wakil dari pejabat Panca Tunggal Kotapraja Pematang Siantar menyatakan harapannya agar ceramah/indoktrinasi yang pada pokoknya bertujuan demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus dilakukan terlebih pada masa peningkatan perjuangan menuju revolusi. Setelah selesai acara kegiatan

ceramah umum yang berlangsung selama dua seperempat jam tersebut, diadakan *briefing* dengan panitia kegiatan hingga pukul 24.00 wib.

Keesokan harinya tanggal 16 Juni 1965 diadakan *briefing* dengan para tokoh partai politik dan ormas-ormasnya, juga kepada para pendidik setempat. Dalam *briefing* ini Dewan Pimpinan Partai IP-KI dan ormas-ormasnya di Kabupaten Simalungun menyatakan dukungan terhadap keberadaan LPKB dan bersedia membantu dalam melaksanakan program kerjanya. Disamping itu, Partai IP-KI juga menyatakan dukungannya terhadap kegiatan seperti ini dalam kesempatan yang lain dengan cara mengerahkan kader-kader partai dan ormas-ormasnya.

Pada siang harinya diadakan inspeksi ke LPKB daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun mengenai kegiatan, personalia, dan administrasi keuangan. Dari hasil pemeriksaan ternyata bahwa apa yang terjadi dilapangan belum sesuai dengan harapan. Kegiatan dilanjutkan pada sore harinya yaitu pertemuan dengan Pengurus Baperki untuk memberikan penjelasan tentang tujuan LPKB oleh Kepala LPKB Sumatera Utara. Secara spontanitas Pengurus Baperki menerima dan menyambut baik penjelasan Kepala LPKB Sumatera Utara. Selanjutnya rombongan Tim Indoktrinasi pulang kembali ke Medan.

2. Pada tanggal 20 Juni 1965 rombongan yang sama berangkat menuju Tebing Tinggi untuk menemui Kepala LPKB Daerah Tingkat II Tebing Tinggi dengan maksud mengadakan ceramah umum. Oleh karena Kepala LPKB Daerah Tingkat II Tebing Tinggi sedang berada di Jakarta untuk mengikuti kursus kader Nasakom dan tidak ada petugas yang mewakili, maka rombongan melanjutkan perjalanannya menuju Kisaran (Kabupaten Asahan). Rombongan baru tiba ditempat tujuan pada pukul 16.30 wib disebabkan terjadi kerusakan kendaraan yang ditumpangi. Di tempat ini ceramah berlangsung di hadapan sekitar 500 orang pemuda yang bertempat di lapangan Sekolah Taman Siswa dengan tema "Peranan Pemuda dalam *Nation Building* dan *Character Building*". Kegiatan ceramah ini berlangsung atas inisiatif mandataris LPKB Daerah Tingkat II Kabupaten Asahan N.R. Peranginangin.

3. Keesokan harinya pada tanggal 21 Juni 1965 rombongan melanjutkan perjalanan ke Tanjung Balai dan bertemu dengan Kepala Daerah Tingkat II Kotapraja Tanjung Balai dengan maksud mengadakan ceramah dan penunjukan Kepala LPKB di daerah tersebut. Pada saat itu pula Kepala Daerah Tingkat II Kotapraja Tanjung Balai menyatakan akan segera membuat undangan kepada seluruh pejabat Sipil dan Militer, tokoh-tokoh partai politik dan ormas-ormasnya, karyawan, dan masyarakat pada umumnya untuk menghadiri dan mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Tim Indoktrinasi yang akan dilangsungkan pada esok hari tanggal 22 Juni 1965. Untuk mengisi kekosongan waktu, pada malam harinya tanggal 21 Juni 1965 diadakan ceramah di hadapan 1000 orang pemuda-pemudi bertempat di ruang Balai Kesenian Tanjung Balai dengan tema “Peranan Pemuda-Pemudi dalam Revolusi dengan Jalan Integrasi-Assimilasi”.
4. Pada tanggal 22 Juni 1965 pukul 12.00 wib, sesuai undangan yang disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan Usman J.S. sehari sebelumnya, Tim Indoktrinasi berkesempatan memberikan penjelasan tentang tugas-tugas pokok LPKB, kedudukan dan kewajiban partai politik dalam LPKB, penyempurnaan susunan formasi, dan tata pelaksanaan tugas. Kegiatan ini dihadiri para pejabat Sipil dan Militer, anggota DPR, Asisten Wedana Kabupaten Asahan, Direktur Sekolah, Kepala Dinas/Jawatan, dan tokoh-tokoh partai politik yang mengambil tempat di Gedung DPRGR.

Sedangkan kegiatan pada malam harinya – masih dalam tanggal yang sama – atas prakarsa Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan dan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotapraja Tanjung Balai Zainul Abidin, dilangsungkan ceramah oleh Kepala LPKB Sumatera Utara di hadapan sekitar 7000 orang dengan mengambil tempat di luar Gedung Kesenian Kotapraja Tanjung Balai. Tema ceramah yang disampaikan tentang “*Nation Building dan Character Building dengan Jalan Integrasi dan Assimilasi Berlandaskan Pancasila dan Manipol-Usdek*”. Dalam kata sambutannya Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tanjung Balai menyampaikan tentang betapa pentingnya masyarakat untuk mendapatkan indoktrinasi seperti ini

demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menghadapi serangan dari Neo-Kolonialisme Malaysia.

Demikian pula dengan kata sambutan yang disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan yang mewakili pejabat Panca Tunggal dan masyarakat Kabupaten Asahan, ia meminta kepada hadirin agar isi dari ceramah tersebut benar-benar dapat diterapkan/dilaksanakan dalam kehidupan sosial masyarakat dan meminta pula kepada LPKB untuk sewaktu-waktu dapat kembali memberikan indoktrinasi. Dalam kesempatan ini Kepala LPKB Sumatera Utara mendapat kehormatan dengan menerima pengalungan untaian bunga yang dilakukan oleh Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) dan disambut oleh rombongan wanita yang berpakaian Bhineka Tunggal Ika, juga mendapat jamuan berupa hiburan berupa paduan suara yang dipersembahkan oleh Tim Paduan Suara dari GSNI, IP-KI, dan Wanita Katholik.

5. Pada tanggal 23 Juni 1965 di Pasanggrahan Tanjung Balai diadakan *briefing* dengan para pimpinan partai politik untuk penyempurnaan penyusunan dan pembentukan LPKB Daerah Tingkat II Kotapraja Tanjung Balai dan Daerah Tingkat II Kabupaten Asahan. Dengan menerima petunjuk dari Kepala Daerah setempat telah dilakukan perubahan susunan mandataris LPKB dengan menempatkan orang-orang yang betul-betul memiliki perhatian terhadap LPKB. Perubahan teknis pembentukan LPKB Cabang harus mengacu Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan Dengan Rakyat tanggal 1 Agustus 1964, nomor: 19 MK-PR/KPT/1964 yang mengubah tata cara pembentukan LPKB Cabang yang tertuang dalam Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus, nomor: 54/WMP-BCH/tahun 1963, tanggal 2 September 1963.
6. Pada tanggal 24 Juni 1965 bertempat di Gedung UISU Tanjung Balai, tim Indoktrinasi berkesempatan memberikan kuliah umum yang dihadiri oleh mahasiswa dan Dewan Pengajar dengan tema “Peranan Mahasiswa dalam *Nation Building* dan *Character Building* Berlandaskan Pancasila dan Manipol-Usdek”. Dalam kata sambutan yang disampaikan oleh perwakilan pengajar terungkap apresiasi yang diberikan kepada Kepala LPKB Sumatera Utara beserta rombongan yang tidak mengenal lelah untuk memberikan

kuliah umum yang sangat bermanfaat bagi generasi muda khususnya mahasiswa UISU.

7. Pada tanggal 25 Juni 1965 pagi hari Tim Indoktrinasi berkesempatan mengadakan *briefing* dengan para guru/pendidik SGA dan SMA Negeri Tanjung Balai dan sekaligus meminta kepada para Direktur sekolah tersebut agar kepada para siswa dapat ditanamkan pengertian integrasi dan asimilasi menuju persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan menuju Rantauprapat ibukota Kabupaten Labuhan Batu. Dalam perjalanan tersebut rombongan menyempatkan berkunjung ke PN Perkebunan untuk memberitahukan maksud dan tujuan kedatangannya di Rantauprapat yakni memberikan ceramah tentang *nation building* dan *character building*, sekaligus mengundang karyawan PN Perkebunan untuk hadir dalam acara tersebut.

Pukul 21.00 wib rombongan tiba di Rantauprapat yang langsung menemui Patih dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Labuhan Batu yang telah menunggu kedatangan rombongan karena sebelumnya telah diberitahukan melalui interlokal dari Tanjung Balai. Dengan rasa gembira Bupati Kepala Daerah Tingkat II Idris Hasibuan dan Patih A. Gani menerima kedatangan rombongan dan memberitahukan bahwa untuk kegiatan besok pada sore harinya khusus di hadapan pejabat Panca Tunggal, anggota DPRGR, Front Nasional, tokoh-tokoh partai politik dan ormas-ormasnya, Kepala Dinas/Jawatan, Korps Kepolisian, dan Kepala-kepala Seksi/Bagian Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II telah disampaikan undangan ceramah yang bertempat di Gedung Nasional.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Kepala Daerah Tingkat II menyampaikan laporan bahwa hingga kini belum dapat menyempurnakan LPKB yang dibentuk di daerahnya karena adanya konflik antar partai politik yang memperebutkan jabatan sebagai Kepala dan Pengurus dalam LPKB.

8. Pada tanggal 26 Juni 1965 mulai pukul 15.00 wib di Gedung DPRGR yang telah dipenuhi oleh para undangan, Kepala LPKB Daerah Tingkat I Sumatera Utara menjelaskan tentang program kerja dan susunan tata kerja LPKB sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen

Perhubungan Dengan Rakyat tanggal 1 Agustus 1964, nomor: 19/MK-PR/KPT/1964 mengenai tata cara penentuan Kepala dan Pengurus LPKB Cabang. Disamping itu sesuai dengan pedoman isi Surat Keputusan Kepala LPKB Pusat maka diberikan juga ceramah tentang “Peranan Alat Negara/Pemerintah dan Tokoh Partai Politik/Ormas dalam Revolusi dengan *Nation Building* dan *Character Building*”.

Dalam sambutan yang disampaikan Patih A. Gani mewakili Bupati Kepala Daerah Tingkat II menekankan bahwa apa yang telah dijelaskan oleh Kepala LPKB tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk merealisasikan Surat Keputusan Presiden nomor: 140 tahun 1963 dan Amanat Pemimpin Besar Revolusi tanggal 15 Juli 1963. Dalam pertemuan tersebut diberikan kesempatan tanya jawab, dimana pimpinan Lekra menyampaikan ketidakpuasannya terhadap isi pidato PYM Presiden Sukarno yang berjudul Tawip tentang pe-Nasakoman LPKB.

Kegiatan selanjutnya adalah memenuhi undangan Komandan Kodim Rantauprapat untuk mengadakan pertemuan di Kantor Kodim yang dihadiri oleh Kepala Staf dengan para perwira lainnya. Dalam pertemuan tersebut Komandan Kodim Rantauprapat menjelaskan tentang apa yang dapat dilakukan oleh LPKB dalam rangka asimilasi dibidang sosial, ekonomi, politik, dan kekeluargaan. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja LPKB di daerah tersebut yang belum mencapai hasil sesuai apa yang diharapkan. Untuk itulah maka secara spontan Komandan Kodim menyatakan kesediaannya untuk membantu LPKB dengan menyediakan kendaraan untuk turun ke daerah-daerah mengadakan indoktrinasi.

Begitu pula sebaliknya Kepala LPKB Daerah Tingkat I Sumatera Utara diminta meluangkan waktu pada hari-hari yang akan datang untuk memberikan ceramah di hadapan masyarakat kota maupun desa. Pada malam harinya di hadapan sekitar 4.000 orang diadakan ceramah dengan tema “*Nation Building* dan *Character Building* dengan Jalan Integrasi dan Asimilasi Berlandaskan Manipol-Usdek”. Dalam sambutannya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Labuhan Batu meminta kepada segenap lapisan masyarakat untuk tidak hanya sekadar mendengarkan ceramah tersebut tetapi



yang lebih penting lagi adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula dengan sambutan yang disampaikan oleh Komandan Kodim Kabupaten Labuhan Batu, ia mengingatkan kepada masyarakat baik Sipil maupun Militer, tokoh-tokoh partai politik maupun ormas-ormas agar betul-betul memahami dan melakukan apa yang telah dijelaskan oleh Kepala LPKB Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Ia meminta agar dalam kegiatan seperti ini jangan sampai ada masyarakat yang hanya menjadi penonton jika tidak ingin tergilas oleh roda revolusi.

9. Pada tanggal 27 Juni 1965 pukul 08.00 wib bertempat di Gedung Nasional Kabupaten Labuhan Batu, di hadapan para pendidik dilangsungkan kegiatan ceramah yang dilakukan oleh Z.B. Siahaan Pembantu I Kepala LPKB Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan tema “Peranan LPKB dalam *Nation Building* dan *Character Building* Berlandaskan Pancasila dan Manipol-Usdek dengan Jalan Integrasi dan Assimilasi”. Sedangkan Kepala LPKB Daerah Tingkat I Sumatera sendiri menyampaikan ceramah dengan tema “Peranan Pendidik dalam Revolusi yang Multikompleks dan Simultan” dengan menggambarkan jauhnya perbedaan sistem pendidikan yang berlangsung dizaman kolonial dengan zaman kemerdekaan.

Dalam kesempatan tersebut, Penilik Sekolah, Kepala Penilik Sekolah, dan Direktur SMA Negeri Simanjuntak selaku wakil dari para pendidik menyatakan kesediaannya untuk meneruskan indoktrinasi dari LPKB kepada para pendidik dan para siswa agar dapat menjiwai persatuan dan kesatuan bangsa yang bulat, kokoh, dan kuat demi pembangunan bangsa.

10. Tanggal 28 Juni 1965 diadakan *briefing* dengan para Ketua Partai Politik dan Ormas-ormas. Dalam *briefing* tersebut Kepala LPKB Daerah Tingkat I Sumatera Utara menyampaikan penjelasan tentang pembentukan, penyusunan pengurus, dan kedudukan LPKB pada tingkat cabang. Pada sore harinya telah diperoleh rumusan untuk penentuan mandataris LPKB Cabang, dilanjutkan dengan penyerahan mandat-mandat dan peraturan-peraturan yang dibutuhkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Pada malam harinya rombongan berangkat kembali menuju Tanjung Balai, namun dalam perjalanan mendapat kecelakaan karena kendaraan yang ditumpangi bertabrakan dengan kendaraan

lain pada dini hari pukul 01.00 wib. Kendaraan tersebut mengalami kerusakan yang cukup berat sehingga untuk perbaikannya memakan biaya hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

11. Tanggal 29 Juni 1965, disamping mengadakan hubungan lebih lanjut dengan Walikota Tanjung Balai dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang dilanjutkan penyerahan mandat-mandat dan peraturan-peraturan untuk menjadi pengurus cabang LPKB, maka pada hari itu juga rombongan melanjutkan perjalanan menuju Pematang Siantar. Sesampainya di Pematang Siantar rombongan bertemu dengan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotapraja Pematang Siantar dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun meminta bantuan untuk mengundang secara khusus pejabat Panca Tunggal, anggota BPH/DPR, anggota Front Nasional, tokoh-tokoh partai politik, karyawan perusahaan negara dan PN Perkebunan, dan karyawan lainnya.
12. Tanggal 30 Juni 1965, bertempat di Gedung DPRGR Kabupaten Simalungun dilangsungkan kegiatan ceramah dengan tema "*Nation Building dan Character Building dengan Jalan Integrasi dan Assimilasi Berlandaskan Pancasila dan Manipol-Usdek*". Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah dan Anggota BPH yang mewakili Bupati Kepala Daerah Tingkat II Simalungun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Indoktrinasi dari LPKB, dan berharap semoga segala yang telah diindoktrinasi kepada segenap lapisan masyarakat dapat dijiwai, diyakini, dan diperjuangkan terus-menerus.
13. Tanggal 1 Juli 1965 bertempat di Kompleks Katholik Pematang Siantar diadakan ceramah dengan tema "*Nation Building dan Character Building yang Berlandaskan Idiel Sumpah Pemuda, Pancasila, Manipol, dan Amanat Pemimpin Besar Revolusi 15 Juli 1963*" yang mendapat sambutan baik dan penuh kegembiraan. Pada sore harinya rombongan berangkat ke Pematang Raja dan pada malam harinya pukul 21.00 wib di tempat tersebut diadakan ceramah dengan tema "*Pentingnya Assimilasi dalam Nation Building dan Character Building*".

Dalam kata sambutannya Asisten Wedana dan salah seorang perwakilan dari masyarakat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Indoktrinasi dari LPKB karena meskipun sudah larut malam dan begitu lelah tetapi masih bersedia memberikan indoktrinasi. Pernyataan itu dibarengi dengan pengalungan bunga dan ulos kepada Kepala LPKB Daerah Tingkat I Sumatera Utara selaku pimpinan rombongan Tim Indoktrinasi sebagai tanda penghormatan dan penghargaan.

Setelah selesai semua kegiatan yang dilakukan di Pematang Siantar, selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan menuju Seribudolok pada pukul 03.00 wib menjelang pagi dan bermalam di sana.

Penulis berpendapat bahwa dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh LPKB cabang Sumatera Utara di bawah pimpinan O. Berlin Girsang, SH. telah memberi gambaran yang konkret mengenai aktivitas yang dilakukan oleh LPKB. Aktivitas tersebut merepresentasikan kegigihan pemerintah pada masa itu dalam melakukan indoktrinasi bagi segenap komponen bangsa mulai dari rakyat biasa sampai pejabat negara. Gambaran lain yang dapat ditangkap dari aktivitas LPKB ini adalah mengenai efektivitas jalannya indoktrinasi. Apabila dilihat dari setiap momentum penggalangan massa yang senantiasa dihadiri oleh ribuan bahkan puluhan ribu, maka hal ini berarti merupakan indikator bahwa kegiatan indoktrinasi telah berjalan cukup efektif.

#### **4.4 Aktivitas Roeslan Abdulgani dalam LPKB**

Sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat yang dibentuk bersamaan dengan terbentuknya Kabinet Karya IV dengan "Tri Program Kerja" yaitu:

1. Sandang Pangan.
2. Pengganyangan Malaysia.
3. Melanjutkan Pembangunan.

Roeslan Abdulgani mengemban tugas untuk menjalin hubungan kerja dan sekaligus mengkoordinasi beberapa kementerian dan lembaga, sebagai berikut:

1. Kementerian Penerangan.
2. Kementerian Penghubung MPR/DPR/DPA/Fn.

3. Kementerian Sekretaris Jenderal Front Nasional.
4. Arsip Nasional.
5. Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB).
6. Panitia Pembina Jiwa Revolusi (Pabinjir).
7. Panitia Gerakan Mendalami Tavip.
8. Panitia Gerakan Mendalami Takari.

Kabinet Kerja IV ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI, nomor: 323 tanggal 13 November 1963, dan pada tanggal 27 Agustus 1964 diubah namanya menjadi “Kabinet Dwikora” berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI, nomor: 215 tahun 1964. Dalam Kabinet Dwikora, jabatan Menteri Penerangan yang semula dirangkap Roeslan Abdulgani, diserahkan kepada Mayor Jenderal TNI Achmadi. Tetapi jabatan Menko Hubra tetap berada di tangan Cak Roes.

Pada dasarnya Kompartimendn Hubra dibentuk dengan tujuan sebagai penghubung atau jembatan antara kebijaksanaan pemerintah dengan rakyat, dan sebaliknya aspirasi dan suara hati rakyat harus diserap dan diperhatikan oleh pemerintah. Disamping itu dalam kegiatan Pembinaan Mental dan Jiwa Revolusi Rakyat Indonesia semuanya dilaksanakan melalui:

1. Indoktrinasi-indoktrinasi yang dilaksanakan oleh suatu panitia, yaitu Panitia Pembina Jiwa Revolusi.
2. Mendidik dan memberikan kursus-kursus mengenai hakekat perjuangan dan jiwa revolusi.
3. Memberikan bimbingan, penerangan, pengawasan, dan koordinasi dalam pelaksanaan pendidikan, ceramah-ceramah tentang Manipol/Usdek.
4. Selain itu juga ditambah dengan tugas-tugas rutin dan proyek-proyek lainnya.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, Menko Hubra dibantu oleh seorang sekretaris. Adapun sekretariat itu meliputi:

1. Deputi Urusan Operasional, tugasnya mengurus segala sesuatu yang menyangkut perencanaan dan pelaksanaan tugas hubungan dengan rakyat.
2. Deputi Urusan Anggaran, tugasnya meliputi urusan perencanaan, pengawasan, dan pemeriksaan anggaran.

3. Deputi Urusan Administrasi, tugasnya menangani masalah-masalah administrasi/Tata Usaha, kepegawaian, dan masalah umum lainnya.
4. Deputi Urusan Mental Pegawai, yang bertugas melakukan pengembangan dan penelitian personil dibidang masing-masing.
5. Deputi Urusan Indoktrinasi, yang bertugas memberikan indoktrinasi, penjelasan-penjelasan, dan ceramah-ceramah tentang Manipol/Usdek.

Sesuai dengan jabatan yang disandanginya dan tugas yang diembannya, Cak Roes memiliki banyak aktivitas yang berkaitan dengan masalah-masalah kebangsaan. Salah satu dari aktivitasnya itu dilakukan ketika ia mendapat tugas dari Bung Karno sebagai pimpinan sehari-hari dari sebuah lembaga yang diberi nama LPKB. Aktivitas yang dilakukan Cak Roes tersebut dapat disimak dari beberapa pidato sebagai berikut:

Pidato *pertama* disampaikan pada acara pembentukan cabang LPKB di Bandung yang diberi judul “Pembinaan kesatuan bangsa sekarang tidak mungkin lagi selain dari pada bersumber kepada Pancasila”. Seperti halnya pidatonya yang lain, pidato Cak Roes kali ini juga mengungkapkan banyak hal tentang apa yang telah dikemukakan oleh Bung Karno dalam berbagai kesempatan. Dalam kesempatan pidatonya kali ini Cak Roes menyebut tentang latar belakang dibentuknya LPKB. Dalam amanatnya yang disampaikan pada tanggal 15 Juli 1963, Presiden Sukarno menyatakan bahwa didalam pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, Bung Karno telah mengemukakan pikiran-pikiran yang mendasari proses *nation building*.

Bahwa *nation building* yang dimaksudkan oleh Bung Karno itu – demikian Cak Roes menambahkan – adalah keinginan untuk membangunkan jiwa bangsa yang bersatu, yang juga mempunyai karakter persatuan, karena persamaan nasib dan patriotisme. Proses *nation building* itu terus-menerus memerlukan aktivitas yang dinamis, pemupukan jiwa dan mental yang ingin bersatu, persamaan watak atas dasar persamaan nasib, patriotisme, rasa setia kawan dan loyal terhadap tanah air Indonesia. Pada bagian yang lain Bung Karno menyatakan – seperti dikutip Cak Roes – bahwa untuk membina kesatuan bangsa yang positif diperlukan beberapa hal, yakni: pupuk rasa keinginan untuk bersatu,

menumbuhkan kesadaran akan adanya nasib yang sama yang dialami oleh rakyat seperti teorinya Otto Bauer, dan semangat patriotisme.

Sedangkan materi pidato yang berkaitan dengan Pancasila, sesuai dengan judul pidato itu sendiri Cak Roes mengungkapkan:

“... Demokrasi didalam Pantjasila tidak tjukup hanja dengan: ik ben demokrat sadja, apalagi ada orang jang berkata, saja pemuda demokrat atau wanita demokrat, maafkan, itu kadang-kadang ada, mengiranja sudah tjukup. Demokrasi didalam Pantjasila adalah demokrasi bersumber kepada Ketuhanan Jang Maha Esa, demokrasi jang berperikemanusiaan, jang mementingkan kebangsaan dan jang membangunkan keadilan sosial. Sosialisme didalam Pantasila adalah sosialisme jang bersumber kepada ajaran Ketuhanan Jang Maha Esa, jang berperikemanusiaan, untuk bangsa Indonesia dan didjalankan setjara demokratis, musjawarah dan mufakat. Ini adalah sanga, modal bagi Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa”.<sup>201</sup>

Demikian pernyataan-pernyataan penting yang pernah disampaikan Bung Karno dalam berbagai kesempatan, yang kemudian dikutip oleh Cak Roes melalui pidato-pidatonya.

Pidato *kedua* disampaikan dalam kesempatan rapat LPKB di Surabaya. Rapat LPKB di Surabaya tersebut sebenarnya bukan merupakan agenda resmi dari kegiatan Cak Roes selaku Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat yang merangkap sebagai Menteri Penerangan. Rapat ini digelar secara mendadak karena adanya desakan dari berbagai pihak yang menanyakan kenapa LPKB di Surabaya dan Jawa Timur tidak berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu sebelum rapat digelar Cak Roes terlebih dahulu menghubungi Sindhunatha selaku Kepala LPKB Pusat yang lebih kompeten dengan permasalahan ini.

Setelah kedatangan Sindhunatha di Surabaya pada keesokan harinya maka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada segera diangkat pejabat sementara Kepala LPKB Daerah Tingkat I Jawa Timur Sahetapy, SH dan pejabat sementara Kepala LPKB Cabang Kotapraja Surabaya Letnan Laut Ir. Kwik Kian Djien. Kedua pejabat sementara Kepala LPKB ini secara resmi dilantik oleh Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat yang tidak lain adalah Roeslan Abdulgani.

<sup>201</sup> C.S.T. Kansil (*et. al.*), *op. cit.*, hal. 128.

Sedangkan mengenai isi atau materi dari pidato yang disampaikan pada dasarnya sama dengan apa yang pernah disampaikan dalam kesempatan sebelumnya di Bandung.

Pidato *ketiga* disampaikan dalam acara peresmian LPKB Cabang Bogor pada tanggal 6 juni 1964 bertepatan dengan ulang tahun Bung Karno. Sedikit berbeda dengan dua pidato sebelumnya pada pidato kali ini Cak roes menekankan tentang pentingnya usaha yang dilakukan LPKB. Bagian dari pidato tersebut badalah:

“...pentingnja usaha L.P.K.B. ini, tidak hanja dalam rangka ‘nation-building’ dan ‘character building’ pada dewasa ini, tetapi djuga dalam phase meningkatnja Revolusi Nasional kita jang pengaruhnja telah dirasakan diseluruh dunia pada umumnja, benua Afrika-Asia dan Asia-Tenggara pada chususnja. Dalam hubungan ini saja tak berhentihentinja untuk mengandjurkan supaja saudara-saudara semua membatja kembali dan memahami serta menguasai seluruh isi dan djiwa amanat Pemimpin Besar Revolusi kita Bung Karno pada tanggal 15 Djuli 1963, suatu amanat jang menekankan pentingnja usaha assimilasi proses dalam nation building itu, dan pentingnja mengikis habis rasa-menjendiri disebabkan karena loyalitas berganda sebagai akibat dari pada keretakan djiwa didalam beberapa golongan masyarakat kita”<sup>202</sup>

Materi yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Bung Karno yang oleh Cak Roes disebut sebagai menjiwai LPKB. Keseluruhan ajaran Bung Karno itu oleh Cak Roes diberi pemahaman yang menunjukkan kegandrungannya akan persatuan dan kesatuan bangsa. Ajaran-ajaran yang dimaksud seperti tertuang dalam berbagai pidato, amanat, dan tulisan seperti: “Islamisme, Nasionalisme dan Marxisme” adalah judul karangan yang ditulis pada tahun 1926, “Indonesia Menggugat” adalah judul pidato pembelaannya di depan hakim kolonial di Bandung pada tahun 1930, “Mencapai Indonesia Merdeka” adalah tulisan yang dibuat pada 1933, dan menjelang proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945 pidato Bung Karno setelah diterbitkan menjadi sebuah buku diberi judul *Lahirnya Pancasila*.

Pada era pasca proklamasi kemerdekaan, ajaran-ajaran Bung Karno masih berlanjut seperti: “Konsepsi Presiden” 1957, “Manipol/Usdek” 1959 yang menyertai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, “To Build The World Anew” (Membangun Dunia Kembali) yang merupakan pidato yang diucapkan di depan Sidang Umum PBB tanggal 30 September 1960. Selanjutnya adalah pidato-pidato yang diucapkan pada setiap memperingati ulang tahun kemerdekaan, yaitu “Jarek

<sup>202</sup> *Ibid.*, hal. 142.

(Jalannya Revolusi Kita)” 1960, “Resopim (Revolusi, Sosialisme, dan Pimpinan)” 1961, “Takem (Tahun Kemenangan)” 1962, dan “Gesuri (Genta Suara Revolusi Indonesia)” 1963.

Dari keseluruhan ajaran Bung Karno tersebut, Cak Roes menyimpulkan bahwa semuanya sangat relevan dan sesuai dengan jiwa LPKB. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa LPKB telah dijiwai oleh ajaran-ajaran Bung Karno yang dirumuskan sejak zaman pergerakan hingga masa revolusi, sejak 1926 hingga 1965.

Bentuk aktivitas lain yang dilakukan Cak Roes dalam LPKB seperti tercermin dalam pidato yang diucapkan di depan sidang DPR-GR pada tanggal 4 Mei 1966, pasca meletusnya peristiwa G 30 S/PKI dalam kapasitasnya sebagai Wakil Perdana Menteri Bidang Lembaga-lembaga Politik. Secara garis besar, dalam pidatonya tersebut Cak Roes mengawali dengan menyebut tugas utamanya sebagai Wakil Perdana Menteri Bidang Lembaga-lembaga Politik adalah mengkoordinir dan mengendalikan beberapa eselon yang terdiri dari:<sup>203</sup>

1. Front Nasional.
2. Lembaga Pertahanan Nasional.
3. Badan Perencana Pembangunan Nasional.
4. Badan Tenaga Atom Nasional.
5. Lembaga Research Nasional.
6. Lembaga Pembina Jiwa Revolusi/LPKB.

Selanjutnya Cak Roes memberi penjelasan tentang fungsi pokok dari lembaga dan badan yang berada dibawah koordinasi dan kendalinya satu per satu. Ketika menjelaskan masalah LPKB, ia memulai dari latar belakang sejarah terbentuknya LPKB seperti telah sering kali diucapkan dalam berbagai kesempatan. Hal yang baru dari penjelasan Cak Roes kali ini adalah memberikan penjelasan tentang pengertian konsep “persatuan” dan “kesatuan” yaitu:

“Istilah Persatuan mengandung arti men-sedjadar-kan unsure-unsur jang hendak kita persatukan itu, untuk kemudian kita ikat dalam suatu platform bersama jang disetudjui oleh unsur masing-masing tersebut, sehingga unsure-unsur kekuatan itu merupakan ibarat suatu ikatan sapu-lidi, jang tidak tertjetjer keadaannya, melainkan dipersatukan oleh suatu tali-persatuan jang kokoh-kuat. Dengan demikian, maka istilah Persatuan mengandung masih

<sup>203</sup> Roeslan Abdulgani, (1966), *Keterangan Wakil Perdana Menteri Bidang Lembaga-lembaga Politik* (Pidato diucapkan didepan sidang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong) pada tanggal 4 Mei 1966, Djakarta: Kementerian Penerangan R.I., hal. 3.



tetap bertahannya unsur masing-masing laksana dalam suatu proses ilmu-alam, jaitu suatu natuurkundig proses. Sudah barang tentu unsure-unsur jang hendak di-ikat dalam ikatan persatuan itu tidak boleh mengandung sifat-sifat jang antagonistis merusak satu sama lain.

Adapun istilah Kesatuan mengandung arti mengintegrasikan, meng-assimilasi-kan, mem-baur-kan atau men-sintese-kan unsur-unsur tersebut ibarat dalam proses kimia, jaitu satu scheikundig-proses. Dengan proses demikian, maka unsur-unsur bagiannya menghilang dan tumbuhlah sesuatu jang sama sekali baru, dan jang kwalitatip serta kwantitatip merupakan sesuatu "hogere optrekking", sesuatu sublimasi daripada unsur-unsur bagiannya masing-masing".<sup>204</sup>

Demikianlah Cak Roes memberikan pemahaman tentang konsep "persatuan" dan "kesatuan" yang melandasi prinsip dasar indoktrinasi yang dilakukan oleh LPKB yang disampaikan di depan sidang DPR-GR. Pada bagian yang lain Cak Roes mengungkapkan tentang tujuan aktivitas LPKB adalah untuk mengikis habis provinsialisme, daerahisme, dan minoritas-isme. Ia mengajak seluruh rakyat dan bangsa untuk melihat tanah air yang membentang dari Sabang sampai Merauke sebagai suatu "*geographical entity*", sebagai suatu kesatuan geografis.

Selain itu tanah air yang membentang dari Sabang sampai Merauke juga merupakan suatu:<sup>205</sup>

1. *national unity*, yaitu suatu kesatuan nasional
2. *state entity*, yaitu suatu kesatuan kenegaraan
3. *ideological entity*, yaitu suatu kesatuan ideologi, suatu kebulatan tekad untuk membela ideologi Pancasila, dan
4. *entity of social consiousness*, yaitu satu kesatuan cita-cita kesadaran sosial.

Berbagai aktivitas yang telah dilakukan Cak Roes, pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari jabatan-jabatan yang disandangnya. Oleh karena itu melalui aktivitas yang dilakukannya Cak Roes sepertinya sedang mengekspresikan pemahamannya terhadap pemikiran-pemikiran Bung Karno dengan melakukan elaborasi sesuai dengan materi yang ingin disampaikannya. Dalam pidatonya yang disampaikan pada acara pembentukan LPKB cabang Bandung, Cak Roes diilhami oleh pemikiran Bung Karno tentang Pancasila. Hal yang sama juga disampaikan dalam kesempatan rapat LPKB yang diselenggarakan di Surabaya. Sedangkan dalam pidato yang disampaikan secara

<sup>204</sup> *Ibid.*, hal. 8.

<sup>205</sup> *Ibid.*, hal. 9-10.

tertulis pada acara peresmian LPKB cabang Bogor, Cak Roes mengungkapkan banyak hal dari pemikiran Bung Karno yang disebutnya sebagai ajaran-ajaran Bung Karno yang menjiwai LPKB.

Dengan mencermati materi pidato-pidato Roeslan dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan aktivitasnya di LPKB, nyata bahwa apa yang dilakukannya adalah menerapkan pemikiran Bung Karno untuk keperluan proses pembangunan bangsa dan pembangunan karakter. Hal inilah yang dijadikan alasan oleh orang-orang yang memberikan julukan sebagai “Jubir Usman.” Seandainya pun predikat itu diketahui atau didengar oleh Roeslan sendiri, mungkin iapun tidak akan mengelak bahkan mungkin merasa bangga sebagai epigonnnya Bung Karno, orang yang dikagumi dan dibanggakannya.

Dari keseluruhan uraian pada bab ini, penulis mencoba membuat konklusi tentang LPKB sebagai lembaga indoktrinasi mulai dari pembentukannya, aktivitasnya, peranan Cak Roes dalam lembaga tersebut, hingga sejauh mana efektivitas lembaga tersebut dalam proses pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*). *Pertama*, pada mulanya LPKB dibentuk sebagai respon positif atas usul 10 pemuda dari warga keturunan Tionghoa yang menghendaki adanya asimilasi melalui kegiatan indoktrinasi. Jadi tujuan utama dibentuknya LPKB adalah sebagai alat indoktrinasi untuk menghapuskan adanya dikotomi antara warga negara “asli” dan “tidak asli”, tetapi dalam perkembangan selanjutnya diperluas. Indoktrinasi yang dilakukan LPKB tidak hanya terbatas pada masalah dikotomi “asli” dan “tidak asli” tetapi juga indoktrinasi tentang pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*), persatuan dan kesatuan bangsa, Manipol/Usdek, Nasakom, Pancasila, pengganyangan Malaysia, nasionalisme, anti kolonialisme dan imperialisme, dsb.

*Kedua*, keberadaan LPKB jika dilihat dari perkembangannya menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dua buah arsip surat atau dokumen yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan Dengan Rakyat, Roeslan Abdulgani. Surat pertama berupa permohonan agar Roeslan selaku penanggung jawab kegiatan indoktrinasi bersedia melantik beberapa cabang LPKB di daerah Garut, Tasikmalaya, dan

Ciamis. Waktu pelaksanaan pelantikan direncanakan berlangsung pada tanggal 7, 8, dan 9 Agustus 1964, dan dimohon agar Roeslan berkenan melakukannya sendiri atau tidak diwakilkan. Surat kedua berupa laporan LPKB Cabang Pontianak yang ditujukan kepada LPKB Pusat. Surat ini berisi tentang telah terbentuknya empat cabang LPKB di daerah Kalimantan Barat.

*Ketiga*, bahwa dalam aktivitasnya LPKB telah melakukan kegiatan indoktrinasi ke berbagai daerah di wilayah Indonesia. Sasaran indoktrinasi adalah segenap komponen bangsa mulai dari masyarakat umum, pemuda, pelajar, mahasiswa, kader ormas, kader parpol, pegawai negeri dan swasta, pejabat pemerintah baik sipil maupun militer. Indoktrinasi dilakukan dengan cara penggalangan massa pada sebuah tempat yang telah ditentukan seperti lapangan, gedung pertemuan, kampus, dan tempat-tempat lain yang memungkinkan untuk pengumpulan massa dalam jumlah yang besar. Dalam konsentrasi massa tersebut, selanjutnya Tim Indoktrinasi dari LPKB memberikan ceramah tentang materi indoktrinasi seperti telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan indoktrinasi yang dilakukan oleh LPKB berjalan cukup efektif karena dihadiri oleh ribuan bahkan puluhan ribu massa di setiap kegiatan indoktrinasinya.

*Keempat*, Roeslan Abdulgani selaku penanggung jawab kegiatan LPKB telah berusaha melakukan banyak hal yang berkaitan dengan kegiatan indoktrinasi. Dalam beberapa kesempatan ia secara langsung menyampaikan ceramah, pidato, dan prasaran di hadapan forum yang menjadi sasaran indoktrinasi, seperti yang dilakukannya di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sedangkan untuk daerah-daerah yang ia sendiri tidak dapat menghadiri kegiatan indoktrinasi, disiapkan tim dan bahan pokok indoktrinasi untuk dikirim ke daerah yang menjadi sasaran indoktrinasi.

## BAB 5

### KESIMPULAN

Pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) adalah sebuah proyek politik yang sudah sejak lama menjadi impian besar Bung Karno. Sejak muda Bung Karno sangat mendambakan terwujudnya suatu masyarakat Indonesia yang secara obyektif bersifat plural karena terdiri dari aneka ragam suku, agama, budaya, dan perbedaan-perbedaan lain yang bersifat alamiah. Hanya dengan persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan menjelma menjadi bangsa yang besar dan mampu membebaskan dirinya dari belenggu penjajahan kolonialisme dan imperialisme Belanda yang berlangsung selama ratusan tahun menghisap kekayaan alam Indonesia.

Dengan kepiawaiannya berpidato, ia melakukan agitasi politik dengan menggelorakan semangat rakyat, semangat untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda. Selain memiliki kehebatan dalam hal berpidato, ia juga seorang pemimpin yang karismatik, memiliki wawasan yang luas dibuktikan dengan kebiasaannya mengutip pendapat pemimpin-pemimpin besar dunia seperti Lenin, Stalin, Trotsky, Mao Tse Tung, Mahatma Gandhi, Yoze Rizal, Garibaldi, dan pemimpin-pemimpin dunia lainnya. Ia juga sering mengutip pandangan dan teori pemikir tingkat dunia seperti Ernest Renan, Otto Bauer, Karl Marx, dan pemikir-pemikir lainnya. Hal ini menunjukkan luasnya bacaan yang dijadikan referensi dalam setiap pidatonya.

Sesungguhnya pemikiran Bung Karno tentang pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) tidak datang begitu saja, melainkan terinspirasi oleh kejayaan bangsa Indonesia di masa lampau seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Di samping itu juga terinspirasi oleh peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia seperti peristiwa berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati pada tahun 1948 untuk pertama kali oleh pemerintah sebagai hari bersejarah yaitu “Kebangkitan Nasional.” Selain itu juga peristiwa diselenggarakannya Kongres Pemuda Indonesia II di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928, dimana para pemuda dari berbagai suku yang berbeda mengikrarkan sumpah dengan mengaku bertanah air,

berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Perwakilan pemuda dari berbagai daerah itu antara lain Jong Java, Jong Sumatra, Sekar Rukun, Jong Batks Bond, Jong Selebes, pemuda Kaum Betawi, dan perkumpulan-perkumpulan lokal lain yang memiliki kemauan bersama untuk bersatu. Peristiwa inilah yang kemudian dalam sejarah Indonesia tercatat sebagai “Sumpah Pemuda.”

Bagi Bung Karno, peristiwa sejarah 1908 dan 1928 telah menjadi kerangka dasar lahirnya pemikiran tentang pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*). Untuk itulah maka pada tanggal 1 Juni 1945, ia secara resmi mencetuskan konsep *nation and character building* pada saat pengukuhan hari lahirnya Pancasila.

Pada tanggal 10 s.d. 12 Maret 1963 dilaksanakan Musyawarah Assimilasi bertempat di Lembaga Administrasi Negara Jakarta. Salah satu keputusan penting dari Musyawarah Assimilasi adalah dibentuknya lembaga indoktrinasi bagi pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) yang diberi nama LPKB. Lembaga ini dipimpin oleh K. Sindhunatha, SH. dan sebagai pelaksana sehari-hari Bung Karno memberi mandat kepada Cak Roes yang pada masa itu menjabat Wakil Perdana Menteri Pertama merangkap Menteri Penerangan. Dan ketika Cak Roes menjabat Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat, jabatan rangkap yang dipercayakan oleh Bung Karno adalah sebagai Ketua Panitia Indoktrinasi atau Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi yang langsung berhubungan dengan LPKB.

Sesuai topik penelitian ini yaitu: “Roeslan Abdulgani: Peranannya dalam Penerapan Pemikiran Bung Karno tentang Pembangunan Bangsa dan Pembangunan Karakter (1959-1965)”, maka dari bukti-bukti yang ada pada sumber sejarah yang digunakan sebagai bahan penelitian untuk penulisan tesis ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, jika dilihat dari latar belakang kehidupannya, tokoh Roeslan Abdulgani memiliki riwayat yang menunjukkan bahwa sejak muda telah tertanam semangat nasionalisme dalam dirinya. Semangat nasionalisme itu semakin kuat ketika ia secara langsung terlibat dalam dua peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa pertama terjadi di tanah kelahirannya sendiri Surabaya yang dikenal sebagai “Peristiwa 10 November 1945” yang dikenang sebagai “Hari

Pahlawan.” Dalam peristiwa ini Cak Roes bersama *arek-arek Surabaya* dengan semangat nasionalismenya yang membara bertempur habis-habisan menghadapi tentara Inggris. Peristiwa kedua terjadi di Bandung 1955 dalam sebuah *event* berskala internasional yaitu KAA. Dalam kesempatan ini Cak Roes mendapat kepercayaan sebagai Sekjen. Keberhasilannya menjalankan tugas sebagai Sekjen KAA dilandasi oleh semangat nasionalismenya untuk menunjukkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia, khususnya peserta KAA.

Keberhasilannya menjalankan tugas sebagai Sekjen KAA telah memberi kepercayaan kepada Bung Karno untuk menduduki berbagai jabatan penting dalam struktur pemerintahan. Kemampuannya menangkap dan menterjemahkan pemikiran dan keinginan Bung Karno ditunjukkan dengan cara mengutip pernyataan-pernyataannya. Hampir dalam setiap pidato, sambutan, prasaran, ceramah, kuliah umum, dan tulisan-tulisannya, Cak Roes mengutip ulang pernyataan Bung Karno dan menyisipkan ke dalam teks yang dibuatnya. Sebagai konsekuensinya, ia mendapat predikat sebagai “Jubir Usman” atau sebagai “epigon” dari Bung Karno. Dari bukti-bukti yang ada, maka predikat tersebut memang cocok diberikan kepada tokoh Roeslan Abdulgani.

*Kedua*, sesuai dengan kesimpulan pertama, maka pendapat Herbert Feith dan Lance Castles yang menempatkan Roeslan Abdulgani sebagai tokoh dalam aliran pemikiran “Nasionalisme Radikal” pada periode (1945-1965) adalah tidak tepat. Dari bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Roeslan Abdulgani bukanlah seorang pemikir tetapi hanya sebagai orang yang memiliki peranan dalam penerapan pemikiran Bung Karno. Peranan dan pemikiran adalah dua hal yang sangat berbeda. Di samping itu dasar yang digunakan oleh Feith dan Castles untuk menempatkan Roeslan dalam aliran pemikiran “Nasionalisme Radikal” hanya berupa sebuah teks pidato yang pernah disampaikan di depan Sidang Konstituante pada tanggal 3 Desember 1957.

Penulis berpendapat bahwa teks pidato tersebut tidak merepresentasikan dari pemikiran Roeslan secara komprehensif. Justru apabila dilihat secara komprehensif, aliran pemikiran “Nasionalisme Radikal” didominasi oleh pemikiran Bung Karno dan PNI-nya. Dengan demikian Feith dan Castles telah melakukan kesalahan dalam melakukan analisis dan membuat sintesis tentang

pemikiran Roeslan Abdulgani. Roeslan Abdulgani sendiri melakukan “kutip ulang” pernyataan Bung Karno tidak hanya secara implisit tetapi dilakukannya secara eksplisit dengan menyebut nama Bung Karno.

*Ketiga*, terlepas dari pandangan Feith dan Castles, Roeslan Abdulgani telah menjalankan peranannya dalam penerapan pemikiran Bung Karno tentang pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) yang berlangsung selama periode (1959-1965). Bahkan Roeslan mampu menjalankan peranan ganda sesuai dengan tugas yang diembannya. Di satu sisi ia harus menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Pertama bidang khusus merangkap Menteri Penerangan, di sisi lain ia mendapat tugas sebagai Ketua Panitia Indoktrinasi untuk pelaksanaan Manipol/Usdek. Begitu pula ketika Roeslan menjabat Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat dan tetap merangkap sebagai Menteri Penerangan, tetapi masih harus bertanggung jawab terhadap kegiatan indoktrinasi yang dilakukan oleh suatu lembaga LPKB. Semua tugas yang berhubungan dengan tanggung jawabnya, baik sebagai menteri maupun sebagai penanggung jawab indoktrinasi telah dilaksanakannya dengan baik.

Penulis berpendapat bahwa oleh karena semua tugas dan tanggung jawab yang dilakukan bersumber dari Bung Karno, maka dapat dikatakan bahwa Roeslan Abdulgani adalah kepanjangan tangan dari kebijakan pemerintahan Bung Karno. Dengan kata lain Roeslan Abdulgani adalah alat Bung Karno untuk melaksanakan indoktrinasi, khususnya dalam rangka pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*). Bukti-bukti dalam peranannya menjalankan kegiatan indoktrinasi dapat dilihat pada dokumen atau arsip dari lembaga indoktrinasi yang disebut LPKB.

*Keempat*, dengan mengikuti aktivitas yang telah dilakukannya dalam kegiatan indoktrinasi yang berlangsung selama periode (1959-1965), dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, Cak Roes memiliki peranan yang cukup penting dalam penerapan pemikiran Bung Karno tentang pembangunan bangsa dan pembangunan karakter. Tokoh ini telah membuktikan bahwa ia mampu bertahan dalam segala zaman – seperti yang ditulis oleh Casper Schuurin – tanpa harus kehilangan jati dirinya. Ia tetap berbicara dengan *blak-blakan, ceplak-*

*ceplos*, dan “*ora tedeng aling-aling*” (terus terang, apa adanya, dan tidak ada yang tutup-tutupi), adalah ungkapan-ungkapan dalam bahasa Jawa yang biasa digunakan oleh Bung Karno. Di kalangan wartawan, tokoh ini cukup mendapat simpati bahkan boleh dibilang diagungkan terutama ketika ia menjabat sebagai Menteri Penerangan karena telah banyak memberi perhatian bagi perkembangan pers pada masa itu. Roeslan mampu berperan ganda ketika berbicara dalam berbagai kesempatan insan pers selaku Menteri Penerangan, tetapi dalam kesempatan yang sama sekaligus memberikan materi indoktrinasi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Indoktrinasi. Dalam hal ini Cak Roes telah menunjukkan peranannya dengan baik sebagai juru bicara Bung Karno.

Sebagai penutup, penulis menyampaikan dua pokok pikiran yang dianggap penting dan berkaitan dengan pembahasan tesis ini. Pertama, bahwa bagi bangsa Indonesia yang secara obyektif merupakan bangsa majemuk, kesadaran sejarah dan pentingnya menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan pada saat seperti sekarang ini. Hal ini harus dilakukan demi tetap tegak berdirinya suatu *nasion* yang memiliki harkat dan martabat dalam pergaulan dunia, dan juga sebagai jawaban atas berbagai persoalan bangsa yang muncul belakangan ini sebagai *ekses* penerapan sistem demokrasi maupun kebijakan otonomi daerah yang masih carut-marut. Kedua, membangkitkan kesadaran bahwa terwujudnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa dengan semangat nasionalisme merupakan modal dasar bagi terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Suatu hal yang mungkin dapat dicapai melalui: “pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*).”



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Arsip:

ANRI. *Inventaris Arsip Dr. H. Roeslan Abdulgani 1950-1976:*

Arsip Nomor 1638, tentang:

“Dr. H. Roeslan Abdulgani: Riwayat Hidup Anggota MPRS tanggal 23 April 1963”.

ANRI. *Arsip Sekretariat Menteri Koordinator Perhubungan dengan Rakyat 1963-1966:*

Arsip Nomor 214, tentang:

“Wakil Ketua DPA: Bahan-bahan pelengkap untuk indoktrinasi tanggal 10 November 1961”.

Arsip Nomor 215, tentang:

“Wakil Ketua DPA: Instruksi-instruksi tanggal 15 November 1961 tentang pelaksanaan indoktrinasi Manipol/Usdek”.

Arsip Nomor 218, tentang:

“Presiden RI dari Wakil Ketua DPA: Laporan tanggal 5 Januari 1962 tentang pelaksanaan indoktrinasi, disertai lampiran”.

Arsip Nomor 574, tentang:

“Ketua Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN)/Menteri Keamanan Nasional: Surat Keputusan no. 8/DWT/1961 tanggal 16 November 1961 tentang pembentukan tim-tim indoktrinasi Daerah Swatantra Tingkat II (Daswati II), Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, disertai lampiran”.

Arsip Nomor 784, tentang:

“Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi: Daftar Nama dan Alamat yang dikirim buku-buku indoktrinasi di dalam dan luar negeri bulan Juli 1963-Oktober 1964”.

Arsip Nomor 1415, tentang:

“Sekretaris LPKB kepada Menko Hubra: Surat tanggal 24 Juni 1964 tentang permintaan untuk melantik LPKB cabang Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis”.

Arsip Nomor 1428, tentang:

“Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) daerah Kalimantan Barat kepada LPKB Pusat: Surat tanggal 23 November 1964 tentang pembentukan cabang LPKB Kotapraja Ketapang di Pontianak”.

Arsip Nomor 1632, tentang:

“LPKB kepada Presiden RI: Surat tanggal 21 Januari 1965 tentang rencana LPKB dalam turut serta memenangkan aksi dwikora sehubungan dengan konfrontasi Indonesia-Malaysia”.

## B. Buku:

Abdulgani, Roeslan. 1956. *Mendajung Dalam Taufan, Ichtisar dan Ichtiar Politik Luar Negeri Indonesia 1956*. Djakarta: Penerbit “Endang”.

Abdulgani, Roeslan. 1956. *Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Tahun 1956*. tkt: tp.

\_\_\_\_\_. 1956. *Keterangan dan Djawaban Pemerintah tentang Program Kabinet Ali Sastroamidjojo (Kedua) di Dewan Perwakilan Rakjat*. Djakarta: Kementerian Penerangan R. I.

Abdulgani, Roeslan. 1961. *Politik dan Ilmu* (Orasi Ilmiah pada Waktu Menerima Gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Politik pada Universitas Padjadjaran, pada Tanggal 31 Djuli 1961 di Bandung). Djakarta: Jajasan Prapantja.

Abdulgani, Roeslan. 1962. *Hari Pahlawan Meletus Karena Matangnja Kondisi-kondisi Rakjat Indonesia* (Sambutan Menjelang Hari Pahlawan Tanggal 10 Nopember 1962). Djakarta: Departemen Penerangan R.I.

Abdulgani, Roeslan. 1962. *Peranan Universitas dalam Perdjuangan Irian Barat* (Kuliah umum di depan mahasiswa Universitas Rakjat). Djakarta: Jajasan “Universitas Rakjat”.

Abdulgani, Roeslan. 1962. *Api Islam Ditengah-tengah Berkobarnja Revolusi*. B.P.U. Perusahaan-perusahaan Pertjetakan dan Penerbitan Negara Depatemen Penerangan R.I.

Abdulgani, Roeslan. 1963. *Pantjaran Api Nan Tak Kundjung Padam* (Himpunan Pidato-pidato, Tjeramah-tjeramah dan Sambutan-sambutan). Djakarta: Departemen Penerangan R.I.

Abdulgani, Roeslan. 1963. *Penggunaan Ilmu Sedjarah* (Uraian pada Penutupan Musjawarah Mahasiswa ke-I IKIP Bandung pada tanggal 19 Oktober 1963 di Bumi Siliwangi). Bandung: Badan Penerbit Prapantja.

Abdulgani, Roeslan. 1963. *Api Revolusi Tetap Berkobar* (Sambutan-sambutan mengenai 10 Nopember, Hari Pahlawan). Djakarta: Departemen Penerangan R.I.

- Abdulgani, Roeslan. 1963. *Resapkan dan Amalkan Pantjasila* (Kumpulan Buah Pikiran: Dr. H. Roeslan Abdulgani). Djakarta: Jajasan Prapantja.
- Abdulgani, Roeslan. 1963. *Assimilasi dalam rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa* (Sambutan pada Musjawarah Assimilasi pada tanggal 10 s/d 12 Maret 1963 di Djakarta). Djakarta: Departemen Penerangan R.I.
- Abdulgani, Roeslan. 1963. *The Bandung Spirit and The Asian-African Press*. Djakarta: Departemen Penerangan R.I.
- Abdulgani, Roeslan. 1964. *Bersama-sama Wanita Menjelesaikan Revolusi* (Prasaran dan Pokok Tjeramah disampaikan kepada beberapa organisasi wanita pada konggres organisasi-organisasi tersebut). B.P.U. Perusahaan-perusahaan Pertjetakan dan Penerbitan Negara Departemen Penerangan R.I.
- Abdulgani, Roeslan. 1966. *Keterangan Wakil Perdana Menteri Bidang Lembaga-lembaga Politik Didepan Sidang DPR-GR*. Djakarta: Departemen Penerangan R.I.
- Abdulgani, Roeslan. 1980. *The Bandung Connection, Konperensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955*. Jakarta: Gunung Agung.
- Abdulgani, Roeslan. 1981. "Semangat dan Jiwa Kepahlawanan dalam Peristiwa 10 Nopember 1945 untuk Kelanjutan Pembinaan Bangsa", dalam *Pemikiran Biografi, Kepahlawanan dan Kesejarahan; suatu kumpulan prasaran pada berbagai lokakarya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Abdullah, Taufik dan Abdurrachman Surjomihardjo. 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi, Arah dan Perspektif*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Abdullah, Taufik, Aswab Mahasin, Daniel Dhakidae (Redaksi). 1994. *Manusia dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Adams, Cindy. 2005. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- Adisusilo, Sutarjo. J.R. 2005. *Sejarah Pemikiran Barat, Dari yang Klasik sampai yang Modern*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Ali, Moh. R. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Anderson, Ben. 1988. *Revoloesi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Anderson, Benedict. 2002. *Imagined Communities, Komunitas-komunitas Terbayang* (Penerjemah -- Omi Intan Naomi). Yogyakarta: INSIST.
- Ankersmit, F.R. 1987. *Refleksi tentang Sejarah, Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah* (Diindonesiakan oleh Dick Hartoko), Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bung Karno. 2001. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- Burke, Peter. (ed.). 1991. *New Perspectives on Historical Writing*. Oxford: Polity Press.
- Dahm, Bernard. 1970. *Sukarno and the struggle for Indonesian independence*. Itacha: Cornell University Press.
- Departemen Penerangan. 1963. *Djadikanlah Departemen Penerangan Satu Departemen Revolusi* (Amanat-amanat pada Konperensi Kerdja ke-17 Departemen Penerangan, 4 sampai 9 Djuli 1963 di Djakarta). Djakarta: Departemen Penerangan R.I.
- Departemen Penerangan. 1963. *Assimilasi dalam rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa, Sambutan-sambutan/Prasaran-prasaran pada Musjawarah Assimilasi pada tanggal 10 s/d 12 Maret 1963 di Djakarta*. Djakarta: Departemen Penerangan R.I.
- Departemen Penerangan. 1964. *Buatlah Irian Barat Satu Zamrud Jang Indah* (Kumpulan Amanat-amanat dan Pidato-pidato Penting Khusus Mengenai Irian Barat, 1 Mei 1963-1 Mei 1964). Djakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Feith, Herbert. 1973. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Itacha and London: Cornel University Press.
- Feith, Herbert dan Lance Castles. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Frederich, William H. dan Suri Suroro. 1985. *Pemahaman Sejarah Indonesia, Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES.
- Frederich, William H. 1989. *Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1945)*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.

- Giebels, Lambert. 2001. *Soekarno, Biografi 1901-1950*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah, Pengantar Metode Sejarah* (terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Gunawan, Restu. (penyunting). 1999. *Tokoh-tokoh Pemikir Paham Kebangsaan, Dr. Ir. Sukarno dan K.H. Ahmad Dahlan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Hadi, Syamsul (ed.). 1991. *Bung Karno dalam Pergulatan Pemikiran*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Soekarno bekerja sama dengan Pustaka Simponi Jakarta.
- Hall, D.G.E. tt. *Sejarah Asia Tenggara* (Diterjemahkan oleh: Drs. I.P. Soewarsha). Suarabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Hatta, Mohammad. 1976. *Indonesia Merdeka*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Ingleson, John. 1983. *Jalan Ke Pengasingan, Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*. Jakarta: LP3ES.
- \_\_\_\_\_. 1961. *Pedoman-pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia*. Djakarta: Departemen Penerangan R.I.
- Kahin, George Mc Turnan. 1995. *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme dan Revolusi Di Indonesia* (Alih bahasa: Nin Bakdi Sumanto). Sebelas Maret University Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan.
- Kansil, C.S.T. (et. al.). 1964. *Capita Selecta: Pembinaan Kesatuan Bangsa*. Kompartemen Perhubungan Dengan Rakjat, Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa.
- \_\_\_\_\_. 1964. *Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi*. Djakarta: Dikeluarkan Oleh Jajasan Prapantja.
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Ungkapan-ungkapan Filsafat Sejarah Barat dan Timur, Penjelasan Berdasarkan Kesadaran Sejarah*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.

- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, Sartono. 2005. *Sejak Indische Sampai Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kohn, Hans. 1961. *Nasionalisme, Arti dan Sedjarahnya* (Terjemahan Sumantri Mertodipuro). Djakarta: P.T. Pembangunan.
- Kristiyanto, Eddy. 2008. *Sejarah Sebagai Locus Philosophicus et Theologicus*. Yogyakarta: Penerbit Lamalera.
- Kuntowijoyo. (2008). *Penjelasan Sejaran (Historical Explanation)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lapian, A. B. 1996. *Terminologi Sejarah; 1945-1950, 1950-1959*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Leirissa, R.Z. 1985. *Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*. Jakarta: Akademika: Pressindo.
- Madjid, Omi Komaria (penyunting). 2001. *Merajut Kembali Persatuan, Aktualisasi Nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Mauladi, Viva Yoga (ed.). 2002. *A. Dahlan Ranuwiharjo: Revolusi Anti Imperialisme, dan Pancasila*. Jakarta INTRANS Institute for Transformation Studies.
- Panitia Nasional Hari Sumpah Pemuda. 1961. *Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa: Indonesia* (Sambutan-sambutan pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1961). Jakarta: Departemen Penerangan R.I.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Iman Toto K. dan Herdianto WK. 2001. *Bung Karno dan Partai Politik*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia bekerja sama dengan Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno.
- Reid, Anthony. 2004. *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Ricklefs, M. C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Penerjemah: Satrio Wahono dkk.), Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Saifuddin, Achmad Fedyani dan Mulyawan Karim. 2008. *Refleksi Karakter Bangsa*. Diterbitkan Atas Kerjasama Kementerian Pemuda dan

Olahraga RI dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia: Penerbit Forum Kajian Antropologi Indonesia.

Sastroamidjojo, Ali. 1974. *Tonggak-tonggak Di Perjalananku*. Jakarta : PT. KINTA.

Simanjuntak, P.N.H., 2003. *Kabinet-kabinet Republik Indonesia, Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Sukarno. 1957. *Menjelamatkan Republik Proklamasi*. Djakarta: Kementerian Penerangan R. I.

Sukarno. 1985. *Indonesia Menggugat!, Pidato Pembelaan Bung Karno di Depan Pengadilan Kolonial Bandung, 1930*. Jakarta: Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno.

Sukarno. 2003. *Dibawah Bendera Revolusi (jilid Kedua)*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.

Sutjiatiningsih, Sri. 1999. *Soegondo Djojopuspito, Hasil Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Vlekke, Bernard H. M. 1967. *Nusantara (Sejarah Indonesia)*, terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Wilhelm, Donald. 1981. *Indonesia Bangkit* (Diterjemahkan oleh: Suli Suleiman). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

### C. Surat Kabar dan Majalah:

Abdullah, Taufik. "PDRI, Kesadaran Sejarah dan Masa Kini", dalam *Jurnal Sejarah, Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi*. Vol. 13, No. 13 Januari 2007. Diterbitkan Oleh: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.

"Manipol Memberi Djalan Bagaimana Menghadapi Revolusinja Tuntutan2 Rakjat Jang Mendesak" (Ceramah Dr. Roeslan Abdulgani) dalam *Buletin Antara*, Senin tanggal 22 Oktober 1962.

"Pilihan Jang Tepat" dalam *Tadjukrentjana, Suluh Indonesia*, tanggal 25 Oktober 1962.

"Wampa/Menteri Penerangan-Pembimbing Agung Pers Nasional" dalam *Tadjukrentjana, Berita Indonesia*, tanggal 25 Oktober 1962.

“Dr. H. Ruslan Abd. Gani, Wampa Urusan Khusus Merangkap Menteri Penerangan” dalam *Berita Indonesia*, tanggal 25 Oktober 1962.

“Menpen Baru” dalam *Harian Rakjat*, tanggal 26 Oktober 1962.

“Harapan Kepada Pak Roeslan” dalam Tadjukrentjana, *Warta Bakti*, tanggal 25 Oktober 1962.

“Pengangkatan Tjak Roeslan” dalam Komentor, *Bintang Timur*, tanggal 25 Oktober 1962.

“Pedomani Ketetapan-Ketetapan M.P.R.S. I” dalam Indukkarangan, *Merdeka*, tanggal 6 Nopember 1962.

“Sudah Mulai Kita Rasakan Hasilnya” dalam Tadjukrentjana, *Suluh Indonesia*, tanggal 6 Nopember 1962.

“Indonesia Punya Masa Depan, Nasionalisme dan Solidaritas Sosial Menjadi Modal Bangsa” dalam Headline *Kompas*, tanggal 5 April 2008.

#### D. Makalah

Leirissa, R.Z. 1996. “Historiografi: Suatu Tinjauan Kritis” *Teks Pidato* Disampaikan pada Upacara Pengukuhan sebagai Gurubesar Madya Tetap pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Leirissa, R.Z. 1998. *Laporan Penelitian: Strukturalisme Dalam Ilmu Sejarah (Pengantar)*. Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.

Leirissa, R.Z. 1999. *Metodologi Strukturis Dalam Ilmu Sejarah*. Depok: Program Ilmu Sejarah, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

#### E. Wawancara

”Tanja Djawab Dr. Roeslan Abdulgani dengan Televisi Kanada” dalam *Buletin Antara*, No. 288/A, Selasa, 16 Oktober 1962.

“Melacak Jejak Revolusi Nasional” dalam kolom Dialog, *Prisma*, No. 8 - Agustus 1981, Tahun ke X.

“Partai Politik Sebagai Senjata Demokrasi” (Wawancara JR. Chaniago dengan Roeslan Abdulgani) dalam *Sejarah (Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi)*, Edisi 4, November 1993.



“Kenapa Sih Cendekiawan Diikat Menurut Agama?” (Wawancara Tony Hasyim dengan Roeslan Abdulgani) dalam *Forum Keadilan* no. 10, Tahun III, tanggal 1 September 1994.

#### F. Internet

Abdulgani, Rudiono. “Riwayat Singkat H. Roeslan Abdulgani” (Koleksi Data Pribadi) dalam <http://www.abdulgani.info/front.htm>, 13/11/2007.

Republika Online. “Roeslan Abdulgani: Jangan Tinggalkan Pancasila” dalam <http://www.polarhome.com/pipermail/marinir/2005-June/000737.html>, 13/11/2007.

In Memoriams. “Berita Sekitar Wafatnya Roeslan Abdulgani” dalam <http://www.abdulgani.info/memoriain/gatra.htm>, 21/02/2008.



## Lampiran 1.

**ICHTISAR POKOK-POKOK ASSIMILASI**1. *Dasar dan Djiwa Assimilasi:*

- Sumpah Pemuda
- Pantja Sila
- Manipol/Usdek

Utjapan P.J.M. Presiden Republik Indonesia – Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno pada tanggal 22 Pebruari 1963 kepada para pemuda: „Een natie met minoriteiten is geen natie” (Suatu bangsa dengan minoritas-minoritas, bukan merupakan bangsa).

Kami berpendapat bahwa “Nation Building” (Pembinaan Bangsa) Indonesia bertujuan membina suatu bangsa jang bersatu-bulat tanpa minoritas-minoritasan!

2. Ditinjau setjara “historis materialistis” maka dapat dितarik kesimpulan bahwa „pembagian produksi berdasarkan golongan ras” (productie verhoudingen) pada zaman kolonial a. l. mengakibatkan timbulnja sematjam sistim kasta dimasyarakat Indonesia dengan golongan-golongan penduduk jang mempunjai kedudukan ekonomis, sosial, dsb.-nya jang berlainan tingkatnja.

Antara golongan jang „di-anak-emaskan” dan Rakjat Indonesia tidak ada persaan dan kesadaran sehidup-senasib. Nampak pula bahwa golongan-golongan tersebut hidup terpisah dari rakjat Indonesia disegala lapangan kehidupan, baik dalam manifestasi politik maupun kulturil, pendidikan, olahraga, kesenian, ekonomi, pergaulan, sosial, kekeluargaan dls. Ini terkenal sekarang sebagai keadaan bahwa disamping „dunia mayoritas” ada „dunia minoritas”.

3. Setelah Indonesia Merdeka golongan-golongan diberi kesempatan untuk mendjadi Warga Negara dari Republik Indonesia, jang berpedoman pada Sumpah Pemuda, Pantja Sila, Manipol/Usdek dan jang berhasjrat membina suatu bangsa jang tidak terpetjah-belah dalam „kotak-kotak” tetapi jang bulat bersatu dan homogin, tanpa minoritas-minoritasan.

Akan tetapi adalah suatu kenjataan pula bahwa setjara „de facto” dunia minoritas-minoritasan dengan segala gedjala-gedjalanja jang kita kenal dari zaman kolonial masih tetap ada. Bahkan masih ada sementara orang jang setjara sadar dan sistimatis memperkembang-biakkan serta menggembelngnja jang setjara njata mempunjai kepentingan untuk mempertahankan tjara-hidup dan struktur masyarakat zaman kolonial itu, dengan segala privileges-nja.

4. Ernest Renan berkata: „Le desir d’etre ensemble” (keinginan/hasrat untuk hidup bersama-sama) adalah unsur mutlak bagi pembinaan satu bangsa. Otto Bauer merumuskan ini dengan kata: „Eine aus schiksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft” (Dari masyarakat jang senasib timbul masyarakat jang bulat).

Masih adanja dua matjam „dunia” dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sungguh sangat disajangkan dan menggambarkan tidak/kurang adanya hasrat (le desir) untuk hidup bersamaan (d’etre ensemble) dari golongan-golongan minoritas jang memisahkan diri dari Bangsa Indonesia. Antara minoritas-minoritas tersebut dan bangsa Indonesia seakan-akan, paling banjak, hanja ada keinginan untuk hidup *berdampingan* (sematjam pecefull co-existence) dan bukanlah hasrat untuk hidup bersatu seperti keluarga bulat, ragam sehidup-senasib dalam segala segi kehidupan rakjat. Perseorangan dari „dunia minoritas” – dunianja sendiri. Minoritas merupakan satu „schicksalgemeinschaft” (masjarakat senasib) sendiri terlepas dari Bangsa Indonesia jang besar.

Meneruskan keadaan demikian, apalagi bila dibuatnja dengan sadar dan sistimatis, berarti memelihara dan menstimulir benih-benih perpetjahan dan pertentangan serta „pengabdian pada sedjenis dunia” dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Berlangsungnja kedaan jang tidak sehat ini sampai sesudah 18 tahun Indonesia Merdeka, menimbulkan dan memperhebat apa jang lazim disebut masalah minoritas, masalah peranakan, masalah WNI keturunan asing dll. dinegeri kita. Setajara umum dapat dikatakan bahwa inti dari pada masalah minoritas ialah bahwa sebagai akibat dari *eksklusivisme* (j. i. hidup menjendiri ditengah-tengah masjarakat Indonesia) dunia minoritas tidak mempunjai suatu „sense of belonging”. Dengan “sense of belonging” dimaksudkan berperasaan dan bersadar termasuk dalam Bangsa Indonesia karena kemauannja jang diwujudkan dalam tindak dan tjara hidupnja, untuk turut bertanggung-djawab atas segala segi kehidupan dan mengembangkan masjarakat Indonesia berdasarkan kedjudjuran dan keichlasan.

“Sense of belonging” pada Bangsa Indonesia ini harus kita bersama pupuk dalam djiwa anak-anak kita dan dimulai pada setiap orang dewasa jang kini masih (setjara tak sadar) mengikuti kehidupan eksklusip dalam tubuh Bangsa Indonesia sehari-hari.

6. Tujuan assimilasi adalah: „masuk dan diterimanja orang-seorang jang berasal keturunan asing kedalam tubuh Bangsa Indonesia jang Tunggal sedemikian rupa hingga achirnja golongan-golongan jang semula chas tidak ada lagi”.

Mentjiptakan dan memperkembangkan “sense of belonging” j.i. persaan dan kesadaran ber-Bangsa dan ber-Tanah Air Indonesia. Mengadakan penggolongan-penggolongan dan eksklusivisme rasial keturunan asing jang kini masih meradjalela dimasjarakat Indonesia.

Antara “sense of belonging” dan “eksklusivisme” ada hubungan timbal-balik jang saling melawan: djikalau sense of belonging tebal dan meningkat maka eksklusivisme mereda dan achirnja lenjap; sebaliknya, djika eksklusivisme digembleng dan diperkokoh “sense of belonging” tak akan tertjapai dan persatuan Bangsa terantjam olehnja.

7. Assimilasi hendaknja setidak-tidaknja dilaksanakan dalam segala bidang kehidupan masjarakat, bidang-bidang politik, pergaulan sehari-hari, kulturil, ekonomis, kekeluargaan dll. Ini berarti bahwa dalam hidup sehari-hari misalnja harus selekas-lekasnja lenjapnya lembaga-lembaga organisasi-organisasi dll. jang bersifat chas dari dunia minoritas. Untuk tertjapainja

tudjuan ini, hendaknja perorangan dari dunia minoritas jang mendjadi anggauta dari sesuatu organisasi/lembaga jang chas minoritas, terutama pemudanja, segera meninggalkan organisasi jang chas minoritas itu dan memasuki dan mendjadi anggauta dari lembaga/organisasi dari bidang jang sama tjoraknja tetapi jang berwujud dari "Nation" Indonesia.

8. Gerakan assimilasi mengadjak:

- agar minoritas dan majoritas tanpa ragu-ragu saling dekat-mendekati dan bertjampur-gaul tanpa sesuatu keraguan (reserve) disegala bidang kehidupan masjarakat.
- Agar semua bersangkutan menindjau kembali eksklusivisme jang njata selalu menimbulkan, meneruskan dan menggempleng *rasa kesadaran berminoritas* (minority consciousness) jang setjara timbal-balik memperkuat *kesadaran bermajoritas*, suatu gedjala kembar jang hanja mempunjai akibat negatip dan buruk bagi tugas kita semua, membina Kesatuan Bangsa Indonesia jang bulat dan homogin.

9. Untuk melaksanakan pembinaan kesatuan Bangsa lewat assimilasi, kami berpedoman pada utjapan P.J.M. Bung Karno: „Saja membenarkan usaha pemuda-pemuda untuk memetjahkan masalah minoritas dengan djalan assimilasi dan menghilangkan eksklusivisme dalam tubuh Bangsa Indonesia”.

**Catatan:**

- Disalin sesuai dengan aslinya.
- Sumber: Departemen Penerangan. 1963. *Assimilasi dalam rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa, Sambutan-sambutan/Prasaran-prasaran pada Musjawarah Assimilasi pada tanggal 10 s/d 12 Maret 1963 di Djakarta*. Djakarta: Departemen Penerangan R.I.

## Lampiran 2.

**PERNJATAAN**

MUSJAWARAH ASSIMILASI jang mengadakan sidang-sidangnja mulai tanggal 10 Maret s/d 12 Maret 1963 bertempat di Lembaga Administrasi Negara Djakarta dan dihadiri oleh pemuda-pemuda pendukung assimilasi dari ibukota dan daerah-daerah menjatakan kebulatan tekadnja untuk:

- 1) Melandjutkan perdjoangannya untuk merobah suatu struktur kemasjarakatan dan tjara berpikir jang masih kita warisi dari djaman kolonial dimana bangsa Indonesia terpetjah-belah, terpisah satu sama lain dalam golongan-golongan keturunan rasial dan kesukuan;
- 2) Melaksanakan perdjoangan ini setjara progresif revolusioner bersama-sama dan dibawah pimpinan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dalam rangka penyelesaian revolusi Indonesia dan Pantja Program Front Nasional menudju kepada 3 kerangka revolusi;
- 3) Mengadjak dan mengikut sertakan seluruh rakjat Indonesia setjara gotong-rojong terutama para Pemudanja dalam perdjoangan ini sambil berseru dan mendesak kepada:
  - A. PEMERINTAH agar setjara sungguh-sungguh memperhatikan akibat-akibat jang datang daripada kenjataan masih adanja organisasi-organisasi, Lembaga-lembaga dan usaha-usaha jang setjara sengadja atau tidak setjara terus-menerus memupuk kesadaran berminoritas dan kesadaran bersuku jang setjara timbal-balik memupuk kesadaran bermajoritas dan bersuku lain dan segera mengambil tindakan-tindakan penertiban jang drastis demi pembinaan kesatuan bangsa;
  - B. PIHAK-PIHAK, PEMIMPIN-PEMIMPIN, serta ANGGOTA-ANGGOTA dari lembaga-lembaga organisasi-organisasi dan usaha-usaha tersebut diatas agar setjara sungguh-sungguh menindjau kembali sikap dan kbidjaksanaannya dan berani mengambil tindakan-tindakan jang drastis progresip sesuai dengan alam revolusi demi kepentingan pembinaan kesatuan bangsa jang bulat dan homogin;
  - C. SELURUH MASJARAKAT INDONESIA agar menjalurkan segala aktivitas disegala bidang kedalam organisasi-organisasi, lembaga-lembaga dan usaha-usaha jang formil dan menurut kenjataan bersifat umum nasional menurut kejakinan kepertjajaan, ideologi dan agama masing-masing;
  - D. SELURUH PERS NASIONAL sebagai alat revolusi untuk ikut membantu melantjarkan proses Assimilasi untuk membina Kesatuan Bangsa sesuai dengan tudjuan revolusi mentjapai masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila.

MUSJAWARAH ASSIMILASI dengan ini menjatakan terima kasih sebesar-besarnya atas doa restu, petundjuk-petundjuk serta dorongan-dorongan jang kuat dari Pemimpin Besar Revolusi serta pembantu-pembantunya jang telah diberikan kepada usaha perdjolongan ini dan mengharap bimbingan-bimbingan untuk perdjolongan selanjutnja sesuai dengan tudjuan dan haluan revolusi.

Untuk memperlantjar proses perdjolongan, MUSJAWARAH ASSIMILASI telah mengambil beberapa keputusan jang dilampirkan pada pernajaan besar ini.

Djakarta, 12 Maret 1963.

D j a m : 15.00.

A.n. Seluruh peserta Musjawarah Assimilasi.

Pimpinan Musjawarah:

ttd. K. SINDHUNATHA S.H.

ANIS IBRAHIM, Anggota,

WIGNJO SOEMARSONO, Anggota,

NOTO BUDIMULJO, Anggota,

SAFIOEDIN, Anggota,

SOEHARTO HASIRUN, Anggota,

OEI TJO IM, Anggota,

HENDRO SOETANTO, Anggota.

**Catatan:**

- Disalin sesuai dengan aslinya.
- Sumber: Departemen Penerangan. 1963. *Assimilasi dalam rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa, Sambutan-sambutan/Prasaran-prasaran pada Musjawarah Assimilasi pada tanggal 10 s/d 12 Maret 1963 di Djakarta*. Djakarta: Departemen Penerangan R.I.

## Lampiran 3.

**KEPUTUSAN MUSJAWARAH ASSIMILASI**

MUSJAWARAH ASSIMILASI jang berlangsung di Djakarta pada tanggal 10, 11, dan 12 Maret 1963;

Setelah mendengarkan prasaran-prasaran dari:

1. Prof. Sunarjo S.H., Mahaguru Universitas Hasanuddin Makasar;
  2. Kolonel Djoehartono, Wakil Sek. Djen. Front Nasional;
  3. Brig. Djen. Dr. Soemarno, Gub. D.C.I. Djakarta Raya;
  4. Kolonel Sutjipto S.H., Kepala Staf Peperti;
  5. Brig. Djen. Umar Wirahadikusuma, Panglima KODAM DJAJA;
  6. J.M. Ipi Gandamana, Menteri P.U. & O.D.;
  7. J.M. Dr. H. Ruslan Abdulgani, Wampa Khusus/Menteri Penerangan;
  8. J.M. Chairul Saleh, Wampa/Ketua M.P.R.S./Ketua Periodik Front Nasional;
  9. J.M. Muljadi Djojomartono, Wampa Kesedjahteraan Rakjat;
  10. J.M. Djenderal Dr. A.H. Nasution, Wampa Keamanan/Pertahanan/Kasab.
- Dan pendapat-pendapat para peserta dengan seksama memutuskan:

**Dalam Bidang Pendidikan:**

- I. Mengingat tudjuan pendidikan seperti tertjantum dalam U.U.D. 1945 dan berdasarkan amanat Presiden R.I. Bung Karno, bahwa satu Natie dengan minoritas-minoritas bukan merupakan Natie, maka MUSJAWARAH ASSIMILASI berpendapat bahwa dalam usaha pendidikan perlu diperhatikan djuga Pembinaan Kesatuan Bangsa jang bulat bersatu dan homogin tanpa ada minoritas-minoritasan.  
 Dalam mengarah tudjuan pendidikan seperti tersebut diatas, hendaknja diperhatikan djuga Pembinaan Kesatuan Bangsa jang **BERBUDAJA NASIONAL**, sehingga dengan demikian Assimilasi total dapat tertjapai dengan tjatatan agar semua unsur jang bertentangan dengan itu ditjegah dan dihapuskan.
- II. **FAKTA-FAKTA JANG KURANG SEHAT BAGI PROSES ASSIMILASI DALAM PENDIDIKAN** adalah antara lain:
  1. Masih adanja sekolah-sekolah dan organisasi-organisasi jang setjara formil bertjorak Nasional, tetapi dalam kenjataanja **memberikan kesempatan dan mentjiptakan iklim untuk bertumbuhnja eksklusivisme rasial.**
  2. adanja penjelewengan-penjelewengan dalam bidang pendidikan baik dalam kurikulum, organisasi maupun administrasi, jang merupakan matjam-matjam rintangan untuk mentjapai **Kesatuan Bangsa jang Bulat dan Homogin.** Misalnja: Tjara-tjara penerimaan peladjar, pembayaran uang sekolah, tundjangan-tundjangan, **TATA PERGAULAN** dan pelbagai formalitas lain.

### III. USAHA-USAHA UNTUK MEMBERIKAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA ASSIMILASI.

1. Mengandjurkan dimasukkannya unsur-unsur positif kedalam rentjana pendidikan didalam dan diluar sekolah yang mempertcepat proses Assimilasi pada semua bidang sehingga Kesatuan Bangsa dapat ditjapai dalam waktu singkat.
2. Menentang dan mentjegah semua usaha yang menghambat proses Assimilasi dalam pendidikan itu seperti gejala-gejala yang bersifat eksklusive dan separatis seperti terurai diatas.
3. Mengajukan saran-saran kepada pemerintah dan organisasi pendidikan swasta agar dibidang-pendidikan dikeluarkan peraturan-peraturan untuk mempertcepat Assimilasi.

#### **Dalam Bidang Ekonomi:**

- I. **DITINDJAU** dari sedjarah perkembangan masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan/perimbangan produksi (materile produksi verhoudingen) djaman kolonial menimbulkan adanya sematjam sistim kasta dalam masyarakat Indonesia dengan golongan-golongan penduduk yang mempunjai kedudukan sosial ekonomis yang berlainan tingkatnja. Dan sampai kini masih nampak, bahwa pada umumnja perbedaan tingkat sosial ekonomis ini djatuh bersamaan dengan penggolongan antara „Majoritas” disatu pihak dan „Minoritas-rasial” serta orang-orang asing dilain pihak.
- II. **TJITA-TJITA** Bangsa Indonesia yang kini sudah Merdeka ialah menudju suatu masyarakat yang adil dan makmur, jaitu suatu masyarakat sosialis Indonesia berlandaskan Pantja Sila, dimana sistim dan kemungkinan „l'exploitation de l'home par l'home” (penghisapan manusia atas sesama manusia lainnja) menemukan adjalnja.
- III. **UNTUK** mentjapai masyarakat adil dan makmur itu setjara revolusioner hendaknja diadakan perombakan bentuk struktural yang sesuai dibidang Perekonomian. Hal ini berarti bahwa kita a.l. ditugaskan merombak sama sekali „Hubungan-hubungan perimbangan produksi” yang diwarisi djaman kolonial itu dan mentjiptakan „Hubungan perimbangan produksi yang baru memungkinkan dan mengarahkan segala sesuatu ketertjapainja masyarakat adil dan makmur tanpa „Kasta” dsb. yang penuh pertentangan kepentingan sosial ekonomis.
- IV. **DISAMPING** itu untuk mengsucceskan tudjuan kita, semua Warga Bangsa Indonesia harus memiliki sesuatu mentalitas yang sesuai dengan panggilan djaman (**revolusi mental**).
- V. **REVOLUSI MENTAL** dalam bidang Ekonomi a.l. mengandung hal-hal sebagai berikut:
  - a. Usaha-usaha dalam bidang-bidang kegiatan ekonomi dilaksanakan bersama-sama dengan semangat gotong-rojong yang sedjati. Segala “funds and forces” dikerahkan seluruhnja demi tertjapainja masyarakat



adil dan makmur sesuai dengan AMANAT PENDERITAAN RAKJAT. Hal ini berarti, bahwa tidak akan ada lagi hasrat/ketjenderungan untuk berusaha hanja dalam lingkungan golongan semata-mata.

- b. Dengan penuh kesadaran akan peranan sosialnja dalam dibidangnja masing-masing sesuai dengan sosialisme Indonesia turut serta sebagai satu Kesatuan jang bulat dan harmonis dalam segala djenis bidang pembangunan.

#### **Dalam Bidang Hukum:**

##### **Menimbang:**

1. Bahwa menurut Manifesto politik R.I. jang telah ditetapkan dengan keputusan D.P.A. tanggal 25 September 1959 No. 3/KPTS/SD/II/59, tudjuan revolusi kita ialah untuk membentuk satu Negara Republik Kesatuan jang demokratis, dimana Irian Barat djuga termasuk kedalamnja, dimana kedaulatan rakjat ada ditangan rakjat dan dilakukan sepenuhnya oleh M.P.R. (U.U.D. pasal 1 ayat 2); dimana hak-hak azasi dan hak-hak warga-negara didjundjung tinggi dan membentuk masjarakat adil dan makmur, tjinta damai dan bersahabat dengan semua negara didunia guna membentuk satu dunia baru;
2. Bahwa Manifesto politik R.I. adalah garis-garis besar Haluan Negara sebagaimana telah ditetapkan dalam ketetapan M.P.R.S. I dan karena itu harus mendjadi landasan hukum nasional Indonesia;
3. Bahwa sesuai dengan djiwa manifesto politik tersebut chususnja mengenai kesadaran sosial, hendaknja hukum Indonesia bersemangat gotong-rojong jang dinamis dan bersemangat Holopis Kuntul Baris;
4. Bahwa semangat persatuan, gotong-rojong dan Holopis Kuntul Baris tersebut hanja dapat ditjapai dengan perundang-undangan dan lembaga-lembaga hukum jang tidak mengenal lagi perbedaan antara sesama warga-negara Indonesia;
5. Bahwa dengan masih adanja golongan-golongan dalam hukum jang berlaku sekarang ini adalah merupakan penghambat dalam penjusunan dan pembinaan kearah kesatuan bangsa jang bulat untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur jang berazaskan Pantja Sila;
6. Bahwa satu-satunja untuk mentjapai tudjuan sutji tersebut adalah Assimilasi antara seluruh suku dan golongan;

##### **Mengingat:**

1. Pidato-pidato dan Amanat-amanat Presiden R.I./Pemimpin Besar Revolusi, chususnja tentang Pantja Sila, Penemuan Kembali Revolusi

Kita, Resopim, didepan Kongres Persahi 1961 dan achir-achir ini didepan Seminar Hukum Nasional 1963;

2. Manifesto Politik jang telah mendjadi Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Amanat Presiden R.I. dihadapan Pemuda pendukung assimilasi tanggal 22 Pebruari di Istana Merdeka jang dengan tegas menjatakan:
  1. Bhineka adalah "das Sein" dan Tunggal Ika adalah "das Sollen".
  2. Suatu Natie dengan Minoritas-minoritas adalah bukan Natie.
  3. Saja membenarkan usaha-usaha Pemuda untuk memetjahkan masalah minoritas dengan djalan Assimilasi dan menghilangkan eksklusivisme dalam tubuh bangsa Indonesia.
  4. Saja tidak mengenal perkataan asli dan tidak asli dalam kalangan Rakjat Indonesia.

Memutuskan:

1. Mengusulkan pada Pemerintah/Departemen jang bersangkutan:
  - a. untuk dalam waktu singkat menetapkan suatu penetapan jang menghapuskan pembedaan-pembedaan/penggolongan-penggolongan jang terdapat dalam per-Undang-undangan kita dewasa ini. (Misalnja peraturan tjatatan sipil);
  - b. agar dalam waktu jang singkat menetapkan ketentuan-ketentuan pokok Pembinaan Kesatuan Bangsa jang antara lain memuat pengertian tentang arti dan tjara Assimilasi sebagai azas-azas Pembinaan Kesatuan Bangsa;
  - c. menetapkan prosedur pelaksanaan U.U. No. 4 tahun 1961 mengenai perobahan nama jang mudah sebagai faktor mempertjepat pembinaan kesatuan bangsa;
  - d. agar membuat peraturan jang menertibkan organisasi eksklusive minoritas penghambat Pembinaan Kesatuan Bangsa;
2. Mengharapkan agar seminar Hukum Nasional jang berlangsung di Djakarta tanggal 11 s/d 16 Maret 1963 memperhatikan dan membahas persoalan tersebut sehingga dalam waktu jang singkat terdapat suatu perumusan jang dapat didjadikan pegangan oleh Pemerintah dalam usaha Pembinaan Kesatuan Bangsa.

Djakarta, 12 Maret 1963.

Musjawarah Assimilasi tahun 1963,

PIMPINAN

**Catatan:**

- Disalin sesuai dengan aslinya.
- Sumber: Departemen Penerangan. 1963. *Assimilasi dalam rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa, Sambutan-sambutan/Prasaran-prasaran pada Musjawarah Assimilasi pada tanggal 10 s/d 12 Maret 1963 di Djakarta*. Djakarta: Departemen Penerangan R.I.

## KEPUTUSAN-KEPUTUSAN SEKSI.

### KEPUTUSAN

#### I. Pembentukan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa.

Musjawarah Assimilasi yang berlangsung di Djakarta, pada tanggal 10, 11 dan 12 Maret 1963: Memutuskan pembentukan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa dengan peraturan dasar dengan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

#### 1. MUKADIMAH:

Terdorong oleh keinginan dan keinsjafan masjarakat yang ditjetuskan dalam Musjawarah assimilasi ini, Musjawarah Kesadaran Nasional di Bandung dan pernyataan-pernyataan lainnja, didjiwai oleh pokok utjapan P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 22 Pebruari 1963 ialah:

- a. Bhineka Tunggal Ika sebagai sembojan kita hendaknja diartikan bahwa „Bhineka”-nja adalah „das Sein” dari Bangsa Indonesia.
- b. Suatu natie dengan minoritas-minoritas bukanlah Natie.
- c. Saja membenarkan usaha Pemuda untuk memetjahkan masalah minoritas dengan djalan Assimilasi dan menghilangkan eksklusivisme dalam seluruh tubuh bangsa Indonesia.
- d. Saja tidak mau mengenal perkataan „Asli” dan „Tidak Asli” dalam kalangan Rakjat Indonesia.
- e. Untuk melaksanakan tudjuan ini dibutuhkan perdjuangan yang gigih dari pemuda-pemuda yang progressip-revolusioner.

Dibentuklah sebuah lembaga, yang dinamakan LEMBAGA PEMBINA KESATUAN BANGSA.

#### 2. Maksud dan tudjuan.

Ikut berusaha membina Kesatuan Bangsa sesuai dengan tudjuan Revolusi untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila.

#### 3. Usaha.

- a. Tudjuan tersebut hanja dapat ditjapai dengan assimilasi disegala bidang dan dengan menghilangkan eksklusivisme dalam tubuh bangsa Indonesia.
- b. Untuk mempertjepat proses assimilasi ditempuh djalan a.l. research dan menjampaikan bahan pertimbangan kedpada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan usaha-usaha lainnja yang sesuai dengan haluan Negara.

#### 4. Waktu.

Lembaga ini didirikan pada tanggal 12 Maret 1963 dan berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia dan akan dibubarkan apabila maksud dan tudjuan tertjapai.

#### **5. Susunan.**

- a. Pimpinan Pusat terdiri dari Dewan Pleno dan Dewan Harian.
- b. Didaerah-daerah didirikan Tjabang dari Lembaga ini dengan Pimpinan Daerah jang terdiri dari Dewan Pleno dan Dewan Harian.
- c. Pelindung dan Penasehat.
- d. Rapat kerdja jang dihadiri oleh Ketua-ketua Tjabang dan Dewan Pleno Pimpinan pusat dan para pendukung lainnja jang diperlukan.

#### **6. Keanggotaan pimpinan.**

Terdiri dari:

- a. Warga Negara Indonesia pendukung Assimilasi.
- b. Diangkat untuk djangka waktu 3 tahun dan dapat diangkat kembali.
- c. Untuk pertama kali pimpinan pusat diangkat oleh Musjawarah Assimilasi jang berlangsung pada tanggal 10, 11, 12 Maret 1963 di Djakarta, dan kepada pimpinan pusat jang pertama kali ini diberikan hak untuk mengangkat pimpinan tjabang, dan kepada pimpinan pusat dan pimpinan tjabang itu diberi hak untuk mengadakan penggantian pada waktu-waktu berikutnja.  
Pembentukan pimpinan Tjabang disahkan oleh pimpinan pusat.

#### **7. Peraturan Tata-Kerdja.**

Hal-hal jang belum ditentukan dan diatur dalam Peraturan Dasar, ditentukan dan diatur dalam peraturan Tata-Kerdja.

### **II. Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa.**

Kepada pimpinan Musjawarah Assimilasi jang dilangsungkan di Djakarta tanggal 10, 11, 12 Maret 1963 ini diberikan mandat penuh untuk melaksanakan pembentukan Lembaga ini dan menjusun Peraturan Dasar beserta Peraturan Tata-Kerdja sehingga selesai.

### **III. Hubungan dengan Pemerintah.**

Kepada pimpinan Musjawarah Assimilasi ini diberikan djuga tugas menghadap kepada P.J.M. Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi, para Menteri dan badan-badan Pemerintahan maupun badan-badan jang lain jang ada hubungannja dengan usaha Pembinaan Kesatuan Bangsa, untuk memperdjoangkan kemungkinan-kemungkinan untuk lebih memperlantjar usaha-usaha Lembaga ini.

Selandjutnja diberikan hak penuh untuk merumuskan ketentuan-ketentuan dan menjelesaikan bentuk status dan susunan, serta mengatur dalam peraturan

Dasar dan peraturan Tata-Kerdja Lembaga ini sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan itu.

---

**Catatan:**

- Disalin sesuai dengan aslinya.
- Sumber: Departemen Penerangan. 1963. *Assimilasi dalam rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa, Sambutan-sambutan/Prasaran-prasaran pada Musjawarah Assimilasi pada tanggal 10 s/d 12 Maret 1963 di Djakarta*. Djakarta: Departemen Penerangan R.I.

Lampiran 5.

**PIMPINAN PUSAT  
LEMBAGA PEMBINA KESATUAN BANGSA**

Dipilih oleh Sidang Paripurna MUSJAWARAH ASSIMILASI Negara setelah terbentuknya LEMBAGA PEMBINA KESATUAN BANGSA pada tanggal 12 Maret 1963 Djam 16.00 di AULA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DJAKARTA.

1. SINDHUNATA S.H. LETNAN HK. NRP. 611959/W.
2. NOTO BUDIMULJO.
3. SAFIOEDIN.
4. ANIS IBRAHIM.
5. SUHARTO HASIRUN.
6. WIGNJO SOEMARSONO.
7. T.A. HARDJANEGARA.
8. SOETANTO.
9. Ir. LUKMAN.
10. KAM LOK JOE.
11. LIE GIOK THO.
12. SOE HOK GIE.
13. AMAN GINTING.
14. ISKANDAR.
15. ONG HOK HAM.
16. PRATIKNJO.
17. IBU SURJO.
18. JACOB UTAMA.
19. Drs. JUNUS JAHJA.
20. THE TJWAN BIE S.H.
21. TIAN LIANG DJIE.
22. SISWORAHARDJO.
23. TAN HONG GIE.

**Catatan:**

- Disalin sesuai dengan aslinya.
- Sumber: Departemen Penerangan. 1963. *Assimilasi dalam rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa, Sambutan-sambutan/Prasaran-prasaran pada Musjawarah Assimilasi pada tanggal 10 s/d 12 Maret 1963 di Djakarta.* Djakarta: Departemen Penerangan R.I.

**KEPUTUSAN MUSJAWARAH ASSIMILASI**  
tentang  
**Program Djangka Pendek untuk Lembaga Pembina**  
**Kesatuan Bangsa**

**KEPUTUSAN 1.**

**I. Saluran-saluran Penerangan.**

Tugas penting dari Lembaga adalah memberikan penerangan seluas-luasnja kepada chalajak ramai, melalui tjeramah-tjeramah, pidato-pidato, pertemuan-pertemuan setjara periodik, penerbitan-penerbitan dll.

Salah satu dari penerbitan-penerbitan itu ialah penerbitan Madjalah.

**II. Penerbitan Madjalah.**

1. Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa ditugaskan mendirikan sebuah Jajasan untuk penerbitan sebuah Madjalah.
2. Madjalah itu bersifat umum dan populer dengan dasar politik Pembinaan Kesatuan Bangsa.
3. Madjalah itu harus diusahakan agar dapat membiajai diri sendiri (self supporting).

**KEPUTUSAN 2.**

Buku kenang-kenangan.

Musjawarah berpendapat bahwa diterbitkannja suatu buku kenang-kenangan Musjawarah Assimilasi jang dilangsungkan pada tanggal 10, 11 dan 12 Maret 1963 di Djakarta, jang berisi a.l. : Keputusan-keputusan Musjawarah, Tjeramah-tjeramah dan Amanat-amanat, Daftar Pengundjung, Gambar dan lain-lain sangat bermanfaat.

Kepada pimpinan Musjawarah diberikan mandat penuh untuk melaksanakan penerbitan itu.

**S E L E S A I.**

**Catatan:**

- Disalin sesuai dengan aslinya.
- Sumber: Departemen Penerangan. 1963. *Assimilasi dalam rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa, Sambutan-sambutan/Prasaran-prasaran pada Musjawarah Assimilasi pada tanggal 10 s/d 12 Maret 1963 di Djakarta*. Djakarta: Departemen Penerangan R.I.

## PERNJATAAN

Setelah mendengar, meneliti dan mempeladjar **pidato P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno** pada tanggal 14/3-1963 pagi, dalam menjambut pembukaan Kongres ke VIII Baperki, bertempat di Istana Olah Raga Bung Karno – Senajan, jang pada pokoknja ber-intikan perđuangan untuk Nation Building dalam rangka menjelesaikan Revolusi sesuai dengan Amanat Penderitaan Rakjat, maka:

**Pimpinan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa** jang telah dilahirkan sebagai hasil Musjawarah Assimilasi dari tanggal 10/3 sampai 12/3-1963 jang lalu,

**berpendapat bahwa:**

- A. **Isi, djiwa dan semangat pidato P.J.M. Presiden tersebut** jang pada pokoknja menggariskan bahwa tjita-tjita Revolusi Indonesia menudju pembinaan kesatuan bangsa jang bulat – Nation Building – melingkupi bidang jang lebih luas daripada pembangunan ekonomi jang sempit; tjita-tjita Revolusi Indonesia menudju kepada pembinaan kesatuan bangsa jang bulat jang diikat oleh perasaan senasib dan **kesatuan perangai** serta **ketjintaan kepada Ibu Pertiwi Indonesia sebagai totalitas**, sesuai dengan adjaran Pantjasila seperti didjelaskan dalam pidato- bersedjarah Lahirnja Pantjasila,
- B. Revolusi Indonesia **tidak mau mengenal** adanja **minoritas-minoritasan** dan tidak mau mengenal perkataan „asli” dan „tidak asli”, **adalah identik dan sesuai dengan** garis perđuangan pemuda pendukung assimilasi jang telah dibenarkan dan direstui oleh Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 22/2-1963 jang lalu, jang oleh musjawarah assimilasi telah dituangkan kedalam suatu pernjataan umum dan beberapa keputusan pokok sebagai program-perđuangan serta dibentuknja Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa sebagai alat perđuangan;

**karena itu menjerukan:**

kepada segenap Rakjat Indonesia jang sedang ber-revolusi, terutama pemuda-pemuda pendukung tjita-tjita pembinaan kesatuan bangsa atau “Nation Building” sesuai dengan garis dan tjita-tjita Bung Karno seperti diatas, **supaja:**

1. **mempeladjar dengan sungguh-sungguh** isi, djiwa dan semangat pidato P.J.M. Presiden tersebut dan menjadikannja pedoman perđuangan selandjutnja;
2. **berđuang terus** dengan semangat revolusi jang gigih dan penuh keberanian dan patriotisme untuk menghapuskan sampai keakar-akarnja **kesadaran berminoritas** jang masih terdapat dalam masjarakat sebagai **sisa-sisa politik divide et impera** kaum kolonialis; menghapuskan dan mentjegah timbulnja



unsur-unsur jang dapat memupuk atau memupuk kembali kesadaran-berminoritas jang setjara timbal balik memupuk pula kesadaran-bermajoritas sehingga **menghambat pemupukan perasaan-senasib dan kesatuan perangai sebagai semen kesatuan bangsa jang bulat itu, sehingga hanja menguntungkan Neo-Kolonialisme dan Imperialisme sadja;**

3. berdjuaug terus dibawah pimpinan Pemimpin Besar Revolusi untuk membina kesatuan bangsa jang bulat dimana segenap unsur-unsur kesukuan maupun keturunan ataupun agama jang progresip terdjalin mendjadi satu; kesatuan bangsa jang tidak mengenal adanja perbedaan antara suku-suku atau keturunan; jang mentjerminkan Kepribadian Sosialis Indonesia sebagai totalitas;
4. berdjuaug terus membantu Pemerintah dan Pemimpin Besar Revolusi untuk menjelesaikan Tri-Program Pemerintah sebagai program djangka pendek dengan djalan mengintegrasikan kekuatan Rakjat jang progresip dan revolusioner sesuai dengan Pantja Program Front Nasional.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa meredhoi perdjuaugan kita.

Djakarta, 14 Pebruari 1963.

a.n. Pimpinan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa,

ttd.

ttd.

K. SINDHUNATA S.H.  
Let HK. Nrp. 611959/W.

ANIS IBRAHIM

**Catatan:**

- Disalin sesuai dengan aslinya.
- Sumber: Departemen Penerangan. 1963. *Assimilasi dalam rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa, Sambutan-sambutan/Prasaran-prasaran pada Musjawarah Assimilasi pada tanggal 10 s/d 12 Maret 1963 di Djakarta.* Djakarta: Departemen Penerangan R.I.

## Lampiran 8.

**PERATURAN DASAR  
LEMBAGA PEMBINA KESATUAN BANGSA**

**MUKADIMAH**

Sesuai dengan haluan Pemerintah Republik Indonesia dan terdorong oleh keinginan dan keinsafan masyarakat yang ditjetuskan dalam:

- a. Musjawarah Assmilasi yang berlangsung di Djakarta pada tanggal 10, 11 dan 12 Maret 1963;
- b. Seminar Kesadaran Nasional di Bandung pada tanggal 13, 14 dan 15 Maret 1961;
- c. Pernyataan-pernyataan para pembesar Pemerintah R.I. dan pihak-pihak lainnya. Didjivai oleh 5 pokok utjapan P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 22 Pebruari 1963, ialah:
  - a. Bhineka Tunggal Ika sebagai sembojan kita hendaknya diartikan bahwa Bhinekanja adalah „das Sein” dan Tunggal Ikanja adalah „das Sollen” bagi Bangsa Indonesia;
  - b. Suatu Natie dengan minoritas-minoritas bukanlah suatu Natie;
  - c. Saja membenarkan usaha pemuda untuk memetjahkan masalah minoritas dengan djalan Assmilasi dan menghilangkan eksklusivisme dalam seluruh tubuh Bangsa Indonesia;
  - d. Saja tidak mau mengenal perkataan „asli” dan „tidak asli” dalam kalangan rakyat Indonesia;
  - e. Untuk melaksanakan tudjuan ini dibutuhkan perdjjoangan yang gigih dari pemuda-pemuda yang progresip-revolusioner.
 Maka dibentuklah sebuah Lembaga yang akan berusaha dan bertindak menurut ketentuan dalam peraturan-peraturan serta sjarat-sjarat sebagai berikut:

**Pasal 1.**

**Nama dan Tempat kedudukan.**

- 1) Lembaga ini bernama LEMBAGA PEMBINA KESATUAN BANGSA dan berkedudukan serta berkantor pusat di Ibu Kota Republik Indonesia.
- 2) Di Daerah-daerah diadakan Tjabang-tjabang Lembaga berkedudukan serta berkantor di Ibu Kota Dst. Tk. I yang dianggap perlu;
  - ranting-ranting** Lembaga berkedudukan serta berkantor di Ibu Kota Dst. Tk. II yang dianggap perlu;
  - sektor-sektor** Lembaga berkedudukan serta berkantor dikota-kota yang dianggap perlu.

**Pasal 2.**

**Azas.**

Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa berazaskan **Pantja Sila dan Sumpah Pemuda**.

Pasal 3.

**Maksud dan Tujuan.**

- 1) Bersama-sama dengan Pemerintah berusaha membina kesatuan bangsa diantara sekalian warga-negara Indonesia jang tunggal sesuai dengan tujuan revolusi Indonesia untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila jaitu masjarakat sosialis Indonesia.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut diatas dalam arti jang luas, setjara khusus Lembaga berusaha menjelesaikan masalah minoritas keturunan sesama warga-negara Indonesia dalam perikehidupan Indonesia dengan sebaik-baiknja.

Pasal 4.

**Usaha.**

- 1) Maksud dan tujuan tersebut pada pasal 3 hanja dapat ditjapai dengan assimilasi disegala bidang: politik, ekonomi, sosial, kekeluargaan, kebudayaan hukum dll. dan dengan menghilangkan eksklusivisme karena keturunan dalam seluruh tubuh bangsa (nation) Indonesia.
- 2) Untuk mempertjepat proses assimilasi ditempuh djalan a.l.
  - a. Penelitian dan penjampaian bahan pertimbangan kepada instansi-instansi pemerintah pusat dan daerah-daerah untuk memperlantjar pelaksanaan kebidjaksanaannja dalam rangka Nation Building.
  - b. Memberi penerangan berentjana dan intensip agar chalajak ramai dan mereka jang langsung bersangkutan menjadari bahwa hidup menjendiri dalam golongan-golongan berdasarkan keturunan adalah:
    - Tidak sesuai dengan dasar dan haluan Negara dan kepribadian Nasional.
    - Tidak sesuai dengan kepentingan jang bersangkutan sendiri pada umumnja maupun generasi mereka jang akan datang, karena tidak memungkinkan berkembangnja diterima dan termasuknja sebagai orang Indonesia sadja setjara wadjar. (Sense of belonging).
    - Tidak dapat dipertanggung-jawabkan karena eksklusivisme keturunan memperkekal kesadaran berminoritas dalam tubuh bangsa Indonesia jang tunggal dan setjara timbal balik memperkokoh kesadaran bermajoritas, suatu gejala kembar jang hanja mempunjai pengaruh negatip, bahkan membahajakan terhadap proses pembina bangsa Indonesia jang bersatu bulat dan homogin.
  - c. Mentjiptakan dan memperkembangkan suasana dan usaha-usaha positip demi pembinaan masjarakat jang bebas dari sisa-sisa kolonialisme menudju masjarakat sosialis Indonesia bebas dari hidup menjendiri dalam golongan berdasarkan keturunan.

- d. Mengichtiarkan hilangnja kenjataan-kenjataan, unsur-unsur dan usaha-usaha negatip jang menjimpang dari maksud dan tudjuan itu dan memberikan djasa-djasa kepada masjarakat dalam bidang tersebut agtar jang bersangkutan meninggalkan tjara-tjara hidup menjendiri dalam golongan berdasarkan keturunan dan tanpa ragu-ragu masuk dan merasa berada dan diterima dalam masjarakat besar Bangsa Indonesia.
- e. Usaha-usaha lainnja jang sesuai dengan haluan negara.

#### Pasal 5.

##### Waktu.

- 1) Lembaga ini didirikan di Djakarta pada tanggal 12 Maret 1963 untuk waktu jang tidak tertentu.
- 2) Lembaga ini harus berusaha agar supaja dapat dibubarkan segera setelah maksud dan tudjuan tersebut pada pasal 3 tertjapai, ialah setelah hilangnja eksklusivisme keturunan dalam tubuh bangsa Indonesia.

#### Pasal 6.

##### Keanggotaan.

- 1) Keanggotaan Lembaga ini terdiri dari Karjawan-karjawan Warga Negara Indonesia pendukung Assimilasi jang karena keinsjafannja dan karena kesanggupannja memberikan bantuannja pada Lembaga berupa pikiran, tenaga, waktu dan atau -- hartanja untuk ikut serta dalam usaha-usaha mentjapai maksud dan tudjuan Lembaga ini.
- 2) Anggota-anggota Lembaga duduk dalam Dewan Pleno Pimpinan Pusat atau Dewan Pleno Pimpinan Tjabang/Ranting/Sektor Lembaga.

#### Pasal 7.

##### Keuangan.

- 1) Keuangan Lembaga ini diperoleh dari:
  - a. Sumbangan tetap para anggota Lembaga.
  - b. Sumbangan penderma dan pendukung.
  - c. Bantuan Pemerintah.
  - d. Lain-lain usaha jang sah, jang tidak bertentangan dengan azas, maksud dan tudjuan Lembaga ini.

#### Pasal 8.

##### Susunan organisasi.

- 1) Pimpinan Pusat Lembaga terdiri dari Dewan Pleno, Dewan Harian dan Staf Sekretariat.

- 2) Pada Lembaga Pusat dan Lembaga Tjabang diadakan Pelindung-pelindung dan Penasehat-penasehat menurut keperluan.
- 3) Selambat-lambatnja dua tahun sekali diadakan Musjawarah Nasional jang dihadiri oleh wakil-wakil Pimpinan Tjabang/Ranting/Sektor dan Pimpinan Pusat Lembaga dan para pendukung lainnja jang diperlukan.

Pasal 9.

**Dewan Pleno, Dewan Harian dan Staf  
Sekretariat Pusat Lembaga**

- 1) Dewan Pleno disusun menurut keperluannja, mentjerminkan masjarakat jang luas dan padat. Dari anggota Dewan ini ditundjuk seorang Ketua Umum Lembaga.
- 2) Dalam Dewan Pleno dibentuk Seksi-seksi menurut keperluannja sesuai dengan pasal 4 sub 1. Anggota Dewan Pleno dibagi habis menurut adanja sesuai dengan bakat, perhatian dan kesanggupan masing-masing. Setiap seksi menundjuk Ketua dan wakil Ketua Seksinja.
- 3) Ketua-ketua Seksi setjara fungsionil mendjabat sebagai wakil-wakil Ketua Umum Lembaga.
- 4) Sekretaris Umum adalah Kepala Staf Sekretariat Pusat Lembaga, Sekretaris Umum Lembaga Pusat, Anggota Dewan Pleno dan anggota Dewan Harian.
- 5) Sekretaris Umum ditundjuk oleh Ketua Umum bersama dengan Wakil-wakil Ketua Umum dari anggota Dewan Pleno.
- 6) Dewan Harian terdiri dari Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum dan Sekretaris Umum.
- 7) Sekretaris Umum menundjuk pembantu-pembantu sebagai sekretaris-sekretaris anggota seksi Sekretariat menurut keperluan.
- 8) Sekretaris pembantu Sekretaris Umum, anggota Staf Sekretariat adalah anggota Dewan Pleno.

Pasal 10.

**Lembaga Tjabang.**

Pimpinan Tjabang/Ranting/Sektor Lembaga disusun menurut keperluannja dan disesuaikan dengan susunan Pimpinan Pusat Lembaga.

Pasal 11.

**Tugas dan Kewadjiban.**

- 1) Musjawarah Nasional menentukan garis-garis kebidjaksanaan jang harus dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Tjabang/Ranting/Sektor.
- 2) Dewan Pleno mengolah dan melaksanakan garis-garis kebidjaksanaan tersebut pada ajat 1.
- 3) Sekretaris Umum merupakan pimpinan tertinggi dalam soal pelaksanaan segala sesuatu jang diputuskan oleh Dewan Pleno dan Dewan Harian.

- 4) Dewan Harian mendampingi dan mengawasi Sekretaris Umum dalam pekerjaannya.
- 5) Dalam soal-soal hubungan kedalam organisasi, Sekretaris Umum bertindak atas nama Lembaga, dalam soal-soal hubungan keluar Ketua Umum bersama sekretaris Umum bertindak atas nama Lembaga.
- 6) Pimpinan Tjabang/Ranting/Sektor bertindak atas nama Lembaga diwilajahnya sesuai dengan garis-garis yang diberikan Pimpinan Pusat Lembaga. Dalam soal-soal pelaksanaan diberikan otonomi seluas-luasnya sesuai dengan kepentingan setempat.

#### Pasal 12.

#### **Djangka waktu dan penggantian keanggotaan pimpinan.**

- 1) pimpinan Pusat dan Pimpinan Tjabang/Ranting/Sektor dibentuk dan disusun untuk djangka waktu 3 tahun. Anggota-anggota pimpinan itu dapat diangkat kembali pada saat penggantian.
- 2) Untuk pertama kali Pimpinan Pusat diangkat oleh Musjawarah Assimilasi yang berlangsung di Djakarta pada tanggal 10, 11 dan 12 Maret 1963.
- 3) Dewan Pleno Pimpinan Pusat mengadakan penggantian Pimpinan Pusat untuk djangka waktu berikutnya.
- 4) Dewan Pleno pimpinan Tjabang/Ranting/Sektor mengadakan penggantian pimpinan untuk djangka waktu berikutnya setelah mendengar pendapat-pendapat para pelindung dan penasehat yang bersangkutan. Pembentukan dan penggantian pimpinan Tjabang/Ranting/Sektor disahkan oleh Pimpinan Pusat.
- 5) Sekretaris Umum dan sekretaris-sekretaris anggota staf Sekretariat sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Dewan Harian bila tindakan-tindakannya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Dasar ini. Pemberhentian ini dilaksanakan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan Pleno dan setelah kepadanya diberikan kesempatan untuk membela diri dimuka Dewan Pleno.

#### Pasal 13.

#### **Pimpinan Pusat Pertama.**

- 1) Pimpinan Pusat yang pertama kali menurut ketentuan pasal 12 ayat 2 serta wewenang yang diberikan oleh Musjawarah Assimilasi tanggal 10, 11 dan 12 Maret 1963, terdiri dari:

Penasehat:

1. Prof. Sunario S.H.
2. Kolonel Djuhartono
3. Letnan Kolonel Harsono

**Anggota-anggota:**

1. Letnan K. Sindhunata S.H.
2. Noto Budimuljo
3. Safioedin
4. Anis Ibrahim
5. Suharto Hasirun
6. Wignjo Sumarsono
7. T.A. Hardjanegara
8. Junus Jahja, drs. ec.
9. Soetanto
10. Ir Lukman
11. Kam Lok Yoe
12. Lie Giok Tho
13. Soe Hok Gie
14. Aman Ginting
15. Iskandar
16. Ong Hok Ham
17. R. Pratiknjo
18. Nj. S. Surjosuhartono
19. Jacob Utama, drs. sos. pol.
20. The Tjwan Bie S.H
21. Tian Liang Djie
22. Sisworahardjo
22. Sisworahardjo
23. Tan Hong Gie
24. Que Sian Koen, drs. ec.
25. Arifin, dr.
26. Rachmat Ibrahim
27. Lukman Setiawan
28. Louis Taolin
29. Vicvtor Matondang
30. P.W. Blogg S.H.
31. Ali Sugiarto
32. Ds. Lie King Han
33. Marjadi S.H. Major
34. Ali Salim
35. Khoe Hong Lim
36. Tjhie Hok Goan
37. Hendro Budianto, drs. ec.
38. Radius Prawiro, drs. ec.
39. Triwoko
40. L.H. Tanoko
41. Winarno, drs. psych.

- 2) Pimpinan Pusat jang pertama ini diberi hak untuk melaksanakan tugas kewadajiban tersebut dalam ayat 1) pasal 11 Peraturan Dasar ini.
- 3) Kepada Dewan Pleno tersebut ayat 1) diwadjibkan melengkapi susunan Pimpinan Pusat Lembaga menurut ketentuan pasal 9.

**Pasal 14.****Rapat-rapat.**

- 1) Rapat dalam Lembaga ini bersifat Musjawarah dan tidak diadakan pemungutan suara.

**Pasal 15.****Perubahan Peraturan Dasar dan Pembubaran Lembaga.**

- 1) Perubahan Peraturan Dasar dan Pembubaran Lembaga dilaksanakan oleh Dewan Pleno Pimpinan Pusat setelah mendengarkan pendapat-pendapat Tjabang-tjabang/Ranting-ranting/Sektor-sektor Musjawarah Nasional dan Penasehat-penasehat/Pelindung-pelindung.
- 2) Pembubaran Lembaga ini harus didasarkan atas:
  - a. Ketentuan Pasal 5 ayat 2.
  - b. Lain-lain alasan jang kuat.

- 3) Segala sesuatu yang bersangkutan-paut dengan akibat-akibat pembubaran tersebut ayat 2 diselesaikan pula oleh Dewan Pleno Pimpinan Pusat Lembaga, yang dapat menjerahkan pelaksanaannya kepada Dewan Harian.
- 4) Pernyataan bubar disebut dalam sebuah Piagam yang ditanda-tangani oleh seluruh anggota Dewan Harian Pimpinan Pusat Lembaga dan sedapat mungkin juga oleh Pelindung-pelindung dan Penasehat-penasehat.
- 5) Upatjara Pembubaran yang didasarkan atas ketentuan ayat 2 sub a, sedapat mungkin dilaksanakan dalam suasana chidmat dan penuh berterima-kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terjapainya maksud dan tujuan Lembaga ini.

#### Pasal 16.

#### **Ketentuan Penutup.**

Hal-hal yang belum diatur, ditentukan oleh Peraturan Tata Kerdja yang tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar ini.

Peraturan Tata Kerdja Pusat Lembaga disusun dan disahkan oleh Dewan Pleno Pusat Lembaga.

Peraturan Tata Kerdja Tjabang/Ranting/Sektor Lembaga disusun oleh Dewan Pleno Tjabang/Ranting/Sektor Lembaga dan disahkan oleh Dewan Harian Pusat Lembaga.

Disusun dan disahkan atas kuasa dari Musjawarah  
Assimilasi yang dilangsungkan di Djakarta pada  
Tanggal 10, 11 dan 12 Maret 1963.

Djakarta, 22 April 1963.

1. K. Sindhunatha S.H. Letn. HK. (A.L.)	ttd.
2. Anis Ibrahim	ttd.
3. Wignjo Sumarsono	ttd.
4. Noto Budimuljo	ttd.
5. Safioedin	ttd.
6. Suharto Hasirun	ttd.
7. Oei Tjo Im	ttd.
8. Hendro Sutanto	ttd.

Pimpinan Musjawarah Assimilasi 1963.

#### **Catatan:**

- Disalin sesuai dengan aslinya.
- Sumber: Departemen Penerangan. 1963. *Assimilasi dalam rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa, Sambutan-sambutan/Prasaran-prasaran pada Musjawarah Assimilasi pada tanggal 10 s/d 12 Maret 1963 di Djakarta.* Djakarta: Departemen Penerangan R.I.



### AMANAT PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

1. Dalam amanat saja, Lahirnja Pantjasila, saja telah mengemukakan fikiran-fikiran jang mendasari proses "NATION BUILDING", jaitu adanja keinginan bersama untuk membangunkan djiwa bangsa jang bersatu, persatuan karakter karena persamaan nasib dan patriotisme.
2. Proses "NATION BUILDING" itu terus-menerus memerlukan aktivitas jang dinamis, pemupukan mental dan djiwa jang ingin bersatu, persamaan watak atas dasar persamaan nasib, patriotisme, rasa setia-kawan dan rasa lojal terhadap Tanah Air Indonesia.  
Siapa jang tidak berdiri diatas landasan "NATION BUILDING" tadi, sesungguhnya dihinggapi oleh penyakit „retak dalam djiwa”, karena mungkin djiwanja dikuasai oleh loyalitas-kembar atau loyalitas-ganda.
3. Saja membenarkan usaha-usaha djiwa muda dalam pembinaan kesatuan Bangsa ini, dengan menghilangkan sikap-sikap dan sifat-sifat menjendiri (eksklusivisme), dengan djalan penjatuan, pembauran (assimilasi) dalam tubuh Bangsa Indonesia.
4. Saja gandrung akan kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia, saja tidak mau mengenal pembatasan „asli” dan „tidak asli”, persukuan, serta pementjilan-pementjilan jang berupa apapun dalam kesatuan tubuh Bangsa Indonesia.

Bogor, 15 Djuli 1963.

PEMIMPIN BESAR REVOLUSI BANGSA INDONESIA

ttd.

(SUKARNO).

**Catatan:**

- Disalin sesuai dengan aslinya.
- Sumber:Kansil, C.S.T., (et. al.). 1964. *Capita Selecta: Pembinaan Kesatuan Bangsa*. Kompartemen Perhubungan Dengan Rakjat, Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa.

Lampiran 10.

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 140 TAHUN 1963.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : 1. bahwa pembinaan kesatuan Bangsa Indonesia dalam rangka pembinaan kesatuan Bangsa Indonesia jang kokoh-kuat dan bersatu, merupakan salah satu tugas-pokok dalam menjelesaikan Revolusi Indonesia berlandaskan Pantjasila, sehingga oleh karena itu memerlukan tjampur tangan, pimpinan dan bimbingan langsung dari Pemerintah;
2. bahwa berhubung dengan hal jang tersebut diatas, perlu membentuk sebuah lembaga, jang khusus dapat melakukan kegiatan-kegiatan jang seluas-luasanja dalam Pembinaan Kesatuan Bangsa jang sesuai dengan tudjuan dan dinamika revolusi;

**Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Pembentukan Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa sebagai berikut:

**Pasal 1.**

Pada staf Wakil Menteri Pertama bidang Khusus/Menteri Penerangan/Ketua Panitia Indoktrinasi dibentuk Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa, disingkat L.P.K.B.

**Pasal 2.**

Tugas Pokok dari L.P.K.B. adalah:

Mengusahakan pembinaan Kesatuan Bangsa diantara golongan2 warga-negara Indonesia, sehingga Bangsa Indonesia merupakan bangsa jang bulat, tunggal dan kokoh-kuat, sesuai dengan tudjuan revolusi Indonesia, Masjarakat adil dan makmur dengan djalan:

- a. Mengadakan penilaian keadaan serta menjampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan/Ketua Panitia Indoktrinasi mengenai kebidjaksanaan pembinaan kesatuan Bangsa;
- b. Memberikan penerangan/indoktrinasi jang intensip dan berentjana kepada masjarakat jang seluas-luasanja tentang mutlaknja penjatuan Bangsa Indonesia dengan djalan pembauran (assimilasi) dan

- menghilangkan sifat2 serta tjara hidup jang menjendiri (eksklusivisme);
- c. Usaha-usaha lain jang tidak bertentangan dengan tugas pokok.

Pasal 3.

(1) L.P.K.B. dipimpin oleh seorang kepala jang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Kepala L.P.K.B. berada dibawah dan bertanggung djawab kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus/Menteri Penerangan/Ketua Panitia Indoktrinasi.

(3) Bentuk susunan dan tata-kerdja dari L.P.K.B. ditetapkan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus/Menteri Penerangan/Ketua Panitia Indoktrinasi.

Pasal 4.

Pembiajaan dari L.P.K.B. dibebankan kepada staf Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus/menteri Penerangan/Ketua Panitia Indoktrinasi.

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 18 Djuli 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO

**Catatan:**

- Disalin sesuai dengan aslinya.
- Sumber: Kansil, C.S.T., (*et. al.*). 1964. *Capita Selecta: Pembinaan Kesatuan Bangsa*. Kompartemen Perhubungan Dengan Rakjat, Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa.

## KIKISLAH HABIS RASA MENJENDIRI

Amanat J.M. Menko/Menteri  
Penerangan/Ketua Panitia  
Pembina Djiwa Revolusi Dr.  
H. Roeslan Abdulgani pada  
peresmian L.P.K.B. Tjabang  
Bogor, tanggal 6 Djuni 1963.

Terlebih dahulu saja ingin menjampaikan penjesalan saja, bahwa saja tidak dapat datang sendiri untuk meresmikan L.P.K.B. Tjabang Bogor, jang meliputi wilayah Kotapradja dan Daerah Tingkat II Bogor pada pagi ini.

Dalam pada itu saja ingin menjatakan penghargaan saja sepenuhnya kepada Pantja Tunggal Daerah Kotapradja dan Daerah Tingkat II Bogor atas segala usaha dan bantuannja, sehingga L.P.K.B. Tjabang Bogor dapat dibentuk.

Tak perlu kiranja saja mendjelaskan disini pentingnja usaha L.P.K.B. ini, tidak hanja dalam rangka "nation building" dan "character building" pada dewasa ini, tetapi djuga dalam phase meningkatnja Revolusi Nasional kita jang pengaruhnja telah dirasakan diseluruh dunia pada umumnja, benua Asia-Afrika dan Asia-Tenggara pada chususnya. Dalam hubungan itu saja tak berhenti-hentinja untuk mengandjurkan supaya saudara-saudara semua membatja kembali dan memahami serta menguasai seluruh isi dan djiwa amanat Pemimpin Besar Revolusi kita Bung Karno pada tanggal 15 Djuli 1963, suatu amanat jang menekankan pentingnja usaha assimilasi proses dalam nation building itu, dan pentingnja mengikis habis rasa-menjendiri disebabkan karena loyalitas berganda sebagai akibat daripada keretakan djiwa didalam beberapa golongan masjarakat kita.

Tetapi tidak hanja amanat Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 15 Djuli 1963 sadja jang harus kita peladjar; djuga pidato Lahimja Pantja Sila pada tanggal 1 Djuni 1945 dan pidato-pidato beliau lainnja jang memantjarkan keinginan beliau untuk membina persatuan dan kesatuan Bangsa dan Tanah air, perlu kita peladjar dan kita pahami serta kita kuasai bersama.

Atas dasar amanat-amanat Presiden inilah, maka kita harus melihat pembentukan L.P.K.B. dengan Keputusan Presiden nomor 140 tahun 1963, tanggal 18 Djuli dulu itu. Sehingga dengan demikian saja minta kepada semua pengasuh, pembimbing dan pengurus L.P.K.B. Tjabang Bogor beserta Pantja Tunggalnja hendaknja djangan ada jang ragu-ragu tentang landasan idiilnya daripada L.P.K.B. ini.

Malahan landasan idiil itu adalah lebih mendalam lagi, jaitu terletak pada ideologi kita bersama, jaitu Pantja Sila kita jang dewasa ini sudah kita pantjarkan kedalam Manipol/Usdek kita; sehingga dengan demikian L.P.K.B. merupakan tidak hanja alat Pembina kesatuan Bangsa, tetapi djuga alat Revolusi jang harus selalu berada dibarisan depan.

Sebab Revolusi Indonesia tak mungkin digerakkan tanpa adanya persatuan dan kesatuan Bangsa; tak mungkin digerakkan tanpa ada rasa-tjinta kepada Tanah air atau patriotisme; tak mungkin digerakkan tanpa ada keinginan dan kemauan untuk benar-benar hidup bersatu; tak mungkin digerakkan tanpa adanya persamaan watak jang dilahirkan karena persamaan nasib; tak mungkin digerakkan tanpa adanya persatuan dasar serta persatuan tudjuan dan persamaan haluan.

Kesemuanja ini ada didalam Pantja-Sila kita dan Manipol/Usdek kita. Karena itulah, maka landasan idiil L.P.K.B. adalah terletak djuga pada Pantja-Sila dan Manipol/Usdek itu.

Dimana kita semua mengetahui bahwa penggali Pantja-Sila itu adalah Bung Karno, maka dapatlah saja tegaskan disini, bahwa L.P.K.B. harus pula sedjiwa dengan seluruh adjaran-adjaran Bung Karno. Dan dimana kita meresmikan L.P.K.B. Tjabang Bogor pada hari bertepatan dengan Hari Ulang Tahunnja Bung Karno, maka setjara simbolis kita dengan begitu ingin mengeratkan dasar kedjiwaan L.P.K.B. dengan seluruh adjaran-adjaran Bung Karno.

Malahan tidak hanya setjara simbolis, tetapi djuga setjara riil dan aktif kita harus meresapkan dan mengamalkan seluruh Adjaran-adjaran Bung Karno selaku Pemimpin Besar Revolusi kita.

Dari keseluruhan adjaran-adjaran serta garis perdjjoangan jang diberikan oleh Bung Karno, maka jang paling menondjol dan diperdjjoangkan mati-matian ialah kegandrungannya dan kekrandjingannya akan perstuan, persatuan ..... sekali lagi persatuan! Persatuan untuk melawan kolonialisme, imperialisme, persatuan untuk mentjapai Indonesia Merdeka.

Idee persatuan dan kesatuan inilah juang mendjadi djiwa dan inti daripada segenap konsepsi-konsepsi jang diberikan oleh Bung Karno kepada Revolusi kita. Idee persatuan dan kesatuan itu bagaikan benang-merah menggetari pidatonja jang berapi-api, tulisan-tulisan dan amanat-amanatnja, mulai dari karangannya jang berdjjudul "Islamisme, Nasionalisme dan Marxisme" pada tahun 1926, selandjutnja idee persatuan dan kesatuan itu mengilhami pidato pembelaannya didepan hakim kolonial di Bandung pada tahun 1930 dan jang terkenal dengan nama "Indonesia Menggugat." Idee persatuan dan kesatuan itu menggetari karangannya jang berdjjudul "Mentjapai Indonesia Merdeka" pada tahun 1933, dan achirnja mendjelma dalam rumusan jang konkrit pada tanggal 1 Djuni 1945 jaitu mendjelma dalam dasar falsafah Negara Pantja-Sila jang diutjapkan oleh Bung Karno dalam pidato "Lahirnja Pantja-Sila."

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, idee persatuan dan kegotong-rojongan segenap kekuatan Revolusioner mendjelma dalam "Konsepsi Presiden" jang terkenal pada tahun 1957.

Kemudian setelah terbukti bahwa alam liberalisme jang telah meletus sedjak tahun 1950 makin mendjadi-djadi meratjuni persatuan dan kesatuan kita, ditambah dengan terdjadinja pemberontakan separatistis P.R.R.I./Permesta dan lain-lain, maka demi persatuan dan kesatuan diutjapkanlah Dekrit 5 Djuli 1959. Penegasan selandjutnja daripada Dekrit 5 Djuli itu adalah Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 jang bukan sadja digetari oleh idee persatuan dan kesatuan, melainkan bahkan meletakkan dasar, tudjuan dan kewadajiban Revolusi Indonesia.

Idee persatuan jang dirumuskan dalam Pantja-Sila sebenarnja dapat dijadikan landasan bagi kehidupan Internasional. Dalam pidato Bung Karno dimuka sidang umum P.B.B. tanggal 30 September 1960 jaitu "Two build The World Anew" (Membangun dunia kembali) antara lain ditegaskan bahwa Pantja-Sila tidak hanja mengandung arti nasional sadja melainkan djauh daripada itu. Pantja-Sila mempunjai arti Universil, jang dapat digunakan dalam kehidupan Internasional dan sanggup mempersatukan bangsa-bangsa diseluruh dunia. Pada hari ini patutlah pada kita meresapkan kembali amanat-amanat Bung Karno sesudah Manifesto Politik jaitu Djarek 1960, Resopim 1961, Takem tahun 1962 dan Gesuri tahun 1963, jang semuanya mengandung penegasan-penegasan lebih landjut daripada Konsepsi Revolusi kita. Dari keseluruhan adjaran-adjaran diatas itu, maka njatalah bahwa L.P.K.B. adalah tjotjok sekali dengan seluruh gagasan-gagasan Bung Karno sedjak dulu kala.

Dan berhubung dengan kesemuanja ini, maka patutlah kita semua pada tanggal 6 Djuni 1964 dikota Bogor sekarang ini dalam meresmikan L.P.K.B. Tjabang Bogor memandjatkan doa kehadirat Tuhan Jang Maha Esa semoga Bung Karno Pemimpin Besar Revolusi kita dikaruniai dengan usia jang pandjang, diberi kekuatan rochaniah dan djasmaniah, agar supaja dapat membawa dan memimpin rakjat Indonesia menudju kepada tjita-tjita Revolusi, jaitu masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja-Sila; dan disamping memandjatkan doa itu marilah kita berdjandji pada diri kita sendiri untuk terus mengamalkan segala tjita-tjita Bung Karno tadi itu. Saja yakin bahwa tidak ada satu hadiah ulang tahun jang akan lebih berharga bagi beliau selain pernyataan niat dan tekad kita untuk setjara ichlas dan djudjur membantu beliau didalam Revolusi sekarang ini.

**Catatan:**

- Disalin sesuai dengan aslinya.
- Sumber:Kansil, C.S.T., (et. al.). 1964. *Capita Selecta: Pembinaan Kesatuan Bangsa*. Kompartemen Perhubungan Dengan Rakjat, Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa.